

Quoting Him

37 *Years with Journalists*

UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak, ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Quoting Him

37 *Years with Journalists*

Quoting Him

37 *Years with Journalist*

Kata Hasta : 82-04-2014

Desain Sampul : Pilipus Anggun Budoyo
Penata Letak : Pilipus Anggun Budoyo
Pewawancara : Setyoati
Editor : Atmadji Sumarkidjo
Foto sampul dan isi : Dokumentasi pribadi Sjafrie Sjamsoeddin,
Puspen TNI, Julie S./Kemhan

Hak Cipta Bahasa Indonesia ada pada Sjafrie Sjamsoeddin © 2014,
Cetakan Pertama Edisi Bahasa Indonesia Tahun 2014
diterbitkan oleh KATA HASTA PUSTAKA, anggota Ikapi

KATA HASTA PUSTAKA
Jl. Pengadegan Barat III No. 25B, Jakarta 12770
Telepon (021) 7971390, (021) 7133-9838, (021) 70566336, Fax (021) 7992681
E-mail: katahasta@cbn.net.id

Cetakan Pertama, April 2014

Quoting Him, 37 Years with Journalist /Sumarkidjo. — Jakarta:
Kata Hasta Pustaka, 2014.
x, 375 hlm.; 14 x 21 cm

Bibliografi : hlm
Indeks.
ISBN: 978-979-1056-56-4

1. Quoting Him, 37 Years with Journalist, Atmadji Sumarkidjo

Daftar Isi

Pengantar Quoting Him: <i>37 Years with Journalists</i>	ix
1. Pak Sjafrie Mau Di Potret Kapan Saja, <i>Alex Suban</i>	1
2. Sjafrie, Dua Kali “Gantikan” SBY, <i>A.M. Fikri</i>	5
3. Sjafrie, ‘Pesakitan’ yang Profesional, <i>Alex Aji Saputra</i>	9
4. <i>The Enigmatic Smiling General,</i> <i>Andry Hariana</i>	17
5. Ia Tidak “Sedingin” Penampilan Luarnya, <i>Angelina Maria Donna Haryati</i>	21
6. Pak Sjafrie Sjamsoeddin: “Jenderal Silver Queen”, <i>Ari Budhi Laksono</i>	23
7. Ternyata Tidak Sulit Menghubunginya, <i>Asni Ovier</i>	27
8. Kapuspen TNI, <i>A Friend in Need is a Friend Indeed,</i> <i>Atmadji Sumarkidjo</i>	29
9. Sjafrie Sjamsoeddin Membuat Jantung Saya Hampir Copot, <i>Bachtiar Sitanggang</i>	41
10. Tentang Bang Sjafrie Sjamsoeddin, <i>Back Tohir</i>	49
11. Intel yang “Tidak Kelihatan” Intel, <i>Bekti Nugroho</i>	51
12. Sang Jenderal Fotogenik, <i>Bernard Chaniago</i>	55
13. Kalem, Senyum Selalu, Tetapi..., <i>R. Berto Wedhatama</i>	57
14. Sjafrie, <i>The Charming General,</i> <i>Casmo Tatilitofa</i>	59
15. Mengenal Dekat Setelah Jadi Kapuspen TNI, <i>Denny Reksa</i>	63
16. Si Jenderal Ganteng..., <i>DJ. Nachrowi</i>	65
17. “Bapak Angkat” Industri Pertahanan Sekaligus <i>Chief Marketing Officer,</i> <i>Dudi Sudibyo</i>	69
18. Suka Sama Suka Bersama Sjafrie, <i>Dwi Atmanta</i>	77

19. Sendirian Mendatangi “Sarang Macan” pada 18 Mei 1998, <i>Eddy Lahengko</i>	83
20. Ingat Sjafrie, Ingat Wartawan yang Tersandera GAM, <i>Edwin Nazir</i>	91
21. Sjafrie, “Gua, Stres Juga!”, <i>Effendi Soen</i>	93
22. Bung Sjafrie Bukan Dinosaurius, <i>Elman Saragih</i>	101
23. Lengkap Memberikan Informasi <i>Off-the-record</i> dan <i>On-the record</i>, <i>Eny D. Purwanto</i>	105
24. Letjen TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin: Tangan Dingin yang Cerdas dan Inovatif, <i>Eri Sofyan Hakim</i>	107
25. Sjafrie, Biarlah Fakta Bicara!, <i>Eva Mazrieava</i>	109
26. Sjafrie, Pribadi yang Susah Ditebak, <i>Fajar W. Hermawan</i>	119
27. Antara Hidup dan Mati 325 Hari Dalam Tawanan GAM, <i>Fery Santoro</i>	125
28. “Selamat (Nanti) berkarya di ladang yang lain..!”, <i>F.X. Lilik Setyowibowo</i>	131
29. Jenderal yang Setia Kepada Tugas, <i>Hanibal W. H. Wijayanta</i>	135
30. Sjafrie Itu Juga Temannya Wartawan, <i>Hisar Sitanggang</i>	149
31. Sjafrie Sjamsoeddin di Mataku, <i>Imam Wahyudi</i>	153
32. Tetap Tegar dan Mampu Bangkit dari Keterpurukan, <i>Imanuddin</i>	165
33. Jenderal yang Murah Senyum dan Tak Pernah Menghindar dari Pers, <i>Jacobus “Valen” Kalao</i>	169
34. Selalu Memberikan <i>Background Information</i> Lengkap, <i>Karim Paputungan</i>	175
35. Sampai Sekarang Ia Masih Menyimpan “Misteri”, <i>Karni Ilyas</i>	179
36. Memang Senang Bergaul dengan Wartawan, <i>Laurens Samsueroi</i>	185
37. Saya Sering “Menitip” Tulisan Melalui Sjafrie, <i>Linda Jalil</i>	187

38. Sjafrie Sjamsoeddin Setelah 15 Tahun , <i>M. Hernowo</i>	193
39. Sjafrie dan Wartawan Sanggabuwana , <i>M. Rizal Maslan</i>	197
40. Sjafrie Sjamsoeddin, Jenderal yang <i>Humble</i> , <i>M. Subhan SD</i>	211
41. Pernah Minta Wartawan Jadi “Pengawal Presiden” , <i>Mansyur Barus</i>	221
42. Tokoh Seperti Dia Pantas untuk Tugas Lain di Masa Depan , <i>Margiono</i>	227
43. Menteri Tampan yang Pintar Jualan , <i>Muhamad Ihsan</i>	229
44. Mengenal Dekat, Berkawan Dekat , <i>Nasihin Masha</i>	235
45. Dari Aceh ke Perang Siber , <i>Nezar Patria</i>	245
46. <i>My Friend, A Handsome and Smart General</i> , <i>Parni Hadi</i>	255
47. Harusnya Jadi Model TNI Masa Kini , <i>Ray Wijaya</i>	261
48. Jangan “Main-main” Dengannya...! , <i>Rini PWI</i>	265
49. Sesungguhnya Ia Seorang Pendiam dan Lebih Banyak Tersenyum... , <i>Prof. Dr Salim Said, MA, MAIA.</i>	269
50. Semua, Jurnalis dan Anak Buahnya, Mencintai Pak Sjafrie! , <i>Saptono</i>	279
51. Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin Berjuang di Tengah Pusaran Kontroversi , <i>Subur Tjahjono</i>	285
52. Sjafrie, Tentara Lapangan , <i>Suryopratomo</i>	291
53. Saya Datang, Dia Pergi , <i>Syarifiddin</i>	303
54. Seorang Letnan “Culun” di Lingkungan Istana , <i>Tarman Azzam</i>	307
55. Pencetus Pertama <i>Embedded Journalist</i> , <i>Teguh Tri Sartono</i>	313
56. Jalan Panjang Sjafrie Menuntaskan Reformasi TNI , <i>Tiurma Siboro</i>	317
57. Di Atas Panser, Tetap <i>Charming</i> , <i>Tiya Diran</i>	331
58. “Dia yang Memulai Persahabatan Ini” , <i>Tony Hasyim</i>	333

59. Batu Intan di Mana pun Tetap Berkilau , <i>Totok Suryanto</i>	355
60. Suatu Ahad di Puri Cikeas.... , <i>Usamah Hisyam</i>	363
61. Sabar Menjawab Pertanyaan Apa pun , <i>Wandi Yusuf</i>	369
62. Sepeda Motor Lewat Gerbang Depan Berkat Pak Sjafrie , <i>Wisnu Dewabrata</i>	371

Pengantar
Quoting Him:
37 Years with Journalists

Atmadji Sumarkidjo, editor

Keistimewaan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin adalah talenta untuk berhubungan baik dan terus membina hubungan dengan empat generasi wartawan, baik yang secara bergantian meliput kegiatan Kepresidenan di era Presiden Soeharto, wartawan yang meliput soal-soal keamanan dan teritorial (ketika menjabat Pangdam Jaya 1997-1998), ketika menjadi Kepala Pusat Penerangan TNI (antara 2002-2005) dan kemudian sewaktu menjabat sebagai Sekjen Departemen Pertahanan (2005-2010) dan terakhir sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI (2010-sekarang).

Mengingat prestasinya sebagai perwira TNI-AD cukup lengkap dan panjang (mulai bertugas tahun 1974 setelah lulus Akabri), sebenarnya sah baginya untuk menuliskan masa-masa dinas yang penuh dengan dinamika, naik dan turun serta juga bahaya yang mengancam. Tetapi dengan rendah hati ia ingin meninggalkan kenang-kenangan manis pengabdianya justru kepada para jurnalis, wartawan, reporter, juru foto serta juru kamera Indonesia.

Atas dasar itu, sebanyak 62 orang wartawan dari empat generasi juga memberikan sebuah “kado” istimewa bagi beliau: sebuah buku berisi kesan dan juga pesan untuk beliau. Mengapa 62 orang yang menulis? Ini sekedar mengingatkan bahwa buku ini dipersembahkan kepadanya pada usianya yang ke-62 (ia lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Oktober 1952). Judulnya tidak bisa lebih pas lagi: *Quoting Him*, ‘mengutip ia’ (selaku Kapuspen).

Pak Sjafrie sudah barang tentu mencintai korpsnya, Korps Baret Merah yang kuat *esprit de corps* atau jiwa korsanya. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ia mencintai serta menghormati pekerjaan yang dilakukan oleh para jurnalis, cetak, elektronik maupun *on-line*. Ia juga kagum atas pengabdian mereka pada profesinya ditengah berbagai era dan zaman dan sadar betul bahwa Indonesia masa kini dan masa mendatang sebagian dibentuk sosoknya oleh peran dari media massa serta para jurnalisnya.

Oleh karena itu, hai para jurnalis muda Indonesia, selamat membaca!

Pak Sjafrie Mau Dipotret Kapan Saja

Alex Suban*

Seperti pada umumnya masyarakat, saya mengenal sosok Letjen Sjafrie Sjamsoeddin saat menjadi Panglima Kodam Jaya. Saya melihatnya di televisi sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jakarta Raya yang hilir mudik dengan panser, memantau kota yang sedang dilanda kerusuhan.

Saya baru mengenal Pak Sjafrie dari dekat saat saya sebagai wartawan foto muda, Harian Umum *Suara Pembaruan* sekitar tahun 2003. Dalam peliputan di lingkungan Mabes TNI, saya mengenalnya sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI.

Kekaguman saya akan sosoknya karena ia adalah perwira tinggi yang sudah banyak makan asam garam di lapangan, ditugaskan menjadi nara sumber wartawan. Jenderal bintang dua itu tidak pelit informasi. Segala hal ia jelaskan panjang lebar sampai kami mengerti. Walaupun itu informasi yang sangat teknis, dan tidak boleh ditulis di media. Hanya untuk menjadi *background* wartawan dalam mencermati sebuah peristiwa. Terlebih di tahun-tahun itu konflik bersenjata terjadi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada bulan Mei 2013, para wartawan menjalani pelatihan peliputan perang menyatu bersama pasukan untuk

meliput jalannya konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka dan pasukan pemerintah, para wartawan dilatih untuk bergerak di dalam peleton pasukan.

Di kaki gunung Sanggabuana, Karawang kami digojlok selama tiga hari seperti layaknya tentara. Pelatihan ini dipantau secara langsung oleh Pak Sjafrie.

Ada pengalaman menarik yang saya alami di Aceh setiba kami di sana. Saat itu, saya dan seorang rekan, R. Berto Wedhatama – sesama fotografer, dari harian *The Jakarta Post* – tengah berjalan kaki dari markas Pusat Komando Operasi (Koops Aceh) menuju hotel tempat kami menginap, Hotel Vina Vira di Lhokseumawe, Aceh Utara.

Kami baru beberapa hari tiba di Aceh sejak Pemerintah mengumumkan Darurat Militer di Aceh, dan masih sangat “fresh” dari pelatihan militer di Bukit Sangga Buana, dan kebetulan saat kami berjalan kaki, hari sudah menjelang malam.

Sepanjang jalan kami melangkah, situasi terasa sangat sepi; selain karena ada informasi tentang pemberlakuan “jam malam”, beberapa hari sejak Darurat Militer diumumkan, masyarakat memang memilih untuk tidak keluar rumah di atas pukul 18.00 sore hari.

Kami berdua bercakap-cakap, walau merasa sedikit waswas. Tiba-tiba saja, terdengar deru mesin sepeda motor mengaum di belakang kami dan lampu motor menyorot kami dari belakang—dalam situasi biasa, mungkin kami tidak akan terlalu hirau, tetapi dalam situasi Darurat Militer, deru mesin motor itu menjadi sesuatu yang “luar biasa” terutama karena suaranya memang benar-benar memekakkan telinga.

“*Alarm steling...*?” kami masing-masing saling bertanya, bersamaan dengan deru mesin motor yang semakin mengaum.

Alarm steling—istilah itu kami dapatkan saat pelatihan di Gunung Sanggabuana, yang menandakan situasi kedaruratan; dan saat pelatihan, setiap terdengar bunyi demikian, kami akan segera tiarap dan mencari tempat yang aman.

Kami merasakan lampu motor dan deru mesin semakin mendekat.

Hanya beberapa detik sejak membersitkan kata “*alarm steling*” di kepala kami, kami pun mempercepat langkah, dan mulai berlari kecil, dan berlari...berlari, hingga memutuskan untuk tiarap.

Dalam hitungan beberapa menit, deru motor terdengar menjauh. Sesaat kemudian, kami bangkit kembali dan berlari sekencang-kencangnya menuju gerbang Hotel Vina Vira....yang ternyata sudah digembok. Kami saling berpandangan, sebelum akhirnya pecah dalam tawa.

“Siapa bilang ya *alarm steling*...jangan-jangan cuma tentara iseng bunyikan mesin motor,” kata saya.

Kami terus tertawa hingga petugas hotel membukakan gembok gerbang. Keringat mengalir di wajah kami, dan kami masih terus tertawa semalaman.

“Makanya jangan terlalu serius ikut pelatihan militer... bunyi motor aja langsung dianggap *alarm steling*,” celoteh teman kami yang lain; sama-sama tertawa.

Wartawan Amerika

Saat peliputan di Aceh, ada kasus seorang wartawan Amerika Serikat William Nessen yang meliput dan kemudian

bergabung dengan pasukan GAM.

Saat mengevakuasi Nessen, Pak Sjafrie juga terlihat dalam rombongan yang menjemputnya. Wajah pak Sjafrie yang biasanya ramah, terlihat dingin tanpa ekspresi. Saat wartawan memanggilnya, ia tak menggubris dan berlalu. Dengan seragam loreng dan senjata laras panjang di tangan, ia terlihat sangat tak bersahabat.

Namun keramahannya pun segera kembali saat beberapa hari kemudian ketika kami, sejumlah wartawan, menemuinya di sebuah hotel di Banda Aceh. Dengan kaos berbalut jaket, ia ngobrol panjang lebar dengan wartawan dan bersikap santai menjelaskan situasi konflik di Aceh.

Walaupun dalam suasana santai, ia tetap siaga, sepucuk pistol terselip di pinggangnya.

*Penulis adalah Wartawan Foto.

Sjafrie, Dua Kali “Gantikan” SBY

A.M. Fikri*

Di pertengahan tahun 1990, saat TNI masih bernama ABRI, posisi siapa menduduki jabatan apa menjadi berita yang banyak dicari jurnalis kala itu. Peran ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator dalam politik dan pemerintahan di Indonesia memegang peranan penting. Posisi Panglima ABRI cukup disegani. Wajar jika anak tangga menuju posisi itu selalu menjadi sorotan.

Setiap ada pergerakan di antara anak tangga, selalu terselip cerita di balik keputusan Panglima ABRI atau Presiden Soeharto. Di masa tahun 1990 itulah muncul istilah bintang yang bersinar, bintang muda dan bintang-bintang lainnya yang identik dengan sorotan media.

Sjafrie Sjamsoeddin termasuk salah satu bintang muda yang bersinar kala itu. Selasa (13/8/96) adalah hari pelantikannya sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Brigjen. Susilo Bambang Yudhoyono. Menggantikan kakak kelasnya yang lulus Akabri tahun 1973, Sjafrie mengulang sejarah serah terima jabatan dengan Yudhoyono. Saat masih menimba ilmu di Akabri, Yudhoyono menyerahkan jabatan Komandan Divisi Korps Taruna Akabri di Magelang kepada Sersan Mayor Taruna (Sermatar) Sjafrie Sjamsoeddin.

Perwira tinggi yang menghabiskan 20 tahun karirnya di Korps Baret Merah ini cukup cemerlang. Setelah berbagai jabatan di Kopassus disandanginya, pria kelahiran Makassar 31 Oktober 1952. Lepas dari tugas sebagai Pengawal Presiden, Kolonel Sjafrie masuk ke jabatan teritorial sebagai Danrem 061/Surya Kencana di Bogor. Belum genap setahun, 1 Februari 1996 menjabat Kepala Staf Garnisun I Jakarta dengan pangkat Brigjen.

Nyaris di setiap pergantian jabatan di ABRI kala itu berbagai informasi tentang latar belakang perwira tinggi banyak dimuat. Namun, kondisi berubah saat reformasi bergulir. Sebagai bintang muda yang bersinar, Sjafrie termasuk yang mendapat sorotan tajam. Apalagi jabatan yang diembannya di tahun 1997-1998 adalah Panglima Kodam Jaya. Dia dianggap melakukan pembiaran atas kerusuhan yang terjadi, meski saat itu pria yang digandrungi ibu-ibu rumah tangga ini turun ke jalan-jalan ibukota untuk mengendalikan pasukannya menenangkan warga.

Momen ini menjadi titik balik perjalanan karir Sjafrie yang bersinar. Ayah dua anak itu 'parkir' ke dalam Markas Besar TNI. Menjadi Staf Ahli Panglima TNI pun sempat dijalani, sampai akhirnya menduduki jabatan strategis di Mabes TNI, Kapuspen TNI.

Kepiawaian Sjafrie berkomunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk jurnalis sejak masuk di Kodam Jaya, sangat menonjol di periode kedua kebangkitan karirnya. Masuk ke jajaran Departemen Pertahanan, Sjafrie seperti tenggelam. Sosoknya jarang muncul dilayar kaca, berbeda jauh saat dia menjabat sebagai Pangdam Jaya.

Menjelang HUT TNI 5 Oktober 2013 lalu, saya

kembali bertemu. Wajah Sjafrie cerah saat bercerita soal pembangunan alat utama sistem persenjataan TNI. Ini mengingatkan saya pada pertemuan terakhir kami yang terjadi akhir 2006. Saat itu kami bersama rombongan Presiden Yudhoyono berkunjung ke Rusia. Salah satu misi kunjungan itu adalah negosiasi untuk pengadaan kapal selam kelas Kilo.

Berbagai program pembelian persenjataan dari Rusia memang menjadi diskusi intensif kedua belah pihak. Mulai pengadaan pesawat tempur Sukhoi untuk TNI-AU, Helikopter serbu untuk TNI-AD, hingga Kapal Selam dan Tank untuk TNI-AL. Saat bersama rombongan Sjafrie sempat bercerita tentang lika-liku negosiasi dengan pihak Rusia. Mulai skema pembayaran hingga pengiriman yang cukup menyulitkan.

Setelah tujuh tahun, apa yang dicapai Kemenhan dalam program pembangunan persenjataan TNI sebagai alat pertahanan negara menjadi kebanggaan Sjafrie. Maklum, dia mengikuti proses lobi-lobi sejak duduk di jabatan staf ahli Panglima TNI yang kala itu dijabat Laksamana TNI Widodo AS.

Kini bahkan tak sekedar lobi untuk membeli senjata, Sjafrie pun mengambil peran untuk melobi negara-negara sahabat untuk menggunakan senjata buatan Indonesia. “Kami tawarkan juga berbagai senjata ke negara-negara sahabat, industri kita sekarang sudah mampu,” katanya.

Seorang rekan jurnalis bahkan pernah bercerita, “Aku diajak sama Sjafrie ke Korea minggu ini, kapan itu juga diajak ke Afrika. Sibuk mengurus alutsista, katanya biar wartawan juga tahu.”

Perjalanan karir Sjafrie memang unik, meski masa tugasnya di militer telah berakhir tiga tahun lalu, tetapi tenaga dan pikirannya masih diperlukan. Dua jabatan strategis di Kemenhan diembannya. Setelah sempat menjadi Sekjen, tugas Wakil Menhan diamanatkan Presiden Yudhoyono.

Ada dua kekhawatirannya untuk kelanjutan program pembangunan sistem persenjataan Indonesia menjelang Pemilu 2014. “Apakah ada perubahan kebijakan pertahanan jika pemerintahan berganti? Dalam jangka panjang apakah TNI juga siap jika persenjataan bertambah?

Kekhawatirannya tak berlebihan. Tahun 2014 ini memang tahun yang banyak dinanti orang. Siapakah Presiden RI selanjutnya? Belum ada tokoh yang menonjol yang disegani rakyat. Soal kesiapan TNI sendiri sebenarnya dia yakin, tetapi ada kekhawatiran tentang alokasi anggaran pendukung untuk perawatan, selain anggaran pengadaan.

*Penulis adalah wartawan stasiun televisi *RCTI*

Sjafrie, ‘Pesakitan’ yang Profesional

Alex Aji Saputra*

Jujur saja, penulis tidak mengetahui banyak profil Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Persinggungan penulis dengan Sjafrie lebih banyak pada momen-momen formal seperti jumpa pers atau buka puasa bersama. Itu pun terbilang terlambat dibanding dengan teman-teman senior atau wartawan yang lazim disebut ‘Laskar Pajang’, yakni mereka sudah makan asam garam liputan di lapangan ketika Orde Baru masih kuat-kuatnya. Para “Laskar Pajang”, terutama yang ngepos di lingkungan Polkam, sudah bersinggungan dengan Sjafrie saat masih menjadi Kasdam Jaya hingga sang *rising star* berada pada ‘puncak popularitasnya’ yakni menjadi Pangdam Jaya pada 1997.

Penulis yang baru menjalani profesi sebagai wartawan setelah *chaos* dan anarkhisme yang mewarnai tuntutan reformasi berlalu. Situasi yang mengemuka ketika itu adalah tuntutan mundurnya Habibie sebagai Presiden RI terkait dengan lepasnya Timor-Timur dari pangkuan ibu pertiwi dan tuntutan pemilu dipercepat. Sjafrie sendiri saat itu kariernya juga sudah ‘meredup’ bersamaan dengan menyeruaknya tuntutan terhadap para pimpinan dan perwira TNI/Polri yang disebut terlibat dalam pelanggaran HAM—terutama peristiwa penembakan Trisakti, Semanggi

I dan Semanggi II- semasa pecahnya Kerusuhan Mei 1998. Sjafrie adalah salah satu di antara para 'pesakitan' karena sebagai Pangdam Jaya dia dianggap membiarkan kerusuhan terjadi.

Praktis semenjak itu, Sjafrie seolah tenggelam. Dia tidak lagi tampil ke permukaan seperti di masa sebelum reformasi atau di awal reformasi. Kalau pun namanya muncul, tidak lebih tuntutan kalangan LSM dan Komnas HAM terkait dengan tuduhan sebagai pelanggar HAM. Oleh pimpinan TNI, yang saat itu masih dijabat Wiranto, Sjafrie seperti disembunyikan di kotak rapat-rapat. Selepas menjabat Pangdam Jaya, perwira kelahiran Makassar 30 Oktober 1952 itu menempati posisi di belakang meja, berturut-turut Aster Kasum TNI, Sahli Polhukam Panglima TNI, dan Koorsahli Panglima TNI. Bisa jadi menempatkan Sjafrie di posisi tersebut sebagai bagian dari kebijakan pimpinan TNI untuk mengamankannya, tapi pada persepsi lain bisa juga dianggap sebagai sanksi. Namun yang jelas, pelan tapi pasti nama alumnus Akmil 1974 yang sebelumnya digadagadag menjadi pimpinan masa depan TNI pun tenggelam begitu saja.

Bagi wartawan muda dan belum kenal dengan Sjafrie, dengan jabatan tersebut sepertinya sangat mustahil untuk bisa bersinggungan dengan Sjafrie. Pernah suatu ketika penulis pada 1998 mendapat tugas untuk mengonfirmasi terkait dengan mengemukanya pemanggilan Sjafrie oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) terkait pelanggaran HAM. Karena sulitnya mengonfirmasi lewat telepon, penulis akhirnya mendatangi rumah Sjafrie yang berada di kawasan Cijantung, Jakarta

Timur. Ikhtiar melakukan aksi duduk selama beberapa jam di depan rumahnya selepas Magrib ternyata tidak membuahkan hasil. Suatu ketika, saat penulis masih ngepos di kantor Kemenkopolkam, secara tidak sengaja berpapasan dengan Sjafrie. Dia keluar dari sebuah ruangan sempit yang berada di bagian belakang kantor Kemenkopolkam. Sjafrie tampak tidak lebih dari pegawai kantoran biasa, jauh dari persepsi rising star yang tertanam di benak penulis semanjak masih menjadi mahasiswa.

Persinggungan itu baru dimulai ketika Sjafrie kembali dipercaya sebagai kapuspen TNI. Walaupun isu pelanggaran HAM masih cukup kencang, pimpinan TNI yang saat itu sudah dipegang Endriartono Sutarto sudah percaya diri kembali mengeluarkan Sjafrie dari 'persembunyiannya'. Berbeda dengan jabatan kepala penerangan di Polri yang bisa disebut sebagai lompatan strategis untuk menempati posisi penting lainnya, posisi kapuspen di TNI tidak ubahnya seperti jabatan mentok atau persiapan menuju pensiun. Ini bisa dilihat dari jejak dua kapuspen sebelumnya, yakni Sudrajat dan Graitto Usodo. Tetapi, dalam pandangan penulis, penempatan Sjafrie bukan sekedar bagian dari *tour of duty*, tapi bagian dari ujian mental untuk tampil kembali memegang posisi strategis di TNI atau pemerintahan. Hal yang sama juga tampaknya terjadi pada koleganya yang menjabat sebagai Wakil Kapuspen, yakni Brigjen Tono Suratman yang juga dikejar-kejar aktivis HAM terkait pelanggaran HAM di Timor-Timur karena posisinya sebagai Danrem 164/WD Kodam IX Udayana.

Benar saja, Sjafrie berupaya maksimal di jabatannya tersebut. Dia tidak mempedulikan munculnya riak-riak yang

masih mempersoalkan dosa-dosanya selama era reformasi, sebaliknya dia fokus melakukan perubahan. Sebagai ujung tombak komunikasi dan informasi TNI, dia cukup luwes menghadapi wartawan. Walaupun kesan berhati-hati cukup kuat, Sjafrie cukup fasih menjawab berbagai isu yang muncul, seperti pernah ditunjukkan Sudrajat. Tetapi lebih dari itu, dia melakukan perbaikan sistem. Sjafrie tidak mempersonalisasikan dirinya sebagai satu-satunya corong TNI yang otoritatif, tapi membagi kewenangan kepada timnya yang menempati posisi Kadispenum. Dari sinilah nama Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi Mayjen TNI Ahmad Yani Basuki yang saat itu masih berpangkat kolonel.

Sjafrie juga memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memberikan wartawan materi jumpa pers dalam bentuk disket, yang sebelumnya dalam bentuk foto copy. Kartu identitas (ID) wartawan yang sebelumnya terkesan sangat konservatif, tercetak dalam kertas lebar dan dilaminating, diubah menggunakan bahan mika seperti lazimnya ID wartawan yang dikeluarkan media masing-masing. Sjafrie juga memperkuat lembaga puspen. Jika sebelumnya jumpa pers panglima TNI selalu digelar di aula Sudirman, maka di era Sjafrie jumpa pers lebih banyak di gedung puspen yang juga berada di kompleks Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Padahal sebelumnya tempat tersebut tidak lebih sebagai persinggahan atau tempat istirahat wartawan.

Berbagai perbaikan yang dilakukan tersebut menunjukkan Sjafrie adalah tentara profesional, yang berupaya melakukan yang terbaik di mana pun bertugas. Seperti tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004

tentang Jatidiri TNI sebagai tentara profesional, ukuran profesionalitas bukan hanya dilihat dari keterampilan menggunakan senjata, tapi juga mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk menjadi tentara profesional tidaklah mudah karena seorang prajurit TNI dituntut memiliki moral, semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi kehormatan militer.

Ibarat berlian, ditaruh di dalam lumpur pun tetap berlian. Tinggal digosok, ia akan kembali berkilau. Barangkali perumpamaan tersebut sangat berlebihan. Tetapi, berbagai halangan dan tantangan yang dihadapi terbukti tidak mampu mendegradasi kualitas profesionalitas seorang Sjafrie. Dia tetap dan layak disebut sebagai perwira 'star', seperti diprediksi banyak orang sebelumnya. Ujian profesionalitas dan mentalitas yang berhasil dia tuntaskan semasa menjabat sebagai kapuspen TNI membuatnya dipromosikan untuk menduduki jabatan strategis di pemerintah, yakni di sekjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan kini dipercaya sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mendampingi Purnomo Yusgiantoro.

Menempati posisi tersebut juga bukan perkara mudah. Berbagai tudingan terkait pelanggaran HAM ternyata juga belum benar-benar tuntas. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan pengangkatan Sjafrie sebagai Wamenhan, nada sumbang kembali dilancarkan kalangan LSM. LSM seperti Human Rights Working Group (HRWG), KontraS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Setara Institut, dan Elsam mempersoalkan karena menganggap pengangkatan Sjafrie mencederai rasa keadilan

para korban pelanggaran HAM yang saat ini masih berjuang untuk keadilan. Setelah menjabat Wamenhan, Sjafrie pun ternyata masih menjalani status cekal dari Amerika Serikat.

Seperti sebelumnya, dia tidak mau meladeni manuver tersebut, dan sebaliknya memilih tidak banyak bicara dan fokus mengemban tugasnya. Tugas yang diemban saat masih menjadi sekjen dan kemudian mengemban posisi wakil menteri pertahanan tidaklah ringan. Sjafrie harus membantu menteri pertahanan menyukseskan program *Minimum Essential Force* (MEF) yaitu Strategic Plan 2010-2020 yang akan menjadi tonggak penting mengembalikan kekuatan militer Indonesia setelah terpuruk akibat embargo yang diberlakukan negara barat, hingga bisa kembali menjadi *superior power* di Asia. Bersama Menhan, Sjafrie juga harus mampu membangun kemandirian alutsista dengan memberdayakan BUMN ataupun perusahaan lokal untuk bersama-sama mewujudkan idealisme tersebut.

Tidak mudah untuk mendapatkan dukungan dari kalangan DPR agar mengucurkan anggaran untuk mewujudkan program tersebut, tidak mudah untuk menyatukan berbagai potensi, termasuk TNI sendiri, agar mau bahu-membahu mengembangkan industri pertahanan nasional, tidak mudah berdiplomasi dengan negara-negara produsen senjata utama dunia agar bersedia menularkan ilmunya dalam bentuk *transfer of technology* dalam setiap transaksi persenjataan, tidak mudah melayani tarikan bahkan pertarungan kepentingan Rusia, Amerika Serikat, China atau negara lainnya dalam setiap tender pembelian senjata. Sebagai orang militer dan paham militer, Sjafrie tentu mengambil bagian penting dalam setiap proses tersebut.

Hingga catatan ini ditulis, Sjafrie masih memegang tugas sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Walaupun tugasnya belum paripurna, hasil dari pengabdian Sjafrie berduet dengan Menhan Purnomo Yugiantoro sudah sangat kelihatan. Kemandirian persenjataan sudah mulai terbentuk sebagai dampak komitmen Kementerian Pertahanan untuk memberdayakan industri pertahanan nasional. Indonesia kini tidak hanya bisa membuat senjata serbu dan kendaraan tempur Anoa, tapi juga sudah mampu membuat Kapal Cepat Rudal (KCR) yang akan diikuti program fregat nasional, dan kapal selam. Indonesia juga sudah melangkah sebagai negara pembuat pesawat tempur melalui kerjasama pembuatan pesawat IFX/KFX dengan Korea Selatan. Indonesia juga semakin optimis mengembangkan roket pertahanan (RHAN) menjadi rudal dengan jangkauan lebih jauh melalui kerjasama dengan China, dan lainnya. Indikator-indikator tersebut menunjukkan sejauh mana Sjafrie fokus untuk profesional menjalankan tugasnya.

Akhirnya, selamat bertugas Pak Sjafrie. Tetap jadikan halangan dan tantangan sebagai energi untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan dan harga diri bangsa ini!

*Penulis kini menjabat Wakil Redaktur Pelaksana *KORAN SINDO*



Untuk membuat rasa bosan, Wamenhan mengajak awak pesawat dan wartawan main gapple.

The Enigmatic Smiling General

Andry Hariana*

Saya baru satu bulan lebih menjadi reporter TV, ketika ditugaskan meliput pemancangan tiang pertama proyek prestisius Menara Jakarta di Kemayoran. Sebagai reporter baru, saya ditugaskan di berbagai tempat secara acak tanpa tawar. Mulai dari liputan ekonomi, pengadilan, pasar, sampai acara ABRI yang biasanya diadakan pagi sekali. Begitu pula dengan acara seremoni, yang biasanya sedikit narasumber dan membosankan.

Selasa siang, 12 Agustus 1997, saya ditugaskan meliput pemancangan tiang pertama Menara Jakarta yang akan menjadi bagian menara tertinggi dunia, mengalahkan menara Petronas di Kuala Lumpur yang sedang dibangun. Udara panas masih terasa, akibat pengaruh *El-nino*, membuat bosan menunggu pembukaan acara.

Sambil menunggu kedatangan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (Menparpostel) Joop Ave yang akan meresmikan proyek ini, mata saya menyapu ke undangan yang hadir. Siapa tahu ada yang dapat saya jadikan narasumber berita. Mata saya terhenti ke sudut, di mana duduk seorang perwira tinggi Angkatan Darat. Wajah dan postur tubuhnya berbeda dengan Jenderal ABRI kebanyakan, yang biasanya keras dan bertubuh gempal. Jenderal dengan satu bintang ini, berwajah halus, dan ada garis senyum di bibirnya.

Tubuhnya tinggi tegap namun tidak gempal.

Saya masih berpikir keras, siapa dan apa jabatan Jenderal ini. Apakah bisa jadi narasumber untuk berita saya. Saya menebak dalam hati, jabatannya pasti Kasdam Jaya. Saya berasumsi demikian karena Pangdam Jaya Mayjen TNI Sutiyoso belum kelihatan. Padahal namanya ada dalam daftar undangan. Dipastikan Kasdam menggantikan Pangdam Jaya yang berhalangan. Saya masih berpikir apa yang bisa ditanyakan kepada Kasdam untuk menjadi berita? Saya lihat, tidak ada teman-teman wartawan lain yang juga melakukan wawancara.

Acara peresmian proyek Menara Jakarta dimulai, saya bersama teman-teman mewawancarai Joop Ave. Sayangnya saya melewatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Kasdam yang belakangan saya ketahui bernama Sjafrie Sjamsoeddin. Namun naluri wartawan saya, walau masih baru, berkata, Jenderal ini bukan perwira tinggi Angkatan Darat biasa. Karirnya pasti akan melejit.

Tiba di kantor, saya berusaha mencari tahu profil Sjafrie Sjamsoeddin, tidak banyak yang bisa saya ketahui. Maklum Google bahkan internet belum biasa digunakan di kantor-kantor media kala itu. Tapi saya menemukan foto kunjungan Presiden Soeharto ke Bosnia Maret 1995. Dalam foto, terlihat Soeharto dikawal seorang Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) yang terlihat menonjol. Tinggi kurus namun tegap, dibalut jas, berikot rompi antipeluru dan menggunakan peci. Selalu berdiri dekat Soeharto. Ya, anggota Paspampres itu, yang saya lihat telah menjadi Kasdam Jaya hari ini.

Naluri atau lebih tepatnya, tebakan saya benar, ketika Sjafrie Sjamsoeddin beberapa bulan kemudian meng-

gantikan Sutiyoso. Bukan lagi hadir sebagai pengganti di acara seremoni, tapi menggantikan Sutiyoso sebagai Pangdam Jaya, dengan tambahan bintang di bahu. Yang terjadi kemudian, bukan hanya menjadi Pangdam biasa, tapi Pangdam Jaya yang populer menjadi idola para ibu dan remaja putri. Bermodal tampan, sopan dan ada garis senyum, tak heran tak ada para ibu di Jakarta yang tidak mengenalnya. Mungkin kalau saja Sjafrie bisa sedikit menyanyi, dan acara pencarian bakat semacam AFI di Indosiar atau *Indonesian Idol* di RCTI telah ada waktu itu, bisalah Sjafrie menang mudah.

Saat Sjafrie Sjamsoeddin menjabat Pangdam Jaya, saya sempat beberapa kali melakukan wawancara. Dan puncaknya, saat kerusuhan terjadi di Jakarta Mei 1998. Saat peristiwa kerusuhan terjadi, saya sempat menginap di kantor, selain demi keamanan, juga ini merupakan peristiwa besar. Bagi saya ini merupakan kesempatan, untuk menjadi saksi dan bagian sejarah. Sejak pagi hari, saya melihat kerusuhan di mana-mana. Api dan bangkai kendaraan juga berserakan. Di malam harinya saya masih merasakan situasi mencekam tanpa aparat polisi maupun ABRI.

Sebagai jurnalis saya bertanya kemana tentara ABRI berada? Wajar jika pertanyaan ini terlontar, karena di hari-hari sebelumnya setiap ada demonstrasi di kampus, dipastikan ada barisan tentara di belakang polisi.

Pertanyaan ini, belum terjawab. Bahkan sehari setelah kerusuhan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin berkeliling Ibu Kota di atas panser, tidak menghasilkan jawaban memuaskan saat diwawancara. Padahal selaku Pangdam Jaya, Sjafrie, merupakan penanggung jawab ke-

amanan ibukota ketika kepolisian menjadi lumpuh. Sjafrie menjawab pertanyaan wartawan dengan tegas dengan air muka lurus. Garis senyumnya masih tetap terlihat. Tapi tidak memuaskan keingintahuan apa yang terjadi saat itu.

Bertahun-tahun kemudian, apa yang terjadi di Jakarta saat itu masih tetap simpang siur. Saya sendiri masih penasaran. Suatu kesempatan, saya bersama teman-teman wartawan yang biasa bertugas di Polkam, pernah diundang makan malam oleh Sjafrie Sjamsoeddin di Planet Hollywood Jakarta. Suasana makan malam itu terasa akrab dan banyak obrolan yang bersifat *off the record* atau tidak untuk disiarkan. Saya tergelitik untuk bertanya situasi Jakarta saat Mei 1998. Saya berharap paling tidak sebagai *background information* atas peristiwa yang saya alami juga. Namun yang terjawab adalah senyum Sjafrie Sjamsoeddin. Hanya itu. Cerita itupun tidak ada kelanjutannya.

Sejak 1998 hingga akhir 2002, saya masih bertugas meliput di bidang Polkam dan Istana Kepresidenan. Termasuk di Puspen TNI yang saat itu dijabat oleh (alm) Marsma TNI Graitto Usodo dan wakilnya Brigjen TNI Tono Suratman. Saya bahkan sempat 'dimusuhi' Graitto Usodo karena protes saya yang membedakan wartawan media asing dengan Indonesia. Saat Maret 2002, Sjafrie memegang jabatan Kapuspen TNI, saya masih sempat beberapa kali melakukan wawancara. Sayang tidak lama, karena mulai bulan Juni, saya sudah tidak meliput, karena mempersiapkan diri setelah terpilih untuk mengikuti *short course* AUSAID di Melbourne Australia. Pulang dari Australia, saya naik jabatan menjadi Redaktur dan Produser, sehingga tidak lagi di lapangan.

*Penulis adalah Produser Berita di stasiun TV *Indosiar*

Ia Tidak “Sedingin” Penampilan Luarnya

Angelina Maria Donna Haryati

Saya mengenal sosok Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin saat dirinya menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI pada tahun 2002 dan saya adalah wartawan dari sebuah media *online* nasional yang ditugaskan dibidang politik dan keamanan.

Sekilas, orang akan mengira Sjafrie sebagai sosok yang dingin dan tegas. Soal ketegasan yang ada dalam dirinya, saya tak memungkirinya. Dalam setiap kesempatan, baik dalam acara formal maupun informal, ia selalu menyatakan pendapatnya dengan tegas dan tidak bertele-tele.

Namun, ia tidaklah ‘sedingin’ penampilan luarnya. Beberapa kali berbicara dengan dirinya dalam sejumlah kesempatan, di mata saya, terlepas dari sosok kontroversialnya Sjafrie adalah pribadi yang hangat dan sederhana. Ia juga merupakan seorang teman yang setia. Meski dirinya tidak lagi menjabat sebagai Kapuspen dan saya tidak lagi menangani masalah-masalah politik dan keamanan, hubungan silaturahmi kami, saya dan teman-teman wartawan, dengan dirinya tetap terjaga dengan baik.

Saat menuliskan pesan ini, saya baru tersadar bahwa sebelas tahun telah berlalu. Tidak banyak yang berubah dari diri seorang Sjafrie Sjamsoeddin. Meski kini menjabat se-



Wamenhan bersama pimpinan media massa nasional di Jakarta, Januari 2014. Komunikasi dengan pimpinan media nasional merupakan forum yang amat berguna bagi para wartawan untuk mendapatkan berbagai informasi latar belakang.

bagai Wakil Menteri Pertahanan, ia masih seorang narasumber dan teman yang sama, seperti dulu saat saya masih mengenalnya sebagai Kapuspen TNI.

*Penulis kini adalah editor di *Majalah Maritim*

Pak Sjafrie Sjamsoeddin: “Jenderal Silver Queen”

Ari Budhi Laksono*

Saya dan rekan saya, Jumadi Suaeb, memberi julukan Sjafrie Sjamsoeddin “Jenderal Silver Queen”. Saya terkesan ketika kami kelelahan, kehujanan, kelaparan, kedinginan, dan badan kami kotor sehabis mengikuti jurit malam saat pelatihan penanggulangan kedaruratan bagi wartawan di Kawah Candradimuka milik Kostrad di Gunung Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat, sebelum diberangkatkan ke Aceh, ia dengan hangat menyambut kami di *base camp*. “Kalian pasti *capek*, lapar, dan kedinginan,” katanya.

Kebetulan saya dan rekan saya termasuk dalam rombongan yang pertama tiba di *base camp*. Ia langsung memberikan cokelat Silver Queen yang sudah ia pegang kepada saya dan rekan saya Jumadi, sambil mengatakan, “Untuk sementara makan cokelat saja dulu untuk nahan lapar.”

Ternyata ia menyiapkan cokelat dalam jumlah sangat banyak, dan masih tersimpan di dalam kotak-kotak yang diletakkan di sejumlah meja di *base camp*. Bukan masalah cokelatnya, tetapi perhatiannya kepada rekan kerjanya sehari-harilah yang mengesankan. Ia mengerti kami bukan tentara, tetapi kelakuan kami untuk sementara di Sanggabuana sangat mirip tentara. Mungkin ia terkesan



Menyaksikan pameran foto Pasukan Perdamaiannya di Cilandak Town Square (Citos)

melihat kami mengikuti proses pelatihan dengan sungguh-sungguh. Saya dan rekan saya Jumadi memberi julukan Jenderal Silver Queen karena jarang sekali atau bahkan tidak pernah melihat seorang jenderal yang sengaja memberikan cokelat kepada orang lain apalagi menyediakannya dalam jumlah banyak.

Begitu pula kenangan saat mengikuti peliputan di Aceh, pada saat awal diumumkankannya darurat militer di daerah itu. Rombongan wartawan yang tidak terlalu banyak, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, singgah di Meulaboh dan sempat singgah di rumah dinas Komandan Korem Teuku



Umar, yang saat itu dijabat Kolonel Gerhan Lantara. Kami bermalam di Meulaboh dan pada malam itu juga kami diajaknya "nongkrong" di salah satu kedai kopi dan martabak. Kami ngobrol *ngalor-ngidul* sampai tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul satu dini hari.

Pemilik kedai berbisik kepada rekan saya, Jumadi, yang kebetulan duduk di dekat pemilik kedai itu, menanyakan pada mau bubar jam berapa. Si pemilik takut kedainya dituduh sebagai tempat nongkrong TNI. Belum lagi ditambah beberapa panser sempat hilir-mudik bahkan berhenti di depan kedai, menambah suasana di sekitar kedai

semakin mencekam. Panser-panser hilir mudik kemungkinan melakukan patroli atau bisa juga sekaligus sebagai tindak pengamanan mengingat sedang ada jenderal bintang dua di Meulaboh, yang masuk kawasan Gerakan Aceh Merdeka. Akhirnya Jumadi memberanikan diri memberitahukan kepada Jenderal Sjafrie kekhawatiran pemilik kedai, dan ia mengerti apa yang dirasakan pemilik kedai tersebut. Kami pun bubar, kembali ke penginapan untuk melanjutkan perjalanan esok paginya ke Lhokseumawe.

Selama mengikuti perjalanan dengannya, kami tidak pernah dianggap sebagai orang lain. Kami dianggap sebagai teman dan bahkan tidak ada batas. Yang pasti ia menunjukkan bahwa ia adalah rekan kerja yang saling membutuhkan.

Itulah Letnan Jenderal TNI Sjafrie "Silver Queen" Sjamsoeddin yang saya kenal. Ia juga tidak kelihatan sebagai tentara, apalagi jika berpakaian sipil. Namun, yang pasti, mudah-mudahan sudah berubah, Jenderal Sjafrie yang saya kenal tidak pernah, atau selalu lupa memakai jam tangan! Padahal, jika mengenakan jam tangan, akan tampak lebih gagah dan gagah. Mungkin juga ia merasa jam tangan mengganggu aktivitas kerjanya, karena membuatnya selalu melihat sang waktu. Karena yang saya tahu, Jenderal Sjafrie tidak pernah mengeluh soal waktu, apalagi jika sudah berhadapan dengan masalah informasi bagi kemajuan TNI.

Sekali lagi, *bravo* Jenderal Silver Queen, *eh*, Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin. *You are the real general....*

**Reporter dan Redaktur "Warta Pagi" LPP TVRI*

Ternyata Tidak Sulit Menghubunginya

Asni Ovier*

Sjafrie Sjamsoeddin adalah prajurit militer yang tenang, namun memiliki sikap tegas terhadap suatu masalah. Sjafrie lebih banyak mendengar, walaupun untuk hal-hal yang dianggap sebagian orang sepele.

Saat menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, banyak orang yang beranggapan karier militernya tamat. Tetapi, kecerdasan dan kerja keras Sjafrie ternyata membalikkan keadaan itu. Kedekatannya dengan kalangan wartawan ketika itu justru membuat posisi Kapuspen menjadi sangat penting. Sjafrie sadar betul bahwa saat itu adalah era informasi. Ia sanggup "memuaskan" wartawan dengan informasi-informasi yang aktual, tepat, dan cepat. Tak sulit bagi para wartawan menghubungi Sjafrie untuk wawancara.

Pertanyaan-pertanyaan sensitif wartawan, misalnya penolakan beberapa LSM terhadapnya terkait masa lalu Sjafrie, dijawab dengan tenang dan argumentatif. Ia juga tidak memilih-milih asal media wartawan, apakah dari media massa besar atau yang baru terbit. Ia selalu memberikan atensi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Hal-hal itu yang justru membuat Sjafrie mendapat simpati dan dukungan. Sjafrie bisa menciptakan suasana yang



Wamenhan mengajak para wartawan berfoto bersama dalam kunjungan kerja di pulau Morotai, Maluku Utara.

hangat, santai, dan bersahabat jika sedang berbincang-bincang dengan wartawan.

Sjafrie juga sosok militer yang sadar betul tentang pentingnya informasi. Saat menjadi Kapuspem TNI, ia membangun semacam *newsroom* yang sangat lengkap. Semua pemberitaan tentang TNI terdokumentasikan dengan baik. Hal itu tidak saja membantu institusinya, tetapi juga sangat membantu kerja wartawan. Kondisi seperti itu dilanjutkannya saat menjadi Sekretaris Departemen Pertahanan (Sekjen Dephan) dan sekarang ketika menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamen).

*Wartawan Harian Umum “*Suara Pembaruan*”

Kapuspen TNI, *A Friend in Need is a Friend Indeed*

Atmadji Sumarkidjo*

Siang, 28 Desember 2003. Di tengah kesibukan redaksi stasiun Rajawali Citra Televisi Indonesia (*RCTI*) menghadapi *deadline* untuk berita utama di petang itu, *Sepu-tar Indonesia*, tiba-tiba telepon selular saya berbunyi.

Saya setengah kesal sambil mencoba melihat identitas penelepon, karena saat-saat tegang itu biasanya telepon seluler saya letakkan di meja kerja dan saya menunggu rekan-rekan saya di *newsroom*. Ternyata ada nama “DJ Nachrowi”. Itu berarti sangat penting, karena Kol. DJ Nachrowi tidak akan menelepon kalau tidak ada informasi atau berita penting, dan beliau menduduki posisi penting di Pusat Penerangan TNI. “Mas Atmadji,” katanya dengan nada resmi. “Pak Kapuspen hendak bicara!” Yang dimaksud adalah Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, teman sejak lama.

Hati saya secara instinktif lalu berdebar-debar. “Pak Atmadji, saya diinstruksikan langsung oleh Panglima TNI untuk memberitahukan kepada Anda sebagai orang pertama, bahwa tadi siang telah didapat konfirmasi bahwa rekan Anda, Ersa Siregar tewas terkena peluru akibat tembak-menembak antara pihak GAM dan aparat TNI!”

Langsung badan saya lemas. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Di seberang sana, Kapuspen agaknya mengerti perasaan saya dan dengan sabar menunggu saya berbicara lagi. “Apa informasinya tidak salah, Pak Sjafrie?” saya mencoba meyakinkan diri, dan berharap itu bukan Ersasiregar sahabat dan juga junior saya ketika kuliah dahulu. “Sudah dilakukan pemeriksaan identifikasi sementara, dan mereka yakin bahwa itu adalah Ersasiregar,” tambah Sjafrie lagi dengan perlahan tetapi meyakinkan.

“Lalu bagaimana rekan saya Fery Santoro?” tanya saya dengan nada cemas.

“Menurut informasi, di antara sejumlah jenazah yang ditemukan di lokasi tembak-menembak, tidak ditemukan tanda-tanda dari Fery Santoro...Besarnya kemudian ia masih hidup...!” jawabnya lagi.

Seperti diketahui, pada 29 Juni 2003, tim peliput RCTI yaitu reporter senior Ersasiregar dan juru kamera Fery Santoro ketika melakukan tugas jurnalistik di Lhok Seumawe, Aceh Timur, mobil yang mereka tumpangi dicegat di tengah jalan, dan mereka dijadikan sandera oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah komando Ishak Daud. Untuk pertama kalinya dalam konflik Aceh, jurnalis menjadi sandera. Beritanya tersebar luas ke seluruh dunia berkat solidaritas komunitas wartawan. Seperti diuraikan oleh wartawati Tiorma Siboro pada bagian lain, pers nasional terus-menerus meributkannya.

Kembali pada situasi akhir tahun tadi. Saya mencoba berpikir jernih di antara rasa sedih, bingung dan ragu. Saya duduk dikursi kerja dan sambungan telepon belum saya tutup. Di ujung sana, Kapuspen masih sabar menunggu

reaksi saya. Saya harus bertindak cepat, sebagai orang nomor tertinggi di Redaksi RCTI pada waktu itu, saya sadar harus ada sesuatu yang saya lakukan. “Pak Sjafrie, tolong diceritakan sekali lagi kronologi peristiwa...!” pinta saya kepadanya. Dengan sabar Kapuspen menjelaskan peristiwa yang terjadi.

Pasukan patroli dari Korps Marinir TNI-AL sedang berpatroli di perairan berawa di wilayah. Mereka mendapat informasi bahwa ada sebuah kelompok GAM sedang beristirahat di gubuk terpencil di tengah danau. Perlahan mereka mengendap dan mengepung lokasi tersebut.

Rupanya kelompok GAM tersebut mendengar kedatangan TNI, tetapi sudah terlambat. Tembakan-tembakan ditujukan ke arah tempat perlindungan mereka. Agar lebih realistis, maka cerita Fery Santoro saya kutipkan di sini:¹

...sekitar pukul 12.00 wib, saat kami semua sedang bersantai dan ngobrol sana-sini, dan yang sedang memasak di dapur pun tidak mendengar ada suara derap langkah sepatu laras. Naluri alamnya keluar, dan tiba-tiba pasang kuping untuk menegaskan bahwa ada gerakan orang mendekati kamp kami. Belum sempat tukang masak tadi memberi peringatan, tiba-tiba terdengar senjata menyalak dari arah depan. Rentetan senjata otomatis dengan suara yang begitu keras. Pastilah senapanya disetel di posisi C, *continuous*. Bukan setelan S, *single*, dengan tembakan satu-satu. Dari suara letupan senapan dapat saya kenali ini senjata SS, senapan serbu, TNI.

¹ Suroso, Jusuf dan Dulhadi, Jaumat, *Pengalaman Fery Santoro : Antara Hidup dan Mati – 325 Hari Bersama GAM*, Kata Hasta Pustaka dan Sugeng Saryadi Syndicate, Jakarta 2006.

Saya terkejut mendapati persembunyian kami tiba-tiba dihajar TNI. Tapi sempat pula gembira karena saya yakin TNI mau menyelamatkan kami. Pandangan saya seperti kabur, dan dengan gerak reflex saya langsung mencoba untuk menyelamatkan diri dari tembakan ke arah yang terus menerus menghantam kamp. Saya coba untuk melompat, karena bila tidak melompat hampir saja kaki kanan saya kena. Ersu pun saya lihat melompat, setelah itu saya tak tahu lagi apa yang terjadi dengan beliau. Kami terpisah. Sedang ayah dan anggota GAM pengawal kami, saya pun tak tahu. Entah kabur ke mana mereka. Betul-betul serangan pendadakan yang bagus, menimbulkan efek kejut yang luar biasa. Sehingga orang GAM itu tak sempat bereaksi. Boroboro mau menyandang senjata dan melakukan tembakan balasan, dia malah kabur. Apalagi seperti Usul Pak Lip, siap senjata sendiri.

Tembakan gencar dibarengi teriakan para prajurit TNI yang saya pun tidak bisa mengenali kesatuannya, betul-betul membuat GAM itu ketakutan. Saya tak tau apakah para prajurit TNI itu mengetahui bahwa kami ada di situ atau tidak. Melihat pola serangan mereka, saya yakin ini bukan serangan untuk menyelamatkan atau membebaskan kami. Serangan yang betul-betul mematikan.

Melihat kondisi semacam ini, apalagi para prajurit itu saya asumsikan tidak mengenali saya, saya pilih jalan menyelamatkan diri. Yang penting tidak sampai dilanggar pelor yang berseliweran di atas kepala. Saya terpaksa merunduk-runduk dan tiarap, sementara peluru berdesingan. Saya melompat dan merayap untuk menjauhkan diri dari kamp yang menjadi sasaran tembak. Kurang lebih sepuluh meter

dari kamp, saya berhenti.

Maksudnya mencoba untuk balik lagi, Menolong Ersu. Di pikiran saya, apakah dia selamat atau tidak. Seperti ada yang memperingatkan saya “Papa...jangan! “ seperti suara anak saya. Dan, saya urungkan niat itu karena begitu mau melangkah, tembakan kembali menderu dan peluru berdesingan tepat di atas kepala saya. Tapi Alhamdulillah cuma kena pohon nipah, bukan kepala saya. Di saat itu pula saya bertemu dengan Ayah.

Ayah juga melompat dan terus merayap mencari tempat aman. Saya mencoba mengikuti dia, padahal dia tidak memaksa atau mengajak saya. Tapi saya yakin Ayah kenal tempat ini. Kami menelusuri medan lumpur dan rawa-rawa yang dalam. Hanya dengan memakai celana pendek, tapi masih sempat mengenakan baju, saya tinggalkan semua harta saya. Semua dibuang. Pokoknya tinggal pakaian sehelai di badan. Sedangkan Ayah cuma pakai celana panjang tanpa baju.

Perasaan saya serba takut dan ngeri. Saya selalu teringat Ersu. Saya menyesal meninggalkannya begitu saja. Saya berdoa semoga beliau selalu selamat dan tidak terjadi apa-apa. Di tengah hutan, saya dan ayah berhenti. Ketika istirahat sejenak untuk mengambil napas, kami melihat dua helikopter terbang berputar-putar persis di atas kami. Pilot maupun awak heli rupanya tak melihat kami karena tajuk pohon terlalu lebat. Bila pelayan senapan mesin melihat kelebat kami saja, alamat kami akan di babat habis. Tinggal kami berdua, yang dari tadinya empat orang. Ke mana Ersu dan GAM si tukang masak itu? Mudah-mudahan Ersu selamat dari terpaan hujan peluru tadi. Si GAM itu tak menjadi pikiran saya, justru dia harus memikirkan keselamatan kami.

Kembali ke Erska, pertanyaanya lagi, mengapa dia tak menyusul kami? Atau dia juga ikut, tapi tersesat di jalan? Boleh jadi dia tak sempat ke mana-mana, berlindung di tempat, dan diselamatkan TNI. Bila ini yang terjadi saya mengucapkan syukur, berarti tinggal saya sendiri kru RCTI yang disekap GAM. Setelah pikiran agak jernih, saya lalu berusaha lagi untuk keluar dari hutan itu berjalan menuju arah matahari terbenam. Kami berdua tidak tahu harus ke mana, saya coba bilang kepada Ayah, 'Kita ke arah kampung saja. Saya pernah ke sana.

Setelah berjalan kurang lebih tiga kilometer, terdengar lagi suara letusan senjata, sementara hari sudah menjelang sore...

Ishak Daud menjelaskan bahwa dalam penyerangan TNI itu ada yang terbunuh dua orang. Siapa lagi kalau bukan Erska dan si tukang masak. Bagaimana disambar geledek, badan saya langsung lemas...tangis saya meledak. *Innalilahi wa inailahi rojiun*. Semoga Erska diterima di sisi Allah...

Memang, peluru "tidak beralamat". Erska gugur terkena peluru dari pasukan TNI yang tidak mengetahui, siapa yang mereka hadapi siang itu.

Setelah berdiam dan mengeluarkan rasa sedih saya, maka saya mencoba kembali pada posisi struktural di perusahaan RCTI.

Ada tiga langkah yang harus saya lakukan hampir paralel:

Pertama, saya harus melaporkan berita sedih tersebut kepada pimpinan tertinggi RCTI, Dirutnya adalah Pak Hary



Jenasah Ersu Siregar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pak Sjafrie menunggu kedatangan jenasah dan mengantar ke rumah duka.

Tanoesudibjo. Sejak peristiwa penculikan yang terjadi beberapa bulan sebelumnya, Pak Hary dengan segala cara sebagai seorang pengusaha mencoba agar kedua anak buahnya itu bisa dibebaskan. *Concern* dari seorang Dirut (walapun secara struktural memang Divisi Redaksi RCTI berada langsung di bawah pengendalian Direktur Utama RCTI) terhadap anak buahnya harus diakui sangatlah besar.

Kedua, saya harus mengutus seseorang yang bisa saya percaya untuk memberitahukan informasi tersebut kepada keluarga Ersu Siregar sebelum muncul di berita televisi. Tidak ada orang yang lebih tepat untuk berbicara kepada keluarga Ersu kecuali saudara Deny Reksa, Korlip RCTI yang punya hubungan erat dengan keluarga Ersu Siregar.

Ketiga, informasi itu harus saya sampaikan kepada seluruh anggota redaksi RCTI sebelum mereka mendengarnya dari sumber lain. Mereka kan wartawan, pasti punya narasumber masing-masing. Pak Sjafrie sudah berjanji kepada saya untuk tidak mengumumkan peristiwa menyedihkan itu sebelum saya menyampaikannya kepada redaksi. “Lima menit setelah RCTI tahu, saya akan buat *release* tentang itu,” ujar Mayjen TNI tersebut.

Tetapi sebelum saya menelepon Dirut yang kebetulan lebih banyak berkantor di kawasan Jalan Kebon Sirih (Redaksi beralamat Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat), saya berkonsultasi dengan *Corporate Secretary* yang kebetulan dijabat oleh mantan Pemred Redaksi, Pak Yanto Sugiarto, dan setelah disetujui saya menelepon langsung ke selulernya. “Apa!” serunya terkejut. “Sumber saya belum memberi informasi mengenai hal itu,” tambahnya lagi, dan berjanji untuk mengontak saya begitu ada konfirmasi langsung dari nara sumber Pak Dirut. Tetapi saya sempat minta izin kepadanya, agar boleh mengumumkan kepada Redaksi langsung disetujui. “Harus, harus!” ujarnya membenarkan. “Jangan sampai kawan-kawan mendengar terlebih dahulu dari pihak lain....!”

Saya langsung ke *newsroom* dan berdiri di podium depan, lokasi di mana Koordinator Reporter (Korlip) biasanya duduk. Suasana yang sibuk dan agak ramai kemudian seolah mereda. Mungkin kawan-kawan redaksi agak bingung, mengapa tiba-tiba saya berdiri di atas podium dengan wajah serius. “Kawan-kawan, mohon perhatian sebentar..!” Mendadak, ruang *newsroom* yang lumayan luas menjadi sunyi. Semua terdiam menunggu kata-kata saya. “Saya mendapat

konfirmasi dari Markas Besar TNI beberapa jam lalu bahwa rekan kita tercinta Ersya Siregar wafat dalam tembak-membak yang terjadi di Aceh...!

Wajah-wajah mereka terkejut. Mula-mula ada sorotan tidak percaya di mereka: Ersya meninggal? Tewas tertembak? Beberapa di antara mereka saling berbisik, untuk konfirmasi apa yang didengar itu salah atau kalimat sesungguhnya itu adalah fakta. Satu menit kemudian riuh-rendah pertanyaan ditujukan kepada saya. Beberapa wartawan wanita ada yang menangis. Saya menjelaskan semua hal yang saya ketahui tanpa menyembunyikan apapun. Setengah jam kemudian, hanya beberapa menit setelah Puspen mengumumkan gugurnya Ersya Siregar, giliran media massa nasional menghubungi saya mencoba mendapat informasi dan konfirmasi.

Selama tiga jam saya melayani pertanyaan, telepon, wawancara, faks dari media nasional. Ada rasa lelah, tetapi campur haru karena perhatian yang begitu besar dari rekan-rekan satu profesi yang saya rasakan sangat tulus. Tidak ada batas atau sekat antara kami, dari stasiun-stasiun televisi lain yang pada hari-hari biasa selalu bersaing untuk mendapatkan berita yang paling baru. Karangan bunga mulai berdatangan menjelang pukul 21.00 malam dan tidak berhenti sampai keesokan harinya.

Kapuspen TNI menelepon lagi, memberitahu bahwa ia atas nama institusi TNI akan mendatangi rumah kediaman almarhum Ersya Siregar untuk menyampaikan kedukaan tersebut. "Pak Atmadji, apapun yang kami bisa bantu bagi keluarga almarhum, saya akan lakukan secara maksimal. Tetapi untuk langkah awal, Panglima TNI bahkan sudah memerintahkan kepada Penguasa Darurat Militer Daerah

(PDMD) Aceh akan dengan segala cara membawa jenazah Ersas Siregar dari lokasi dan diterbangkan ke Jakarta secepat mungkin.

Malam itu juga, rekan Deny Reksa menghubungi mantan (ketika itu, baru saja ia diberhentikan dari jabatan oleh Presiden Megawati) Sekretaris Menteri Polkam Letjen Sudi Silalahi. Yang bersangkutan menjanjikan akan membantu proses pemulangan jenazah Ersas Siregar, meskipun ia tidak menduduki jabatannya lagi.

Dua hari setelah saat menyedihkan itu, kembali Kapuspen menelepon saya, memberitahukan bahwa ia akan hadir dalam penyambutan jenazah Ersas Siregar di bandara Soekarno Hatta, Jakarta. “Saya hadir sebagai pribadi dan sekaligus juga mewakili Panglima TNI!” ujarnya singkat. Dan memang Kapuspen datang dua jam sebelum pesawat tiba, dan ketika peti jenazah datang, dan dibawa sebentar ke tempat untuk identifikasi, Sjafrie menemani, “Sudah pasti ya, sekarang kita bawa untuk upacara penyambutan...” tambahnya.

Ratusan penyambut menyemut di areal *cargo* bandara internasional itu yang menjadi titik penyambutan peti jenazah Ersas. Panas tidak dirasakan oleh mereka, karena ingin melihat peti jenazah itu, belum lagi puluhan juru kamera televisi dan media cetak yang berebutan posisi untuk mendapatkan gambar terbaik.

Acara pemakaman almarhum Ersas Siregar mendapat perhatian yang besar dari para jurnalis dan anggota masyarakat biasa. Saya belum pernah melihat perhatian yang begitu besar dari masyarakat bagi pemakaman seorang wartawan yang gugur ketika melaksanakan tugas. Di tepi jalan, mereka berdiri berjajal, sekedar bisa melihat mobil

jenazah berlalu menuju tempat pemakaman. Menakjubkan, mengharukan, hanya saja itu tetap sebuah pemakaman yang menyisihkan kesedihan mendalam keluarga dan rekan-rekan seprofesi.

Pada 18 Mei 2004, enam bulan setelah gugurnya almarhum Ersas Siregar, drama penyanderaan itu berakhir dengan dilepaskannya juru kamera *RCTI* Fery Santoro dari penyanderaan pihak GAM melalui perundingan yang alot yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI). Ia menjalani masa pahit dan melelahkan selama 325 hari di hutan Aceh.

Lain dengan proses pemulangan jenazah almarhum Ersas Siregar, dalam pelepasan Fery Santoro suasananya adalah campuran antara rasa haru dan kegembiraan.

Berbeda dengan peristiwa Ersas Siregar, dalam proses Fery, Pak Sjafrie sengaja tidak menonjolkan diri. Tetapi bukan berarti tidak ada perhatian yang diberikan kepada Fery Santoro. Kami di *RCTI* tahu betul bahwa TNI dimotori oleh Pak Sjafrie telah berusaha membantu dengan berbagai cara agar Fery Santoro bisa dibebaskan dalam keadaan selamat dan agar jangan ada operasi yang bisa menimbulkan keadaan yang menyulitkan Fery. Kami akui, itu sulit dalam praktik di lapangan, di mana kontak senjata antara TNI dan GAM bisa sewaktu-waktu terjadi.

Dua minggu setelah pulangnya Fery Santoro, Dirut *RCTI* Hary Tanoesoedibjo dan jajaran pimpinan redaksi *RCTI* melakukan audensi kepada Kapuspen TNI di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Kami menyampaikan rasa terima kasih atas apa yang dilakukan beliau sejak penyanderaan dimulai hingga semua berakhir.

Sementara itu pertemanan kami tidak berakhir disitu, dan masih berjalan hingga tulisan ini dibuat. *A friend in need is a friend indeed.* Teman yang sesungguhnya ada ketika ia sangat dibutuhkan.

*Wartawan senior dan mantan Wakil Pemimpin Redaksi *RCTI*

Sjafrie Sjamsoeddin Membuat Jantung Saya Hampir Copot

Bachtiar Sitanggang*

Bekerja sebagai wartawan di lingkungan Sekretariat Negara dan Istana Kepresidenan di era Orde Baru sangatlah “menggerahkan”. Semua serba teratur, disiplin, dan bekerja di lingkungan militer dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Wartawan harus *discreening* oleh Badan Intelijen Strategis (Bais) ABRI, harus bersih diri, dan bersih lingkungan, alias tidak ada anggota keluarga yang terlibat Pemberontakan Gerakan 30 September (G-30-S) Partai Komunis Indonesia.

Dalam menjalankan tugas, wartawan tidak diperkenankan memakai sandal dan sepatu kets, apalagi sepatu sandal atau sandal. Jika mengenakan kemeja batik, harus lengan panjang. Jika mengenakan kemeja, harus pakai dasi. Selama acara resmi berlangsung, pintu harus ditutup, berarti tidak boleh datang terlambat. Secara tak langsung harus menjunjung tinggi sopan santun.

Pada saat diliputi perasaan dan dalam keadaan seperti itulah saya “bersentuhan” dengan Kolonel (Inf) Sjafrie Sjamsoeddin yang bertugas (kalau tidak salah waktu itu) sebagai Komandan Grup A, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Presiden Soeharto. Saya tidak ingat detail

acara apa saja yang berlangsung di Istana Negara yang saya ikuti. Biasanya, acara di Istana Negara atau Istana Merdeka sering dilanjutkan dengan ramah-tamah. Sambil minum teh dan menyantap *snack* Pak Harto berbincang-bincang dengan beberapa orang tamu didampingi pembantunya, seperti menteri terkait. Saat-saat seperti itu, Pak Harto menjelaskan sesuatu kepada tamunya ataupun menanyakan beberapa hal, kadang kala sampai mendalam.

Biasanya pada saat upacara, wartawan ikut menyaksikan acara-acara ataupun upacara resmi seperti pelantikan duta besar, pejabat negara, dan pengambilan sumpah pejabat tinggi. Demikian pula saat memperingat hari-hari penting seperti hari Pahlawan, peringatan Proklamasi Kemerdekaan, ataupun pembukaan kongres atau muktamar organisasi-organisasi tertentu, dan banyak acara lagi.

Saya juga tidak ingat lagi apa yang mendorong saya untuk selalu ingin mendengarkan pembicaraan Pak Harto dengan tamu-tamunya. Itu "kebiasaan" yang berbeda dengan rekan wartawan lain, yang biasanya "menyerbu" tokoh tertentu untuk diwawancarai, misalnya penerima penghargaan atau para terbaik, guru teladan, dokter puskesmas dari daerah terpencil dan lain-lain, lalu mengelilingi meja yang ada hidangan makanan kecil dan minuman ringannya.

Jantung Hampir Copot

Mungkin karena terpengaruh pengalaman senior-senior saya seperti Laurens Samsoeri, alm. Annie Bertha Simamora, dan alm. Moxa Nadeak, yang sering bercerita atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan berita yang tidak termuat di koran (*background information*) yang diperoleh dari berbagai



Berbincang bersama dua pimpinan media massa nasional.

sumber termasuk dari pembicaraan para petinggi negara, seperti pembicaraan Pak Harto dengan tamu-tamunya itu, saya menjadi “aneh” dibandingkan rekan-rekan wartawan lain. Memang Pak Harto selalu memberikan pidato tertulis dalam berbagai acara, tetapi penjelasan panjang tentang pidatonya itu pasti ada latar belakangnya.

Begitulah suatu saat, seusai acara resmi di Istana Negara, sambil memegang tatakan gelas di tangan kiri berisi teh di atasnya, Pak Harto berbincang-bincang dengan beberapa tamunya. Saya tak ingat mengapa saat itu tanpa sadar saya berada terlalu dekat dengan Pak Harto yang sedang menjelaskan sesuatu. Saya bahkan menjulurkan kepala agar dapat melihat mimik Pak Harto. Tiba-tiba ada yang memegang pundak kanan-kiri saya. Saya sangat kaget, bercampur takut, dan tentu saja malu!

Begitu menoleh, saya mendapati seorang pria tinggi, ganteng, berwajah serius. Saya mengenalnya sebagai orang penting yang bertanggung jawab atas keselamatan Pak Harto. Dia Sjafrie Sjamsoeddin, Kolonel Infanteri, Pengawal Presiden.

Saya sungguh ketakutan, dan tidak tahu berbuat apa. Namun, tanpa saya duga, ia malah mendorong saya ke depan tanpa mencolok, agar bisa lebih leluasa melihat mimik dan wajah Pak Harto, tanpa harus menjulur-julurkan kepala, yang malah tidak pantas dilihat orang atau tidak sopan.

Siapa pun tahu, perbuatan dan sikap saya itu dianggap salah, dan tindakan Sjafrie itu merupakan hukuman. Saya bisa diproses dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Paspampres dan dikucilkan sebagai peliput acara kepresidenan. Jika terjadi demikian halnya, tentu reputasi saya akan hancur di mata rekan-rekan wartawan, juga di kantor sendiri. Untunglah, sebaliknya yang terjadi.

Efek Positif Transmigrasi

Peristiwa itu meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Sejak itu, Kolonel Sjafrie selalu menarik saya menempatkannya sedekat mungkin dengan Pak Harto, sampai bisa mendengar paparannya saat berbincang dengan tamu-tamunya. Melalui kesempatan seperti itu saya dapat mengetahui bagaimana Pak Harto mengerti dan memahami seluk-beluk permasalahan rakyatnya, tidak hanya di kota tetapi juga sampai di pelosok dan pedalaman serta transmigrasi.

Saya pernah mendengar Pak Harto menjelaskan tentang pentingnya transmigrasi di Indonesia untuk menyebarkan penduduk dari pulau dan daerah padat ke daerah yang

jarang atau malah tidak ada penduduknya. Hal itu pernah saya dengar dijelaskan kepada tamu-tamu asing melalui penerjemah.

Transmigrasi akan menimbulkan efek positif yang akan mendorong pertumbuhan kesejahteraan penduduk yang bertransmigrasi khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Karena dengan transmigrasi, keluarga bersangkutan akan memperoleh lahan 4 hektar, dengan perincian 2 hektar untuk petanian sawah atau perkebunan sedang 2 hektar lagi untuk ladang palawija dan sayur-sayuran. Pernyataan Pak Harto itu untuk menjawab kritik dari luar negeri yang berpendapat transmigrasi adalah pemindahan kemiskinan dari satu daerah ke daerah lain.

Berkaitan dengan wacana kuota kopi di pasaran dunia, Pak Harto menjelaskan bahwa perkebunan kopi di Indonesia berbeda dengan di Amerika Latin, khususnya Brasil. Di Indonesia, kopi dihasilkan petani, berbeda dengan di Brasil yang dihasilkan tuan tanah. Sebab itu, tidaklah adil dan bertentangan dengan hak asasi manusia kalau ekspor kopi Indonesia dibatasi. Sebagian petani kopi di Indonesia bahkan transmigran yang dibiayai Pemerintah Indonesia dengan biaya amat besar serta pengorbanan rakyat yang tinggi. Dunia internasional justru seharusnya membantu Pemerintah Indonesia mengentaskan kemiskinan. Pak Harto tampaknya berusaha meyakinkan lawan bicaranya, yang saya lihat begitu menyimak penjelasan itu.

Begitulah saya dapat menimba pemikiran dan pemahaman Pak Harto selama bertugas di Sekretariat Negara yang diawali “eksekusi” Kolonel Sjafrie Sjamsoeddin tersebut. Tidak hanya soal transmigrasi yang saya dengar dari

Pak Harto, namun juga masalah keluarga berencana, semua program Inpres, baik pasar maupun sekolah dasar, koperasi, program pelestarian lingkungan, dan lain-lain.

Sebagai Orang Serius

Saya mengamati Sjafrie Sjamsoeddin hanya dari ”jauh”, yang menurut saya serius. Saya tidak pernah bicara dengannya, mengingat tugas di Istana itu ibarat hanya “numpang”, walaupun ada kaitan, hanya dengan Biro Hubungan Masyarakat.

Sjafrie agak berbeda dengan pendahulunya, Subagyo Hadi Siswojo. Subagyo sering datang dengan diantar mobil Toyota Jeep ke samping Istana Negara dan begitu turun dari mobil ia menyelipkan pistol ke pinggangnya. Pistolnya putih dengan gagang kayu berkilap, pokoknya lain dari pistol biasanya. Sedangkan penampilan Sjafrie biasa saja, selalu dekat dengan Pak Harto di hampir semua tempat maupun saat berjalan kaki.

Itulah kenangan saya tentang Sjafrie. Saya ditugaskan meliput acara kepresidenan sejak 1985 sebelum Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP) Harian Umum *Sinar Harapan* dicabut Departemen Penerangan RI 10 Oktober 1995. Sebenarnya, tugas itu saya emban karena tidak ada yang bersedia, “takut bergaul dengan tentara”, dan baru pertama kali bertugas “nge-pos”, karena sebelumnya hanya ditugaskan mendadak ke berbagai instansi maupun peristiwa.

Saya terakhir melihat Sjafrie Sjamsoeddin di rumah Pak Harto di Jalan Cendana. Saya tidak ingat acara apa saat itu, namun ia duduk di tikar bersama orang banyak, mungkin acara keagamaan. Saya hanya lihat dari pintu, kebetulan ia dekat, saat itulah saya terakhir dengan dia.

Karena selain tugas di Sekretariat Negara, saya juga sebagai Redaktur Pelaksana dan selama Harmoko Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya (DPP Golkar) yang Menteri Penerangan (waktu itu) saya ditugaskan untuk meliput kegiatan Golkar yang sering ke daerah-daerah, jadi waktu saya di Istana hanya sesekali saja, juga mengakibatkan pengetahuan saya dengan sang Walpri yang pernah membuat jantung saya “hampir copot” itu hanya dari berita.

Seminggu sebelum saya diminta menorehkan kenangan ini, saya berkunjung ke kantor Rekan Henrikus SH di Plaza Central Jl Jenderal Sudirman. Saat itu Henrikus menelepon Staf Sjafrie Sjamsoeddin memberitahukan rencana pemakaman Liem Sioe Liong-Sudono Salim (Oom Lim) yang wafat di Singapura. Saya meminta kepada Henrikus untuk menyampaikan salam kepada Sjafrie Sjamsoeddin.

Saya selalu mengikuti perkembangan kariernya. Ketika mengenalnya, ia masih berpangkat melati tiga, sekarang sudah bintang tiga. Mungkin ia tidak hanya menjabat Wakil Menteri Pertahanan seperti sekarang ini kalau tidak ada peristiwa Mei 1998.

Selamat bertugas mengabdikan untuk nusa dan bangsa dan kemanusiaan.

**Wartawan “Sinar Harapan” dan “Suara Pembaruan”
antara tahun 1985 - September 1996*



Para reporter media sudah terbiasa melakukan *door-stop interview* di depan ruang kerja Letjen Sjafrie Sjamsoeddin.

Tentang Bang Sjafrie Sjamsoeddin

Back Tohir*

Saya mengenal Bang Sjafrie Sjamsoeddin sejak beliau belum menjadi komandan grup A pada Pasukan Pengaman Presiden di era Presiden Soeharto.

Pertama saya melihat Bang Sjafrie di lingkungan Istana Negara sudah sangat terkesan dengan penampilannya yang masih muda, tampan dan santun tapi ada kesan berwibawa dan tegas pada dirinya.

Saya tahu karier militer Bang Sjafrie sangat cemerlang, Ia adalah lulusan Akademi Militer tahun 1974, mengawali karier militernya sebagai Komandan Peleton Group I Komandan Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), kemudian dipercaya sebagai Komandan Nanggala X Timor Timur pada 1976.

Sebagai militer Bang Sjafrie mempunyai pemikiran yang cemerlang dan dapat bergaul dengan kalangan sipil.

Saya teringat pada waktu itu saya dan kawan-kawan dari Dokmas Setneg bertugas sebagai tim peliputan kegiatan Presiden dan Ibu Negara serta keluarga Presiden, baik di dalam negeri maupun pada saat dinas keluar negeri, kami merasa sangat terbantu dan nyaman bekerja sama dengan Pasukan Pengamanan Presiden di bawah pimpinan Komandan Group Bang Sjafrie.

Kami dapat bekerja sama dengan anak buah Bang Sjafrie di dalam meliput segala kegiatan Presiden dan Ibu Negara tanpa ada halangan yang berarti, itu semua berkat keluwesan Bang Sjafrie.

Pengalamannya di daerah konflik membuatnya menjadi matang di dalam bertindak dan berfikir.

*Back Tohir, Fotografer Presiden RI

Intel yang “Tidak Kelihatan” Intel

Bekti Nugroho*

Saya mulai berinteraksi dengan Pak Sjafrie Sjamsoedin waktu menjabat Kasdam Jaya. Pangkatnya Brigjen TNI. Di lingkungan teman-teman yang bertugas di Polkam, kami tahu, yang bakal naik adalah Prabowo Subianto dan Sjafrie, yang memang selalu menjadi “prima-dona” bagi teman-teman wartawan.

Di situ saya mulai berinteraksi, kebetulan memang saya bertugas di bidang Polkam. Semakin intens interaksi kami waktu jadi Kasdam, kemudian Pangdam, terus hingga di Puspen TNI. Kami saling bertelepon, dan yang jelas sering *sharing*, tentu sesuai dengan posisi dan peran masing-masing.

Sjafrie di mata saya adalah seorang intelijen, yang tidak kelihatan inteligennya. Ia diuntungkan secara fisik. *Charming*, jadi bukan tipikal sosok tentara yang kita kenal selama ini yang selalu diasosiasikan kaku, rambut cepak dan badan berotot. Itu keuntungannya.

Yang kedua, bagaimana saya tahu ia intelijen yang handal, karena ketemu pertama dengan siapa pun, ia langsung ingat orang itu. Itu luar biasa. Maka, ia sebenarnya seorang perwira intelijen yang hebat, profesional, handal, intelijen yang memang jago. Ia prajurit yang profesional. Berpandangan modern, misalnya tentang perubahan-

perubahan di Puspen, bahkan termasuk dalam hal modernisasi peralatan. Ia tentara yang punya visi.

Sebenarnya ia tepat untuk menjadi seorang Atase Perumahan. Bukan hanya sangat jago dan cerdas, juga ditunjang fisiknya. Jadi, sayang kalau kemudian ia masuk di staf, menangani kesekretariatan. Dengan kemampuan dan jaringan (*networking*) yang ia miliki, menurut saya, negara dan tentara bisa lebih memanfaatkannya untuk kepentingan nasional ataupun institusi. Bukan mengecilkan arti kesekretariatan, karena hal itu juga penting. Namun, itu akan membuat geraknya terbatas. Misalnya waktu sudah Letjen kemudian jadi Sekjen Dephan, menurut saya ia layak *kok* jadi panglima.

Ia memang selalu dibayang-bayangi sebagai "orang Prabowo". Padahal, siapa pun saat itu pasti dibayang-bayangi Prabowo karena tumbuh dan berkembang bersamaan pada saat-saat itu. Ketika itu, 1998, Prabowo jadi Pangkostrad, dan Sjafrie Pangdam Jaya.

Tetapi, di zaman reformasi ini, apakah itu masih jadi pertimbangan? Kalau ya, berarti menunjukkan sistemnya tidak jalan. Sebagai sebuah sistem, yang dilihat harusnya kompetensinya. Artinya, kalau sistem berjalan bagus, siapa pun orangnya akan bisa menempati posisi apa pun, tanpa mempertimbangkan ini orang siapa, itu orang siapa. Karena kontrolnya jalan. Sayang sekali kalau orang-orang yang cerdas, profesional, handal, tersingkir begitu saja.

Dalam kaitan dengan tugas-tugas jurnalis, Sjafrie orang yang sangat fleksibel, akomodatif, enak. Fleksibel dan supel. Ia mengerti kebutuhan jurnalis. Orangnya juga sangat gaul. Karena sangat kompeten di bidang tugasnya, kalau kita

tidak pandai-pandai menghadapinya, kita bisa saja tidak mendapatkan apa-apa. Karena sebagai narasumber ia pintar.

Di luar itu, ia orang yang sangat menjaga disiplin. Terutama disiplin ketentaraan. Tidak mau mengambil risiko, tetapi terbuka dan lempeng.

Ia sangat kuat menahan diri, bisa dilihat dari caranya menjaga penampilan yang sederhana.

Terakhir kami bertemu waktu sudah menjabat sebagai Sekjen Dephan, ia sempat mengajak bertemu dengan beberapa teman wartawan. Saya hadir waktu ia menikahkan anaknya.

** Wartawan senior, mantan reporter “RCTI”
dan mantan anggota Dewan Pers*



Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin beberapa saat selesai dilantik menjadi Wakil Menteri Pertahanan RI di Istana Negara, dengan lapang memenuhi hasrat para wartawan untuk berfoto bersama. Sejak bertahun-tahun ia selalu menganggap para “kuli tinta” sebagai mitranya.

Sang Jenderal Fotogenik

Bernard Chaniago*

Tahun 1998, pertama kali saya mengenal Pak Sjafrie Sjamsoeddin sang Perwira TNI fotogenik sebagai Pangdam Jaya yang sedang meredakan massa kerusuhan Mei 1998 dari atas panser TNI AD. Saya kebetulan memang sedang ditugaskan oleh media tempat saya bekerja untuk meliput kegiatan TNI.

Tahun 2003, saya ditugaskan oleh *Tempo* mengikuti pelatihan wartawan untuk daerah konflik yang difasilitasi oleh Mabes TNI Cilangkap, di daerah Karawang, Jawa Barat. Ketika itu Pak Sjafrie sebagai Kapuspen Mabes TNI Cilangkap. Disitulah akhirnya saya dapat mengenal, melihat dan memotret dari dekat sosok perwira yang karismatik dan fotogenik.

Setelah saya selesai mengikuti pelatihan wartawan, kami dikirim oleh Mabes TNI ke Aceh untuk bergabung dan meliput langsung kegiatan operasi Darurat Militer. Saya bertemu kembali dengan Pak Sjafrie di lokasi, di mana beliau sangat sibuk berkoordinasi dengan telepon genggamnya. Saat itu saya tidak menyia-nyiakan momen tersebut, beliau saya potret dari berbagai *angle*, dan akhirnya saya mendapatkan satu *angle* yang menurut saya dapat menggambarkan betapa sibuknya beliau saat itu. Saya memotret beliau yang

sedang duduk dengan latar belakang sebuah alat olahraga angkat besi, dan itulah yang menjadikan simbol betapa berat beban seorang Perwira TNI dalam menjalankan tugas untuk NKRI.

Selang beberapa waktu setelah Pak Sjafrie dilantik menjadi Sekjen Dephan, saya ditugaskan kembali oleh *Tempo* untuk memotret beliau, untuk rubrik wawancara. Segera saya mencari *file* foto Pak Sjafrie ketika di Aceh, untuk saya cetak dan berikan kepada beliau.

Siang itu ketika beliau menerima kami, saya kembali terus menerus memotret jenderal fotogenik itu dari berbagai *angle*, maklum, namanya juga pewarta foto...Wawancara selesai dan saya meminta waktu sang Jenderal untuk berfoto bersama. Setelah selesai, sebelum pulang saya memberikan sebuah kotak yang berisi foto beliau yang sudah terbingkai. Ketika dibuka, beliau sangat senang dan menanyakan kapan saya memotret dan lokasi pemotretannya. Keesokan harinya staf beliau mengontak saya dan mengabarkan bahwa Pak Sjafrie meminta foto tersebut dicetak ulang dengan ukuran yang agak besar serta membubuhkan tanda tangan saya pada foto tersebut.

Selamat dan sukses selalu Pak Sjafrie...

Itu pula lah kata-kata yang juga saya bubuhkan di foto tersebut.

*Penulis adalah wartawan *Tempo*

Kalem, Senyum Selalu, Tetapi...

R. Berto Wedhatama*

Sjafrie Sjamsoeddin adalah sosok prajurit TNI yang tegas, cepat, dan berani mengambil keputusan yang terbaik. Sosoknya sangat berwibawa dan sangat disegani anak buahnya.

Ia adalah sosok intelijen yang paling cocok di tubuh TNI. Dari luar kelihatan kalem, senyum selalu, tetapi di balik itu menyimpan segala informasi intelijen dan beragam rahasia militer yang mungkin masuk dalam kategori *top secret*.

Setelah berada dalam lingkungan Kementerian Pertahanan, dan masih sempat beberapa kali bertemu, saya yakin keahliannya dalam bidang intelijen militer sangat berpengaruh dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan.

**Wartawan Jakarta Post*



Sambil tertawa, Sjafre memperhatikan hasil *selfie* para wartawan dalam suatu acara santai

Sjafrie, *The Charming General*

Casmo Tatilitofa*

Kesan pertama terhadap sosok Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin — yang kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan RI — adalah senyumnya. Ya, senyumnya! Hal itu semakin menambah *charming* sosok penampilannya. Selain itu juga sikap keakraban dalam pergaulan.

Dan *personal description* Sjafrie Syamsoeddin semacam itu tidak pernah berubah sejak saat masa-masa awal ketika bergabung sebagai anggota Pasukan Pengawal Presiden (Paswalpres) di tahun tujuh puluhan saat masih berpangkat perwira pertama.

Hiasan senyum itu masih tetap sama ketika Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin memerlukan hadir pada acara pemakaman juru foto Presiden Soeharto, H. Saidi, di Taman Pemakaman Umum (TPU) Layur, Rawamangun, Jakarta Timur, September 2010. Keluarga Saidi baru saja selesai menaburkan bunga dan berdoa ketika Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin tiba di tempat pemakaman. Ia langsung jongkok untuk memanjatkan doa bagi almarhum.

“Saya kenal Saidi sejak (saya) masih pangkat Letnan,” katanya menjelaskan.

Begitulah, Sjafrie ramah terhadap siapapun. Sebagai salah seorang yang senantiasa ada di dekat presiden, ia bukan sosok yang 'ditakuti' para wartawan. Sebab, memang ada di antara para anggota Paswalpres yang suka menampilkan sosok angker dan galak.

Ke Bosnia

Dalam karirnya di Paswalpres, yang kemudian berubah nama menjadi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Sjafrie sempat menduduki posisi Komandan Grup A Paspampres dengan pangkat Kolonel, menggantikan Kol. Inf. Soebagio HS. Grup A Paspampres adalah pasukan pengamanan untuk presiden, sedangkan Grup B pasukan pengamanan untuk wakil presiden.

Ketika memegang jabatan itu Kol. Inf. Sjafrie Sjamsoedin sempat mengawal Presiden Soeharto dalam kunjungan ke wilayah perang Bosnia Herzegovina. Sjafrie dan Saidi adalah dua orang anggota rombongan sangat terbatas Presiden Soeharto saat lawatan ke zona konflik Bosnia Herzegovina pada bulan Maret tahun 1995, dari Zagreb, Kroasia. Sjafrie adalah Komandan Grup A Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden), sementara Saidi juru foto kepercayaan Pak Harto.

Keduanya mencatat sejarah, sebab Presiden Soeharto termasuk nekat, mengingat sehari sebelumnya pesawat yang ditumpangi Utusan Khusus PBB Yashi Akashi sempat ditembaki saat terbang di angkasa Bosnia. Untungnya, Yashi Akashi selamat tiba kembali mendarat di Zagreb.

Bahkan pejabat PBB di Zagreb saat itu, Michael William, memuji keberanian Presiden Soeharto yang kala

itu menjabat Ketua Gerakan Non Blok. Michel William tidak berani bertanggungjawab atas kepergian Presiden RI ke Sarajevo, ibukota Bosnia Herzegovina tersebut, maka Presiden Soeharto 'teken kontrak' tanggung jawab sendiri kalau terjadi apa-apa.

Sjafrie Sjamsoeddin termasuk berperan meyakinkan Presiden Soeharto untuk mengenakan rompi anti peluru, karena sebelumnya presiden menolak mengenakannya. Di Sarajevo, dalam kunjungan beberapa jam itu Sjafrie selalu duduk di bagian belakang (pintu masuk) panser, fasilitas kendaraan yang dipergunakan Presiden Soeharto di Sarajevo.

Setelah melakukan pertemuan dan melakukan serangkaian pembicaraan dengan Presiden Bosnia Herzegovina Dr. Alija Izetbegovic dan santap siang bersama serta berkeliling meninjau suasana Sarajevo, Presiden Soeharto terbang kembali ke Kroasia.

Komandan Grup A Paspamres Kol. Inf. Sjafrie Sjamsoeddin adalah saksi mata Presiden Soeharto melakukan sujud syukur begitu kembali menginjakkan kakinya di Bandara Zagreb, Kroasia, atas keselamatan penerbangan ke Sarajevo. Namun, ia mungkin tidak tahu bahwa kami para wartawan memperoleh hadiah istimewa, berupa pembebasan rekening hotel Inter Continental Zagreb selama menginap dua hari dua malam...!

Danrem Bogor

Suatu kali selesai meliput acara peresmian Taman Bunga Nusantara di kawasan Puncak, Jawa Barat, para wartawan mendahului meninggalkan tempat acara menuju bus untuk kembali ke Jakarta. Perjalanan menuju bus melewati

beberapa pos pengamanan, hingga di luar kompleks taman bunga.

Ketika kami sudah berada di luar kompleks taman bunga, tiba-tiba ada teriakan dari kumpulan beberapa anggota TNI dan Polri.

“Hei, mau ke mana itu?” tanya salah seorang dari mereka yang terlihat tengah duduk dengan beberapa anggota TNI lainnya.

Ternyata yang menyapa dengan teriakan itu adalah Komandan Resort Militer (Danrem) Suryakencana/Bogor Kolonel Inf. Sjafrie Sjamsoeddin. Ya, rupanya setelah beberapa lama meninggalkan istana, Sjafrie menempati pos Danrem Suryakencana. Dari sana akhirnya Sjafrie Sjamsoeddin dipromosikan menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jakarta Raya (Jaya).

Dalam posisi Pangdam V/Jaya itu Sjafrie Sjamsoeddin juga tercatat dalam sejarah karena terjadi kerusuhan, pergolakan politik, hingga kemudian mencapai puncak di mana HM Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden. Menjelang hari-hari itu, kami para wartawan yang senantiasa *stand by* di Jalan Cendana, sempat menyaksikan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengamati situasi Cendana.

Lama tidak berjumpa dengan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, hingga hari pemakaman H. Saidi, yang namanya melekat di segenap hati orang-orang Istana, di Rawamangun. Dan... Pak Sjafrie tetap mengenal kami. Bukan main!

**Wartawan Senior Kepresidenan tahun 1979 - 2003*

Mengenal Dekat Setelah Jadi Kapuspen TNI

Denny Reksa*

Saya mengenal Jenderal Sjafrie, saat itu ketika menjabat sebagai *News Gathering Manager RCTI* dan beliau menjabat sebagai Kapuspen TNI, orangnya tenang dan serius.

Saya masih ingat, waktu dua sahabat saya, reporter senior Alm. Sory Ers Siregar dan juru kamera Ferry Santoro ditangkap GAM tanggal 5 Juli 2003 di Langsa Aceh, Jenderal Sjafrie yang menelepon saya melalui ajudan, bahwa ada dua awak RCTI yang ditangkap GAM. Nah setelah itulah, komunikasi dan koordinasi dengan beliau semakin intensif, apalagi saya ditunjuk oleh pak Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama RCTI saat itu, sebagai *Liasion Officer* (LO) RCTI di Mabes TNI sedangkan pihak Mabes menunjuk pak Kolonel D.J. Nachrowi, sekarang Kabiopers Istana Kepresidenan, sebagai LO dari Mabes TNI.

Selain mengandalkan info dari lapangan dan jejaring wartawan di Aceh serta koresponden RCTI di Aceh dan Medan, saya juga menerima info dari beliau, terutama mengenai langkah-langkah yang diambil TNI dalam menangani kedua sahabat saya yang ditangkap GAM tersebut. Dari situlah saya teruskan informasi tersebut ke pak Hary Tanoesoedibjo dan manajemen RCTI dan pihak

keluarga. Gaya bicaranya tidak kaku bahkan beliau juga menyampaikan pertimbangan yang diambil TNI dalam menangani kedua sahabat saya tersebut, dengan tenang tapi serius, sehingga saya merasa nyaman dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan beliau.

Dalam pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Endiartono Sutarto di Mabes TNI Cilangkap yang difasilitasi Jenderal Sjafrie, semakin membuat penilaian saya terhadap beliau, sebagai figur yang tenang dan serius, dalam menangani berbagai persoalan. Pak Sjafrie memang akrab dengan wartawan, tetapi buat saya ada nilai lebih bahwa beliau selain tenang dan serius dalam menangani penangkapan kru RCTI oleh anggota GAM misalnya, beliau juga tidak pernah lupa dengan teman atau sahabatnya. Ini bisa saya sampaikan saat beliau sudah di Dephan-pun masih ingat saya, ketika bertemu di Bandara Soekarno-Hatta, dengan sapaan yang santai pula, “Hei apa kabar Den, aku sekarang di Dephan, kamu masih di RCTI? Kok lama *ndak* kontak aku... lupa ya, nomorku kan tidak berubah Den ...”

Waktu itu beliau berdua bersama isteri. Sekali lagi Jenderal Sjafrie di mata saya adalah figur yang tenang, serius, dan selalu ingat dengan teman/sahabat.

* Mantan wartawan *RCTI*

Si Jenderal Ganteng...

DJ. Nachrowi*

Judul tersebut terkesan terlalu kampungan, namun itulah yang tepat, mengingat sebutan dan percakapan yang pertama saya dengar dari internal TNI dan PNS Kodam Jaya ketika acara serah terima jabatan Pangdam Jaya dari Majen TNI Sutiyoso kepada Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, “Ganteng euy....!”

Sebutan Jenderal ganteng itu juga terdengar dari teriakan ibu-ibu dan masyarakat manakala berjumpa beliau pada saat meninjau kesiapan pasukan bertugas mengamankan Jakarta dan sekitarnya, bahkan teriakan ibu-ibu di pasar-pasar, mall, di pinggir-pinggir jalan yang dilewati ketika beliau melihat perkembangan harga bahan pokok, itulah yang saya saksikan, saya dengar ketika saya selaku Kapendam Jaya mendampingi Pangdam Jaya melaksanakan tugas berkeliling meninjau, melihat perkembangan ibu kota, saat itu awal reformasi eforia demokrasi, unjuk rasa mahasiswa di kampus, ekonomi mulai kacau dan gangguan keamanan merajalela di mana-mana.

Tulisan ini saya buat bukan ditujukan untuk memuji apalagi memuja beliau tapi lebih untuk mendeskripsikan realitas sosial yang saya saksikan, saya dengar ketika bersama-sama bertugas di Kodam Jaya. Lebih jauh saya melihat dan

merasakan beliau sebagai Jenderal pemikir yang cerdas, pekerja keras dengan pembawaan tenang, berwawasan ilmu yang luas dan komprehensif serta sangat komunikatif.

Sebagai Pangdam Jaya, di awal reformasi, kondisi Jakarta saat itu terjadi eforia demokrasi, situasi Jakarta dan sekitarnya mencekam, isu-isu yang menyesatkan tersebar di mana-mana, ketenangan dan kenyamanan masyarakat Jakarta terganggu. Kesibukan beliau sebagai Pangdam Jaya mengajak dan menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu negatif, beliau mendatangi satuan-satuan yang bertugas di lapangan memberikan arahan, petunjuk agar bertugas sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku, tidak segan-segan beliau lakukan pada waktu siang dan malam.

Suatu hal yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh pejabat tinggi TNI pada saat itu, yaitu kedekatan beliau dengan Pers dan Media, hal ini dapat dilihat dari keseharian tugas-tugas beliau sebagai Pangdam. Pernyataan beliau tentang perkembangan situasi keamanan Jakarta selalu dicari dan ditunggu wartawan, di titik tinjau manapun beliau berada dapat dipastikan wartawan sudah banyak menanti. Kedekatan itu lebih terasa ketika beliau meminta Kapendam untuk berkumpul dengan wartawan untuk bincang-bincang secara informal tentang perkembangan situasi Jakarta, dan menariknya acara seperti ini mempunyai magnet, daya tarik tersendiri dengan kehadiran wartawan dalam jumlah yang banyak. Kebiasaan ini berjalan sampai saat ini ketika beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Sebagai pribadi, saya merasa bangga karena dipercaya beliau sebagai Kapendam Jaya dan diberikan kebebasan

berimprovisasi untuk menjelaskan informasi perkembangan situasi Jakarta kepada publik melalui media massa, sehingga mulai saat itulah saya dikenal masyarakat sebagai Juru bicara Kodam Jaya dan muncul hampir setiap hari di media TV dan koran-koran Jakarta.

Terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada beliau, karena bimbingan, arahan, dan petunjuknya saya mencapai karir seperti sekarang ini.

*Penulis adalah mantan Kepala Dinas Penerangan Umum Puspren TNI, kini bekerja di Sekretariat Negara RI.



Berfoto bersama dengan para wartawan setelah melakukan peninjauan di dalam satu industri kapal swasta.

“Bapak Angkat” Industri Pertahanan Sekaligus *Chief Marketing Officer*

Dudi Sudiby*

Pesawat angkut C-295 dengan mulus mendarat di landasan rumput pangkalan udara Astra Kestra di Lampung. Pesawat terbang yang baru masuk jajaran TNI-AU sebagai pengganti Fokker F-27, sedang menjalani uji kelayakan untuk mendarat di pangkalan-pangkalan udara kecil (tipe C) milik TNI-AU. Salah satu penumpang dalam pesawat itu adalah Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan.

Kesediaannya untuk mengikuti uji-terbang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang total mengikuti perkembangan sistem senjata TNI. Dalam perjalanan di pesawat C-295 tersebut saya cukup lama bercakap-cakap dengan beliau. Terus terang, saya kagum kepada komitmennya untuk membangun industri pertahanan dalam negeri kita, dan tidak hanya berhenti pada cita-cita belaka, melainkan mencoba mewujudkannya. Secara sepintas saya melihat bahwa duet Purnomo Yusgiantoro—Sjafrie Sjamsoeddin adalah contoh *teamwork* yang padu dan saling mengisi.

Sejarah industri pertahanan nasional kita cukup panjang, tetapi menurut pandangan saya tidak pernah mengalami kemajuan yang berarti. Atau secara santai kita katakan bergerak seperti tari *poco-poco*, maju, mundur, ke

depan, ke belakang. Ujungnya, dia tetap berada di posisi semula. Penyebabnya semua pihak tahu, tetapi tidak pernah dicari jalan agar keluar dari situasi tersebut karena perlu komitmen, keberanian untuk melaksanakan komitmen dan dana yang memadai.

Di era Menristek BJ Habibie, industri-industri yang berkaitan dengan pertahanan disatukan dibawah BPIS (Badan Pembina Industri Strategis). Karena wawasan teknologi Pak Habibie yang luas dan juga karena kedekatannya dengan Presiden Soeharto, terjadi kemajuan yang signifikan. Ada industri pesawat terbang (PT IPTN, Industri Pesawat Terbang Nasional) yang membuat pesawat terbang baling-baling NC-212 dan CN-235, PT PAL di Surabaya sudah memproduksi kapal-kapal patrol untuk keperluan TNI-AL (tipe FPB-57) dan PT Pindad di Bandung memproduksi senapan serbu otomatis jenis SS-1 yang pola dasarnya diambil dari senapan serbu buatan Belgia (FNC).

Tetapi ketika situasi politik berubah, industri pertahanan dalam negeri juga terimbas keras. IPTN yang paling dahulu koleps, karena dalam *Letter of Intent* (LoI) antara IMF dan pemerintah, disepakati tidak ada pengucuran subsidi bagi perusahaan dirgantara tersebut. IPTN limbung, ratusan pegawai yang sudah dikirim ke luar negeri serta punya keahlian, banyak yang keluar dan bekerja di berbagai pabrik pesawat terbang di negara lain.

Industri pertahanan nasional baru bisa bangkit lagi setelah tahun 2000, setelah pemerintah benar-benar mempunyai *political will* untuk itu. Yang pertama mendapat kesempatan adalah PT Pindad di Bandung. Wapres 2004-2009 M. Jusuf Kalla “menantang” pihak Pindad untuk

membuat kendaraan tempur sendiri. Ini setelah Indonesia membeli sejumlah kendaraan tempur jenis *armoured personel carrier* (APC, kendaraan lapis baja pembawa personel) VAB buatan Perancis untuk pasukan perdamaian TNI di Lebanon. Harganya cukup mahal karena kebutuhan yang mendesak bagi TNI. “Masakan kita tidak bisa membuat kendaraan seperti itu?” tantang Pak Wapres.

Pihak Pindad kemudian mencoba merancang APC dengan model yang mengacu pada rancang-bangun VAB. Setelah versi ketiga yaitu APS-3 menjalani uji-coba berat menunjukkan kendaraan lapis-baja tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan, maka Mabes TNI/Kemhan berani memesan 100 kendaraan sekaligus. Oleh Presiden, kendaraan produksi dalam negeri tersebut diberi nama resmi APS-3 Anoa. Kinerja Anoa begitu baiknya, sehingga Mabes TNI menghentikan pembelian tahap lanjutan VAB dari Perancis dan berani mengirimkan Anoa ke Lebanon. Sejauh ini, performa Anoa di sana tidak mengecewakan. *Operational proven* atau malahan *combat proven* (terbukti dalam perang sesungguhnya) kendaraan tempur adalah promosi yang tidak bisa diragukan dampak positifnya. TNI-AD kini juga semakin percaya diri, dan mampu merancang pembangunan batalyon-batalyon mekanis (*mechanized battalion*) yang lincah bergerak.

Prestasi Anoa itu menurut saya adalah sebuah *milestone* (batupenjuru) penting bagi kemandirian industri pertahanan nasional. Pertanyaan waktu itu yang muncul di benak saya, apakah pemerintah sudah benar-benar punya *political will* untuk memanfaatkan kemajuan-kemajuan tersebut? Karena pengalaman pahit di masa lampau, saya mulanya pesimis.

Beruntungnya ada seorang Sjafrie Sjamsoeddin. Ternyata komitmen yang dipunyai oleh perwira Baret Merah itu benar-benar total. Ia mendorong para CEO perusahaan pertahanan dalam negeri untuk tidak ragu-ragu berani berjualan dan berani memproduksi. Modal SDM maupun teknologi sudah dipunyai. Setelah sempat tersendat akibat kekurangan dana, PT Dirgantara Indonesia (perusahaan pengganti IPTN) menciptakan varian CN-235 jenis MPA (*Maritime Patrol Aircraft*). Karena reputasi pabrik pesawat di Bandung sudah dikenal di industri penerbangan internasional, tidak sulit mereka bekerjasama. Sebagai pengganti pesawat F-27 Fokker Troopship yang sudah tidak diterbangkan lagi, TNI-AU mendapat jatah untuk membeli sejumlah pesawat C-295 buatan Airbus Military (AM, penerus pabrik Casa di Spanyol yang dibeli oleh konsorsium Airbus). Tetapi hanya sebagian yang di beli secara penuh dari AM di Seville, Spanyol. PT DI memperoleh kepercayaan untuk merakit pesawat-pesawat selanjutnya di Bandung dengan nama CN-295. Tidak itu saja, sekarang PT DI mendapat kepercayaan sebagai agen tunggal dan perakitan CN-295 untuk kawasan Asia Pasifik.

Boleh dikata, pabrik pesawat terbang di kota Bandung tersebut secara perlahan tapi pasti telah menemukan “jiwanya” kembali yang sempat hilang.

PT PAL di Surabaya berani membuat kapal perang ukuran besar bekerjasama dengan galangan kapal Daesun Shingbuilding & Engineering Co Ltd di Korea Selatan. Kapal jenis LPD (*Landing Platform Dock*) berbobot 7300 ton mampu membawa pasukan, kapal pendarat dan sekaligus empat helikopter. Kapal pertama sepenuhnya dibuat di

Korsel dan PAL mengirim para teknisi. Tiga kapal sejenis, sepenuhnya dibuat di Surabaya. Kualitasnya tidak kalah.

“Duet” Purnomo–Sjafrie menggariskan kebijakan industri pertahanan nasional dengan dua tujuan, pertama mendukung pemenuhan peralatan militer/alusista bagi TNI dari dalam negeri selama itu mampu. Kedua, sekaligus juga meningkatkan kemampuan (*skill*) dan keahlian industri pertahanan nasional dalam produksi sistem senjata tersebut. Strategi yang dijalankan oleh Kemhan untuk mencapai kedua tujuan utama tersebut dijalankan melalui tiga tahapan; *pertama* melakukan *joint production* dengan industri sejenis di luar negeri. Pada tahapan ini, pabrikan dalam negeri juga sekaligus melakukan ToT (*Transfer of Technology*) dari prinsipal luar negeri.

Pada tahapan berikutnya, *tahapan dua*, industri pertahanan dalam negeri sudah melakukan *joint development* (pengembangan bersama) dengan produsen asli. Ini sudah dilakukan dengan skala terbatas dengan Korsel dalam pengembangan KF-X (*fifth generation fighter*) atau pesawat tempur generasi kelima yang lebih maju dan lebih hebat dibandingkan pesawat F-16 Viper.

Ketiga, bila kondisi sudah memungkinkan, maka bukan tidak mungkin dilakukan *joint investment*. Pada posisi demikian, itu berarti industri pertahanan dalam negeri sudah masuk tahapan *mature* (matang) dan berani bersaing di pasar dunia secara mandiri.

Sekarang ini industri pertahanan nasional sudah memasuki tahapan pertama, seperti dari beberapa contoh yang saya kemukakan di atas tadi. Bahkan PT PAL kini sudah berani melangkah maju dan bekerjasama dengan

galangan kapal Daewoo Shipbuilding dari Korsel membuat kapal selam kelas Changbogo (varian U-209 dari Jerman). Karena teknologinya rumit, maka kemungkinan tiga kapal selam pertama sepenuhnya dibuat di Korsel dimana setelah produksi ketiga kapal selam barulah PAL mempunyai kemampuan teknologi untuk membuat sendiri di dalam negeri. Sementara dengan galangan kapal Damen Schelde Naval Shipbuilding di Belanda, PAL belajar membuat kapal fregat ringan PKR (Perusak Kapal Rudal) – 105 di dalam negeri. Sebelumnya TNI telah membeli tiga kapal korvet modern dari galangan kapal tersebut.

Tetapi selain membangkitkan gairah industri pertahanan dalam negeri, pihak Kemhan tidak hanya berhenti sampai tahapan pembelian oleh TNI, tetapi Pak Sjafrie secara sukarela mau menjalankan tugas sebagai *salesman* produk-produk tersebut di luar negeri. Menurut penuturan beliau kepada saya, ia telah melakukan perjalanan ke sejumlah negara di benua Afrika (Uganda, Burkina Faso dan Kongo), di kawasan ASEAN (Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam), Korea Selatan, Kanada, Brasil dan Perancis. Respons dari Negara-negara tersebut cukup baik. Kendaraan tempur Anoa sudah dibeli oleh Malaysia dan Brunei, dan kini Kerajaan Oman menurut informasi malahan memesan 100 unit Anoa! Pesawat CN-235 MPA sudah dibeli oleh Korsel, dan Filipina konon tertarik dengan kapal LPD buatan Indonesia yang harganya lebih murah dari pada beli dari negara lain.

Apakah kita cukup puas? Sebagai pengamat masalah industri pertahanan saya mengatakan bahwa saya cukup senang dengan kemajuan sekarang, tetapi industri pertahanan



Tidak jarang menyapa para reporter media setelah sebuah acara tertutup.

dalam negeri tidak boleh berpuas diri. Kita mampu membuat Anoa, tetapi mesin penggeraknya masih impor dari pabrik Renault (Perancis). Mengapa Kemhan/Perindustrian tidak mendorong perusahaan Boma Bisma di Surabaya membuat mesin untuk Anoa supaya kendaraan tempur tersebut 100% “asli” buatan Indonesia? Mengapa pula, *offset* yang didapat oleh PT DI tidak ditambah persentasenya sehingga pabrik di Bandung itu semakin mandiri, dan mengurangi sifat pekerjaan rakitan.

Saya ingat, dahulu, di era Orde Lama, para pakar Indonesia telah mampu membuat roket Kartika. Beberapa seri Kartika sukses diluncurkan dari “pangkalan” (karena lokasinya masih terlalu sederhana) roket di Pameungpeuk. Di selatan Jawa Barat. Kalau program itu dihidupkan kembali dan bekerjasama dengan negara atau industri yang tepat, maka itu bakal jadi cikal bakal pembuatan rudal jarak menengah seperti yang dikembangkan di India atau China. Atau untuk tahap awal, kita membuat “roket kendali” sebelum jadi peluru kendali yang sesungguhnya.

Saya hanya menyayangkan bahwa “duet” Purnomo-Sjafrie akan selesai masa pengabdian mereka bulan Oktober 2014 ini. Saya hanya berharap para penerusnya dalam pemerintahan baru Indonesia tahun 2014-2019 meneruskan hasil kerja Menhan & Wamenhan sebelumnya, dan juga kalau bisa melakukan percepatan agar sistem pertahanan nasional akan lebih kuat apabila tidak bergantung semata-mata pada sistem senjata impor belaka.

*Penulis adalah wartawan senior di majalah *Angkasa*,
pengamat masalah penerbangan.

Suka Sama Suka Bersama Sjafrie

Dwi Atmanta*

Tidak banyak perwira tinggi TNI, aktif atau purnawirawan, yang mempunyai kelompok diskusi tetap yang terdiri dari wartawan lintas media seperti koran, majalah, portal berita bahkan lembaga konsultan asing. Pertemuan kelompok semacam itu menjadi sarana komunikasi personal untuk bertukar informasi, menjelaskan duduk perkara suatu masalah, peristiwa atau kebijakan, atau sekedar berbagi pengalaman pribadi.

Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin barangkali termasuk perwira TNI yang langka dan beruntung mempunyai “fans grup” itu. Inisiatif pertemuan bisa datang darinya, namun tidak jarang dari teman-teman wartawannya, yang boleh dibilang senior mengingat pengalaman kerja mereka yang belasan bahkan puluhan tahun. Salah satu indikasi kuat kesenioran para wartawan itu adalah rambut mereka yang sudah ditumbuhi, kalau tidak dipenuhi, uban.

Pertemuan-pertemuan itu sudah berlangsung semenjak Sjafrie masih menjabat Sekjen Dephan, paling tidak yang saya ikuti. Beberapa teman bahkan sudah diundang ketika Sjafrie masih menjabat Kapuspen TNI, yakni mereka yang mengikuti program pelatihan untuk mempersiapkan

diri mereka meliput darurat militer di Aceh pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Jadwal pertemuan memang tidak tetap, tergantung kepentingan atau isu nasional yang tengah diperbincangkan, namun buka puasa bersama selalu masuk dalam agenda. Tempat juga berpindah-pindah, terkadang di Balai Wartawan Kementerian Pertahanan, di rumah dinas Wamenhan di Jl. Imam Bonjol, kali lain di restoran Thailand atau restoran berkelas di kawasan Menteng dan Kemang. Di luar buka puasa bersama, biasanya pertemuan dimulai pukul 7 malam dan berakhir lewat pukul 22.00.

Isi pembicaraan tidak melulu berkaitan dengan pertahanan yang memang menjadi ranah Sjafrie. Sering kali, bahkan selalu, teman-teman wartawan dengan sengaja memancing pembicaraan tentang politik nasional, misalnya minat Sjafrie untuk meramaikan bursa calon presiden dan wakil presiden atau tanggapannya terhadap calon-calon potensial pengganti Presiden SBY.

Dalam merespon pertanyaan semacam itu biasanya Sjafrie tidak akan memberikan jawaban langsung atau *to the point*, tetapi kalimat-kalimat yang membuat penanya atau siapapun yang mendengarnya harus mencerna. Ketika ada teman yang menanyakan pendapatnya terhadap Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama, Sjafrie tidak serta merta menanggapi tingkat kepopuleran sang gubernur yang menurut banyak lembaga survei belum terkalahkan oleh kandidat presiden yang sudah mengumumkan pencalonan mereka. Sjafrie justru berbicara banyak tentang pertemuannya dengan kedua tokoh itu ketika menunggu kedatangan jenazah Ketua MPR Taufik

Kiemas dari Singapura serta hubungan “persaudaraan”nya dengan sang Wagub DKI.

Dalam beberapa kesempatan Sjafrie menjelaskan hal-hal teknis yang media tidak atau belum pernah ulas menyangkut kebijakan Kementerian Pertahanan, misalnya ketika marak pemberitaan pengusuran purnawirawan-purnawirawan TNI dari rumah dinas mereka atau prosedur pengadaan tank Scorpion yang mengundang kontroversi.

Diskusi serius tidak jarang mewarnai pertemuan, seperti waktu Sjafrie melontarkan pentingnya Indonesia mengantisipasi *cyber war* sebagai bentuk nyata *survival of the fittest* negara-negara di dunia, jauh sebelum Amerika Serikat dan China bersitegang menyusul tuduhan Washington bahwa Beijing ada di belakang serangan para peretas sistem informasi pertahanan Amerika.

Namun obrolan juga tidak selalu serius. Dalam salah satu pertemuan Sjafrie menceritakan keheranannya akan kedatangan tiba-tiba seorang tamu wanita muda yang ternyata istri baru salah satu menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. “Cantik loh,” kata Sjafrie mendeskripsikan penampilan tamunya yang kebetulan datang untuk menunggu suaminya.

Pernah pula Sjafrie menceritakan *trick* untuk membuat salah satu negara tetangga ASEAN membeli peralatan perang buatan industri pertahanan dalam negeri. Diundanglah perwira tinggi militer negara tetangga tersebut ke Indonesia untuk menerima penghargaan Kementerian Pertahanan. “Ya kasih saja (penghargaan), kasih...,” katanya, yang tentu saja membuat para pendengar tertawa.

Adalah tugas Sjafrie untuk mempromosikan produk industri pertahanan nasional dan memperlancar pengadaan

alutsista untuk memperkuat pertahanan negara. Salah satu pengalaman menarik Sjafrie dalam menjalankan tugas itu terjadi ketika ia mengunjungi Arab Saudi bersama Letjen Pramono Edhie Wibowo, waktu itu Panglima Kostrad. Tidak disangka, tamu-tamu Indonesia itu mendapat surprise berupa servis VVIP, termasuk pesawat kerajaan yang membawa mereka ke Mekkah untuk melaksanakan umrah.

Menjadi bagian dari “lingkaran” Sjafrie bukan jaminan memperoleh informasi A1 atau bocoran dengan klasifikasi rahasia, meskipun semua orang tahu Sjafrie tahu banyak. Tetapi tujuan pertemuan-pertemuan itu memang bukan untuk membuka rahasia atau aib negara dan sudah seharusnya Sjafrie menjaganya, sebagaimana halnya ia tidak pernah menceritakan kehidupan keluarganya, termasuk waktu ia akan menikahkan putrinya.

Ada batas-batas yang harus dijaga yang barangkali juga bermakna Sjafrie ingin menghormati *privacy* teman-teman wartawannya, meskipun pernah sekali ia menunjukkan keinginannya mendamaikan dua teman yang tampaknya sedang berselisih. Penghormatan Sjafrie kepada profesi teman-temannya juga terlihat dari absennya “pesan sponsor” yang sering dilontarkan pejabat atau eksekutif PR sehabis menjamu wartawan. Tidak ada perasaan berdosa atau berhutang, paling tidak yang saya alami, ketika tidak memuat pernyataan-pernyataan Sjafrie.

Meminjam istilah populer, ini adalah hubungan suka sama suka, di mana tidak ada ikatan dan kewajiban untuk melakukan sesuatu sebagai imbalan. Tetapi barangkali justru karena tiadanya ikatan, hubungan baik itu terbina paling tidak sampai sekarang.

Apa yang Sjafrie dan para peserta rutin pertemuan-pertemuan itu jaga adalah sikap saling menghormati dan tahu sama tahu. Para wartawan itu tidak lupa akan masa lalu Sjafrie tetapi bahwa mereka tidak merasa perlu mengungkitnya adalah terjemahan sikap saling menghormati itu.

Seperti syair lagu lama Ebiet G. Ade, apakah bila terlanjur salah akan tetap dianggap salah? Bahkan barangkali kita tidak tahu siapa dan apa yang salah.

*Penulis adalah wartawan *The Jakarta Post*



Sejak menjabat Kapuspen TNI, Sjafrie selalu terbiasa menyalami para reporter sebelum atau sesudah berbicara dengan mereka.

Sendirian Mendatangi “Sarang Macan” pada 18 Mei 1998

Eddy Lahengko*

Saya mengenal seorang Sjafrie Sjamsoeddin ketika masih berpangkat kolonel. Saat itu, dia masih menjadi anggota pengawal Presiden Soeharto pada satuan Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres). Perkenalan ini terjadi secara kebetulan, waktu itu Mohamad Hasan (Bob Hasan) sebagai Ketua Umum PB Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang selalu didampingi Andi Darussalam Tabusalla.

Sementara, saya sendiri duduk sebagai salah satu pengurus PB PASI. Bob Hasan dalam seminggu beberapa kali bermain golf dengan Presiden Soeharto di Lapangan Golf Rawamangun. Terkadang Pak Bob lewat Andi Darussalam Tabusalla memanggil saya datang ke lapangan Golf Rawamangun, sebelum Pak Bob bermain golf dengan orang nomor satu di Republik Indonesia ketika itu.

Karena seringkali ke lapangan golf Rawamangun otomatis sering juga melihat sosok Sjafrie Sjamsoeddin yang selalu berada di samping Pak Harto. Dalam masa ini belum terjadi komunikasi antara saya dan Sjafrie tapi hanya kenal lewat pandangan saja. Tapi sudah saling tahu, apalagi Andi Darussalam Tabusallasatu dan Sjafrie sama-sama dari

Makassar. Belum ada kesan dari seorang Sjafrie, karena meski sering bertemu tapi belum terjalin komunikasi.

Suatu ketika Kopassus merayakan ulang tahun, Sjafrie bersama Prabowo Subianto sebagai perwira menengah di pasukan elite ingin menyelenggarakan lomba lari 10 K menyongsong HUT pasukan elite di TNI AD itu. Kegiatan ini dengan sendirinya membangun jalinan kerjasama dengan PB PASI. Lomba lari yang bertajuk “Baret Merah 10 K” ini diikuti peserta yang membludak.

Dalam masa persiapan lomba lari itulah mulai berjumpa dengan Pak Prabowo dan Pak Sjafrie. Sebab, sebagai pengurus, saya selalu hadir dalam setiap rapat persiapan lomba. Kedekatan saya dengan atletik tidak lepas dari tugas sebagai wartawan olahraga, yang juga meliput cabang atletik.

Ketika usai pelaksanaan lomba “Baret Merah 10 K”, tali silaturahmi terus berlanjut. Ketika Sjafrie mendapat tugas sebagai Komandan Korem Suryakencana di Bogor berpangkat Kolonel, komunikasi tetap berlangsung itupun berkat Andi Darussalam Tabusalla yang memang berkawan dengan Sjafrie.

Sebagai wartawan, yang paling tak dilupakan saat Sjafrie menjadi Panglima Kodam Jaya, dengan pangkat Mayjen TNI pada tahun 1998. Ketika itu, situasi politik di Ibukota Jakarta makin memanas karena berbagai aksi demo. Saat itu, terjadi kasus yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti, di antaranya Elang.

Sebenarnya, saat itu, saya merupakan wartawan olahraga. Tapi, karena panggilan jiwa sebagai jurnalis, sehingga saya berangkat ke lokasi kejadian di kompleks Universitas Trisakti di kawasan Jakarta Barat. Meski sehari-

hari meliputi peristiwa olahraga, saya juga hadir di tengah-tengah mahasiswa dan para aktivis yang memenuhi aula Usakti tempat persemayaman ketiga jenazah mahasiswa Trisakti.

Ketika suasana duka bercampur emosi dari mereka yang hadir termasuk mahasiswa Trisakti menyaksikan tiga rekan mereka ditembak sekaligus melihat peti jenazah ketiganya, tak disangka menjelang tengah malam tanpa pengawasan yang ketat layaknya seorang komandan, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dalam situasi "amat panas" dan emosional dari aktifis dan mahasiswa berkesempatan datang ke aula tempat disemayamkan ketiga jenazah mahasiswa Trisakti itu.

Kehadiran Sjafrie dalam aula tempat persemayaman itu, saya khawatir bakal terjadi sesuatu. Namun, Sjafrie begitu tenang dan tidak terjadi apa-apa. Meskipun kehadiran Pangdam Jaya ketika itu mendapat umpatan dan hujatan para mahasiswa yang memang sangat emosional kala itu, bahkan salah seorang orang tua dari korban penembakan sempat membisikan sesuatu ke Sjafrie (entah apa yang dikatakan) tapi seorang Sjafrie tetap tenang. Bahkan Sjafrie cukup lama berada di aula tempat ketiga jenazah disemayamkan, ia dengan kusuk membaca Yasin di hadapan tiga jenazah mahasiswa Trisakti. Usai membaca Yasin tengah malam itu ia meninggalkan Kampus Trisakti.

Penulis kagum dengan kehadiran Sjafrie di aula tempat jenazah empat mahasiswa yang ditembak itu. Saya tidak tahu apakah kalau pejabat lain akan hadir dalam situasi seperti itu. Harus diingat, mahasiswa ketika itu sangat emosional karena empat orang rekan mereka menjadi korban.

Mahasiswa ketika itu melontarkan umpatan dan makian ketika Sjafrie sedang membaca Yasin. Tapi, Sjafrie kelihatan menghadapi semua itu dengan tenang. Dalam hati saya, dalam situasi seperti itu seorang pemimpin daerah yang berpangkat jenderal mau hadir tentu dengan segala resiko apalagi dengan kasat mata saya melihat sendiri Sjafrie datang tanpa pengawalan yang ketat, artinya tidak ada seorang anggota TNI pun yang mendampinginya berpakaian dinas. Tapi entahlah kalau ada anggota yang berpakaian sipil yang sudah membaaur dengan aktifis dan mahasiswa.

Dalam hati saya pikir, ini baru sosok pemimpin yang tidak takut menghadapi masalah, termasuk mendapat caci dan maki. Peristiwa kehadiran Sjafrie di aula ketiga mahasiswa Trisakti di semayamkan tak akan terlupakan, dan juga kehadiran sang Pangdam amat mengesankan bagi saya yang waktu itu hanya seorang reporter olahraga pada harian sore Suara Pembaruan. Selepas dari peristiwa itu hampir tidak ada komunikasi apalagi pertemuan. Sjafrie sudah tidak lagi menjabat Pangdam Jaya dan mutasi menjadi staf ahli Panglima TNI.

Bersamaan dengan era reformasi, harian Sinar Harapan yang diberangus dalam era Soeharto, terbit lagi, maka banyak orang lama kembali ke Sinar Harapan, termasuk saya.

Oleh pimpinan Sinar Harapan saya ditugaskan di Polkam, meliputi TNI dan jajarannya. Sejak saat itu, saya sering lagi bertemu dengan Sjafrie. Apalagi, Sjafrie menjabat Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, maka semakin intens pertemuan dalam kapasitas tugas jurnalistik.

Di era Sjafrie menjabat Kapuspen TNI, situasi keamanan di tanah air cukup terganggu dengan kasus Aceh



Dalam cara buka puasa bersama, tidak ada sekat-sekat formal antara Wamenhan Sjafrie dan para reporter. Berdiri di sebelah kanannya, reporter senior *Sinar Harapan*, Eddy Lahenko.

karena adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sjafrie juga tak kalah gesit melakukan tugasnya untuk menjelaskan situasi keamanan dan peran serta kegiatan TNI lainnya ke masyarakat melalui media.

Khusus masalah Aceh, GAM ketika itu juga sedang gencar-gencarnya melakukan provokasi, bahkan melakukan pembusukan lewat media terhadap pemerintah Indonesia, khususnya TNI. Ini tentu menjadi tugas Sjafrie sebagai Kapuspen untuk meluruskan penyesatan informasi yang sering disampaikan GAM.

Tuntutan tugas seperti ini, tidak mungkin terlaksana tanpa menjalin hubungan yang baik dengan jurnalis. Sebab, pejabat membutuhkan kemahiran tersendiri untuk meladeni wartawan. Sjafrie melakukan hal itu, ia memiliki

hubungan yang baik dengan media nasional, lokal maupun internasional.

Dalam tugasnya di bidang penerangan ini, Sjafrri memposisikan diri sebagai humas yang baik. Dia melakukan pendekatan dan sering berkomunikasi dengan awak media, bertukar pikiran bahkan tak jarang dia hanya memberikan latar belakang suatu peristiwa. Tentu, bukan untuk konsumsi berita. Pendekatan seperti inilah membuat awak media respek terhadap sang Kapuspen TNI. Tak jarang, dia mengajak wartawan ikut berkunjung ke daerah bersama Panglima TNI untuk melihat langsung suatu masalah.

Ketika Aceh makin bergejolak dan tak memenuhi komitmen, maka pemerintah memberlakukan darurat militer di Aceh. Sjafrrie berinisiatif untuk melakukan, pelatihan kedaruratan bagi wartawan yang meliput di lingkungan TNI. Ratusan wartawan yang dibagi dalam dua kelompok dilatih ala militer di kawasan pelatihan TNI AD atau Kostrad, Sanggabuana Karawang Jabar.

Wartawan dalam kelompok pertama termasuk saya mendapat pelatihan kedaruratan, bagaimana wartawan memposisikan diri ketika terjadi kontak senjata di lapangan, di mana harus berlindung, termasuk bagaimana harus selalu *survive* di daerah kontak senjata. Semua itu menjadi bekal bagi awak media yang ditugaskan kantor masing-masing untuk meliput pemberlakuan darurat militer di Aceh.

Minimal wartawan ketika itu mendapat tambahan ilmu terutama disiplin dalam menghargai waktu dan membakar semangat nasionalisme meskipun awalnya banyak juga teman menggerutu karena tak menyangka diboyong ke Sanggabuana hanya untuk di gojlok ala tentara. ”Kok bisa

jadi begini, kenapa jadi tentara amat sih,” gerutu rekan wartawan di hari pertama pelatihan sudah harus mendaki menuju markas pelatihan.

Alhasil setelah itu teman teman wartawan sudah tak merasa “dikerjai” tapi malah menikmati suasana pelatihan meskipun berat untuk ukuran wartawan. Bahkan suasana akrab terbangun antara sesama wartawan dari berbagai media maupun dengan para pelatih, demikian juga hubungan dengan Kapuspen Mayjen Sjafrie Sjamsuddin dan Wakil Kapuspen Brigjen TNI, Tono Suratman (ketika itu) berserta para awak puspen TNI terbangun begitu akrab penuh kekeluargaan. Sehingga setiap hari markas Puspen di Cilangkap dihadiri oleh wartawan dari berbagai media ada atau tidak ada berita tetap datang ke Cilangkap.

Setelah menjabat Kapuspen, Sjafrie diberi tugas lagi menjadi Sekjen Dephan dengan pangkat Letjen, tapi jalinan dengan awak media semasa di Puspen tetap terjaga dan terbina, bahkan sampai beliau menjabat posisi Wakil Menhan, tali silaturahmi terjalin terus.

Bahkan tak jarang di tengah kesibukannya yang begitu padat dalam tugas di Departemen Pertahanan, Sjafrie masih meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dengan rekan wartawan peliput di TNI dan itu sudah menjadi agenda rutin ketika beliau ada waktu.

Dari perjalanan mengenal sosok Sjafrie Sjamsudin, bagi saya berawal dari sekedar hubungan biasa hingga kemudian berhubungan dalam kapasitas tugas jurnalistik. Sjafrie adalah seorang pemimpin yang mau belajar dari siapa saja. Bahkan dia bisa menjadi pendengar yang setia ketika berdiskusi dengan rekan wartawan. Dia sangat akomodatif terhadap

pendapat orang lain. Buah pikiran yang disampaikan pun amat bermakna dan ilmiah.

Menurut saya, Sjafrie berhasil membina hubungan dengan media baik lokal, nasional maupun internasional, meskipun ada juga yang melihat lain tapi setelah bergaul dan berkomunikasi intens dengannya, maka pasti setiap orang akan menilai ia orang pintar, seorang pemimpin yang mau mendengar dan belajar dari siapa saja. Intinya Sjafrie adalah sosok yang komunikatif bagi yang sudah mengenalnya dan tak jarang pula humor segar dan lepas keluar dari mulutnya. Baru kemudian dia tertawa ngakak bersama orang yang diajak bercanda.

**Reporter Harian Umum” Suara Pembaruan” dan
“Sinar Harapan”*



Memberikan keterangan kepada wartawan An-TV.

Ingat Sjafrie, Ingat Wartawan yang Tersandera GAM

Edwin Nazir*

Saya pertama mengenal sosok Pak Sjafrie Sjamsoeddin lewat televisi pada tahun 1998 saat terjadi kerusuhan di Jakarta. Wajah Pak Sjafrie kerap muncul di televisi dan juga media cetak. Sebagai sarjana yang baru lulus, maraknya pemberitaan tentang situasi politik di tanah air saat itu, membuat saya tertarik dan akhirnya membawa saya pada dunia jurnalistik.

Sebagai jurnalis, tugas saya adalah mencari berita. Profesi ini yang membawa saya bisa bertemu langsung dan mengenal Pak Sjafrie Sjamsoeddin, meski tidak dekat. Interaksi saya dengan beliau sebatas hubungan antara narasumber dengan pencari berita; Pak Sjafrie sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI saat itu, dan saya sebagai jurnalis junior.

Sebagai Kapuspen, tentu saja Pak Sjafrie menjadi sumber berita yang terkait dengan TNI. Satu hal yang saya selalu ingat, ada satu orang teman jurnalis perempuan yang kerap memberi nama file hasil wawancaranya dengan Pak Sjafrie menggunakan kata yang sama sekali tidak berhubungan dengan isi wawancara, yaitu 'ganteng'...

Pemberitaan seputar Operasi Darurat Militer di Aceh pada Mei 2003 - Mei 2004, memburu berita di lapangan, dan mencari keterangan dari Puspen TNI, menjadi

sesuatu yang sifatnya personal bagi saya karena saat itu, nasib dua rekan jurnalis, Ersu Siregar dan Fery Santoro, dalam ketidakpastian. Mereka menjadi sandera kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Bang Ersu dan Fery diculik pada hari Minggu, 29 Juni 2003. Hari itu seharusnya menjadi jadwal terakhir Bang Ersu bertugas meliput pelaksanaan Darurat Militer di Aceh, setelah sebelumnya bertugas selama dua pekan. Saya dan Bang Ersu dijadwalkan untuk kembali ke Jakarta pada 30 Juni 2003, pagi hari. Namun, hari Minggu itu menjadi hari terakhir saya melihat Bang Ersu.

Hari-hari setelah itu adalah hari-hari tanpa kejelasan. Kami merasa dalam posisi yang serba salah, di antara sikap TNI yang tidak mau berkompromi dengan GAM, dan sikap GAM yang tidak mau melepas sandera.

Upaya pembebasan yang berlangsung panjang dan penuh ketidakpastian itu berakhir memilukan saat kami mendapat kabar tertembaknya Bang Ersu dalam kontak senjata antara TNI dan GAM. Saya ingat, itu terjadi pada bulan Desember 2003. Upaya kami meminta pembebasan rekan kami, Fery, semakin kuat sejak itu. Fery akhirnya bebas, dengan melibatkan pihak ICRC, sesuai kesepakatan antara pihak TNI dan GAM.

Saya meyakini, tidak ada pihak yang sengaja membiarkan jatuhnya korban jiwa. Tapi itulah yang terjadi, Bang Ersu – senior saya, dan banyak warga sipil lainnya. Menjadi korban selama konflik yang berkecamuk lebih dari tiga dekade di Aceh.

*Penulis adalah reporter *RCTI*

Sjafrie, “Gua Stres Juga...!”

Effendi Soen*

Saya pertama melihat sosok Pak Sjafrie Sjamsoeddin sekitar tahun 1989, ketika meliput kunjungan bhakti sosial rombongan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia—FKPPI ke Timor Timur. Dalam kegiatan tersebut bertemu dua pria tegap gagah dan ganteng berpakaian preman yang ramah mengobrol dengan anggota rombongan. Ternyata kemudian saya mendapat informasi kalau mereka berdua adalah Letkol. Sjafrie Sjamsoeddin dan satu lagi berkumis tebal, Kusmayadi (almarhum, terakhir Pati Kostrad, Brigjen).

Saat itu saya belum melihat sosok Pak Sjafrie berseragam tentara, yang rupanya dari satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Namun setelah itu, saya lebih mengenal beliau karena liputan saya banyak di lingkungan TNI dan Kopassus termasuk kegiatan pendakian gunung bersama ekspedisi Kopassus dan olahraga dirgantara terjun payung. Tahun 1990an saya mulai liputan di lingkungan istana dan melihat beliau selalu mendampingi Pak Harto, sebagai Komandan Grup A Paspamres yang bertugas mengawal RI 1. Saya kagum beliau bisa mendampingi orang nomor satu di Indonesia karena bukan hanya tugasnya yang begitu penting dan strategis, tapi juga sosoknya membanggakan kita orang

Indonesia, tinggi dan ganteng sehingga enak dilihat apalagi disorot kamera media. Meskipun demikian sebagai anggota pasukan khusus yang biasanya tampil kilat dan senyap harus bersikap lain saat mengawal VVIP di tengah umum.

“*Gua* nih stres juga. Jadi tentara seperti di Kopassus kan ofensif sedangkan jadi Paspamres itu defensif padahal tingkat ancamannya sangat tinggi,” begitu kira-kira sepenggal obrolan dengan beliau disuatu saat santai mengenai tugasnya di Paspampres. Tapi nyatanya beliau mampu menjalankan tugasnya di dalam dan di luar negeri dengan sukses, satu diantaranya pengamanan ketika mengawal Presiden Soeharto berkunjung ke Bosnia. Suatu prestasi dunia karena konflik Bosnia saat itu menakutkan semua, tapi Presiden Suharto *cuek* saja berkunjung, dan tentunya didampingi Pak Sjafrie sebagai ujung tombak pengamanannya.

Saat pertemuan dengan Pak Sjafrie berikutnya diluar pertemuan biasa di Mako Passus atau kegiatan terjun payung yang saya alami yang berkesan adalah ditengah kerusuhan tahun 1998. Pak Sjafrie sebagai Pangdam Jaya sibuk sekali dengan berbagai kerusuhan termasuk gerakan politis mengepung istana pada saat 20 Mei 1998. Istana dan jalan protokol Jakarta tertutup oleh pengamanan ketat. Setiap orang sulit mendekati kompleks kantor kepresidenan dan Sekretariat Negara meskipun menyandang predikat wartawan istana. Tiba-tiba ada kabar Mensesneg akan memberikan keterangan Pers tentang situasi yang ada di istana.

Saya yang mendapat tugas dari TVRI juga mencari jalan untuk bisa sampai disana dan dengan siasat yang dimiliki akhirnya dari kantor TVRI Senayan bisa sampai di istana melalui Jalan Tomang, Harmoni seberang Istana

Kepresidenan. Karena saya kenal dan tahu berkomunikasi dengan berbagai satuan militer yang bertugas menjaga jalan lintasan, saya bisa sampai di Harmoni dengan kendaraan, tapi masuk istana terpaksa jalan kaki. Rupanya yang lain lebih parah karena masuk dari arah lain yang lebih jauh sekali sehingga banyak yang tiba di Istana dalam kondisi kelelahan. Di istana kami mendapat penjelasan perkembangan terakhir dari Mensesneg (lupa namanya) dan bertemu Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Syamsudin. Di tengah suasana mencekam itu kepada para wartawan istana dengan ramah dan kalem pak Sjafrie menjelaskan kondisi ibukota. Ia malahan mengajak wartawan jika ada yang ingin bersama beliau untuk berkeliling mengabadikan situasi dengan menumpang kendaraan panzer yang dibawanya. Sayang saya tidak bisa merasakannya karena ada tugas lain dari kantor.

Saya kembali kerap bertemu dan berkegiatan dengan beliau saat menjadi Kapuspen TNI dan meluncurkan kegiatan *embedded journalist* saat terjadi konflik dan operasi militer di Aceh. Saya tidak ikut menjadi pesertanya karena dinilai sudah memiliki dasar pendidikan sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) waktu kuliah dulu, namun saya sempat bersama beliau dan Wakapuspen Brigjen Tono Suratman meninjau latihan teman-teman wartawan di Pusdiklat Tontaipur Gunung Sanggabuana Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Saya juga sempat diminta bantu beliau menilai tayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang diproduksi Puspen berkaitan dengan operasi TNI di Aceh. Senang sekali saya bisa memberikan penilaian dan saran perbaikannya untuk video spot tersebut dan merupakan suatu kehormatan dari

beliau. Seperti wartawan dan stasiun TV lain, saya juga ditugaskan TVRI melakukan peliputan di Aceh. Ketika saya baru masuk Lhoksumawe bersama tim liputan TVRI, para wartawan sedang siaga mengejar liputan dibebaskannya wartawan asing dari Amerika Serikat oleh GAM. Saya menemui Pak Sjafrie yang sedang berada di Lhokseumawe dengan atase pertahanan Amerika Serikat.

Saya dengan baik diterima beliau bahkan dikenalkan kepada Athan AS itu. Lalu sayapun diskusi tentang kondisi terakhir termasuk tentang wartawan Amerika Serikat yang saat itu jadi incaran wartawan karena infonya akan dibebaskan. Dari pak Sjafrie saya mendapatkan *background* menyeluruh tentang operasi di Aceh dan tentang info wartawan AS yang akan dibebaskan tersebut. Sesudah itu sayapun bersama tim TVRI hanya siaga saja tidak seperti wartawan lain yang menggebu mengejar berita pembebasan tersebut. Akhirnya wartwan itu dibebaskan dan menjadi berita utama menarik dari Aceh, namun belakangan ada beberapa ketidakpuasan karena pemilihan wartawan yang mendapat akses dari Pangkoops saat itu dianggap tidak adil. Saya sendiri tidak mengalami kesulitan untuk bisa meliput berbagai satuan ketika konflik di Aceh berlangsung selain kuncinya banyak kenal dekat sebelumnya dengan para anggota TNI yang bertugas, juga tahu batasan mana yang boleh dan tidak patut disiarkan.

Bantuan Kemanusiaan

Seusai Liputan konflik di Aceh saya mendapat kehormatan ikut Asia Pacific Symposium Public Affair Multinational Planning Augmentation Team 9 – 13 Pebruari 2004 di Si-

ngapura. Kegiatan menyusun protokol dan petunjuk operasional bantuan kemanusiaan bagi suatu negara yang mengalami bencana atau *chaos* itu diikuti perwakilan urusan publik dari militer 18 negara di Asia Pacific seperti Amerika Serikat, Australia, India, Mongolia dan Indonesia. Saya satu satunya wakil wartawan Indonesia yang ikut serta bersama perwira dari Puspen Kolonel Wattimena (sekarang Marsma). Pak Sjafrie menjadi salahsatu narasumber, sedangkan saya ikutserta menjelaskan tentang pengalaman *embedded journalist* selama konflik di Aceh. Pada intinya dalam simposium itu merumuskan kerangka perencanaan dan langkah langkah yang menjadi acuan dalam melaksanakan bantuan kemanusiaan jika ada kejadian di wilayah Asia Pasifik.

Pelaksanaan *embeded journalist* berdasarkan informasi dari perwakilan Amerika Serikat di Operasi Badai Gurun di Irak dinilai mahal. Bagi Indonesia *embeded journalist* difasilitasi TNI dalam bentuk pemberian pembekalan pengetahuan dan kemampuan lapangan para wartawan agar siap dan aman dalam meliput operasi militer. Kebetulan saya memiliki pengalaman liputan ke beberapa konflik dan operasi militer di dalam maupun luar negeri seperti di Timor Timur, Papua, Sampit Kalimantan, Perang Kamboja, Bosnia dan Mindanao Moro Filipina. Media yang meliput kegiatan konflik atau operasi militer menurut saya harus memiliki kesiapan dan kemampuan dari segi fisik, keterampilan dan mental yang dibutuhkan ketika di lapangan. Dalam peliputan operasi militer atau konflik diperlukan adanya saling memahami dan dibangun kemitraannya diantara media dan pihak keamanan tentang tugas dan misi masing masing.

Ketika bencana tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004 terjadi, sehari sesudah kejadian saya sudah berada di Banda Aceh dan kemudian menyaksikan penanggulangan bencana belum mampu menunjukkan langkah yang tegas. Datanglah Pak Sjafrie Syamsudin yang langsung mengorganisasikan dan menggerakkan kemampuan yang ada dengan langkah-langkah yang lebih jelas. Meskipun jabatan beliau Kapuspen TNI namun kemampuan kepemimpinan lapangan dan jiwa komandonya mampu menggebrak suasana dan langkah penanggulangan saat itu bergerak.

Ketika ada kesempatan ngobrol dengan Pak Sjafrie saya tanyakan apakah konsep simposium di Singapura sudah bisa diaplikasikan di bencana tsunami Aceh. Menurut beliau kemungkinan besar dilaksanakan karena menurut informasi kapal induk Amerika Serikat dengan membawa tim bantuan juga sudah bergerak menuju Aceh. Ternyata benar berbagai negara segera berdatangan membantu yang diantaranya adalah satuan bantuan dari 18 negara di Asia Pasifik yang konsep pelaksanaannya sudah pernah disusun bersama.

Terakhir saya berjumpa beliau sesudah menjabat sebagai Sekjen Kemhan. Waktu itu saya sebagai Wakil Ketua Pelaksana Panitia Kejuaraan Terjun Payung Asia 2010 yang diselenggarakan di Solo Jawa Tengah untuk beraudiensi dengan Menhan Poernomo Yusgiantoro didampingi Pak Sjafrie. *Alhamdulillah* kejuaraan internasional itu sukses karena dukungan dari Menhankam dan tentunya juga beliau.

Penilaian dan kesan saya terhadap beliau, orangnya bukan hanya ganteng, tapi juga *smart* dan enak untuk ngobrol

bahkan saya kerap mendapatkan *background* suatu keadaan dengan rasional dan netral tanpa ada pemaksaan kehendak meski dia seorang militer. Pandangannya tentang sesuatu sering saya rasakan mampu menembus dan memperkaya persepsi kita yang berprofesi sebagai wartawan, namun tentu saja yang disertai kecerdasan komprehensif dan rasa tanggung jawab sebagai anak Merah Putih.

*Penulis adalah wartawan senior *TVRI*



Wamehan selalu bersedia berbicara dalam *talk show* di radio.

Bung Sjafrie Bukan Dinosaurus

Elman Saragih*

Saya amat yakin bahwa pepatah Amerika yang berbunyi *Old soldiers never die, they just fade away* sangat dipahami oleh Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Bagaikan minuman anggur, Sjafrie tentu berharap menjadi anggur yang semakin tua semakin enak rasanya. Wakil Menteri Pertahanan Indonesia yang menjabat sejak tahun 2010 tersebut kini hampir mencapai usia 61 tahun, tetapi sekilas ia tetap seperti orang muda. Guratan ketuaan tak terlalu terlihat dari pancaran wajahnya.

Dengan situasi seperti itu, saya menjadi makin yakin bahwa kendati kelak Sjafrie pensiun dari jabatan Wakil Menteri Pertahanan sekaligus Sekjen Kementerian Pertahanan, spirit mudanya akan tetap menyala. Usia tuanya akan menjadi 'anggur' yang mengenakan. Bagi saya, Sjafrie tentu sosok yang teramat penting untuk dilewatkan.

Sepak terjangnya di dunia ketentaraan boleh dibilang penuh warna, terkadang menyisakan kontroversi. Tetapi sebagai pribadi, Sjafrie merupakan sosok yang hangat dan terbuka. Ia tidak merasa kikuk untuk membicarakan segala hal, termasuk terkait dengan sejumlah langkahnya yang oleh sebagian kalangan disebut kontroversial.

Saya mengenal Bung Sjafrie sebagai tentara yang tegas, taat azas, dan memiliki mental petarung. Ia bukanlah pribadi yang gampang menyerah atau patah arang. Berbagai tudingan, hambatan, bahkan stigma, ia hadapi dengan ajakan berdialog dengan hangat, bahkan berdebat dengan santun. Lebih dari sekedar itu, Sjafrie yang saya kenal jelas seorang tentara yang memiliki konsep matang.

Saya menjadi teringat suatu waktu di tahun 2005, ketika ia ditugasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Sekjen Departemen Pertahanan (kini Kementerian Pertahanan), ia diminta oleh Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (ketika itu) untuk mengubah citra Dephan (kini berubah menjadi Kemhan) dari departemen yang dikenal tak efisien dalam menggunakan anggaran menjadi institusi yang efisien.

Jelas, bukan pekerjaan yang mudah. Tapi, bagi seorang Sjafrie yang visioner, tak ada tugas sulit yang tidak bisa diselesaikan. Ada kemauan, pasti ada jalan. Ada tekad dan visi, pasti ada solusi.

Dengan kemampuannya, Sjafrie mencoba melakukan pembenahan dari dalam, terutama dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selama ini, sistem yang ada membuat begitu banyak pihak dan kepentingan-kepentingan bebas bermain di dalamnya, termasuk berbagai pihak yang ikut menikmati keuntungan dari pengadaan alutsista bagi Tentara Nasional Indonesia tersebut.

Tentu saja para pemain tersebut tidak hanya berasal dari kalangan intern Dephan atau TNI, tetapi juga melibatkan pihak luar, termasuk kalangan swasta. Oleh karena itu, langkah pertama yang ia lakukan adalah membentuk sebuah

tim di dalam departemen di mana keputusan pengadaan alutsista dibahas oleh *Dealing Center Management*. Sejak itulah, lambat laun sistem yang lebih akuntabel dan efisien pun terbangun.

Tentu, masih ada persoalan di sana-sini. Tetapi, keberaniannya untuk masuk ke jantung persoalan di institusi pertahanan jelas patut kita apresiasi. Apa yang dilakukannya bisa kita kategorikan sebagai *legacy* penting bagi sistem pertahanan kita, juga bagi institusi Kementerian Pertahanan. Apa yang sudah ia rintis, mesti menjadi pedoman penting dalam menjawab tantangan masa depan yang jelas lebih kompleks dan rumit.

Maka, meskipun sudah pensiun dari Kemenhan nanti, saya yakin Sjafrie tetap akan eksis sesuai pepatah *Old Soldiers never die, they just fade away!* Bung Sjafrie tetap harus mengambil peran penting untuk mengajak para purnawirawan TNI beradaptasi dengan sistem demokrasi dan berupaya membantu menjadikan TNI alat pertahanan negara yang kita banggakan dan disegani negara-negara tetangga.

Di medan laga yang berbeda, Bung Sjafrie akan sekuat tenaga membendung agar ‘skenario dinosaurus’ tidak menjadi kenyataan. ‘Skenario dinosaurus’ yang saya maksud ialah seperti yang pernah disinggung oleh SBY, yakni terasing di lingkungannya lalu kemudian punah dimakan zaman! Tugas itu justru semakin berat. Tetapi, di tangan sahabat saya, Bung Sjafrie, saya yakin itu bisa dilalui.

**Senior Editor Metro TV, mantan Pemimpin Redaksi Metro TV, mantan reporter bidang Hankam.*



Sewaktu menjabat Kapuspen TNI bersama Kol. Inf. DJ Nachrowi (kedua dari kiri) dan wartawan senior Eny D. Purwanto (ketiga dari kiri).

Lengkap Memberikan Informasi *Off-the-record* dan *On-the record*

Eny D. Purwanto*

Pak Sjafrie Sjamsoeddin itu sangat baik dan ramah. Ia sangat terbuka dan transparan dalam memberikan informasi, wawasan, dan segala permasalahan maupun solusi yang tercakup dalam bidang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Ia memahami dan menghormati profesi wartawan, selalu menjelaskan atau memaparkan persoalan dengan sangat jelas, yang menunjukkan ia sangat profesional dan menguasai bidangnya.

Wartawan selalu diberi kesempatan untuk bertanya dan ia akan menjawab setiap pertanyaan itu dengan senang dan bahkan sering kali menambahkan dengan latar belakang yang melengkapi jawabannya, baik *on-the-record* maupun *off-the-record*. Sehingga, mau tidak mau, wartawan yang meliput bidangnya (Keamanan Negara-TNI) dituntut untuk selalu berpikir dan bertindak cerdas, jeli, teliti, cermat, tepat, cepat, dan bijaksana dalam setiap kali membuat dan menurunkan berita-berita.

Ditugaskan meliput bidang di mana ia sebagai pejabatnya yang berwenang adalah suatu pengalaman tugas yang sangat menyenangkan, tidak merasa capek meski harus meliput dari pagi sampai malam, karena begitu banyak mendapat ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, yang bermanfaat

bagi bangsa negara, media tempat kita bekerja, dan diri sendiri. Selama sekitar 17 tahun saya menjadi wartawan atau bekerja di bidang media untuk media cetak (*Suara Pembaruan, Kapital*), televisi (*Lativi*) dan Website (*DMC/ Defence Media Center, Departemen Pertahanan RI*), sangat jarang saya menjumpai sosok pejabat seperti Sjafrie.

Dari awal saya mengenalnya, mulai sebagai perwira menengah (Pamen) hingga menjadi perwira tinggi atau jenderal, tidak ada yang berubah dalam perhatian, sikap, tindakan, dan komitmennya kepada kemajuan media massa/dunia informasi/bidang penerangan di Indonesia pada umumnya, dan terhadap pers dan wartawan pada khususnya.

Ia adalah salah satu panutan dan contoh sosok yang baik dan profesional di negara tercinta ini.

*Mantan wartawan pada *Harian Umum*
“*Suara Pembaruan*” dan *Lativi*

Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin: Tangan Dingin yang Cerdas dan Inovatif

Eri Sofyan Hakim*

Dunia jurnalisme pada perkembangannya tidak bisa dilepaskan dengan sosok Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Apalagi jika berkaitan dengan sepak terjang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kedekatan kalangan media dengan mantan Pangdam Jaya ini sangat dirasakan ketika Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI periode tahun 2002 hingga 2005. Terlihat sisi lain sosok Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Perwira TNI yang cerdas dan inovatif. Di bawah kepemimpinan Sjafrie Sjamsoeddin Puspen TNI mampu menjadi lembaga informasi modern yang transparan dalam menyambung kepentingan pemberitaan media di satu sisi dan menyampaikan agenda kegiatan TNI di sisi lainnya.

Bagi sejumlah pewarta, mengenal sosok Sjafrie Sjamsoeddin menjadi kesempatan awal untuk dapat memahami dinamika dunia TNI. Pasalnya, di era Sjafrie Sjamsoeddin TNI bukan lagi menjadi lembaga yang alergi terhadap pemberitaan media, namun secara perlahan-lahan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi media untuk meliput.

Bukan hanya itu, di berbagai kesempatan awak media dilibatkan langsung dengan TNI sebut saja pelatihan Sangga Buana yang dilaksanakan saat era Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Dengan pro dan kontranya, sedikit banyak pelatihan yang ada memberikan pengetahuan kepada media tentang kondisi perang sesungguhnya.

Di Internal Pusat Penerangan Mabes TNI sendiri Letjen Sjafrie Sjamsoeddin melakukan reformasi besar-besaran. Pemahaman beliau tentang pentingnya media dan informasi dibuktikan dengan pembekalan Staf Penerangan Mabes TNI. Bukan hanya itu, kelengkapan alat-alat media, seperti kamera, alat editing lengkap tersedia di kantor Pusat Penerangan TNI Cilangkap. Sampai saat ini, alat-alat yang ada masih dimanfaatkan fungsinya.

Sebagai Perwira Tinggi, Lejen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin seperti yang saya ingat adalah sosok yang rendah hati, terbuka dan komunikatif. Hal inilah yang menjadikan Sjafrie Sjamsoeddin dikenal dekat dengan semua kalangan termasuk wartawan. Tidak heran kami biasa bediskusi tentang pekerjaan atau hal-hal lainnya saat peliputan.

Seperti peribahasa *diam itu emas* adalah hal yang tepat menggambarkan sosok Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Tidak banyak omong (meskipun ketika menjabat Kapuspen rumus yang berlaku adalah, *bicara itu berlian*), cekatan dan inovatif menjadikan sosok Sjafrie Sjamsoeddin berbeda dengan perwira TNI lainnya.

*Penulis adalah reporter pada stasiun televisi *Indosiar*

Sjafrie, Biarlah Fakta Bicara!

Eva Mazrieva*

“**V**a, *Bapak siap diwawancarai sekarang!*”, demikian bunyi pesan BBM yang saya terima sekitar pukul 21.00 malam, Senin 9 Mei 2011. Saya baru saja tiba di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC untuk mengikuti acara dialog dan makan malam bersama beberapa pemimpin redaksi media dari Indonesia yang diselenggarakan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Patti Djalal. “Bapak” yang dimaksud dalam pesan singkat itu adalah Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, yang sejak awal Januari 2010 diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Indonesia.

Sudah sepekan itu saya berusaha mewawancarai mantan Pangdam Jaya tahun 1997-1998 ini, terkait kedatangan beberapa anggota DPR ke Washington DC, yang salah satu misinya adalah mempertanyakan kepada Departemen Kehakiman Amerika tentang “nasib” visa Sjafrie Sjamsoeddin. Ia memang pernah ditolak masuk ke Amerika pada bulan Oktober 2009, sewaktu akan menemani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti KTT G20 di Pittsburgh. Belum diketahui alasan penolakan tersebut. Tetapi banyak media ketika itu berspekulasi, penolakan itu terkait kasus pelanggaran HAM.



Wamenhan dan Menteri Pertanian Suswono di atas kapal feri dalam perjalanan ke Batam, menjawab pertanyaan dari pers.

Mengingat begitu banyak kontroversi yang mengelilingi tokoh ini, saya tentu tidak ingin melewatkan kesempatan wawancara ini. Tetapi butuh waktu sekitar 30-40 menit untuk kembali ke kantor yang terletak di Independence Avenue. *“Bisa ditunda sekitar 40 menit?”*, balas saya melalui BBM. *“Gue coba, tapi cepat kasih kabar begitu tiba di kantor”*, balas Ade Siboro – teman lama yang dulu sempat malang melintang meliput berbagai peristiwa di Jakarta hingga ke pelosok-pelosok Aceh dan beberapa tempat lain. Ade dikenal memiliki hubungan baik dengan beberapa petinggi TNI. Ade adalah satu di antara beberapa teman yang saya kontak agar bisa mewawancarai Jendral bintang tiga ini.



Kereta api cepat dari Dupont Circle menuju Federal Central South West ini rasanya lama betul. Dengan berlari-lari kecil saya menuju kantor dan langsung naik ke studio rekaman di lantai dua, menyiapkan Dalet untuk merekam wawancara jarak jauh ini melalui telepon. Suara khas Sjafrie terdengar di ujung telepon yang saya hubungi.

“Bapak janji akan menjawab pertanyaan saya dengan terbuka khan?”, ujar saya membuka pembicaraan. *“Tentu!”*, jawab Sjafrie pendek.

Saya memang sudah menegaskan pada Ade Siboro dan beberapa staf Sjafrie bahwa saya tidak akan mengajukan pertanyaan basa-basi. Setelah bertahun-tahun tidak bertatap muka secara langsung, saya harap Sjafrie Sjamsoeddin

masih mengenali gaya wawancara saya yang blak-blakan. Selanjutnya mengalir wawancara yang berlangsung sekitar 30 menit itu. Sjafrie Sjamsoeddin – Jendral ganteng yang kontroversial itu ternyata masih seperti dulu. Lugas tetapi sangat hati-hati menjawab pertanyaan demi pertanyaan.

“Pertama, kita tidak boleh bekerja berdasarkan ‘image’ atau ‘dugaan’ semata. Kita harus bekerja berdasarkan fakta”. Demikian jawaban pertama Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi kedatangan dan pertanyaan sejumlah anggota Komisi I DPR kepada Departemen Kehakiman Amerika tentang “nasib”nya dan sejumlah jendral lain yang hingga kini masih tidak diperkenankan masuk ke Amerika.

Selanjutnya mengalir wawancara mulai dari soal dugaan keterlibatannya dalam insiden di Santa Cruz Dilli tanggal 12 Desember 1991 yang menewaskan sekitar 250 warga pro-kemerdekaan hingga insiden penembakan di Trisakti dan kerusuhan bernuansa SARA tahun 1998. Sebagaimana diketahui ketika insiden Santa Cruz terjadi, Sjafrie Sjamsoeddin bertugas sebagai Satuan Tugas Inteljen SGI Komando Pasukan Khusus SGI-KOPASSUS. Sementara ketika insiden penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan terjadi, posisi Sjafrie juga sangat strategis yaitu Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Mantap Jaya III dan sekaligus Panglima Daerah Militer (Pangdam) V Jaya. Mustahil jika Sjafrie Sjamsoeddin tidak mengetahui apa-apa yang terjadi di balik kedua peristiwa besar itu. Belum lagi jika bicara soal peristiwa penculikan para aktivis mahasiswa antara tahun 1997 – 1998.

Ketika peristiwa Santa Cruz terjadi, saya belum lagi jadi wartawan. Malah baru jadi mahasiswa junior di Universitas

Indonesia. Tetapi ketika insiden penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan tahun 1998, saya meliput langsung di lapangan.

Tanggal 12 Mei 1998, saya yang ketika itu bekerja di SCTV—bersama seorang juru kamera—sudah memantau situasi di sekitar Citraland dan Universitas Trisakti—Grogol karena menurut informasi mahasiswa Trisakti akan kembali berdemonstrasi menuju DPR-MPR. Demonstrasi ini awalnya berjalan lancar. Ratusan mahasiswa Trisakti mulai keluar kampus sekitar jam satu siang. Melewati Universitas Tarumanegara masih aman. Tetapi belum lagi melewati kantor Walikota Jakarta Barat, demonstrasi itu sudah dihalangi barikade aparat hingga beberapa lapis. Di tempat itu sepertinya terjadi negosiasi antara beberapa wakil mahasiswa dengan pimpinan aparat. Saya yang semula berada di depan Citraland, terpancing naik ke jembatan penyeberangan yang menghubungkan Citraland dan Trisakti. Dari sana kami mengambil beberapa gambar *mall* dan kampus dari arah *mall*. Saya juga mewawancarai beberapa orang, menanyakan pandangan mereka tentang aksi demonstrasi mahasiswa dan harapan mereka pada pemerintah mengingat kondisi perekonomian yang sedang memburuk. Sempat turun hujan sebentar yang membuat kami berteduh di belakang *mall*.

Singkat cerita, sudah hampir sore dan kami sedang siap-siap pulang, ketika tiba-tiba dari arah kantor walikota terdengar tembakan. Kami bergegas ke arah depan kampus Trisakti tapi tidak bisa tembus karena masa begitu banyak di depan Citraland. Beberapa aparat berpakaian serba hitam dan bersenjata tampak berlari menyeberang ke arah

kampus Trisakti. Ada pula yang bersiap di jembatan layang antara kampus Trisakti dan Citraland—bukan jembatan penyeberangan. Semuanya membawa senjata, tapi kami tidak bisa memastikan apakah senjata itu berpeluru tajam atau peluru karet karena suasana begitu kacau. Suara tembakan dan lemparan gas air mata bercampur jerit kemarahan mahasiswa dan massa memecakkan langit Jakarta.

Kami menyebrang hingga ke kolong jembatan layang antara kampus Trisakti dan Citraland, dan melihat mahasiswa berlarian masuk ke dalam kampus. Sementara di luar tampak polisi bermotor yang mengenakan seragam URC (Unit Reaksi Cepat) hilir mudik di depan kampus. Mahasiswa pun terpecah. Ada yang masih sempat masuk ke dalam kampus, ada pula yang berlarian naik ke jembatan penyeberangan. Situasi sempat mereda dan ketika itu kami diperintahkan kantor untuk segera kembali, karena hasil liputan ditunggu untuk siaran sore atau “*breaking news*”. Kami pun kembali. Berita yang kami buat ditayangkan beberapa kali pada slot “*breaking news*”.

Tak puas mengikuti lanjutan kasus penembakan itu lewat teman-teman, sekitar jam 8 malam saya menawarkan diri membantu liputan di RS Sumber Waras di mana beberapa mahasiswa yang luka-luka dirawat. Setibanya di rumah sakit saya bertemu sesama wartawan SCTV lainnya—Kartini Seno dan juru kamera Dwie Guntoro. Kami menunggu di luar ruang UGD, mengambil gambar keluarga dan mahasiswa yang datang menjenguk rekan mereka yang menjadi korban. Tampak Ketua Crisis Centre Universitas Trisakti Adi Andojo ikut menemui para korban dan keluarganya.

Ketika Kartini Seno menunggu di depan ruang UGD, menjelang jam 10 malam saya dan Dwie Guntoro berjalan menuju ke kamar mayat. Kami mencoba mengambil gambar situasi di sana. Ketika itu tampak Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Hendarji masuk ke kamar mayat. Menurut kabar, ia ingin memeriksa jenazah mahasiswa yang tewas. Tak banyak yang mengenali Hendarji, tapi ketika kami dan beberapa wartawan lain mewawancarainya, beberapa mahasiswa yang berjaga mendadak marah. Ia dikejar hingga ke parkir. Saya dan Dwie Guntoro mendorongnya masuk ke dalam mobil sambil menenangkan mahasiswa. Thanks to “*anton-bauer*”—jenis batere kamera tahun 90-an yang ukurannya sangat besar sehingga melindungi kepala Hendarji, yang berlingung di balik kamera ketika dilempari batu oleh mahasiswa.

Malamnya kami sempat kembali ke kampus Trisakti. Disana kami bertemu Marzuki Darusman dan Albert Hasibuan—anggota Komnas HAM. Bercak darah masih ada di beberapa lokasi di dalam kampus. Termasuk di anak tangga salah satu gedung, tempat duduknya Elang Mulia Lesmana—salah satu mahasiswa yang tertembak. Beberapa mahasiswa yang kami wawancarai malam itu tidak habis pikir bagaimana Elang yang tidak ikut berdemonstrasi dan sedang duduk-duduk di anak tangga paling atas, bisa tertembak. Juga mengapa aparat bersikeras bahwa peluru yang digunakan hanya peluru karet? Misteri yang hingga 15 tahun kemudian tak bisa dipecahkan.

Menjelang subuh datang, saya melihat Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin datang ke kampus Trisakti. Ia masuk ke ruang auditorium dan melihat

lokasi tertembaknya Elang Mulia Lesmana di anak tangga paling atas ruang itu. Saat kami dekati untuk wawancara, Sjafrie meletakkan satu jari telunjuk ke bibirnya. Tanda ia lebih memilih untuk diam. Saat ia keluar auditorium, matahari mulai keluar dari peraduannya. Mahasiswa mulai membludak di depan Trisakti. Mahasiswa yang mengenali Sjafrie langsung berteriak-teriak memakinya. “*Lihat Jenderal, darah di mana-mana!!*”. Lainnya memekik penuh amarah. “*Siapa pelakunya, Jenderal? Siapa?*”. Ajudan Sjafrie mendorongnya ke mobil yang dikawal ketat dan langsung meluncur keluar Trisakti.

Keesokkannya kerusuhan pun pecah di mana-mana. Ada yang mengatasnamakan penembakan mahasiswa Trisakti, ada yang memang murni kriminalitas, ada pula yang (mungkin) memanfaatkan situasi demi kepentingan politik. Satu lagi misteri yang masih tak terpecahkan.

Yang pasti semua wartawan kala itu mahfum, ketika Jakarta “terbakar”, Panglima TNI Jendral Wiranto memerintahkan Pangdam Jaya Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengirim pasukan mengontrol aksi kerusuhan yang kian luas. Dan Sjafrie Sjamsoeddin benar-benar melakukan hal itu. Pasukannya tampak di jalan-jalan. Sjafrie sendiri pernah beberapa kali tampak mengontrol situasi dan mengomandoi pasukannya dengan mengendarai panser buatan Prancis. Tetapi tidak jelas mengapa akhirnya Wiranto—sebagaimana wawancara di beberapa media kala itu—tetap meminta bantuan Pangdam Diponegoro untuk mengirim pasukan tambahan ke Jakarta. Jika pasukan Sjafrie dianggap kredibel, mengapa perlu pasukan tambahan itu? Jika benar Wiranto tidak berselisih paham dengan Letjen (Purn) Prabowo

Subianto—seperti yang berulang kali diucapkan keduanya di depan publik—mengapa Wiranto tidak mengaktifkan pasukan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang dikomandoi Prabowo?

Saat didesak oleh pertanyaan seputar hal ini, Sjafrie Sjamsoeddin memberi jawaban yang menantang. *“... secara pribadi saya sudah tidak ada lagi keinginan untuk masuk dalam persoalan itu karena Pemerintah Indonesia sudah memutuskannya. Presiden, pada 13 September 1999, telah memberi penjelasan resmi kepada Komnas HAM terkait peristiwa 1998 yang rumit dan segala isunya. Sementara yang terkait insiden Timor Timur juga sudah diklarifikasi Komnas HAM. Jadi saya kira semua sudah ada jawabannya dan kalau hal ini diulang-ulang terus, siapapun juga menilai tidak pas lagi. Karena kita sudah menjelaskan pada institusi-institusi yang kompeten”*.

Tetapi jika kemudian pemerintah Amerika pada tahun 2009 masih menolak Sjafrie Sjamsoeddin untuk masuk, tentu ada pertimbangan lain yang mendasarinya. Apakah hal itu karena tekanan LSM dalam dan luar Amerika? Sjafrie kembali ke point awal. *“Itulah tantangan pihak-pihak yang berkompeten, apakah mau mendengar tekanan yang tidak terbukti atau berbicara clear dan faktual”*.

Sjafrie Sjamsoeddin bisa jadi tokoh kontroversial. Dalam artian, tokoh yang dinilai banyak tahu soal “perselingkuhan” di dalam tubuh militer Indonesia pada masa-masa genting itu. Dan, jika Sjafrie Sjamsoeddin memang adalah sosok yang dikenal wartawan selama ini, yang selalu bicara dan bekerja berdasarkan fakta, memang sudah saatnya Sjafrie bicara.



Kebiasaan Wamenhan adalah melayani semua pertanyaan dari seluruh wartawan hingga mereka puas.

Mantan Presiden B.J. Habibie sudah bicara lewat bukunya *Detik-Detik Yang Menentukan*. Prabowo Subianto, baik lewat buku maupun lewat sahabatnya, Fadli Zon, juga sudah sering bicara. Demikian pula Wiranto. Kini saatnya Sjafrie. Inilah saat mengungkap fakta yang terjadi agar tidak ada lagi salah duga seperti yang menyelubungi tokoh ini selama 15 tahun terakhir.

Biarkan fakta bicara Pak Sjafrie!

Washington, Oktober 2013

*Penulis, mantan reporter SCTV kini bekerja di VOA
(Voice of America)

Sjafrie, Pribadi yang Susah Ditebak

Fajar W. Hermawan*

Sebenarnya interaksi saya cukup singkat. Tepatnya tahun 2002 hingga 2003. Sjafrie Sjamsoeddin masih berpangkat Mayor Jenderal (pangkat bawaan yang disandanginya sejak ia menjabat Pangdam Jaya, 1997). Kala itu, usai menjabat Pangdam Jaya, ia ditempatkan di Markas Besar TNI, Cilangkap.

Kebetulan, pada 2002, tempat saya bekerja (*Koran Tempo*) menempatkan saya di pos Markas Besar TNI, Kantor Kementerian Polkam, dan Kementerian Pertahanan. Tiga lembaga itu sering kami sambangi karena saat itu pemerintah tengah gencar menyelesaikan konflik antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tiga lembaga itu cukup sibuk dan menjadi sumber berita.

Interaksi saya dan teman-teman media lain semakin intens manakala Mabes TNI, menunjuk Jenderal bintang dua—sekarang bintang di pundaknya sudah bertambah satu—yang banyak dikagumi ibu-ibu ini menjadi Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI pada 2002.

Ada yang cukup mengesankan saat saya melakukan liputan di pos Polkam, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI itu. Saat itu, saya dan teman dari harian *Republika* diomeli Sjafrie

dan rombongan. Saat itu Kementerian Polkam, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI melakukan kunjungan ke Ambon dan Ternate. Mereka mengajak sejumlah media. Dalam rombongan ada Menteri Polhukam yang dijabat Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan sejumlah pejabat lingkungan TNI lainnya.

Setelah bermalam di Ambon, rombongan terbang ke Ternate. Malam harinya, staf di lingkungan TNI mengajak kami jalan-jalan ke Pantai Ternate dan Kota Ternatenya. Kebetulan di sana pas musim durian. Kami pun diajak makan durian di tepi pantai sambil ngobrol ngalor-ngidul. Selesai memecah entah berapa durian yang kami habiskan, kami pun pulang ke hotel. Jam dinding saat itu sudah menunjuk ke angka 00.00 WIT. Ada yang langsung masuk kamar, ada yang masih meneruskan obrolan. Saya dan teman *Republika* termasuk yang tak langsung masuk kamar. Kami masih meneruskan obrolan sambil menikmati malam hening Kota Ternate. “Eh sudah jam 01.00. Besok jam 05.00 kita harus sudah berangkat,” kata seorang staf mengingatkan kami.

Kenyamanan Kota Ternate memang membuat kami lupa. Tapi begitu diingatkan itu, akhirnya kami langsung masuk kamar. Karena perjalanan seharian kami pun pulas tertidur. Alarm dari telepon genggam yang kami putar di jam 04.00 berdering tak kami hiraukan. Tiba-tiba pukul lima kurang pintu kamar kami digedor-gedor. Entah itu gedoran yang keberapa. Kami baru terbangun begitu suara gedoran diiringi suara teriakan. “Hai *Tempo*, *Republika*...kita mau berangkat. Bangun.” Keras sekali. Kami pun terbangun dan langsung membuka pintu.

Dengan tergopoh-gopoh kami hanya cuci muka dan kumur serta ganti pakaian yang lusuh. Di bawah, bus rombongan Mayjen Sjafrie sudah siap. Mereka sudah duduk manis dengan pakaian rapih. Mereka memandangi kami. “Gawat. Bos bisa marah ini,” kata salah satu dari mereka. Kami yang tak sempat menyisir rambut pun hanya terdiam culun. “*Tempo* dan *Republika* ini yang bikin telat,” kata Sjafrie yang duduk di kursi depan. “Siap,” begitu kami jawab. Untung, acara pertemuan antara rombongan Menko Polkam belum dimulai. Sehingga kami tak kena damprat lagi.

Itu yang pertama. Yang kedua, saat saya ditugaskan meliput darurat militer di Aceh, Juni 2003. Sekitar sebulan saya bertugas di Aceh kala itu. Berita-berita tentang Aceh kala itu memang sangat “seksi”. Karena saat itu TNI sedang bertekad untuk meredam gejolak Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

TNI melakukan sejumlah batasan-batasan peliputan. Di antaranya jika mau meliput di daerah yang rawan harus ikut mereka, dan sebagainya. Namun setelah kira-kira tiga minggu bertugas di sana saya dan sejumlah teman dari media lain nekad untuk melakukan liputan sendiri. *Media Center* TNI yang setiap hari ada konferensi pers, hari itu kosong. Kebetulan hari itu kawan dari *Indosiar* mengajak liputan di luar Kota Aceh, tepatnya kami jalan ke arah daerah Pidie. Daerah ini dikenal sebagai salah satu basis GAM.

Di tengah perjalanan menuju Pidie, kami melihat ada gerombolan orang tak berseragam menenteng senjata. “Brimob lagi ada kontak kayaknya,” kata seorang kawan. Sopir yang membawa kami pun menghentikan laju

mobilnya. Kurang lebih 15 menit berhenti, kami melihat gerombolan itu hanya lalu lalang di jalan, kami pun memutuskan melanjutkan perjalanan. Begitu melewati mereka, laju kendaraan kami dihentikan. “Waduh ini anggota GAM,” kata kawan lainnya.

Mereka meminta kami turun dan menunjukkan identitas. Kami pucat. Mereka menanyakan tujuan kami.

”Jangan lanjutkan perjalanan karena di sana (salah satu dari mereka yang belakangan kami ketahui itu komandannya) sedang ada kontak.”

Mereka meminta kami masuk mobil dan mengikuti mereka masuk ke perkampungan.

“Jangan ada yang hidupkan hape,” komandan itu membentak kami. Dengan senjata mereka mengawal kami. Lalu mereka berhenti di sebuah gudang penggilingan padi yang ada di tengah sawah yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari Jalan Raya Pidie.

Mereka menginterogasi kami. Kami ditanya macam-macam. Sesekali mereka berteriak menantang TNI agar menyerang mereka sambil membunyikan senapannya. Setelah kurang lebih satu jam di daerah yang tak ada penduduknya itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari jauh. “Tiarap semua, tentara menyerang!” teriak anggota GAM itu. Kami, GAM yang tadinya menantang TNI dan wartawan, pun kocar-kacir.

Singkat kata, kami tersandera selama kurang lebih lima jam (10.00-15.00). Sampai kemudian kami diselamatkan pasukan dari Kodam Siliwangi untuk dibawa ke posko mereka yang tak jauh dari tempat kami disandera. Kami bermalam di markas Siliwangi ini.

Di posko pasukan Siliwangi, komandannya melakukan kontak di markas TNI di Aceh. Mereka mengabarkan soal peristiwa yang kami alami. Sampai kemudian kami pulang keesokan harinya. Teman-teman yang ada di Banda Aceh langsung menyanjai kami begitu kami tiba di sana.

Nah, rupanya peristiwa ini sampai ke Mayjen Sjafrie. Mungkin Sjafrie juga menerima laporan dari stafnya yang ada di Aceh. Ini saya ketahui saat saya dan sejumlah kawan lagi ngopi-ngopi di sebuah tempat—yang saya lupa namanya--di Kota Banda Aceh. Saat sedang ngobrol, kami melihat Sjafrie dan sejumlah stafnya juga datang ke tempat itu. Kami langsung menyapa.

Lalu dia balik bertanya, “Mana yang dari *Tempo*...?” Saya terkejut.

“Ini Fajar Pak,” kata kawan saya. Rombongan Sjafrie akhirnya bergabung dengan kami duduk di kursi melingkar sambil menyeruput kopi dan jajanan yang ada di situ. Obrolan malam itu berlangsung hangat.

Dia pun tanya tentang peristiwa penyanderaan itu. Mungkin dia sudah mendapat laporan tentang peristiwa itu. Saya pun cerita. Dia mendengarkan sambil geleng-geleng. “Kamu nekad. Lain kali jangan diulang dong,” katanya sambil tersenyum.

Dari dua peristiwa itu dan dari beberapa kali berinteraksi dengan Sjafrie, akhirnya, nama saya melekat di pikiran dia. Setiap kali bertemu, dia akan menegur dan menyebut nama. Namun saya mendapat kesan, Sjafrie itu orang yang

susah ditebak. Mengapa? Jika kita bertemu, bertatap muka langsung, dia jauh dari kesan angker. Sebaliknya, dia sangat hangat, akrab.

Namun mungkin saya terlalu *ge-er*, merasa sudah ia kenal, jadi sewaktu-waktu kalau telepon minta informasi atau sekedar konfirmasi berita akan gampang. Tapi rupanya tidak. Meski akrab dan kenal nama dan media, jangan harap—waktu itu—kita akan bisa menelepon dia sewaktu-waktu. Bahkan seingat saya, saya belum pernah berhasil meneleponnya meski sudah di SMS. Akhirnya, kalau berita itu harus mendapatkan konfirmasi, saya harus hanya puas mendapatkan dari stafnya. Dongkol saya....

*Penulis adalah mantan wartawan *Koran Tempo*

Antara Hidup dan Mati 325 Hari Dalam Tahanan GAM

Fery Santoro*

Saya dan reporter senior Sorry Ersu Siregar ditangkap pada bulan Juni 2003, ketika melaksanakan tugas jurnalistik di wilayah Aceh Timur. Kami ditangkap dan dijadikan tawanan oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dengan alasan-alasan yang tidak saya mengerti, selama berbulan-bulan kami dibawa dari satu lokasi tahanan ke lokasi yang lain, di hutan-hutan yang lebat dan di rawa-rawa terpencil di Aceh.

Saya masih ingat bagaimana kami tertangkap. Pada saat itu kami sedang melakukan perjalanan darat dari Lhoek Seumawe ke Langsa. Dalam perjalanan pulang ke Lhoek Seumawe tiba-tiba perasaan aku tidak enak. Takut akan terjadi sesuatu. Ternyata perasaan saya benar karena di tengah jalan mobil kami distop oleh 6 orang bersenjata lengkap. Saya terperanjat karena saat itu sedang tertidur dan tahu-tahu mobil dihentikan dan mereka masuk sambil menodongkan senjata ke arah leher saya. Betapa takutnya saya waktu itu dan hanya pasrah tidak berani untuk melawannya. Saya berpikir, dari pada mati konyol lebih baik pasrah.

Hanya dalam hitungan menit mereka langsung membawa kami ke suatu tempat yang jauh dari jalan raya. Bersama Bang Ersu kami dibawa ke suatu tempat di bukit yang ti-

dak ada penerangan, dan hanya bintang-bintang di atas yang bisa menerangi perbukitan itu. Malam itu kami tidur dengan hanya beralaskan tikar. Udara sangat dingin dan semakin malam, tentu saja semakin dingin. Kain sarung tak cukup menutupi sekujur tubuhku. Tarik ke atas, bawahnya kedinginan. Tarik ke bawah, bagian atasnya kedinginan. Jadilah atas dan bawah dingin.

*Achh...seandainya saya punya *sleeping bag* (kantong tidur), tidurku pasti nyenyak. Apa boleh buat harus diterima apapun yang dikasih. Menjelang pagi pertama kali saya mendapatkan sarapan selama ditahan minum teh hangat atau kopi sepotong roti. Lumayan untuk mengganjal perut saya tak peduli roti apa anggap saja roti isi keju atau nasi goreng spesial yang biasa disajikan di hotel berbintang lima. Lagi pula kalau tidak makan, bagaimana mau mendapatkan energi?*

Hari demi hari saya lalui. Pindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat yang lainnya..... Perjalanan demi perjalanan yang sangat melelahkan karena jalur yang dilewati adalah jalur yang tidak pernah dilalui manusia. Bisa dibayangkan bagaimana harus melewati rawa-rawa yang dalamnya hampir setengah meter karena ini jalan satu-satunya harus dilalui agar selamat. Kontak senjatapun tak bisa dihitung lagi, suara letusan meriam sering kali saya alami dan terdengar sangat dekat sekali... dan allhamdulillah saya dan Bang Ersa bisa menghindari dari kontak tembak itu karena kami dikawal oleh 5 anggota GAM.

Menjadi seorang tawanan bukanlah pengalaman hidup yang menyenangkan lebih-lebih menjadi tawanan dalam situasi perang atau konflik. Tetapi terkadang garis kehidupan

tidak bisa ditawar atau ditentukan oleh manusia dan inilah yang di alami oleh saya, Fery Santoro dan rekan saya, almarhum Sorry Elsa Siregar. Ia dan saya adalah jurnalis *RCTI* yang ditangkap GAM.

Saya tak bisa menyembunyikan rasa takut dan was-was, setelah ingat bahwa orang-orang GAM sangat benci terhadap orang asal Jawa, meskipun diskripsi itu belum tentu benar. Perasaan takut itu terus menghantui saya. Menghantui saya sampai menjelang pagi. Saya, walaupun adalah orang Jawa, tidak terima kalau dikatakan “menjajah Aceh”. Di mata saya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia semua orang Indonesia itu sama. Tak ada yang dijajah dan tidak ada pula yang menjajah. Bahwa rezim penguasa acapkali bertindak tidak adil dan diskriminatif mungkin saja, apa-



Almarhum Elsa Siregar (kanan) dan juru kamera RCTI Fery Santoro (sebelah kanannya) ketika disandera GAM di Aceh.

lagi wilayah Aceh oleh Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Daerah Istimewa, salah satu dasar pertimbangannya karena jasa-jasa para tokoh masyarakat Aceh dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI.

Sudah hampir setengah tahun kami dalam tahanan GAM. Pada tgl 29 Desember 2003 Ersas Siregar tertembak dan meninggal karena saat itu terjadi kontak tembak antara TNI dan GAM tepat pukul 12 siang saat itu kami sedang bersantai di gubug yang dikelilingi pohon nipah dan rawarawa. Tanpa sadar tiba-tiba terdengar tembakan bertubi-tubi dalam jarak 50 meter terdengar bunyi senjata otomatis SS-1 yang hanya dimiliki TNI.

Saya dan Bang Ersas menyelamatkan diri entah tiba-tiba saat saya mau melompat terdengar senjata lagi hampir terkena kaki saya. Bagaimana nasib Bang Ersas? Saya merasa was-was dalam hati sambil berdoa, semoga ia selamat. Namun nasib berkata lain Ersas Siregar ternyata tertembak saya pun sangat sedih dan terpukul sekali. Bagaimana nasib saya selanjutnya tanpa ada Bang Ersas? Pikiran itu selalu saja jadi beban dan lebih berat lagi karena menjadi tawanan seorang diri.

Tapi *alhamdulillah*, saya mencoba untuk bisa tetap bertahan dan harus tetap semangat walau hati dan pikiran sangat stres.

Pada tanggal 16 Mei 2004 akhirnya saya dibebaskan dengan bantuan dari ICRC (Palang Merah Internasional), PMI, AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) dan teman-teman pers yang lainnya serta juga pemerintah, dalam hal ini berperan penting adalah Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

Tak terasa 325 hari lamanya saya ditahan. Memang resiko sangat besar sebagai seorang jurnalis apabila ditugaskan ditempat perang atau konflik. Antara hidup dan mati karena bagaimana untuk bisa bertahan dan bertahan hidup dalam tekanan dan tekanan.

Sosok yang sangat dekat dengan rakyat dan sangat santun tegas dan cepat dalam bertindak adalah gambaran seorang jenderal berbintang tiga: Sjafrie Sjamsoeddin yang sekarang menjadi Wakil Menteri di Kementerian Pertahanan. Untuk dibaca dan bisa menjadi tauladan untuk generasi penerus, terutama kita kita yang muda-muda, karena buku ini ingin menyampaikan pesan tak tertulis dan benar-benar sangat *human*.

*Penulis adalah camera person *RCTI* yang sempat disandera oleh GAM di Aceh selama 325 hari.



Tidak ada batas antara wartawan dan Wamenhan.

“Selamat (Nanti) Berkarya di Ladang yang Lain..!”

F.X. Lilik Setyowibowo*

Bahagia sekali rasanya bisa berbagi cerita disini. Saya mengenal Pak Sjafrie Sjamsoeddin (walau saya sedikit ragu apakah Pak Sjafrie mengingat saya, *wakakakakak*) saat mulai menjadi wartawan di radio Sonora 92 FM Jakarta tahun 2002 lalu.

Ingat betul saya ketika dikirim ke Aceh pada waktu tsunami tahun 2004. Mabes TNI kala itu mengajak 4 wartawan berangkat ke Aceh tanggal 28 Desember 2004 atau 2 hari pasca tsunami Aceh. Saat itu yang berangkat adalah saya, Teguh Tri Sartono (*Radio Elshinta*), Marlon (*RRI*) dan mas Suryopratomo (mas Tommy yang kala itu Pemred *Kompas*). Begitu sampai di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Jendral kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Oktober 1952 ini mengajak kami tidur di dalam ruangan yang sama dengan beliau dan beberapa perwira tinggi lainnya. Namun, saya, Teguh serta Marlon menolaknya dan memilih tidur bersama pasukan TNI yang selesai evakuasi korban di hangar pangkalan udara tersebut.

Di sini saya melihat bahwa Pak Sjafrie tidak ingin menjaga jarak dengan wartawan dan saya menilai Pak Sjafrie tidak ingin membeda-bedakan masyarakat sipil seperti kami dengan beliau yang perwira TNI.

Seperti kita ketahui pasca tsunami, jaringan telekomunikasi lumpuh di Aceh. Untung saya tetap bisa berkomunikasi atau memberi laporan pandangan mata ke kantor. Mengetahui hal ini Pak Ahmad Yani Basuki yang kala itu menjabat Kabid Penum TNI dan berpangkat Letkol menanyakan, apakah alat komunikasi saya yang namanya telepon satelit Immarsat dapat digunakan untuk laporan ke Mabes TNI ke Jakarta? Akhirnya, saya menawarkan diri ke Pak Sjafrie agar menggunakan alat kami untuk berkomunikasi dengan Mabes. Dengan bangga saya mengajari Pak Sjafrie dan Panglima TNI Jenderal Endriarto Sutarto bagaimana mengoperasikan alat tersebut.

Usai ‘laporan ke Jakarta, Pak Sjafrie mengucapkan terima kasih dengan menepuk punggung saya; “Terima kasih ya de...” *wuih*, benar-benar senang dan bangga saya. Selain ditepuk seorang yang menyandang bintang dua kala itu, ternyata kami (Radio Sonora) dapat sedikit berkontribusi bagi Negara dan Bangsa.

Satu hal lagi yang masih saya ingat hingga saat ini adalah saat saya bersama dengan rekan-rekan berbincang santai dengan Pak Sjafrie. Kala itu Pak Sjafrie mengatakan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI memang kalah canggih dibanding peralatan perang beberapa negara lainnya. Namun, mentalitas dan kemampuan tempur pasukan TNI tidak dapat diragukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari latihan-latihan gabungan yang dilakukan TNI dengan negara-negara lainnya.

Dalam perbincangan tersebut, ia juga menyinggung teknologi terkini sangat berperan dalam peperangan, termasuk teknologi satelit. Pangdam Jaya tahun 1997 ini

"Selamat (Nanti) berkarya di ladang yang lain..!"



Keterangan pers bisa dilakukan di mana saja, kapan saja.

mengatakan Amerika Serikat mungkin sudah mengetahui letak-letak strategis dan penempatan pasukan beserta peralatan tempurnya. Namun, Koorsahli Panglima TNI tahun 2001 ini menegaskan, walaupun semua posisi strategis kemungkinan sudah diketahui bangsa lain, namun SOP atau pergerakan dan strategi pasukan tidak akan mudah diketahui. Pemikiran tersebut menggambarkan sifat-sifat seorang prajurit lapangan dan bukan prajurit apalagi jenderal di belakang meja.

Maka dari itu, ketika ramai isu penyadapan yang dilakukan Australia terhadap presiden dan beberapa orang penting Indonesia lainnya, saya sudah tidak heran dan tidak heboh. Karena saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Sjafrie tersebut.

Di usia Pak Sjafrie yang menginjak 61 tahun ini, tentu bukanlah usia yg dapat dikatakan muda. Namun, semangat muda, jiwa-korsa dan mentalitas prajurit sejati dari Pak Sjafrie tentu harus ditularkan kepada generasi muda. Saya yakin memasuki masa pensiun ini, Pak Sjafrie telah memiliki rencana-rencana selanjutnya. Dan, saya yakin Pak Sjafrie ‘tidak akan bisa tenang’ sebab masih akan banyak junior-junior yang ingin menimba ilmu dari “Bapak”.

Saya mengucapkan selamat berkarya di ladang yang lain Pak.... Salam hangat dari Gedung Perintis lantai 5, Krukut Jakarta Barat.

*Penulis adalah wartawan di *Radio Sonora 92 FM Jakarta*

Jenderal yang Setia Kepada Tugas

Hanibal W. H. Wijayanta*

Sebagai wartawan yang biasa meliput masalah pertahanan dan keamanan sejak awal karier di dunia Jurnalistik pada tahun 1994, saya mulai sering melihat sosok Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin yang tinggi, ramping, dan liat, ketika masih berpangkat Kolonel. Saat itu Kolonel Sjafrie adalah Komandan Grup A Paspampres, sekaligus pengawal pribadi Presiden Soeharto, dan kemudian menjadi Komandan Korem 061/Suryakencana di Bogor.

Saya mulai sering ngobrol dengan Bang Sjafrie—begitu kami biasa memanggilnya dalam suasana santai—saat lelaki kelahiran 30 Oktober 1952 itu bertugas di Kodam Jaya, mulai dari Komandan Garnisun, lalu Kepala Staf Kodam Jaya, dan kemudian Panglima Kodam Jaya. Agak berbeda dengan para perwira militer pada jaman itu, Sjafrie dikenal sebagai seorang perwira militer yang tidak terlalu pelit bicara, meski tetap santun dan berwibawa.

Dalam usia 44 tahun bintang di bahu Sjafrie bertambah lagi—menjadi dua—ketika diangkat sebagai Panglima Kodam Jaya. Inilah masa emas Sjafrie. Sebagai Panglima yang masih muda, gagah, tinggi, dan ganteng, ia digandrungi dan diidolakan para remaja putri hingga ibu-ibu.

Di mana saja dia muncul, warga Jakarta—terutama kaum hawa—selalu mengelu-elukan sang Panglima. Permintaan untuk foto bersama selalu diiyakannya, dengan senyumnya yang khas.

Pada saat Sjafrie menjabat sebagai Pangdam Jaya, terjadilah kerusuhan Mei 1998. Berbagai kabar berhembus bahwa dialah dalang di balik kerusuhan Mei. Beberapa kawan saya di *Tempo* bahkan mendapat kesaksian dari prajurit yang konon diperintahkan untuk mengacau, namun kondisinya sudah dalam perawatan dokter jiwa. Beberapa kawan yang lain mencoba meyakinkan kepada saya bahwa rencana kerusuhan dirancang bersama kawan dekatnya, Letnan Jenderal Prabowo Subianto dalam Pertemuan Makostrad 14 Mei 1998 malam.

Padahal, pada 14 Mei 1998 malam itu saya juga datang ke Makostrad dan tidak melihat persiapan atau rencana membuat kerusuhan apapun. Karena itu, untuk memastikan keterlibatannya dalam kerusuhan Mei 1998, saya pernah menanyakan kepadanya. Saat itu ia hanya menjawab pendek, “Itu semua fitnah, Han...,” ujarnya dengan pandangan mata menerawang sedih. Baru kali itu saya melihat sang Jenderal tampak sedih dan galau. Dia tampaknya merasa sedih, karena oleh Keluarga Cendana ia dituduh membiarkan para mahasiswa menduduki DPR, sementara oleh sebagian masyarakat ia dianggap sebagai dalang kerusuhan Mei.

Soal peristiwa kerusuhan Mei 1998, saya sempat menulis untuk majalah *Forum Keadilan* sebagai berikut:

Mengapa Kalian Pergi, Jenderal?

ABRI dinilai tidak cukup bertindak untuk mencegah kerusuhan. Padahal aparat intelejen telah memprediksikannya. Tapi mengapa tanggal 14 Mei mereka tetap pergi ke Malang?

Jelaga misteri tampaknya begitu erat menggumpal di sekitar fakta kerusuhan 13-15 Mei lalu. Saking lengketnya, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pun gagal mengidentifikasi secara jelas, siapa saja yang harus bertanggungjawab dalam tragedi ini. Mereka bahkan menciptakan kontroversi dengan memasukkan pertemuan di Makostrad tanggal 14 Mei 1998 sebagai sesuatu yang patut untuk dicermati.

Padahal sebenarnya TGPF sudah mulai memasuki wilayah sensitif yang selama ini sulit diungkap. Hal ini terlihat pada temuan data dan keterangan sejumlah pejabat ABRI yang diminta kesaksiannya. Sehingga, pada kesimpulan keempat disebutkan adanya keterlibatan banyak pihak, mulai dari preman lokal, organisasi politik dan massa hingga keterlibatan sejumlah anggota dan unsur dalam tubuh ABRI. ABRI juga dinilai tidak cukup bertindak untuk mencegah terjadinya kerusuhan, padahal memiliki tanggung jawab untuk itu.

Sebenarnya, saat itu di lingkungan Kodam Jaya masih digelar operasi Mantap tahap III. Operasi Mantap adalah nama sandi pengamanan pemilu 1997 hingga pemilu 1998. "Operasi ini dimulai dari Sidang Umum hingga 30 Juni 1998," kata Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam operasi ini, Pangdam menjadi Panglima Komando Operasi (Pangkoops), sementara

Kapolda Mayjen Pol Hamami Nata menjadi wakilnya. “Dalam eskalasi rendah, memang polri yang di depan, tapi dalam eskalasi yang tinggi, maka dia akan bermain dengan Koops Jaya,” ujar Hamami.

Saat itu, suasana Jakarta memang sudah cukup memanas. Demonstrasi mahasiswa merebak di mana-mana. Menurut temuan TGPF, sebenarnya aparat intelejen telah mencium bau eskalasi ancaman kerusuhan sejak hari Senin, 18 April 1998. Saat itu Kepala Badan Intelejen ABRI (BIA) Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim menyelenggarakan rapat koordinasi intelejen bersama pimpinan Kostrad, Danjen Kopassus dan Kapolda. Ka-BIA pun telah memperingatkan Pangdam Jaya. “Prediksi kita, kondisi itu akan memuncak pada tanggal 20 Mei,” ujar Zacky.

Tanggal 11 Mei, BIA membaca eskalasi demonstrasi dan gerakan massa makin meningkat dengan cepat, karena itu Kepala BIA memberikan peringatan dini kepada para aparat. “Cegah timbulnya martir,” ujarnya. Soalnya, dengan jatuhnya martir, situasi akan semakin memburuk dengan cepat. Perkiraananya, bisul kerusuhan baru akan pecah tanggal 20 Mei, bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Saat itu telah beredar pula ajakan untuk turun ke jalan pada tanggal tersebut.

Tapi dugaan Zacky meleset, karena tanggal 12 terjadilah insiden penembakan di universitas Trisakti yang menewaskan 4 orang mahasiswa. “Jatuhnya korban ini mempercepat situasi itu,” ujar Zacky. Ketika itu, Pangkoops segera memerintahkan kondisi siaga satu. Kekuatan pasukan Koops Jaya saat itu, menurut Sjafrie baru 61 Satuan Setingkat Kompi (SSK).

Saat ada penembakan mahasiswa di Trisakti, 12 Mei, Pangkostrad Letjen Prabowo tengah berada di Bogor. Ia mengaku tahu berita itu setelah ditelepon Sjafrie antara pukul 19.00-20.00. “Dari situ kita sudah memperkirakan bahwa situasi di Jakarta sudah diperkirakan akan meledak,” ujar Prabowo. Malam itu juga ia ke Makostrad dan memberi perintah kepada stafnya untuk siap-siap menerima pasukan karena ia sudah memperkirakan situasi Jakarta akan meledak.

Keesokan harinya, 13 Mei, situasi makin memburuk. Meskipun saat pemakaman korban penembakan situasi bisa dikendalikan, namun upaya pengamanan akhirnya jebol juga. Percikan kerusuhan dan penjarahan mulai berkobar di berbagai tempat. Padahal saat itu jumlah pasukan telah bertambah menjadi 112 SSK. “Atas perintah Pangkoops, saya segera menghubungi seluruh Kotama operasi untuk dapat membantu mengerahkan pasukan,” ujar Kasdam Jaya saat itu, Brigjen TNI Sudi Silalahi. Menurut sebuah sumber FORUM, hari itu beberapa kali Sjafrie mengontak Pangab untuk meminta briefing. “Namun sama sekali tak ada perintah apapun,” ujar sang sumber.

Kondisi aparat kepolisianlah yang paling sengsara sebab mereka menjadi sasaran kemarahan massa karena kejadian sehari sebelumnya. Tragisnya, di saat mereka mati-matian mempertahankan diri, aparat dari satuan lain justru terkesan membiarkan mereka diserang massa. Bahkan di Jalan Galur, satuan Brimob sempat hampir bentrok dengan satuan Marinir. “Sangat ironis sekali,” kata Hamami. Hal itu diakui Sjafrie. “Koordinasi ini memang tidak bagus sekali,” ujarnya.

Melihat situasi makin gawat, Pangkoops Jaya memutuskan untuk memindahkan posisi pos koordinasi ke

Makoskogor di Jalan Medeka Timur. “Di situ dari Kostrad, Kopassus, Marinir, semua memperkuat kita untuk mempercepat kita berbenah,” kata Sjafrie. Tapi hari itu juga Hamami melaporkan ketidaksanggupannya menghadapi situasi amuk massa kepada Kapolri saat itu, Jenderal Pol Dibyo Widodo. “Saya melaporkan bahwa situasi ini harus sudah diambil alih Pangab,” ujarnya.

Dari data yang dikumpulkan TGPF, ditemukan fakta bahwa di beberapa tempat, kerusuhan dipicu oleh datangnya sekelompok provokator dengan mobil dan tampak terlatih. Aksi mereka kemudian diikuti massa aktif maupun massa pasif yang semula hanya sekedar menonton kerusuhan. Namun, meski dalam kondisi moral yang turun, polisi masih mampu menangkap 2500 orang perusuh. Tapi situasi tak juga reda. Bahkan di Tangerang, Jakarta Barat dan Cengkareng pembakaran dan penjarahan makin gawat.

Sementara itu, semula tanggal 14 Mei direncanakan sebagai pelaksanaan upacara serah terima Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dari divisi II Kostrad di Malang, Jawa Timur. Saat itu Pangab Jenderal TNI Wiranto sudah setuju berangkat untuk menjadi inspektur upacara. Namun, melihat situasi makin memburuk, tanggal 13 Prabowo segera menghubungi Mabes ABRI. “Saya mengecek kembali ke Mabes ABRI dan menyarankan supaya upacara ditunda,” ujar Prabowo. Menurut sebuah sumber FORUM, konon Prabowo meminta penundaan sampai beberapa kali.

Tapi anehnya keputusan Mabes ABRI ini tak bisa ditunda, tetap dilaksanakan dan Pangab akan hadir. “Saya juga tanya, apa Pangkostrad hadir juga di Malang, apa tidak sebaiknya di Jakarta,” katanya. Tapi keputusan Mabes ABRI

tetap ke Malang. Bahkan KSAD Jenderal Subagyo HS pun turut berangkat. Padahal dalam keterangannya kepada TGPF, Kepala BIA menegaskan bahwa karena peristiwa penembakan tanggal 12, seharusnya semua pasukan harus siaga satu. “Panglima ABRI juga sama, tidur di kantor begitu korban jatuh, itu *automatically*,” kata Mayjen Zacky. Apalagi penyerahan pasukan itu pun sebenarnya cukup dilakukan oleh panglima Divisi.

Karena itu, pagi hari tanggal 14, rombongan Pangab, KSAD, Pangkostrad dan perwira-perwira staf dalam jumlah yang cukup banyak, bersiap dari lapangan terbang Halim Perdanakusumah untuk kemudian berangkat ke Malang. Namun, upacara penyerahan pasukan itu pun dipercepat. “Kami dengar ada telepon ke Pangab di ruang VIP, saya dengar itu Menkopolkam atau apa, menelepon, pokoknya situasi memburuk di Jakarta,” kata Prabowo.

Di Jakarta kondisi memang sudah cukup gawat. Pangkoops kemudian memperkuat pasukan sehingga tergelar 142 SSK. Kendaraan tempur pun bertambah, dari hanya 7 pada tanggal 12, menjadi 25 pada tanggal 13, lalu hari itu menjadi 154 kendaraan. Namun hari itu pembakaran sudah terjadi di mana-mana, massa pun tumpah-ruah ke jalanan. “Rasio pasukan tidak cukup,” ujar gubernur DKI Sutiyoso.

Pukul 12.30 rombongan dari Malang kembali ke Jakarta. Sesampai di Halim, Prabowo langsung ke Makostrad. Ia bertemu Sjafrie di Makoskogor. “Gimana situasi? tanyanya. “Sudah, kamu ikut saya saja,” sahut Sjafrie. Prabowo kemudian mengikuti Sjafrie naik Helikopter Skogar lalu terbang keliling Jakarta. “Di situ kita lihat banyak sekali gedung-gedung yang dibakar mas-

sa,” ujar Prabowo. Menurut sumber FORUM, saat itu pula Pangab Wiranto pun terbang dengan helikopter.

Setelah mendarat, Prabowo segera berangkat ke gedung ICMI di jalan Kebon Sirih. Beberapa hari sebelumnya ia sudah berjanji akan ketemu dengan Ketua Umum ICMI Ahmad Tirtosudiro. “Saya berharap dia bisa kasih statement untuk menenangkan massa,” ujar Prabowo. Menurut sumber FORUM, Prabowo juga mengontak beberapa ulama untuk janji ketemu. Tapi sayang Ahmad Tirto tidak ada.

Dari situ ia langsung ke Makoskogor untuk memberikan beberapa saran kepada Mayjen Sjafrie. “Frie, di Thamrin nggak ada pasukan,” ujarnya. Ia pun menyarankan agar semua panser yang mangkal di depan Depkankam disuruh patroli sepanjang Sudirman-Thamrin. “Saya ikut satu panser sama pak Sjafrie dan Dankopassus,” ujarnya.

Dari patroli dengan panser, sore hari mereka kembali ke Makostrad, soalnya Prabowo ada janji bertemu dengan Buyung, Setiawan Djodi dan kawan-kawan. Setelah pertemuan itu usai, Prabowo mengikuti briefing di Makostrad sampai dini hari. “Itulah briefing pertama yang digelar Pangab Wiranto sejak kerusuhan berlangsung,” ujar sebuah sumber FORUM. Padahal, sebagian Jakarta sudah habis terbakar.

Hanibal WY Wijayanta,

Rombongan yang Mana Lagi?

Jalan Merdeka Timur, 14 Mei, selepas maghrib. Hanya satu dua mobil melintasi jalan di jantung ibu kota itu. Suasana lengang namun tegang. Maklum, api kerusuhan sejak sehari

sebelumnya telah membakar sebagian wilayah Jakarta. Beberapa orang prajurit menyandang senapan M-16 tampak berseliweran antara ujung stasiun Gambir hingga ujung jalan menuju masjid Istiqlal.

Ketegangan pun membayangi Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad). Belasan panzer tampak memenuhi halaman—yang tak seperti biasanya—dalam keadaan gelap gulita itu. Di Markas Komando Staf Komandan Garnisun (Makoskogar) Ibukota keadaan pun serupa. Hening.

Sebuah panzer tiba-tiba masuk ke halaman Makoskogar. Beberapa orang penumpang turun dan melangkah menuju Kostrad lewat jalan tembus penghubung Makoskogar dengan Makostrad. Beberapa waktu sebelumnya, dari pintu belakang Makostrad masuk pula beberapa mobil tipe station wagon dan sedan. Malam itu Makostrad memang kedatangan beberapa orang tamu.

Salah satu tamu malam itu adalah pengusaha Setiawan Djody. Sekembalinya dari Ujungpandang, Djody dihubungi penyair WS Rendra. Ia diminta untuk mengatur pertemuan dengan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto. “Saya diminta Buyung Nasution,” ujar Rendra. Saat itu Djody langsung mengontak pengusaha Fahmi Idris. “Dari dia, saya dapat kabar bahwa habis maghrib bisa bertemu Prabowo.” kata Djody.

Bersama Rendra, Djody berangkat ke Makostrad petang itu, sampai di sana pukul 18.00 WIB. Waktu itu Prabowo belum tiba. Ia bersama Pangdam dan beberapa perwira tinggi sedang keliling kota dengan beberapa panzer. Namun Buyung sudah datang bersama Ketua YLBHI

Bambang Widjojanto, pengacara Hotma Sitompul dan Ruhut Sitompul serta mantan ketua Walhi Zulkarnain.

Ada pula pengusaha Hashim Djojohadikusumo, anggota DPP Golkar Din Samsuddin, Fahmi Idris, pengusaha Maher Algadrie dan Farid Prawiranegara, Direktur Institut for Policy Studies (IPS) Fadli Zon, ketua MUI H Amidhan dan Mahyudin Nawawi, Ketua Pemuda Anzor Iqbal Assegaf dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Hajrianto Tohari. Adapula Staf Ahli Pangab Brigjen TNI Adityawarman Toha.

Hashim tiba di Makostrad pukul 17.30 WIB. “Saya sebagai adik kandung Pangkostrad ingin mencari tahu keadaan keamanan Ibukota yang sudah sangat mencekam,” ujarnya. Para tokoh Islam juga beralasan ingin menanyakan sebab kerusuhan. Hashim pun sempat menanyakan tujuan kedatangan Buyung dan kawan-kawan. “Ya, mau ketemu kakakmu, Pangkostrad.” ujar Buyung.

Sekitar pukul 19.00, Prabowo datang bersama Kaskostrad Mayjen TNI Kivlan Zein dan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR. Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin datang sebentar kemudian pergi lagi. Pertemuan dilakukan, namun Din, Iqbal, Hajriyanto, H Amidan dan Mahyuddin menunggu di luar. “Kami sempat kesal karena mereka datang kemudian tapi diterima lebih awal,” ujar Din.

“Apa yang bisa saya bantu,” ujar Prabowo membuka pertemuan. Lalu Buyung menanyakan beberapa masalah. Djody mengaku sempat khawatir Prabowo marah, karena Buyung bertanya dengan keras soal keterlibatan Prabowo dalam penembakan mahasiswa dan kerusuhan di Ibukota, tuntutan mundur Presiden Soeharto dan soal isu friksi

Prabowo-Wiranto. “Tapi kekhawatiran saya tak terbukti,” ujar Djodi.

Dengan tegas Prabowo membantah isu friksi itu. “Wiranto itu bos saya, masa saya menentang dia,” ujarnya. Ia pun membantah isu keterlibatannya dalam penembakan mahasiswa Trisakti. “Saya berani bersumpah dengan Al Qur’an bahwa saya tak pernah memerintahkan penembakan itu,” ujarnya. Sementara soal tuntutan agar Soeharto lengser, Prabowo tak membantah. “Kalau memang rakyat menghendaki, Pak Harto pasti tak akan mempertahankan kekuasaannya dengan kekuatan senjata,” katanya.

Pertemuan berakhir sekitar pukul 20.30. Ketika itu ajudan Prabowo, Mayor M Fuad Basya mengatakan, “Rombongan ke dua...” Inilah yang didengar Fahmi Idris yang kemudian terungkap dalam testimoni TGPF. Saat itu Amidhan cs sempat masuk ke dalam ruangan, namun karena keterbatasan waktu Pangkostrad, mereka akhirnya hanya ngobrol sambil berjalan ke ruang makan bersama Buyung cs. Ketika Amidhan menanyakan siapa dalang kerusuhan, Prabowo hanya berkata, “Kiri.”

Sesudah makan malam, para tamu pulang rombongan per rombongan, mulai dari Buyung, Djody, Rendra dan kawan-kawan, kemudian Fahmi Idris, lalu Amidhan dan Mahyudin, dan terakhir Din, Fadli, dan kawan-kawan dalam dua mobil panther. Iqbal tetap di Makostrad karena hendak mengantar Prabowo ke rumah Gus Dur. Sementara Prabowo, Kivlan dan Muchdi mengikuti briefing Pangab di Makoskogar.

Briefing berakhir lewat tengah malam. Lalu dengan mengendarai panser, Prabowo berangkat dari Makostrad ke

rumah Gus Dur diantar Iqbal Assegaf.
Debu-debu pun berhamburan.

Hanibal WY Wijayanta dan Tim FORUM

===

Pasca Lengsernya Pak Harto, dan tersingkirnya kelompok Letjen Prabowo Subianto dalam persaingan dengan Panglima TNI Jenderal Wiranto, karier Sjafrie Sjamsoeddin agak meredup. Maklumlah, Sjafrie biasa dikelompokkan dalam klik Prabowo, yang biasa diasosiasikan sebagai ABRI hijau. Dari posisi Pangdam Jaya, Sjafrie dimutasi ke Staf Ahli Panglima TNI, kemudian Asisten Teritorial Kasum TNI, dan kemudian Kepala Pusat Penerangan TNI. Padahal biasanya, seorang bekas Panglima Kodam Jaya akan segera mendapat job strategis bintang tiga, seperti Panglima Kostrad, Wakil KSAD, atau Irjen Dephankam.

Namun, Sjafrie tetap melaksanakan semua tugasnya dengan baik, dan setia. Ia menunjukkan bahwa dirinya profesional dan setia pada tugas dan pengabdian sebagai tentara. Sjafrie adalah orang Kopassus pertama yang menjadi Kapuspen TNI, namun mampu berkomunikasi baik dengan semua orang, dan jauh dari kesan menakutkan. Dengan kemampuannya dalam *public speaking*, keluwesan dalam bergaul dan jaringan yang dimilikinya, Sjafrie adalah orang yang sangat tepat menjadi juru bicara TNI pada saat menghadapi era reformasi.

Profesionalitas dan kesetiaan terus dilanjutkan ketika Sjafrie ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Departemen

Pertahanan dan Keamanan di bawah Menteri Pertahanan Juwono Soedarsono. Sjafrie juga tetap setia dan menjalankan tugas dengan baik, meskipun tidak jadi diangkat sebagai KSAD ataupun tidak jadi diangkat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Padahal SK pengangkatan sebagai Menteri Sekretaris Negara sudah ditunjukkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepadanya. Di masa menjadi Sekjen Dephan, rencana penataan alutsista TNI dibahas kembali. Pekerjaan ini dilanjutkannya setelah ia diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Sejak berada di posisi Teritorial, Sjafrie cukup dekat dengan wartawan. Dekat di sini adalah dalam arti tidak pelit memberikan kesempatan wawancara, plus *background information*. Apalagi kalau dia tahu bahwa wartawan yang mewawancarai dirinya juga mau belajar, dan banyak membaca tentang berbagai masalah kemiliteran dan pertahanan keamanan. Sjafrie mau meluruskan informasi kurang tepat yang sebelumnya kami dapat, serta memberikan berbagai wawasan dan cara pandang yang agak berbeda dengan kami-kami sebagai wartawan muda tentang masalah-masalah tertentu.

Sjafrie juga tak pelit menceritakan pengalaman hidupnya selama berkarier di militer. Berbagai cerita tentang pengalaman mengawal Pak Harto saat berkunjung ke Bosnia, dan saat didemo di Jerman Barat diceritakannya tanpa kesan menonjolkan diri. Begitu pula ketika mendapat tugas “menjemput” Teungku Daud Beureu’eh pada saat ia masih berpangkat Letnan, memimpin operasi di Timor Timur maupun ketika menyamar sebagai pegawai Garuda saat operasi di Papua, atau juga cerita lucu tentang bagaimana

dirinya dan para Paspampres lainnya menghindari Joop Ave, Kepala Protokoler Istana di masa lampau yang dikenal kemayu dan kerap menyambangi kamar para prajurit yang ganteng-ganteng. Karena cukup dekat, ia pun biasa menanyakan kabar para wartawan yang dikenalnya secara personal, langsung saat bertemu maupun lewat telepon.

Sjafrie Itu Juga Temannya Wartawan

Hisar Sitanggang*

Siapakah yang tak kenal Sjafrie Sjamsoeddin, meski ia sudah pensiun sebagai tentara aktif dan sekarang ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan? Ketika ia dulu menjabat Pangdam Jaya, harus diakui namanya memang terkenal luas di kalangan masyarakat. Bukan hanya di Jakarta saja, tetapi juga di luar Ibukota.

Salah seorang wartawan senior di Lampung yang belum pernah bertemu dengan Sjafrie secara pribadi juga menyebutkan Sjafrie adalah sosok pimpinan tentara tegas dan cekatan. Tentu bagi mereka yang kerap bergaul dengan beliau karena terkait hal pekerjaan, kelebihan Sjafrie itu bukan hal baru.

Terlepas dari hal keterkenalan itu, menurut saya, Pak Sjafrie itu adalah sosok pekerja keras, namun lugas. Ia juga adalah tentara yang ramah dan hormat, termasuk kepada wartawan meski usia si wartawan itu jauh lebih muda dari dirinya.

Kepemimpinannya yang tegas merupakan ciri khasnya karena gemblengan yang diterimanya semasa menjadi prajurit TNI, meski wajahnya tidak galak *lho*; malah ganteng menurut kebanyakan kaum hawa. Hal itu mungkin berkaitan dengan pengalaman keprajuritannya yang lama



Wamenhan sering berdiskusi bebas dengan para wartawan. Foto, dengan reporter membahas isi sebuah berita koran di atas pesawat C-130 Hercules.

digembleng sebagai prajurit Kopassus dengan berbagai macam penugasan penting.

Ia juga termasuk yang cekatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Namanya sejauh ini juga belum pernah tercatat atau dikaitkan dalam praktik korupsi, baik sewaktu bertugas di TNI maupun Kementerian Pertahanan.

Ia juga menghargai sikap dan pandangan wartawan tentang suatu hal tertentu. Bahkan ia kerap mengajak wartawan bertukar pikiran, sekaligus untuk mempererat persahabatan, tanpa memosisikan dirinya sebagai yang lebih pintar atau lebih dituakan.

Ketika ia menjabat Kapuspen TNI, dan wakilnya saat itu Brigjen Tono Suratman, salah satu bentuk perhatiannya terhadap wartawan di Indonesia adalah melatih fisik dan mental si wartawan di Puslatpur Kostrad di Krawang Jawa

Barat, sebelum diikutsertakan mengikuti atau meliput operasi TNI di Provinsi Aceh. Maklum, saat itu Aceh sedang mengalami konflik sehingga pemerintah terpaksa menerapkan keadaan darurat militer di daerah tersebut.

Memang banyak kritikan terhadap praktik *embedded journalist*, yang juga telah diterapkan AS saat Perang Teluk terjadi, karena dikhawatirkan menghasilkan tulisan yang bias atau tidak berimbang karena hanya berdasarkan satu sudut saja.

Terlepas dari kritikan itu, ada juga keuntungan yang diperoleh wartawan saat dilatih di Puslatpur Kostrad itu, seperti diasah cara menyelamatkan diri dan bisa mempertahankan diri saat situasi dalam kritis.

Melalui pelatihan itu telah diajarkan kepada para wartawan tentang hakiki liputan di daerah konflik, yakni mengutamakan keselamatan nyawa sendiri dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya menghasilkan liputan.

Saya termasuk yang beruntung bisa mengikuti pelatihan itu, meski banyak wartawan yang enggan mengikutinya.

Dalam praktiknya saat di Aceh, para wartawan lebih suka berjalan sendiri untuk mencari berita, lebih waspada dan tetap berusaha meminimalkan distorsi dan ketidakakuratan dalam pemberitaannya.

Sjafrie juga termasuk sosok yang ringan tangan menolong orang, meski dalam hal yang kesannya sepele. Saya masih ingat saat suatu kali meliput kunjungan Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono ke Aceh ketika proses perdamaian ala Poso dan Ambon hendak diterapkan di daerah itu, seorang wartawan mengalami penyakit maagnya kambuh. Sjafrie menyarankan minum susu untuk mengurangi rasa nyerinya.

Bagaimana mungkin di daerah yang sedang bergejolak dan ikut dalam rombongan pejabat, masih bisa menyempatkan diri mencari minuman itu dalam kondisi sedang sakit ? Tentu sulit kan?

Tanpa diduga, Pak Sjafrie membelikannya untuk si wartawan itu, juga untuk wartawan lainnya. Pertolongan ini terkesan hal sepele, tetapi maknanya sangat besar bagi si wartawan. Wajarlah jika ia disebutkan seorang “teman wartawan” yang baik tanpa memandang status dan kedudukan.

Bagaimana halnya dengan bertukar pikiran? Sjafrie tidak alergi terhadap hal seperti itu, bahkan ia termasuk sosok yang suka bertukar pikiran dengan tidak memposisikan diri sebagai yang paling pintar, meskipun ia termasuk prajurit TNI yang cerdas, tegas dan berwibawa.

Ia juga bisa menghargai pendapat orang lain, terutama wartawan, saat melakukan kritikan tajam terhadap suatu permasalahan. Ia sudah “kebal” terhadap berbagai tuduhan dan kritikan. Namun keramahan, kepiawaian lobinya dan ketegasannya tak luntur, termasuk ketika ia ditugaskan sebagai Sekjen Kemenhan dan terakhir (sekarang) sebagai Wakil Menhan RI.

**Penulis adalah wartawan LKBN Antara*

Sjafrie Sjamsoeddin di Matak

Imam Wahyudi*

“Perkenalan” saya dengan Bang Sjafrie Sjamsoeddin terjadi pada pertengahan Maret 1996. Benar-benar perkenalan dalam tanda petik, karena bukan perkenalan langsung. Saya kenal Bang Sjafrie dan beliau mungkin tidak kenal saya. Saya pertama kali mengenal Bang Sjafrie dari foto di media cetak yang menunjukkan pria kelahiran Makassar ini dalam posisi mengawal dan melindungi Presiden Soeharto yang hendak masuk (atau keluar) dari kendaraan lapis baja pengangkut personil (APC) di Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Kunjungan Presiden Soeharto itu menjadi berita utama di banyak media nasional dan internasional karena dilakukan hanya dua hari setelah pesawat PBB yang membawa utusan khusus PBB Yasushi Akashi ditembak di wilayah udara Bosnia. Nama dan wajah Bang Sjafrie yang saat itu menjadi Komandan Grup A Paspampres (Pasukan Pengaman Presiden), jadi ikut terkenal.

Saya semakin “mengetahui” Bang Sjafrie ketika saya beberapa kali meliput ke Timor Timur (sekarang Timor Leste). Di Timor Timur saya mengenal Sjafrie Sjamsoeddin dari sisi yang berbeda. Di even kunjungan ke Sarajevo yang tengah dibalut perang dan aksi penembak jitu itu, saya mengenalnya dari sisi yang hampir seluruhnya positif:

pengawal RI-1 yang profesional dan berani (dalam kunjungan itu, baik Bang Sjafrie maupun Pak Harto tidak menggunakan helm ataupun rompi anti peluru). Di Timor Timur nama Sjafrie Sjamsoeddin lebih berkonotasi misterius, keras, berdarah dingin dan menakutkan. Beberapa pemuda *klandestein* yang saya temui sering menyebut namanya dengan nuansa campuran antara takut dan benci. Sementara beberapa personil militernya menyebutnya dengan nuansa segan dan misterius. Di Timor Timur, Bang Sjafrie dikenal sebagai Komandan Satuan Tugas Intelijen (SGI), satuan yang sangat ditakuti dan dibenci oleh kalangan *klandestein*.

Ketika Sjafrie Sjamsoeddin bertugas sebagai Kasdam dan kemudian Pangdam Jaya status perkenalan saya masih tetap perkenalan dengan tanda petik. Citranya sebagai serdadu yang misterius tapi cerdas, ganteng tapi tidak terlalu hangat dan berbagai citra positif-negatif lain, terbentuk di kepala saya dari berita-berita tentangnya dan juga cerita-cerita di balik berita yang datang dari sumber-sumber sekunder seperti sahabat saya Bekti Nugroho, Tony Cahyono dan rekan-rekan lain yang banyak meliput masalah Hankam. Secara fisik, saya tidak pernah bertemu Bang Sjafrie, apalagi melakukan wawancara.

Pertemuan saya secara fisik dengan Sjafrie Sjamsoeddin terjadi di Dili, beberapa hari sebelum pelaksanaan Jajak Pendapat Timor Timur. Saat itu ada rombongan pejabat TNI dan wartawan yang datang ke Dili. Kabarnya mereka hendak meninjau persiapan pelaksanaan Jajak Pendapat. Saya dan beberapa rekan dari RCTI sudah tinggal di Dili sejak beberapa pekan sebelumnya untuk meliput persiapan

dan kampanye menjelang Jajak Pendapat. Salah satu rekan kamerawan saya, Anton Susilo, ada dalam rombongan itu.

Menurut rencana, Anton akan balik hari itu juga ke Jakarta dan dia membawa *backdrop* untuk siaran langsung yang saya pesan dari Jakarta. Jadi saya dan rekan kamerawan saya Tony Cahyono mesti datang ke Bandara Komoro untuk menjemputnya. Di bandara, saya menemui Anton yang masih berada di luar ruang tunggu, sementara Tony langsung ke ruang VIP dan ngobrol dengan beberapa perwira TNI. Tony sering meliput di Hankam dan banyak mengenal perwira tinggi TNI.

Setelah mengambil *backdrop* saya masuk ke ruang VIP untuk menemui Tony. Saat itu, Tony sedang berbincang-bincang sambil berdiri dengan seorang perwira tinggi AD, Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin. Ketika saya menghampiri mereka, Bang Sjafrie lebih dulu melihat saya dan langsung ber-seru: “Hei Mam, ke sini.” Jujur saya agak terkejut dan heran dengan keramahan Bang Sjafrie yang langsung menyapa dan menjabat tangan saya seperti sudah mengenal saya sejak lama. Saat kami berjabat tangan, Bang Sjafrie menegaskan kepada Tony, “Imam ini seperti saya. Ada di mana-mana. Ada di Aceh, terus ke Papua, ke Timor Timur dan tempat lain,” ujarnya. Saya pun menjawab sambil berseloroh, “Iya Bang, tapi misi kita berlainan,” Kami bertiga pun tertawa. Saat itu saya sepenuhnya menyadari, kami berdua pada dasarnya sudah saling mengenal sejak lama.

Sepanjang karir saya sebagai wartawan saya relatif jarang meliput acara-acara di Mabes TNI atau kantor-kantor TNI lain yang sesungguhnya memungkinkan saya untuk dekat dengan perwira-perwira TNI. Tapi, saya sering meliput di

wilayah-wilayah konflik vertikal termasuk di Aceh, Papua dan Timor Timur yang membuat saya mau tidak mau harus masuk *radar* TNI. Saya bersama kamerawan Fipin Kurniawan dan Koresponden Aceh Umar HN dan Ali Raban, adalah jurnalis yang meliput pemblokiran jalan di Simpang KKA Lhok Seumawe, Aceh. Pemblokiran oleh ribuan massa itu awalnya ditujukan untuk menahan gerakan truk aparat Den Rudal yang hendak melakukan penyisiran untuk mencari anggota mereka yang hilang. Namun, aksi itu kemudian berbuntut kekacauan dan penembakan yang menewaskan puluhan orang. Menyusul peristiwa itu, saya mendengar, Mabes TNI mengutus Bang Sjafrie yang saat itu merupakan Staf Ahli Polhukam Panglima TNI untuk melakukan pengumpulan fakta atas kasus itu.

Dalam peristiwa Semanggi I, saat Bang Sjafrie Sjamsoeddin menjabat Pangdam, saya adalah *stand up reporter* yang melaporkan langsung demo mahasiswa yang berujung bentrokan dengan aparat di Semanggi. Awalnya siaran langsung dari jembatan Semanggi itu masuk di salah satu segmen program Seputar Indonesia yang tayang pukul 18:30 WIB. Tapi, karena bentrokan terus berlangsung maka saya harus muncul di layar secara berkala dalam format *breaking news* sampai siaran *breaking news* itu diputuskan untuk stop pada sekitar pukul 9 malam.

Menjelang Operasi Militer Terpadu

Pertemuan kedua saya dengan Sjafrie Sjamsoeddin, terjadi pada pertengahan Mei 2003, saat beliau menjabat Kapuspen TNI. Kapuspen, mengundang sejumlah pimpinan media untuk ikut rombongan Kasum TNI Letjen

Djamari Chaniago yang melakukan perjalanan ke Aceh. Saya (RCTI), Sugeng Suparwoto (TPI), Asro Kamal Rokan (SKH Republika) dan redaktur senior SKH Kompas, Nugroho F. Yudho ikut dalam rombongan itu. Tujuan perjalanan itu, tampaknya adalah meninjau persiapan pasukan yang akan melakukan operasi militer terpadu di Aceh menyusul penolakan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka terhadap tawaran otonomi khusus. Namun, dalam percakapan selama penerbangan dengan Hercules VIP menuju Lhok Seumawe (transit di Medan), saya mendapati bahwa Bang Sjafrie sangat konsen tentang bagaimana memfasilitasi media agar mereka bisa meliput dan melaporkan operasi militer ini ke masyarakat. Karenanya saya kemudian mengusulkan agar TNI bisa mengalokasikan fasilitas jaringan satelitnya untuk kepentingan transmisi materi audio visual ke Jakarta. Fasilitas itu bisa digunakan oleh jurnalis TV yang karena berbagai alasan tidak bisa mendatangkan unit *satellite news gathering* (SNG) mereka ke Aceh. Bang Sjafrie tampak sangat tertarik dengan usulan itu, sehingga saat makan siang di Lhok Seumawe, beliau langsung mempertemukan saya dengan Komandan Satkomlek Mabes TNI untuk membicarakan detail usulan itu. Kesimpulan dalam pembicaraan segitiga itu, Satkomlek akan membuka fasilitas pengiriman materi audio visual di Lhok Seumawe. Materi akan diterima (*downlink*) di Mabes TNI dan kemudian diteruskan ke RCTI dengan jaringan *microwave*. Jurnalis yang membutuhkan materi itu, bisa mengambil langsung gambar yang diperlukan di Mabes TNI, Cilangkap atau di kantor RCTI, Kebon Jeruk.

Dalam penerbangan pulang, Bang Sjafrie mengundang kami berempat untuk berdiskusi dengan Kasum

mengenai pelaksanaan liputan saat operasi militer terpadu berlangsung. Dalam diskusi itu antara lain dibahas tentang model peliputan *embedded* seperti yang dilakukan sejumlah media barat saat penyerbuan pasukan Sekutu ke Irak dan model *non embedded*. Seingat saya, kami menyampaikan, yang perlu dilakukan TNI adalah memfasilitasi agar jurnalis bisa melakukan liputan dengan lancar dan aman tanpa harus membuat mereka menjadi jurnalis *embedded*. Misalnya, dengan menyediakan *media center* dan fasilitas pengiriman materi teks maupun audio visual serta pelatihan liputan di daerah berbahaya. Kami juga menyatakan bahwa kekritisian jurnalis dalam pemberitaan operasi militer sesungguhnya tidak hanya diperlukan masyarakat, tetapi juga dibutuhkan TNI, karena kekritisian semacam itu akan bisa menjaga operasi ini tetap berada di dalam rel-nya dan menjaga nama TNI sebagai pembela rakyat. Diskusi saat itu berlangsung sangat terbuka dan menurut saya berkualitas.

Beberapa hari setelah perjalanan kunjungan itu, Kapuspen Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin mengundang para pimpinan media ke Mabes TNI untuk berdiskusi tentang peliputan media dalam operasi militer terpadu. Diskusi itu diawali dengan paparan Kapuspen tentang Peran TNI dalam mengatasi insurjensi. Diskusi itu juga mendalami usulan tentang perlunya pelatihan peliputan di daerah berbahaya (*hostile environment training*) bagi wartawan yang akan meliput operasi terpadu. Hanya dalam hitungan hari setelah itu, tim teknis RCTI sudah diundang untuk memasang *microwave* yang bisa mentransmisikan materi audio visual dari Aceh yang di *downlink* di Cilangkap ke RCTI. Puspen TNI juga kemudian mendaftarkan dan mengundang wartawan

untuk mengikuti pelatihan di Sanggabuwana. Semuanya berlangsung cepat.

Pada akhirnya, mekanisme pengiriman gambar dari Aceh ke Jakarta dengan fasilitas satelit TNI tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Pelatihan wartawan di Sangga Buwana juga lebih digembar gemborkan sebagai pelatihan wartawan *embedded*. Bukan *hostile environment and first aid training* (HEFAT). Tapi dalam soal lain. Yang ingin saya sampaikan, dari rangkaian pertemuan langsung ini, saya secara langsung mengenal sisi Bang Sjafrie yang lain. Sisi tentara yang ditugaskan menangani komunikasi. Menjaga komunikasi tetap berlangsung dua arah, dengan langkah-langkah dan keputusan yang cepat, taktis dan terukur.

Penculikan Ersa Siregar dan Fery Santoro

Tim liputan kami, Ersa Siregar dan Fery Santoro, hilang kontak saat dalam perjalanan dari Kuala Langsa Aceh Timur ke Lhok Seumawe Aceh Utara, Minggu 29 Juni 2003. Saya mendapat laporannya Senin pagi. Hingga siang hari kami maupun teman-teman di lapangan tidak mendapatkan titik terang tentang keberadaan Bang Ersa. Bahkan, sempat beredar spekulasi bahwa keduanya ada kemungkinan berada di tangan GAM atau di tangan TNI. Saya kemudian menelpon Bang Sjafrie. Saat mendengar penjelasan saya bahwa Bang Ersa hilang dalam perjalanan ke Lhok Seumawe, Bang Sjafrie spontan mengucapkan "Aduh!". Saat itu juga saya berkeyakinan penuh Bang Ersa dan Fery tidak di tangan TNI. Mereka di tangan GAM. Dugaan itu terbukti keesokan harinya, saat jubir GAM wilayah Aceh Timur Teungku Mansoor mengakui bahwa pasukan GAM wilayah

Aceh Timur yang dipimpin Ishak Daud, telah menculik dan menahan Bang Ersas Siregar dan Fery Santoro.

Proses pembebasan Ersas dan Fery berlangsung sangat alot dan penuh lika-liku. Salah satu prosesnya adalah saat saya bersama sejumlah wartawan mendapat akses untuk menemui dan menjemput Bang Ersas dan Fery sekitar seminggu setelah Bang Ersas diculik. Upaya penjemputan itu gagal karena Ishak Daud ternyata hanya membolehkan kami membawa Bang Ersas dan Fery, sementara Soraya dan Safrida, dua istri perwira TNI AU yang juga ikut diculik karena berada semobil dengan Bang Ersas dan Fery tidak boleh kami bawa. Kedua perempuan itu, ikut di mobil Bang Ersas karena ingin memberikan bantuan kepada pengungsi yang diliput Bang Ersas dan Fery. Penjemputan yang gagal itu membawa banyak konsekuensi. Kami para wartawan yang berusaha menjemput Bang Ersas, akhirnya diperiksa polisi dan dibuatkan BAP.

Sejak saat itu, tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Kapuspen Sjafrie Sjamsoeddin. Namun beberapa permintaan yang disampaikan Ishak Daud terkait pembebasan Ersas selalu saya sampaikan kepada Nugroho F Yudho. Informasi itu menurut mas Nugroho selalu di *update* kepada Kapuspen Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin dengan harapan akan terjadi titik temu dan penyelesaian.

Di media, untuk penyerahan Ersas dan Fery, Ishak Daud selalu meminta banyak persyaratan yang seringkali dinilai TNI berlebihan dan tidak masuk akal. Seperti jeda tempur selama 45 hari, 30 hari dan kemudian 2 minggu. Namun, dalam komunikasi lewat telepon, permintaan yang disampaikan Ishak jauh lebih realistis. Menurut Ishak



Door-stop interview oleh para reporter tidak merupakan masalah bagi Wamenhan.

permintaan yang muncul di media hanya untuk konsumsi media. Permintaan yang sebenarnya adalah yang dia sampaikan melalui telepon langsung ke saya dan kemudian saya *update* ke teman-teman, termasuk Mas Nugroho.

Setelah Bang Ersa tertembak hingga meninggal pada 29 Desember 2003. Tekanan agar GAM segera membebaskan Fery Santoro semakin kuat. Tekanan muncul dari ICRC, PMI maupun organisasi profesi jurnalis nasional maupun internasional. Permintaan Ishak Daud mengenai syarat pembebasan Fery Santoro akhirnya semakin kongkrit. TNI juga meresponnya dengan tak kalah kongkrit. Pada hari Selasa, 11 Mei 2004, Kapuspen TNI Mayjen Sjafrie

Sjamsoeddin mengatakan TNI akan memberikan ruang dengan tidak melakukan operasi ofensif selama proses pelepasan. Pada hari yang sama, setelah melalui negosiasi 2 hari via telepon—yang antara lain melibatkan PMI Aceh, ICRC Aceh dan pengacara Alamsyah Hamdani—Ishak Daud akhirnya mematok persyaratan, Fery akan diserahkan jika ada jeda tempur 3 hari. Penyerahan kepada PMI dan ICRC itu akan dihadiri wartawan media nasional dan asing yang akan menginap di lokasi sampai penyerahan selesai.

Negosiasi di kantor PMI Banda Aceh itu dilakukan atas sepengetahuan dan hasilnya dilaporkan ke Pangdam Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya yang juga menjadi Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD). Saat itu saya yang mengikuti langsung proses perundingan sejak awal, ditugasi untuk mengetik poin-poin kesepakatannya. *Print out-nya* diserahkan Ketua PMI Aceh dan pengacara Alamsyah Hamdani kepada Pangdam Mayjen Endang Suwarya dan Kapuspen Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin yang kemudian menyerahkannya kepada Panglima TNI Jenderal Endriartono Soetarto. Saat itu kebetulan Panglima TNI sedang berkunjung ke Banda Aceh.

Proses penjemputan Fery Santoro di Dusun Lhok Jok Aceh Timur, berlangsung berbelit. Para wartawan yang menjemput (saya, Nani Afrida, Nezar Patria, Husni Arifin, Sholahuddin dan Munir Noer) bahkan sempat beralih status menjadi tahanan GAM selama beberapa jam karena ada informasi Fery Santoro yang dibebaskan sementara pada Minggu sore, 16 Mei 2004, tidak akan dikembalikan lagi ke lokasi pembebasan pada hari Senin pagi 17 Mei 2004. Pengembalian Fery ke Lhok Jok, sebelumnya sudah

disepakati PMI dan ICRC saat mereka hendak membawa Fery ke Langsa Minggu sore. Ferry akhirnya dikembalikan lagi ke Lhok Jok untuk mengikuti upacara pelepasan pada Senin pagi dan dibebaskan sepenuhnya pada Senin sore, 17 Mei 2004.

Selama proses penjemputan itu, saya tidak pernah sekalipun berkomunikasi dengan Kapuspen Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin. Tapi, dari *output* kebijakan yang kami rasakan manfaatnya selama proses pelepasan Fery Santoro, saya yakin Bang Sjafrie, dalam kapasitasnya sebagai Kapuspen telah memberikan banyak dukungannya.

Saya bertemu lagi dengan Bang Sjafrie Sjamsoeddin saat beliau menjadi Wakil Menhan dan saya menjadi *trainer* di Content Creative Indonesia (CCI). Saat itu CCI yang dipimpin Riza Primadi, dipercaya memberikan pelatihan komunikasi kepada jajaran eselon 1 dan 2 Kementerian Pertahanan. Saya melihatnya serius mengikuti sesi training tertentu secara penuh, berbaur dengan pejabat eselon 1. Sebagian lain, termasuk sesi *training* untuk pejabat eselon 2 diikutinya secara *on-off*. Saya, sekali lagi melihat sisi lain dari Sjafrie Sjamsoeddin. Sisi pembelajar.

**Penulis adalah mantan wartawan RCTI,
kini anggota Dewan Pers.*



Makan malam sambil bertukar pikiran dengan insan pers secara terbuka dilakukan secara regular di kediaman resmi Wamenhan.

Tetap Tegar dan Mampu Bangkit dari Keterpurukan

Imanuddin*

Pengetahuan saya pribadi tentang Letnan Jendral Sjafrie Sjamsoeddin terbatas dalam kapasitas saya sebagai wartawan yang lama meliput kegiatan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Departemen Pertahanan (sebelum diubah menjadi Kementerian Pertahanan), termasuk markas besar ketiga angkatan maupun unit-unit di bawahnya.

Saya tidak terlalu banyak tahu mengenai awal karirnya di TNI selepas lulus dari AMN tahun 1974. Dan ia pun bukan lulusan terbaik di angkatannya di AMN (terbaik adalah Agustadi Sasongko Purnomo, terakhir jabatan KASAD 2007-2009) yang seperti biasa selalu dijadikan acuan untuk menilai dan mengevaluasi karir seseorang di militer.

Namun yang saya tahu lewat pemberitaan media maupun catatan biografi yang banyak tersebar di media cetak maupun *online* bahwa pilihannya (atau lebih tepat mungkin garis tangannya yang mengantarkan ia) untuk bergabung dengan kesatuan elit Angkatan Darat (Kopassus) dan kemudian terjun di sejumlah operasi militer di beberapa wilayah konflik seperti Aceh, Timor Timur maupun Papua (dulu Irian Jaya) mengantarkannya menjadi “orang yang terpilih” untuk masuk lingkaran dalam pengawal Presiden

Soeharto. Lewat penelusuran berita di media inilah saya pun mengetahui bahwa Sjafrie adalah lulusan terbaik pendidikan mengenai *Terrorism in Low Intensity Conflict* di Amerika Serikat.

Banyak penggalan-penggalan cerita, lewat testimoni-testimoni orang yang berada di lingkaran istana kepresidenan termasuk wartawan istana, mengenai bagaimana kedekatan hubungannya dengan Pak Harto—dan tentu saja dengan Ibu Tien Soeharto. Namun yang paling fenomenal tentu saja cerita “behind the scenes” mengenai betapa percayanya Pak Harto terhadap kemampuan Sjafrie untuk mengelola keamanan pribadi pak Harto beserta rombongan yang berkunjung ke Sarajevo, Bosnia Herzegovina, pada tanggal 13 Maret 1995. Pak Harto bahkan dikabarkan menyerahkan sepenuhnya kepada Sjafrie untuk melakukan persiapan/tindakan yang dianggap perlu sepanjang penerbangan menuju/kembali dari Bosnia yang saat itu sedang dalam keadaan perang.

Saya mulai banyak tahu mengenai dirinya setelah Sjafrie diangkat menjadi Kasdam Jaya di tahun 1996, sekaligus menjabat Komandan Garnisun Ibukota. Tahun 1996 adalah salah satu tahun penting di dalam sejarah modern Republik ini yang mendahului runtuhnya pemerintahan Orde Baru di tahun 1998. Di tahun 1996 inilah terjadi kerusuhan 27 Juli 1996 pasca pengambilalihan markas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang saat itu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Setahun kemudian ia dipercaya menjadi Pangdam Jaya, sebuah posisi yang sangat strategis karena Jakarta dipercaya sebagai miniaturnya Indonesia, hingga 1998. Di masa

menjabat Penguasa militer ibukota inilah terjadi peristiwa yang menjadi salah satu tonggak sejarah penting negara ini selain deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, peristiwa Gestapu 1965 maupun (dalam tahapan dan kriteria tertentu) peristiwa Malari 1974. Di bawah pengawasannya sebagai Pangdam Jaya lah terjadi pergantian kepemimpinan Negara dari Soeharto ke B.J. Habibie.

Di masa kepemimpinannya sebagai Pangdam Jaya juga lah terjadi peristiwa penculikan sejumlah aktivis mahasiswa dan pemuda. Banyak kalangan yang menyiratkan keterlibatan Sjafrie di dalam penculikan aktivis tersebut. Namun ketiadaan bukti yang cukup, termasuk tiadanya kesaksian para aktivis yang kembali hidup-hidup setelah diculik, tidaklah dapat membawa Sjafrie untuk diajukan ke pengadilan dan mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa penculikan para aktivis tersebut.

Namun, tidak urung Sjafrie terkena imbas jatuhnya Soeharto, termasuk dugaan keterlibatannya dalam penculikan aktivis, yang mengakibatkan dirinya harus “diasingkan” dan “diparkir” di posisi yang dipercaya bagi setiap perwira tinggi TNI sebagai tempat buangan. Setelah empat tahun ditempatkan pada posisi non-strategis dengan pangkat Mayor Jenderal, perlahan ia mulai menata dan menapaki karir militernya. Di tahun 2002, ia ditunjuk menjadi Kapuspen TNI, sebuah posisi yang membuatnya kembali masuk radar pemberitaan media massa.

Di masa kepemimpinannya di Puspen TNI, seperti kesaksian staf Puspen maupun wartawan peliput kegiatan Mabas TNI, terjadi reorganisasi bidang kerja Puspen, termasuk “keberanian” Kapuspen untuk menjawab dan

memberi komentar atas pertanyaan wartawan seputar kebijakan Mabes TNI, sesuatu yang sebelumnya langka terjadi di TNI.

Rupanya “keberhasilannya” mengelola Puspen dan pemberitaan mengenai TNI membuatnya dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan sejak 2005. Lima tahun kemudian ia pun dipercaya menjadi Wakil Menteri Pertahanan, suatu jabatan baru di lingkungan kementerian dalam kabinet presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kini.

Apa yang bisa ditarik sebagai kesimpulan dari perjalanan karirnya yang meroket, kemudian meluncur tajam, namun akhirnya bisa kembali menapak naik adalah kemampuannya untuk tetap bisa tegar bahkan bangkit dari keterpurukan yang menimpa dalam karir militernya. Tidak semua orang bisa “survive” dari ujian hidup yang keras.... Tetapi ternyata ada, mungkin banyak, yang bisa

*Penulis adalah wartawan harian *The Jakarta Post*

Jenderal yang Murah Senyum dan Tak Pernah Menghindar dari Pers

Jacobus “Valen” Kalao*

Itulah sosok jenderal yang saya kenal walaupun ia (waktu itu) “hanya” berbintang dua tetapi senyumnya selalu terus nampak. Selama saya tugas liputan beliau di TNI mulai dari tingkat Kodam sampai dengan Markas Besar TNI di Cilangkap, Jenderal berbintang dua ini selalu ramah dan tersenyum. Apa saja yang mau ditanya selalu dijawabnya seakan tiada jarak jenderal bintang dua yang punya jabatan sangat strategis dengan para wartawan. Siapa dia?

Siapa lagi kalau bukan Mayor Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

Contohnya saat beliau menjabat sebagai Pangdam Jaya Radio Sonora akan melakukan wawancara, dan kebetulan bukan saya yang ditugaskan tetapi rekan saya. Kemudian rekan saya minta petunjuk pada saya saat akan melakukan wawancara dengan Pangdam Jaya yang saat itu dijabat oleh Sjafrie Sjamsoeddin, “Bagaimana *sib* sosok Pangdam Jaya (Sjafrie Sjamsoeddin)?”

Saya jawab, datang saja langsung dan tanya petugas, yang jelas Pangdam orangnya sangat baik, tapi itu juga kalau beliau tidak sibuk atau tidak berada di luar, pasti kamu akan dilayani.

Ternyata benar saat teman saya pulang dari Kodam Jaya dan bertemu saya dan langsung cerita dengan menggebu-gebu, “Ternyata benar, Bang. Pak Sjafrie itu orangnya baik banget padahal saat itu beliau sedang olah raga tenis dan saya disuruh tunggu setelah olahraga tenis langsung lakukan wawancara.”

Bahkan rekan saya itu menceritakan, setelah selesai wawancara ia diberi kenang-kenangan berupa pulpen yang sampai saat ini masih ada dan disimpan.

Kemudian saat Pak Sjafrie menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI, rupanya beliau sudah punya firasat bahwa Aceh akan diberlakukan Darurat Militer dengan melihat kondisi keamanan saat itu. Para wartawan yang tidak pernah ketinggalan dalam liputan segala kegiatan TNI juga melakukan persiapan bila sewaktu waktu Aceh akan ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer.

Ternyata para wartawan dipersilahkan untuk meliput, *embedded*, istilahnya, dengan pasukan TNI, namun para wartawan tidak diperbolehkan pergi begitu saja dengan tidak punya pengalaman perang. Mereka dipersiapkan ala militer dengan melakukan pelatihan militer di kawasan Gunung Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. Kami para wartawan pun senang diberi kesempatan seperti itu.

Tetapi banyak kawan-kawan mengeluh, dan bahkan ada yang mau mundur, setelah tahu bagaimana beratnya latihan militer yang sesungguhnya. Waduh betapa sengsaranya karena belum sampai di tempat bahkan kurang lebih 50-100 meter kami diturunkan dari kendaraan, kemudian disuruh jalan jongkok dan saat naik tangga disuruh hitung jumlah anak tangga. Kemudian ada juga sesi latihan menembak

dengan senjata laras pendek (pistol) maupun senjata laras panjang (SS-1). Kemudian bagaimana cara menghitung saat dengar suara tembakan atau serangan.

Namun semua lelah dan capai itu bisa hilang dengan sekejap saat malam hari di mana Pak Sjafrie datang ke gunung Sanggabuana dan selalu menanyakan kondisi kami dengan senyumannya yang khas dan berbincang pada wartawan.

Bila kami dapat terjemahkan senyumnya Pak Sjafrie saat itu, seakan dia berkata, “Latihan kalian ini belum seberapa...!” Apa pun, kami bangga beliau mau peduli kepada kami sampai dengan jelang usainya rangkaian pelatihan di Gunung Sanggabuana tersebut. Semua wartawan berkumpul di lapangan dengan berbaris. Di situ, Pak Sjafrie menginformasikan kepada kami bahwa kami (wartawan) saat di Aceh dalam liputan harus hati-hati dan ekstra hati-hati. karena nama-nama kami (wartawan) yang ikut latihan di Sanggabuana sudah ada di tangan GAM.

Kami pun semua saling melihat, siapa yang menginformasikan atau yang membocorkannya? Namun baik Pak Sjafrie maupun para wartawan berusaha tetap tenang dan santai mendengar itu semua.

Akhirnya pemerintah mengumumkan Darurat Militer di seluruh Aceh tepat pada pukul 00.00 dini hari.

Besok siang saya berangkat sendiri dengan menggunakan pesawat komersial menuju medan lewat darat ke Lhokseumawe, Aceh. Tidak lama kemudian, Pak Sjafrie datang mendampingi kunjungan kerja Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto.

Pak Sjafrie yang menjabat sebagai Kapuspen TNI malahan tinggal beberapa hari di Aceh, sementara Panglima

TNI sudah pulang terlebih dahulu. Pertama-tama yang ditanyakan Pak Sjafrie kepada para wartawan adalah, “Gimana, sehat dan aman semuanya?”

Kemudian pertanyaan berikut, “Bagaimana tempat tinggal? Apa sudah dapat tempat semuanya?”

Tidak itu saja, Pak Sjafrie juga menawarkan mess militer yang ada di Lhokseumawe jika para wartawan merasa kesulitan mendapatkan hotel atau tempat tinggal selama meliput di Aceh.

Inilah sosok Pak Sjafrie yang terus merasa bertanggung jawab kepada para wartawan yang bertugas meliput di Aceh.

Pada malam harinya, kami para wartawan diajak makan malam di sebuah rumah makan di pinggir jalan kota Lokseumawe yang tidak jauh dari markas TNI, namun rumah makan tersebut menurut informasi adalah tempat para GAM berkumpul dan berarti termasuk daerah berbahaya. Tidak mengherankan kamipun mendapat pengawalan cukup ketat saat makan malam bersama Pak Sjafrie, maupun bersama Pangkoops (saat itu dijabat oleh Mayjen Bambang Darmono). Jadi tidak mengherankan bahwa seakan-akan tempat makan itu aman-aman saja dan Aceh dalam kondisi normal.

Sambil bercerita dan santai makan malam itu terus bergulir...

Saya memprediksi saat itu Pak Sjafrie suatu saat akan menjadi orang nomor satu di TNI ataupun juga di tanah air dengan melihat kepribadian yang akrab, lemah lembut dengan siapa saja dan wajahnya yang ganteng menjadi idola semua orang terutama kaum hawa, begitu juga idola para wartawan.

Ternyata promosi bagi Pak Sjafrie selanjutnya adalah saat dia dimutasi ke Departemen Pertahanan RI dengan posisi yang juga cukup baik: Sekretaris Jenderal Dephan, orang nomor dua dibawah Menhan (waktu itu) Prof. Dr. Juwono Sudarsono.

Setelah menjabat sebagai Sekjen, tanpa sengaja saya bertemu lagi dengan Pak Sjafrie karena saat itu kebetulan saya akan meliput kegiatan di Dephan. Kebetulan pula saat itu saya mencukur rambut hingga plontos, yang langsung disapa sambil bergurau oleh Pak Sjafrie, “Eh, *elu* baru pulang haji (padahal saya beragama Katolik)...?”

Langsung saya jawab bergurau juga, “Alhamdulillah...”

Spontanitas saya menjawab demikian adalah karena kekaguman saya terhadap sosok beliau yang walaupun sudah lama tidak bertemu, ia tetap dengan wajah ceria dan senyum yang khas, menyapa saya.

Sampai saat ini saya tetap bangga dengan sosok Pak Sjafrie. Orang yang selalu murah senyum dan belum pernah sekalipun selama saya meliput kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aktivitas beliau — baik sebagai Pangdam, Kapuspen, maupun Sekjen Dephan, dan bahkan hingga saat ini sebagai Wakil Menteri Pertahanan — melihat wajahnya muram atau marah.

Saya bersyukur Pak Sjafrie akhirnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI, dan akan tetap berdoa agar dia berkesempatan mencapai jabatan yang lebih tinggi lagi. Semoga hal itu bisa terjadi pada Pak Sjafrie. Semoga!

*Penulis adalah reporter *Radio Sonora*, Jakarta.



Memberikan penjelasan setelah kunjungan ke PT Dirgantara Nusantara di Bandung.

Selalu Memberikan *Background Information* Lengkap

Karim Paputungan*

Ketika Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, dalam hati saya berkata, syukurlah, akhirnya “kartu” nya hidup kembali. Maklum sebagai wartawan yang pernah ditugaskan di bidang Hankam “zaman baheula” saya sempat mengikuti karirnya meroket hingga menjabat sebagai Pangdam Jaya. Karena situasi berubah, maka Pak Sjafrie seakan lama menghilang, karena mendapat penugasan baru di bidang yang memang *low profile*.

Saya sempat sebentar bertugas di lingkungan Kepresidenan era Orde Baru, sesekali saya sering melihat beliau, sewaktu menjabat sebagai Komandan Grup A, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Tetapi karena periode tugas saya singkat, saya tidak banyak bergaul dengannya. Sewaktu kemudian menjabat Pangdam, saya sering mendengar cerita dari para reporter harian Merdeka, mengenai bagaimana ia bersikap terbuka terhadap pers yang meliput aktivitasnya sebagai Pangdam Jaya, bahkan dalam situasi gawat, seperti pada saat kerusuhan 13-15 Mei 1998, ia selalu berusaha memberikan keterangan penting kepada para wartawan.

Saya juga mendengar, ia secara sendirian berani mendatangi kampus Universitas Trisakti di Grogol, untuk menyatakan dukacitanya atas empat mahasiswa Usakti yang gugur akibat tembakan pihak tidak dikenal. Itu yang patut dipuji, sikapnya yang *fair*. Tatkala diangkat jadi Kapuspen, saya sudah tidak di lapangan lagi, tetapi justru ia menunjukkan dirinya sebagai perwira tinggi yang mampu berkomunikasi dengan sangat baik, dan bukan sekedar baik saja. Kalau saya memerintahkan kepada reporter saya untuk konfirmasi sebuah data atau informasi sebelum dicetak, si reporter tidak peduli jam berapa dengan mudah bisa mendapat konfirmasi resmi dari Kapuspen TNI. Jelas ini membantu tugas pers!

Sebagai Kapuspen, yang saya hormati beliau sering mengundang pimpinan media massa untuk acara seperti berbuka puasa bersama. Pada acara tersebut selain saling menyapa sebagai sahabat, ia banyak memberikan informasi latar belakang (*background information*) mengenai berbagai hal. Semua terbuka, dengan harapan bahwa pimpinan media mengerti mengenai berbagai hal yang sensitif yang mungkin tidak bisa diberitakan secara terbuka.

Mayjen Sjafrie adalah salah satu Kapuspen yang sukses mengemban jabatan sebagai juru bicara TNI. Seingat saya, beliau jadi Kapuspen era Pak Widodo AS dan masa Endriartono Soetarto. Cukup lama dan menunjukkan beliau dipercaya oleh atasannya. Waktu beliau pindah jabatan jadi Sekjen Departemen Pertahanan, dan pangkatnya jadi Letjen TNI, kebiasaan untuk berbagi informasi masih diteruskan. Kemudian Pak Sjafrie diangkat jadi Wakil Menteri Pertahanan, sebuah jabatan strategis. Tetapi silaturahmi bersama insan pers, termasuk pimpinan media

masih dilakukan. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Pak Sjafrie, tetapi kalau bertemu, ia masih menyapa dengan gaya seolah-olah baru satu hari tidak bertemu.

Bila ia mengirim kartu Lebaran resmi, yang mengesankan bagi saya, ia menulis dengan tangan ucapan selamat Idul Fitri. Sangat personal, padahal orang seperti Pak Sjafrie banyak pekerjaan lain yang menyita waktu. Selamat ya, Pak Sjafrie!

**Wartawan senior, pernah jadi reporter Hankam, mantan Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Merdeka, Jakarta,*



Keterangan pers di atas kapal feri bukan masalah.

Sampai Sekarang Ia Masih Menyimpan “Misteri”

Karni Ilyas*

Ketika diminta untuk menulis interaksi dengan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, saya lalu merenung. Menerawang sosok tersebut hampir tigapuluh tahun lalu.

Benar, saya mengenalnya sejak lama, begitu lamanya sehingga saya tidak ingat apa pangkatnya. Bisa ia sudah berpangkat Mayor atau masih Kapten. Pokoknya ia masih sangat muda dan simpatik terhadap para wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan. Sebagai wartawan, memang saya sesekali meliput di wilayah Istana, tetapi tidak sempat dekat karena intensitas di lingkungan tersebut tidak cukup banyak. Jadi saya adalah wartawan yang tidak pernah dekat dengan Presiden Soeharto seperti banyak wartawan lain yang sering meliput kegiatan Presiden.

Yang saya tahu, ia berwajah simpatik sehingga banyak yang senang dengannya. Saya juga sekali melihat wajahnya, juga tidak merasa seram untuk berdiri dekat-dekat beliau.

Pada tahun-tahun akhir Orde Baru, sebagai wartawan/redaktur di majalah *Tempo*, saya mulai meluaskan jejaringan saya berkenalan dengan sejumlah perwira TNI. Jadilah saya kenal dengan nama-nama seperti A.M. Hendropriyono, Prabowo Subianto dan tentu saja Sjafrie. Ketika memimpin

majalah *Forum Keadilan*, kontak-kontak dengan mereka sangat intensif, terutama dengan Sjafrie setelah menjadi Pangdam Jaya.

Tetapi justru ketika kontak dan komunikasi semakin intens, seorang perwira menengah meminta kepada saya untuk mengambil jarak dan menjauh dari Sjafrie. Ia menyampaikan pesan tersebut atas perintah Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol. Hamami Nata (alm.). Saya tanya alasannya, tidak pernah di jawab. Karena penasaran saya memutuskan untuk mengecek sendiri kepada Mayjen Sjafrie. Mula-mula saya telepon ajudannya, menanyakan apa acara bosnya malam itu. Dijawab, Pangdam ada acara buka puasa bersama di kompleks Kodam di Cawang.

Saya datang pada waktu menjelang sholat di mesjid Kodam. Ternyata beliau sudah di dalam mesjid, sehingga saya memutuskan untuk tidak menganggunya. Selesai sholat, saya buru-buru berdiri di teras mesjid, berharap bahwa ia akan keluar melalui jalur tersebut. Benar juga, Mayjen Sjafrie keluar dari mesjid dan ketika melihat saya ia menyalami dengan ramah. “Tunggu sebentar ya, duluan saja duduk di sana.” katanya menunjuk ruangan tempat makan. Saya lalu masuk ruangan makan, dan kepada petugas di sana saya katakan bahwa saya diminta menunggu Pangdam. “Kalau begitu silakan duduk di sana.” ujarinya ke tempat yang agak di belakang. Saya menurut saja, dan duduk menunggu.

Beberapa menit kemudian, Pangdam Jaya masuk ke ruangan diiringi sejumlah pejabat lain. Sebagai orang nomor satu di Kodam Jaya, tentu saja ia mendapat giliran pertama untuk mengambil makanan. Saya lihat Sjafrie mengambil



Wamenhan dalam suasana santai bersama dua wartawan senior, Karni Ilyas (kiri) dan Tarman Azzam (kanan).

semangkok soto. Petugas lalu mempersilakannya untuk di meja VIP. Sjafrie tidak mempedulikan “petunjuk” itu dan berjalan ke belakang ke arah saya. Mula-mula saya menyangka Sjafrie akan menemani saya sambil makan, tetapi saya menjadi terkejut, karena ternyata membawa soto untuk diserahkan kepada saya..!

Saya terharu atas sikap Pangdam Jaya. Akhirnya saya tidak “tega” menanyakan informasi bahwa saya harus menjauh darinya. Sikapnya yang ramah, tulus tersebut saya nilai sudah merupakan jawaban. Ia tidak marah kepada saya, atau tidak mengambil sikap bermusuhan. Buat apa lagi saya bertanya?

Beberapa tahun kemudian, suasana sudah berbeda. Orde Baru telah berganti dengan reformasi. Suatu hari, saya bertemu lagi dengan perwira yang menyampaikan

pesan tadi. Penasaran, saya bertanya lagi, dengan mendesak, mengapa saya harus menjauh dari Sjafrie. Kini, mungkin karena suasana telah berubah, lalu menjawab. “Ampun bang, ampun....” katanya sambil mengangkat tangan dengan gaya menyembah. “Sebenarnya pada waktu itu abang sudah menjadi TO.....!”

Giliran saya yang terdiam. Terkejut juga saya. TO berarti “Target Operasi”, artinya orang yang jadi target harus diburu dan mungkin harus “dilenyapkan” dengan satu atau lain cara. Tetapi mengapa saya? Apa dosa saya? Atau, penguasa tidak senang gaya liputan majalah yang saya pimpin?

Kalau saya memang menjadi TO, mengapa saya tidak “diamankan”? Lalu pertanyaan berikut, siapa yang harus mengeksekusi TO itu? Pangdam? Kepolisian? Satgas Intel Kodam? BIA? Kalau aparat Kodam yang ditugaskan, berarti Sjafrie pasti yang tahu betul. Berarti pula, ia yang harus memerintah hal itu. Tetapi mengapa itu tidak dilakukan. Mungkinkah TO dibatalkan?

Itu yang menjadi misteri sampai sekarang. Hingga hari ini, Sjafrie dan saya masih berteman baik, dan sampai hari ini pula, saya masih menganggap bahwa kasus TO tersebut merupakan misteri yang belum terpecahkan....!

Tetapi di luar soal TO, sejak sebelum tahun 2004, saya sempat punya pikiran, mengapa Sjafrie tidak dicalonkan untuk menjadi Presiden RI setelah era Kepresidenan Megawati Soekarnoputri? Saya lihat, Sjafrie memenuhi semua syarat ideal seorang pimpinan tertinggi negara. Ia cakap, tinggi, dan terutama cerdas. Ia mungkin lebih ideal dari pada seorang perwira tinggi lain yang juga cakap, tinggi besar dan cerdas, yang kemudian akhirnya menjadi Presiden

RI tahun 2004. Soal ia tidak berpolitik dan tidak berpartai menurut pandangan saya waktu itu tidaklah merupakan kendala. Tapi agaknya sejarah menghendaki jalannya sendiri. Sjafrie kembali ke panggung publik dengan predikat yang lain: Kapuspen TNI, Sekjen Dephan, Wamen Kemhan.

Bagaimana tahun 2014? Kalau hari ini saya ditanya, apakah saya masih “mencalonkan” Sjafrie Sjamsoeddi untuk menjadi calon ideal Presiden RI mendatang, maka jawab saya: ya. Ia masih tetap tokoh idaman saya untuk memimpin NKRI ini!

*Penulis adalah wartawan senior mantan redaktur majalah *Tempo*, mantan Pemimpin Redaksi majalah *Forum Keadilan*, mantan Pemred *SCTV* dan kini menjabat Pemred *TV-One*.



Body language Wamenhan ketika berbicara dengan pers.

Memang Senang Bergaul dengan Wartawan

Laurens Samsoreri*

Mengenal Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pengawal pribadi Presiden Soeharto, sama seperti kenal dengan Wakil Presiden Adam Malik: cepat akrab, tidak membedakan status atau pangkat dan setiakawan.

Sjafrie dikenal akrab dengan wartawan. Ia selalu mengatakan, tugasnya mengawal Presiden RI adalah tugas berat. Sebab itu, dalam beberapa hal ia melibatkan wartawan dalam tugas pengamanan itu. Seperti ketika Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Pasarturi, Surabaya, ia ”melibatkan” wartawan untuk ”memagari” Presiden, karena pertimbangan ia sudah sangat mengenal para wartawan itu dalam keseharian bertugas di lingkungan Istana, apalagi ketika itu jumlah Walpri tidak cukup banyak untuk memagari Pak Harto.

Saya mengenal Sjafrie sejak berpangkat Letnan Satu, ketika masih menjadi Komandan Pengawal Pribadi (Walpri) hingga terakhir kali bertemu sebagai Pangdam Jaya dengan pangkat Mayjen TNI. Walaupun militer tulen, pendekatannya kepada wartawan tidak formal, tidak kaku, seperti umumnya militer. Jika Presiden Soeharto sudah beristirahat, Sjafrie justru akan bergabung dengan

wartawan, mengobrol santai, tanpa menyinggung isu-isu penting, seperti contohnya politik.

Ada satu pengalaman bersama Sjafrie yang tak akan terlupakan. Dalam sebuah perjalanan tugas ke Bali, kami membuat janji untuk jalan-jalan mencari angin seusai bertugas. Langkah membawa kami ke suatu *music room*. Namun, keinginan untuk *refreshing* itu pupus setelah kami sama-sama melihat gelagat tidak baik dari seorang pengunjung, yang rupanya *gay*. Alhasil, kami, dua orang yang punya tinggi badan sama (175 cm), langsung mencari akal untuk meloloskan diri dari situasi yang tidak menyenangkan itu...

**Mantan wartawan bidang Kepresidenan Harian "Sinar Harapan",
mantan Wakil Pemimpin Redaksi Harian "Jayakarta"*

Saya Sering “Menitip” Tulisan Melalui Sjafrie

Linda Djalil*

Saya kenal Sjafrie pertama kali di Istana Kepresidenan. Setelah *Tempo* diberedel, saya bekerja di *Gatra* dan kembali ditugaskan di sana.

Sjafrie adalah orang yang mudah sekali memiliki akses ke Presiden, yang kami sebut ”Lurah”. Apa yang kami sampaikan ke dia untuk minta disampaikan ke Pak Harto, bisa cepat disampaikan, termasuk kalau kami mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri. Yang saya suka dari dia, meskipun tahu mungkin kelebihanannya di situ, dia rendah hati. Tidak pernah menyombongkan diri, baik secara bahasa tubuh, ataupun dari ungkapan-ungkapannya. Tidak pernah memberitahukan ke banyak orang tentang *’Ini gua paling oke di antara kalian’*.

Mungkin karena pendidikannya. Sjafrie, selain anak kolong karena ayahnya juga tentara, juga bersekolah di SMAN 4 Jakarta, yang terletak di Menteng (daerah elite, Red). Angkatannya, atau satu-dua tahun angkatan yang berbeda di atas atau di bawah dia, adalah anak-anak dari Pahlawan Revolusi, anak konglomerat, dan sebagainya, yang membuatnya tidak gamang dalam pergaulan. Jadi, ketika menghadapi banyak menteri yang kadang kala *petentang-petentang*, yang kadang kala memandang rendah, Sjafrie tidak

inggih-inggih. Bahasa tubuhnya sigap, santun, dan tegas.

Saya rasa itu bawaan dari rumah, dan dari pergaulannya di Menteng. Itulah dasar bagaimana dia bersikap selanjutnya dalam pekerjaan dia, jenis apa pun, kebetulan dia jadi tentara.

Sama seperti saya tulis di buku, ketika kami akan berangkat ke Zagreb, dari awal saya sudah bilang untuk ikut membujuk Moerdiono bahkan Pak Harto agar saya bisa ikut sampai Bosnia. Dia mengatakan tidak bisa. (Kalau tidak ada orang lain, kami memang bicara *lu-gue*, mengingat kami satu almamater di SMAN-4, walaupun dia senior saya).

Dia tidak mengizinkan, mengingat keamanan. Tampaknya dia sampaikan keinginan kami itu, karena Pak Moerdiono dan Pak Harto mengatakan atas dasar pertimbangan keamanan, tidak ada perempuan ikut ke Sarajevo, Ibu Tien pun hanya sampai di Zagreb.

Jadi, Sjafrie juga sangat komunikatif, sangat responsif. Kebanyakan tentara tinggi hati terhadap wartawan, tetapi Sjafrie tidak. Dia juga tidak genit, tidak *pecicilan*, tidak berusaha merayu-rayu, memuji-muji wartawan perempuan yang bertugas di Istana—Binagraha, seperti sebagian jenderal yang sering ke Istana.

Selain Bosnia, kami juga sering pergi ke negeri-negeri lain. Nah, kalau mengikuti tugas ke luar negeri, misalkan dari Jakarta ke Tokyo, Jepang, Pak Harto akan berpidato. Bagi kami, wartawan yang bekerja di mingguan seperti *Tempo* atau *Gatra*, harus mencari cara untuk tidak kalah dengan wartawan yang bekerja di koran. Jadi, bagaimana caranya kami yang di bekerja di mingguan mendapatkan bahan pidato itu lebih dulu.

Biasanya di perjalanan saya sudah dapat bocoran terlebih dulu dari Mensesneg Moerdiono, sebelum koran-koran mendapatkannya. Biasanya saya langsung susun laporan dengan tulisan tangan. Pada saat transit sebelum Tokyo, saya menitipkan naskah itu kepada Sjafrie untuk dikirim ke kantor Jakarta. Sjafrie akan meminta tolong staf Deplu, untuk mengirimkan via faks ke *Gatra*, karena pada saat itu belum ada *e-mail*.

Itulah yang dilakukan Sjafrie. Bayangkan, seorang tentara melakukan hal itu. Sjafrie memberikan kemudahan. Mungkin juga dia sudah menilai tulisan kami.

Itu yang paling saya ingat. Sjafrie akan menolong mengirimkan berita ke kantor melalui staf Deplu ke kantor pusat di Jakarta mengingat waktu itu belum ada *e-mail*. Dia juga ringan tangan membantu teman wartawan lain sejauh dia bisa melakukannya. Dia selalu mengatakan, “Coba saya lihat, apakah memungkinkan atau tidak.”

Itulah Sjafrie. Mempermudah pekerjaan kami. Bukan hanya kepada wartawan, kepada tukang sapu di Istana, juga *office boy*, dia hormat *kok*. Kalau ditanya tentang itu, dia akan menjawab, “*Gile, gua dulu diusir-usir orang kalau lewat Jalan Cendana, masak sekarang gue ngusir-ngusir orang sih.*”

Sama seperti saya tulis di buku, Sjafrie menceritakan pengalaman pernah diusir tentara yang berjaga di rumah Pak Harto di Jalan Cendana saat berjalan kaki sepulang sekolah di SMA 4. Dia harus berjalan di sisi seberang. “Tahu-tahu saya juga sekarang bertugas di situ,” katanya.

Sjafrie juga cinta kesenian. Saya kira itulah penghalusan budi. Bukan tentara yang kering. Dia penikmat musik dan pintar main piano. Menyanyi apa pun bisa. Kalau *ngumpul*

dengan lulusan SMA 4, dia bisa melepaskan predikat jenderal di pundaknya. Bicara pekerjaan dia 'jaim' (*jaga image*, Red), tetapi dia tidak memberikan kesulitan bagi para wartawan di Istana. Orangnya *gaul*, komunikatif, menghargai orang lain. Wartawan *kan* sering sekali dianggap warga kelas tiga oleh pejabat, tetapi tidak oleh Sjafrie.

Mungkin ini penilaian subjektif, tetapi saya tidak melihat kekurangan dia di mata seorang wartawan. Bahwa dia dicaci-maki, dianggap sebagai seseorang yang tidak bisa meng-*handle* kerusuhan dan sebagainya, itu di luar *service area* saya.

Jadi, pengalaman waktu bekerja sama dengan dia di lingkungan kepresidenan itu menarik. Ketika Pak Harto jatuh, dia berdiri dekat tangga, dan kami berfoto. Sedih juga pada satu sisi, namun pada sisi lain saya juga senang. Sedih secara manusia, senang karena melihat keenakan sudah demikian lama berkuasa pun berakhir.

Sesudah itu saya tidak mengikuti perjalanan karier Sjafrie lagi karena saya tidak lagi menjadi wartawan. Saya hanya menyayangkan, semestinya dia bisa lebih dari sekarang dalam hal kariernya, dengan bermodal seperti tadi kita bicarakan.

Tidak gampang mengasah seseorang untuk jadi pejabat seperti duta besar. Banyak orang jadi duta besar, tetapi banyak juga yang tidak berkelakuan sebagaimana mestinya, tidak tahu *table manner*, karena dari dasarnya memang tidak tahu. Itu baru satu contoh. Hal seperti itu kan tidak ada sekolahnya.

Sjafrie menurut saya memang layak mendapat jabatan ini. Bahkan lebih lagi. Sayang dia sudah pensiun. Maaf,

kalau dia jadi dubes, sayang. Menteri malah cocok.

Ada yang bilang Sjafrie bukan orang pintar. Menurut saya, dia orang yang taktis. Ada orang yang pintar dari buku, tetapi tidak pintar hidup. Sjafrie itu taktis, pintar di lapangan. Memang mudah “memegang” Pak Harto? Sjafrie bisa. Dia waktu sekolah juga disayang guru-guru di SMA 4. Dia *ngajeni* guru-guru.

*Penulis adalah wartawan majalah *Tempo* dan *Gatra*



Meskipun berpakaian dinas lengkap, bukan berarti tidak berempati kepada para jurnalis.

Sjafrie Sjamsoeddin Setelah 15 Tahun

M. Hernowo*

Jenderal yang cerdas. Itulah kesan pertama saya ketika pertama kali melihat sosok Sjafrie Sjamsoeddin di sejumlah media massa, sekitar kerusuhan Mei 1998 yang membakar Jakarta. Berkat wajahnya yang ganteng, Sjafrie yang saat itu menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya, juga menjadi idola baru di kalangan perempuan, di tengah panasnya suasana politik saat itu.

Dinamika politik di 1998 dan beberapa tahun sesudahnya, memang membuat sosok Sjafrie sempat surut. Sejumlah tuduhan miring bahkan sempat diarahkan kepadanya, seperti diduga melakukan pembiaran peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, dan terlibat dalam kasus di Timor-Timur.

Kesan jenderal yang cerdas, kembali muncul sekitar 15 tahun kemudian, yaitu ketika saya mengikuti *roadshow* pesawat CN-295 milik TNI Angkatan Udara ke enam negara ASEAN, 22-31 Mei 2013 yang dipimpin Sjafrie. T tutur katanya selalu tertata dan terukur. Meski sudah pensiun dari TNI, sosok sebagai prajurit komando masih terlihat jelas di diri Sjafrie. Kelelahan tak pernah terlihat di wajahnya, selama perjalanan 10 hari dengan 44 jam terbang

ke Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia.

Sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie juga menunjukkan visinya yang kuat tentang profesionalisme TNI, industri pertahanan, hingga demokrasi. Menurutnya, profesionalitas TNI amat dibutuhkan demi demokrasi. “Kita sudah memilih demokrasi. Tidak ada jalan kembali. TNI harus mengawal demokrasi ini demi kemajuan bangsa,” katanya di beberapa kesempatan.

Pandangan itu, diduga membuat Sjafrie selalu mendukung upaya untuk membuat TNI semakin profesional. Dalam pertemuan dengan warga negara Indonesia di Manila, Filipina, Sjafrie, antara lain bercerita tentang sejumlah oknum anggota TNI yang harus diproses hukum karena sejumlah persoalan. Misalnya, karena kasus di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta, hingga insiden TNI-Polisi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Namun, Sjafrie juga menceritakan modernisasi alat utama sistem pertahanan yang sedang dilakukan TNI, hingga diharapkan diperoleh postur kekuatan dasar minimum atau *minimum essential force* di tahun 2014.

Sjafrie memang memegang peran penting dalam modernisasi alutsista beberapa tahun terakhir. Sejumlah masalah seperti terbatasnya anggaran dan banyaknya alutsista yang sudah tua, membuat modernisasi alutsista bukan persoalan yang mudah.

Namun di atas berbagai persoalan tersebut, Sjafrie menegaskan, kemandirian harus menjadi prioritas utama dalam modernisasi alutsista. Untuk itu, industri pertahanan dalam negeri harus menjadi prioritas, dan jangan

sampai ada ketergantungan terhadap persenjataan negara tertentu.

Selama roadshow, Sjafrie juga menunjukkan dirinya sebagai *salesman* yang handal. Dengan detail, dia memaparkan pesawat CN-295 produksi PT Dirgantara Indonesia-Airbus Military, kepada pejabat kementerian pertahanan ASEAN yang ditemuinya. Dia juga menjadikan topi tentara dan rompi anti peluru produksi Indonesia yang digunakan TNI, sebagai kenang-kenangan. “Dalam hubungan profesional, adalah baik jika kita juga memberikan cinderamata yang terkait dengan hubungan profesional tersebut,” katanya tentang mengapa memberikan cinderamata hasil industri pertahanan Indonesia.

Akhirnya, kualitas pribadi dan peran yang dimilikinya, telah menjadikan Sjafrie sebagai salah satu sosok yang tak mudah dilupakan dalam sejarah TNI dan bangsa ini secara umum.

Selamat Pak Sjafrie...

**Penulis adalah wartawan*



Di Pulau Nipah, dekat Singapura.

Sjafrie dan Wartawan Sanggabuana

M. Rizal Maslan*

Era Orde Lama dan Orde Baru merupakan zaman penuh resistensi terhadap kehidupan berdemokrasi, termasuk kebebasan pers. Dalam hal tertentu, pihak militer yang dikuasai penguasa di Indonesia sering digunakan dalam memberangus kebebasan berpendapat, termasuk pers atau media massa.

Pembredelan, intimidasi militer terhadap media massa kerap terjadi. Namun, sejak gerakan reformasi bergulir tahun 1998 silam. Kebebasan pers menjadi sebuah euforia. Situasi berbalik, militer dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi sasaran empuk. Kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah dilakukan TNI diungkit dan terbuka.

Sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi TNI dibawa ke pengadilan militer kasus penculikan aktivis pro demokrasi, HAM *Ad Hoc*, kasus Timor Timur, Papua, bahkan kasus penembakan misterius, Tanjung Priok dan Aceh.

Selama ini bagaimana sikap TNI yang begitu tertutup dan ketat terhadap dunia pers. Tak sedikit perwira tinggi TNI, baik yang aktif atau purnawirawan balik menyalahkan pers atas melemahnya TNI. Tetapi banyak juga anggota,

perwira TNI lainnya yang punya harapan TNI bisa diterima lagi oleh rakyat Indonesia.

Upaya membangkitkan moralitas, kepercayaan diri dan reformasi TNI ini mulai memperlihatkan keberhasilan. Bagaimana upaya TNI merangkul dunia pers sebagai mitra bersahabat, bukan lagi 'musuh dalam selimut' di negeri ini. Sosok Sjafrie Sjamsoeddin lah, yang piawai mendekati wartawan dan sejumlah media, untuk membalikan kondisi hubungan antara TNI dan pers ini.

Komunikasi dan diskusi-diskusi yang dilakukan Sjafrie saat menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI ini kerap dilakukan. Walau sebagian rekan-rekan jurnalis atau wartawan pada awalnya menaruh curiga dengan upayanya mendekati wartawan ini.

Kecurigaan yang memang sangat beralasan sekali. Apalagi melihat sosok Sjafrie saat menjabat Panglima Kodam Jaya di tahun 1998. Banyak orang menduga dia berada dibalik kerusuhan dibulan Mei 1998, sebelum Presiden Soeharto. Belum lagi kedekatannya dengan sejumlah perwira tinggi lainnya yang dituduh dalam kasus penculikan aktivis.

Bukan tidak mungkin upaya pendekatannya ini dikatakan untuk mencuci otak (*brain wash*) kawan-kawan jurnalis. Kecurigaan pun hilang. Sjafrie yang saat itu berpangkat Mayor Jenderal diangkat menjadi Kapuspen TNI pun secara terbuka berbagi informasi dan berdiskusi dengan kawan-kawan jurnalis lainnya.

Jurnalis diajak berdiskusi masalah militer, masalah keamanan dan pertahanan yang terjadi saat itu. Setidaknya, upaya ini menjadi suatu bekal tersendiri bagi jurnalis melihat masalah yang dihadapi TNI selama ini. Termasuk mengajak

jurnalis meliput dari dekat operasi Darurat Militer (Darmil) di Aceh tahun 2003.

Meski pada awalnya Operasi Darmil sempat tertutup bagi wartawan. Namun dengan diskusi intens antara Sjafrie dan sejumlah wartawan mengenai positif dan negatifnya sebuah operasi militer dengan pelarangan media massa meliput. Karena pengalaman pahit tahun 1999 dengan lepasnya Timor Timur pasca jejak pendapat.

Militer melarang wartawan media nasional masuk dan dievakuasi, tetapi wartawan media asing dibiarkan leluasa. Akhirnya, berita yang berbau propaganda asing menyebabkan mulusnya Timor Timur lepas dan menjadi negara Timor Leste. Akankah ini juga terjadi dengan Aceh?

Sjafrie menginformasikan bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri mengkuatirkan bila wartawan meliput operasi militer bisa menjadi korban. Alasan itu bisa diterima, tapi pada sisi lain masyarakat juga perlu tahu kebijakan Darmil di Aceh dan apa yang dilakukan TNI dalam memerangi Gerakan Aceh Merdeka dan problematika lainnya.

Panglima TNI yang saat itu dijabat Endriartono Sutarto mengizinkan wartawan masuk ke Aceh. Namun syaratnya, wartawan harus dibekali pelatihan agar tidak menjadi korban dari operasi militer itu sendiri.

“Ya semacam orientasi, dan mengetahui persoalan apa yang sebenarnya terjadi di Aceh, dan apa yang dilakukan TNI,” begitu kira-kira Sjafrie mengatakan rencana itu.

Nah, menjelang operasi militer diberlakukan di Aceh. Sekitar 54 orang jurnalis media cetak, elektronik, online dan jurnalis foto pada 11-15 Mei 2003 dikirim ke daerah Latihan Kostrad, Gunung Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat.

Minggu, 11 Mei 2003 jam 04.50 WIB, ke-54 jurnalis berkumpul dan diwajibkan mengenakan seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) alias loreng. Semua diangkut dengan menggunakan 3 truk reo milik TNI. Walau semua terlihat bersendagurau, tetapi semuanya dag-dig-dug dengan hati dan pikiran masing-masing. “*Ntar* kita mau *diapain yah?* Kalau dilatih militer, *gue* mau kabur,” kata Edy Lahengko, jurnalis senior dari *Sinar Harapan*.

Semua tertawa, tertawa kecut. Dua jam, para jurnalis ini dibawa dari Cilangkap, Jakarta Timur menuju Sanggabuana. Beberapa prajurit TNI, baik dari Puspen TNI, Kostrad dan Kopassus, nampak masih ramah. Namun, menjelang 5 kilometer, Ari B Laksono reporter TVRI bertanya kepada seorang prajurit TNI berseragam loreng, “*Udah* dekat ya Mas?” tanyanya.

Prajurit berpangkat Sersan Kepala yang awalnya ramah, berubah seketika, “*Nggak* tahu, lihat aja nanti. Sebentar lagi *sampe!*” jawabnya. Jawaban ini bagi sebagian rekan-rekan jurnalis yang biasa meliput di Politik dan Keamanan, termasuk TNI sudah paham.

Benar saja, begitu rombongan truk berada dalam jarak 200-300 meter melihat jejeran anggota TNI yang masing-masing membawa kayu bambu sepanjang satu meter lebih. Melihat kami datang, mereka langsung menutup jalan.

“Siap-siap Zal,” ujar Teguh, reporter radio *Elsihnta*. Tiba-tiba, kami pun mendengarkan teriakan-teriakan dari para prajurit TNI ini. “Turun semua! Cepat..cepat! Jangan *lelet kaya kebo..!*” Begitu suara bersahut-sahutan sambil di antara mereka memukulkan kayu ke badan truk menambah kebisingan.

“Wah sial, kantor *gue* salah kirim kali *neh...sialan!*” teriak Jumadi, kameramen *TVRI* sambil bergegas dan loncat dari dalam truk. Entah kenapa, tiba-tiba sejumlah jurnalis tertawa, melihat tingkah Jumadi. “Celana *gue* robek lagi, sialan!” umpatnya.

“*Kok* begini *seeh?* *Kok* militeristik bener *seeh*. *Kok* serius amat gitu?” Itu juga lontaran pertanyaan Tiarma Siboro, yang kala itu masih di bekerja di koran *The Jakarta Post*. Banyak lagi umpatan, gerundelan para jurnalis ketika melihat sikap anggota TNI itu membentak.

“Kalian ingat! Kalian berada di wilayah militer. Tidak ada lagi embel-embel wartawan. Semua sama, harus mematuhi aturan kami. Kalian panggil kami, Pelatih, dan kalian adalah Siswa! Ingat itu! Kalian ingat muka saya ini, seram!!” kata Serka Manongga, salah satu instruktur yang menyambut kedatangan “KOMPI PERS” ini.

Tak hanya itu, kami diminta berjalan berjejer rapi sambil menyanyikan lagu ‘Halo-halo Bandung’. Sekali lagi, karena tak terbiasa, berjalan sambil bernyanyi bukanlah hal yang mudah ternyata, nafas keteteran. Sampai-sampai semua bernyanyi tinggal sayup-sayup dan menghilang suaranya. Kami pun disuruh jongkok, dan diancam jalan jongkok sampai sisa perjalanan menuju gerbang Daerah Latihan Kostrad itu.

“Pilih mana? Jalan jongkok atau nyanyi?” tanya Serka Manongga dan Serka Syahdan dari satuan Kostrad di Cilodong itu. “Siap! Nyanyi!” teriak para jurnalis.

Itulah awal pelatihan dimulai, selanjutnya menaiki tangga menuju bukit di pegunungan Sanggabuwana yang menjadi daerah latihan. Tak hanya menaiki tangga, tapi harus menghitung anak tangga mulai dari bawah sampai atasnya.

Itu hari pertama para jurnalis datang. Selanjutnya materi banyak diisi mengenai pengenalan senjata api, baris-berbaris, kompas siang, kompas malam, *survival*, terpenting adalah dilatih bagaimana meliput di suatu daerah konflik atau perang. Bagaimana seorang jurnalis, kameramen atau fotografer menempatkan posisi seaman mungkin di daerah konflik atau ketika mengikuti patroli militer.

Yang paling menarik adalah sesi latihan Jurit Malam atau Caraka. Jurnalis dilepas satu persatu ke hutan Sanggabuana. Mereka dibekali kata sandi, dan pesan. Pesan ini harus sampai ke perwira TNI yang dituju di pos terakhir. Kami dilepas sekitar pukul 22.00 WIB malam dan hujan.

Teriakan dan jeritan ‘ketakutan’ para jurnalis, antara ketawa dan membuat hati *deg-degan*. Mulai ditakuti kuburan buatan, hantu-hantuan, pocong-pocongan dan menebak barang-barang dikegelapan malam. Kebanyakan, setelah kondisi ketakutan ini, hampir sebagian besar pesan lupa atau kalimatnya sudah ‘keplintir’ hehehe..

Salah satunya penulis. Akhirnya lupa pesan sebagian kata-katanya, akhirnya disuruh *push up* dan berbaring di tanah, dengan muka kena ciptaran tanah yang kena air hujan. Tiba-tiba Letnan Inf. Toni, perwira yang menerima pesan ini berdiri tegap dan menghormat kepada beberapa orang yang datang. Ternyata dia menghormat kepada Sjafrie yang saat itu muncul dari belakang.

“Wah, *elo* kenapa Zal?” tanya Sjafrie.

Penulis pun berdiri dan memberikan hormat seperti Letnan Toni itu. “Siap! Biasa salah pesan,” jawab penulis.

“Oh ya udah, *gue* gak bisa belain *elo* hehehe...*baju* *elo* bau comberan..*kangen* *gue* ama seragam bau kayak gini. Kaya

muda *gue* dulu,” jawabnya.

Penulis hanya menjawab siap juga. Sjafrie pun pamit dan menuju ruang komando. “Siswa, cepat posisi *push up* lagi, sebelum regu kamu datang terakhir. Jangan mentang-mentang dekat jenderal bisa bebas hukuman,” ujar Letnan Toni.

“Ah sialan! Kirain lupa,” jawab aku.

Pembekalan semacam ini kepada jurnalis bukannya selesai begitu saja. Ternyata banyak yang mempersoalkannya, termasuk kalangan DPR, dan sesama jurnalis lainnya. Bahkan, sampai sebagian dikirimkan meliput ke Aceh pun, para jurnalis ini tak sedikit yang dicap sebagai ‘antek TNI’, bahkan nama-nama ke 54 orang ini disebut-sebut sudah di tangan pihak GAM.

Dilematis, di satu sisi pembekalan semacam ini mungkin baru pertama ada di dunia ini. Wartawan Indonesia mungkin paling pertama dibekali latihan seperti ini. Bahkan latihan jurnalis ini pun sempat diliput media asing, sehingga menambah kepanikan tersendiri.

Di Aceh pun, para jurnalis awalnya sempat tegang, kelompok *embeded* dan yang tidak. Belum lagi, ternyata latihan ini tidak menjamin hubungan antara jurnalis dengan prajurit TNI di lapangan harmonis dan lancar. Di satu sisi, ketika jurnalis memberitakan sumber TNI, dicap antek TNI oleh GAM. Ketika memberitakan dari sumber GAM, jurnalis dicap ‘penghianat’. Belum masalah keamanan, masalah dukungan media massa masing-masing dan sebagainya.

Hampir 1-2 bulan, jurnalis eks Sanggabuana meliput Darurat Militer di Aceh 2003. Para jurnalis akhirnya

menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri, dialog dan curhat sesama jurnalis dan personel TNI. Saat itu, pandangan hampir semua jurnalis eks sanggabuana tujuannya satu! Meliput kondisi Aceh dan persoalannya dari dekat! Bukan dari kaca mata dan sumber-sumber di Jakarta. Melihat situasi dan kondisi serta masalah di Aceh, seperti dekatnya jurnalis itu dengan desingan peluru.

Untungnya, saat-saat seperti itu, Sjafrie sering bertandang ke Koops TNI di Lhokseumawe. Sehingga, para jurnalis pun bisa berdiskusi atau sekedar meluapkan curhat atas masalah-masalah yang dihadapi. Hubungan komunikasi ini tidak hanya sampai di situ.

Para jurnalis ini pun kerap melakukan dialog intens tentang masalah Aceh dan keamanan lainnya. Bahkan, bagaimana Sjafrie mendiskusikan penyelamatan atas pembebasan almarhum Ersya Siregar dan Fery Santoro dari RCTI yang saat itu dibawa kelompok GAM Aceh Timur berbulan-bulan.

Sjafrie lah yang sering memberikan *background* terhadap sejumlah isu-isu pertahanan kepada sejumlah jurnalis. Ada yang menyebutkan ini semua atau diskusi yang kerap dilakukan disebut *brain washing*. Cuci otak. Tapi bagi kami, itu sebatas tukar pikiran dan sebagainya.

Sayangnya, sepeninggal Sjafrie dari jabatan Kapuspen TNI. Tidak ada lagi perwira tinggi yang mewariskan forum-forum seperti ini. Bahkan, saat ini ada perwira tinggi di lingkungan TNI yang menyebutkan tidak butuh pers, media massa atau wartawan. Padahal, TNI dan jurnalis masih bisa menjalin hubungan yang baik untuk masyarakatnya.

“Operasi Senyap” di Rumah Dinas Panglima TNI

Seperti biasa, sejumlah kawan-kawan jurnalis *kongkow* bersama Sjafrie Sjamsoeddin, saat masih menjabat Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI. Biasanya, rutin satu bulan sekali pertemuan. Bisa di Media Center TNI di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, atau tempat lainnya yang enak untuk nongkrong dan ngobrol.

Seingat penulis, kala itu ada isu pergantian posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) atau isu *reshuffle* kabinet. Malam itu seperti biasa Kolonel Caj. Ahmad Yani Basuki (sekarang Brigjen dan bertugas di Istana Presiden) dan Kolonel Caj. Nachrowi (sekarang Kabiro Pers Istana) sibuk menelepon semua kawan-kawan jurnalis untuk berkumpul. Pukul 20.00 WIB *teng*, kami diminta berkumpul di Media Center TNI, Menteng, Jakarta Pusat. Pak Yani dan Pak Nachrowi sudah duluan berada di gedung itu. Makanan nasi goreng dan cemilan serta kopi dan teh hangat sudah tersedia.

Tak beberapa lama Sjafrie datang. Mulailah cipika-cipiki sampai membicarakan isu-isu situasi perpolitikan sampai masalah keamanan yang serius, ditengahi canda sana-sini. Sampai pukul 22.45 WIB, tiba-tiba acara disudahi. Ini tidak seperti biasanya, rupanya Sjafrie tiba-tiba diminta menghadap Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.

Semua anak buah Sjafrie, termasuk Pak Yani dan Pak Basuki pun hormat, ketika bosnya masuk mobil dan keluar halaman Media Center TNI. “*Ya udah* nanti kita lanjutkan, waktu sudah malam juga,” ujar Pak Yani dan Pak Nachrowi serentak.

Tetapi beberapa Jurnalis, seperti Tiarma Siboro (*the Jakarta Post*), Edi Lahengko (*Sinar Harapan*), Teguh (*Elshinta*), Ovier Asni (*Suara Pembaruan*), Dona (KCM), Ratna alias Ninis (*Media Indonesia*), Doan (*RRI Pro2*) memilih menunggu. Jurnalis lainnya pulang, termasuk Imelda Sari (*SCTV*).

Beberapa jurnalis yang masih tinggal ini berpikiran pasti Sjafrie dipanggil membahas akan ada pergantian besar-besaran di tubuh TNI AD, yang hari itu isunya memang santer. Akhirnya, dua mobil serta tiga motor yang dipake jurnalis ini meluncur, sambil menerka pasti Sjafrie ke kediaman dinas Jenderal Endriartono Sutarto di Jalan Depasar, Kuningan, Jakarta Selatan.

Iringan ini memang awalnya berusaha mengejar kendaraan Sjafrie yang sudah menghilang duluan dari pandangan kami. Begitu kami memasuki kawasan Jl HR Rasuna Said, dan memutar di depan Kementerian Kesehatan, sebelum kami berbelok arah menuju Jalan Denpasar. Motor Megapro Teguh berhenti. Penulis yang sama-sama menggunakan sepeda motor pun meminta agar semua motor dan mobil Edi Lahengko dan Ratna lampunya dimatikan.

Kami pun terus menyusuri Jalan Denpasar. Sekitar 10 meter menuju rumah Endriartono Sutarto, serentak semua mematikan mesin kendaraannya masing-masing. Tepat kendaraan pun terparkir persis di depan rumah Panglima TNI. Tak seorang pun memperhatikan kami, termasuk para penjaga keamanan di rumah Panglima TNI.

Para jurnalis ini berkumpul sambil memperhatikan keadaan di rumah. “Pada kurang *kerjaan aja elo pada*,” kata Doan sambil *cengegesan* mengepulkan asap rokok Dji Sam

Soe-nya untuk mengusir hawa dingin.

“*Udah* Bang, pasti ada yang serius ini. Pasti isu *gede* dibahas di dalam. Kan kalau dapat kita duluan yang *beritain*,” imbuh Teguh.

Sekitar 10-20 menit kemudian, tiba-tiba pintu rumah Endriartono Sutarto terbuka. Terlihat Endriartono tengah mengantar Sjafrie yang akan pulang. Serentak itu pula, ke-7 jurnalis ini pun masuk halaman dan mencoba masuk. “Selamat malam Pak Tarto,” sapa beberapa jurnalis sambil dorong-dorongan masuk.

“Wah.. Pada *ngapain* itu semua. *Ngapain* itu malam-malam, *nggak* ada berita. Pengawal ini gimana?” jawab Endriartono terkaget-kaget dan berusaha tersenyum. Entah bilang apa, mungkin dia mau berkata “Kamu urus itu,” ke Sjafrie atau bagaimana. Yang jelas Sjafrie langsung berkata, “Ayo balik lagi ke Media Center TNI,” ujarnya.

Seperti anak bebek yang digebah, jurnalis ini *cegegesan* ke luar halaman. Seorang pengawal sempat berujar, “Kok kita nga ada yang tahu *sampean-sampean* datang yah?” ujarnya celangak-celinguk.

Entah siapa yang berujar tiba-tiba salah seorang dari kami mengatakan, ini baru jebolan Sanggabuana, gimana teroris nyerbu. Kami pun tak sempat membahas ini, karena masing-masing mencoba mengejar mobil Sjafrie yang memang langsung kebiasaan ‘menghilang’ itu.

Tak berapa lama kemudian, memang Sjafrie sudah berada lagi di Media Center TNI. Kami kira awalnya Sjafrie akan marah dengan ‘kelakuan’ kami di rumah Panglima TNI itu. Ternyata tidak, dia bilang kebetulan akan menyampaikan informasi walau *off the record*.

Tak beberapa lama, muncul juga Pak Yani dan Pak Nachrowi. Yang ternyata saat itu sudah masuk kawasan tol Pondok Gede dan Bekasi. Akhirnya mereka juga kembali lagi. “Wiiih..mantaps. Padahal *udah* dekat rumah saya,” ujar Nachrowi yang matanya memerah karena mengantuk.

Akhirnya obrolan pun dimulai lagi hingga pukul 03.30 WIB. Membahas peta politik dan pergantian di tubuh TNI AD dan angkatan lainnya.

Aksi Demo

Saat Sjafrie menjabat sebagai Kapuspen, beberapa LSM sempat melakukan aksi demonstrasi terkait isu Darurat Militer di Aceh. Saat itu penulis dan beberapa teman sedang duduk-duduk di warung rokok dekat Kantor LBH. Tiba-tiba, Usman Hamid (Kontras) datang mendekati dan memberitahukan rencana para aktivis melakukan aksi demonstrasi ke Mabes TNI Cilangkap.

Saat hari-H aksi demonstrasi tersebut, Usman menelepon penulis dan menanyakan jalan masuk yang paling memungkinkan menuju Mabes TNI. “Jalan lewat gerbang belakang saja, jangan lewat gerbang depan,” ujar penulis menjelaskan. Gerbang belakang Mabes TNI berada di Jalan Raya Hankam “Kalau dari gerbang depan, pasti ga bisa masuk, karena khusus untuk tamu penting dan para perwira tinggi TNI. Sedangkan tamu biasa, wartawan dan prajurit biasanya lewat pintu belakang,” penulis menambahkan.

Usman bertanya lagi, “Aman *ngga?*”

“Ya, jangan nanya aman apa *ngga*, ya namanya juga sarang tentara; tapi yang pasti sih *nggak* bakal digebuk lah, sekalipun yang kita demo nanti itu Panglima TNI dan

Pak Sjafrie, kan mereka juga dekat dengan wartawan dan sekarang ini sudah peduli soal itu.”

Unjukrasa KontraS dan LSM pemerhati HAM lainnya tidak berlangsung satu kali saja. Saat Sjafrie dilantik menjadi Sekjen Kemenhan, ada kekhawatiran dari sejumlah LSM, seperti KontraS, HRWG, Imparsial, Ikohi—termasuk juga teman-teman jurnalis—yang, antara lain, dikarenakan sosok Sjafrie yang dalam pandangan mereka, masih resisten terhadap isu HAM; kekhawatiran lainnya juga terkait bisnis TNI, dan isu lainnya.

Beberapa teman-teman LSM saat itu bertanya pada penulis, apakah memungkinkan melakukan aksi demonstrasi. “Demo saja. *Lagian gak* bakal mungkin Sjafrie juga *nanggapin*. Tetapi disisi lain, ini juga bisa jadi bukti, benar nggak kekuatiran kita ini beralasan; ya, didemo sih pasti Sjafrie marah, tapi kalau sampai nurunin tentara untuk gebukin demonstran, ya ga bakalan juga, kan,” ujar penulis.

Demo akhirnya berjalan seperti biasanya.. Membawa poster-poster memprotes pengangkatan Sjafrie sebagai Sekjen Kemhan, orasi, lalu bubar. Beberapa hari kemudian, Sjafrie berkata kepada penulis, “Demo itu biasa dialami demokrasi seperti sekarang. Tapi kan *temen-temen ente* juga itu yang demo,” katanya tersenyum.

Toh akhirnya selama KontraS dipegang Haris Azhar ada dua prajurit TNI yang diadvokasi mereka. Salah satu diantaranya adalah seorang Sersan Satu (Sertu) asal Pekalongan yg dikriminalisasi karena melaporkan praktik jual beli pemasangan listrik. Sampai dipenjara, disidang Mahmil, ditabrak, dan diancam mau dibunuh orang tak dikenal.

*Penulis adalah wartawan *Detik.com*



Wamenhan adalah sumber berita yang tidak pernah kering dengan informasi

Sjafrie Sjamsoeddin, Jenderal yang *Humble*

M. Subhan SD*

“**K**e mana aja *lu?*” Begitu kalimat yang kerap dilontarkan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin bila kami cukup lama tak bersua. Kalimat yang semula tidak biasa didengar dari mulut seorang pejabat negara itu, justru terasa akrab, dekat, tak berjarak, *humble*, bersahabat. Memang, Pak Sjafrie biasa menggunakan kata *lu* dan *gua* saat ngobrol. Justru terasa tanpa sekat dan birokratis. Sesama anak Jakarta, walaupun beda generasi, saya merasakan begitu hangat ketika berkomunikasi dengan Pak Sjafrie. Dia bukanlah tipikal pejabat yang menjaga pencitraan atau *jaim* (jaga image).

Selama 20 tahun saya menjadi wartawan, barangkali Pak Sjafrie satu-satunya jenderal yang tak pernah kehilangan hubungan selama lebih dari tiga perempat pengalaman saya di dunia jurnalistik. Sewaktu menyertai kunjungan kerjanya ke daerah atau keluar negeri, Pak Sjafrie selalu menjadi teman bicara yang asyik. Kalau saya “terlepas” saja, beliau langsung mencari-carinya. Dalam suatu kunjungan ke Medan pada awal tahun 2010, anak buahnya mencari-cari dan memanggil-manggil nama saya. Tetapi dia tak menemukan di sejumlah ruang di lingkungan Kodam Bukit Barisan. Saya pun tak mendengar panggilannya, karena

saat itu saya tengah mencuci muka di kamar mandi, setelah perjalanan dari Bandara Polonia. “Dicari Bapak (Sjafrie),” katanya. Padahal hanya diminta untuk makan bersama-sama.

Begitu juga saat mengikuti kunjungan ke Brasil tahun 2012. Bahkan berulang kali sekretaris pribadinya (Sespri) menelepon kamar hotel tempat saya menginap di Sao Paolo, untuk menyampaikan pesan, ”Ditunggu makan bersama Bapak..”. Karena saya tak segera turun ke lobi, telepon genggam saya berdering berkali-kali. Lagi-lagi untuk menyampaikan pesan, “Ditunggu Bapak”. Saya merasakan Sjafrie sangat berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya. Pak Sjafrie sangat *care* sampai-sampai memperhatikan makan untuk wartawan. Inilah yang sulit saya temui bila menyertai kunjungan pejabat-pejabat lainnya.

Pertama kali saya berkenalan dengan Pak Sjafrie saat beliau menjadi Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya yang diembannya sejak 13 Agustus 1996, dan kemudian semakin dekat saat naik jabatan menjadi Panglima Kodam Jaya menggantikan Mayjen TNI Sutiyoso, yang efektif semenjak 15 September 1997 berdasarkan surat keputusan Panglima ABRI Nomor 542/IX/1997, tertanggal 9 September 1997. Saat itu saya menjadi wartawan yang bertugas di lingkungan Kodam Jaya, yang secara otomatis setiap hari bertemu.

Saya melihat ada dua persepsi yang melekat dalam diri Pak Sjafrie. Wacana publik selalu mempersepsikan Pak Sjafrie sebagai tipikal jenderal yang keras, tegas, sangar, bahkan dicurigai terlibat dalam peristiwa-peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Bisa jadi persepsi itu muncul karena kerap kali Sjafrie dilekatkan dengan konflik di Timur-

Timur (kini Timor Leste) antara lain dalam peristiwa Santa Cruz di Dili, tahun 1991. Atau bisa jadi karena dikaitkan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Orang asing, juga medianya, serta kelompok antikekerasan dan publik punya pandangan seperti itu.

Namun, untuk menjelaskan teka-teki perannya dalam peristiwa Mei 1998, misalnya, Pak Sjafrie tak menolak dipanggil Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998. Dia datang ke rumah Bambang W Soeharto, Ketua TGPF. Pak Sjafrie diperiksa selama 2,5 jam oleh TGPF pada Rabu tanggal 26 Agustus 1998. TGPF terdiri dari Bambang Soeharto, Saparinah Sadli, Rosita Noer, Bambang Widjojanto, dan I Made Gelgel. TGPF antara lain mengklarifikasi pendapat di sejumlah kalangan yang menyebutkan pada saat kerusuhan terjadi kevakuman aparat keamanan.

Kepada para wartawan yang menunggu di teras rumah Bambang Soeharto di kawasan Cilandak, Sjafrie enggan berkomentar. Tetapi justru Bambang memberi keterangan. “Banyak alasan yang bisa kita mengerti pada waktu ini, bahwa itulah memang keadaannya. Persoalannya pertama, bagaimana memenuhi kebutuhan pen jagaan. Kedua masalah psikologis karena masyarakat juga sudah begitu tidak ter kendalinya, dan adanya orang-orang dari luar Jakarta dan luar Jawa. Prioritasnya memang pada obyek vital dan sentra ekonomi,” ujar Bambang setelah memeriksa Sjafrie. Pertemuan TGPF dan Sjafrie itu diapresiasi alm. Munir, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Bagi Munir, pertemuan itu langkah maju dari ketertutupan pemerintah

atas berbagai tuntutan pengusutan dan pertanggungjawaban atas peristiwa kerusuhan Mei.

Itu merupakan salah satu penggalan peristiwa yang saya saksikan selama mengenal Pak Sjafrie. Sejumlah peristiwa yang teringat antara lain saat Pak Sjafrie mengusut peristiwa ledakan bom di rumah susun Tanahtinggi, Jakarta Pusat, yang disinyalir terkait PRD. Bahkan pengusaha Sofyan Wanandi sempat diperiksa Bakorstanasda Jaya (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah Jakarta) karena diduga ada dokumen yang menyebut-nyebut eksponen 66 itu; menjaga pengamanan SU MPR 1998; membersihkan premanisme; operasi Gerakan Disiplin Nasional (GDN); hingga pemanfaatan lahan tidur agar produktif dalam Operasi Batara (Operasi Bhakti Tani ABRI-Rakyat).

Persepsi lain, sangat personal. Saya merasakan hubungan dengan Pak Sjafrie melampaui sekedar kolega atau narasumber. Apalagi Pak Sjafrie sangat menjaga hubungan baik dengan wartawan. Pak Sjafrie seringkali mengundang teman-teman wartawan yang dekat dengannya untuk bertemu. Biasanya kami sekedar ngobrol, membicarakan hal yang lucu-lucu, berkelakar, sambil makan malam. Biasanya yang sebar undangan Kolonel DJ Nachrowi, yang selalu mendampingi Pak Sjafrie sejak di Kodam Jaya, Mabes TNI, hingga Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Fokus Alutsista

Begitu akrabnya sampai-sampai beberapa kali tak ada yang tahu bahwa saya adalah wartawan. Saya kerap kali

diposisikan sebagai bagian dari rombongan Pak Sjafrie. Tak enak juga rasanya, karena sebagai wartawan saya selalu memperlihatkan identitas jelas, kecuali saat melakukan liputan investigasi atau menyusup ke daerah-daerah yang tertutup untuk media. Suatu waktu di akhir tahun 2005 saat saya bertugas di Makassar, saya ditelepon Pak Nachrowi. Saat itu Pak Sjafrie adalah Sekretaris Jenderal Kemhan. Pak Nachrowi juga sudah di Kemhan. Di seberang telepon, Pak Nachrowi bilang bahwa Pak Sjafrie akan berkunjung ke Makassar. Di kota kelahirannya itu, Pak Sjafrie hendak melihat dan menyelesaikan aset-aset TNI dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, selain berencana berziarah ke Bone.

Pada Jumat pagi, tanggal 9 Desember 2005, saya berangkat dari kantor *Kompas* di Jalan Pengayoman, Panakkukang, menuju Bandar Udara Hasanuddin. Setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam, saya menuju Pangkalan TNI-AU yang *gate*-nya berbeda dengan *gate* bandara untuk umum. Saya berhenti di pos penjagaan. Petugas menanyakan keperluan saya. Saya jawab bahwa saya akan bertemu Pak Sjafrie. Saya menunggu beberapa menit karena petugas jaga menghubungi personel di bagian dalam. Setelah mendapat lampu hijau saya menuju ruang pertemuan Galaktika.

Namun, saat sampai di depan bangunan itu, saya dihentikan seorang tentara. Saya katakan bahwa saya akan menghadiri pertemuan dengan Pak Sjafrie. Tetapi tampaknya saya tak segera diizinkan masuk ruangan, walaupun saya sudah jelaskan identitas saya. Memang, pertemuan itu tidak mengundang wartawan. Kamera dan video yang saya lihat adalah hanya milik bagian penerangan TNI AU dan Kemhan. Saya

mulai khawatir karena saya tahu Pak Sjafrie sudah mendarat sejak tadi. Artinya, saya akan tertinggal acara dalam pertemuan itu. Akhirnya saya katakan pada seorang tentara berpangkat Letkol, “Saya datang ke sini karena diminta untuk bertemu Pak Sjafrie. Jika dilarang, tidak apa-apa, saya akan pulang dan mengatakan pada Pak Sjafrie bahwa saya dilarang masuk!” Tanpa perdebatan lagi, saya pun diperbolehkan masuk.

Melihat saya, Pak Sjafrie langsung bilang, “Gimana kabar *lu?*” Tentu saya menjawab baik-baik saja. Tetapi saya merasakan pertanyaan itu sangat akrab. Maka saya sulit menemukan “kesangaran” dalam diri Pak Sjafrie. Saya pun diperkenalkan kepada rombongannya, antara lain Dirjen Sarana Pertahanan Dephan Marsma TNI Pieter Wattimena, dan Dirjen Kekuatan Pertahanan Dephan Mayjen TNI Suryadi. Pak Sjafrie meminta saya duduk di dekatnya di meja jajaran perwira tinggi (Pati) itu. Di ruangan itu saya kemudian ikut mendengarkan bagaimana kondisi Skuadron pesawat jenis Sukhoi milik TNI-AU yang sangat memprihatinkan. Pak Sjafrie dan rombongan menyimak dengan baik saat Komandan Sukhoi memaparkan kondisi pesawat-pesawat tempur tersebut.

Bayangkan saja, empat jet Sukhoi yang dimiliki TNI-AU, terdiri jenis Su-27 SK (nomor ekor TS-2701 dan TS-2702, satu tempat duduk) dan Su-30 MK (nomor TS-3001 dan TS-3002, dua tempat duduk), malah lebih banyak diparkir di hanggar Lanud Hasanuddin, karena tak ada suku cadang. Bahkan, ada dua Sukhoi yaitu TS-2701 dan TS-3002, siap terbang tetapi tanpa radar sehingga tak mampu mendeteksi pesawat musuh. Pompa bahan bakar pesawat

TS-2702 sudah kadaluwarsa, sedangkan milik TS-3001 bocor. Saya yang ikut pertemuan itu ngeri melihat kondisi alutsista militer kita. Lalu bagaimana bisa mempertahankan kedaulatan Indonesia dari serangan musuh?

Saya punya amunisi untuk menulis. Saya pikir saat tepat untuk mengangkat tulisan menceritakan kondisi yang kontras, antara kemampuan pesawat tempur dan menjaga kedaulatan negara. Saya menerka saja barangkali itu “pesan” yang disampaikan Pak Sjafrie. Saya pun melengkapi bahan-bahannya, dan saya wawancara lagi sejumlah narasumber. Kondisi Sukhoi itu saya tulis dalam bentuk *feature* dengan judul *Sukhoi dan Kanibalisme Suku Cadang* edisi 2 Januari atau hari pertama kerja tahun 2006. Tak dinyana, tulisan itu membuat kehebohan di Cilangkap. Saya sempat ditelepon oleh seorang jenderal. Tetapi Pak Sjafrie tidak pernah mempermasalahkannya, apalagi menelepon. Saya paham Pak Sjafrie begitu serius merancang untuk memperkuat dan memodernisasi alutsista TNI.

Betapa Pak Sjafrie benar-benar serius memperkuat alutsista TNI yang modern, saya saksikan kembali saat menyertainya melakukan kunjungan kerja ke Brasil, pada November 2012. Saya memang satu-satunya wartawan dalam rombongan Pak Sjafrie yang saat itu sudah menduduki Wakil Menteri Pertahanan. Dalam delegasi Indonesia, ada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhi Wibowo, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Kepala Badan Diklat Kemhan Mayjen Suwarno, juga Dubes RI untuk Brasil Sudaryomo Hartosudarmo. Brasil memang menjadi alternatif perhatian untuk memperkuat alutsista TNI. Dalam beberapa tahun ini,

industri militer Brasil berkembang pesat. Dalam kunjungan itu Sjafrie memimpin pembelian kelanjutan pesawat Super Tucano yang cocok untuk beroperasi menjaga perbatasan dan roket Astros.

Sjafrie berdiskusi dengan petinggi Embraer, produsen pesawat Super Tucano, di Sao Paolo. Dia juga melihat langsung pabrik dan proses pembuatan roket Astros di pabrik Avibras di San Jose Dos Campos. Bahkan tidak henti-hentinya berdiskusi dengan Presiden Avibras Sami Youssef Hassuani. Sebelumnya, Sjafrie memimpin pertemuan dengan delegasi Brasil yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Bersenjata Brasil Jenderal Jose Carlos de Nardi di Kantor Kemenhan di ibu kota Brasilia. Sjafrie meyakinkan pemerintah Brasil untuk membuat payung hukum agar kerjasama kedua negara di bidang militer berlangsung baik. Saya selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan. Pak Sjafrie membiarkan saya ikut menyimak pembicaraan penting. Kembali saya menangkap “pesan” Pak Sjafrie

Penguatan alutsista memang tidak main-main. Apalagi sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Sjafrie bertanggung jawab terhadap alutsista TNI. Pemerintah sudah memutuskan bahwa pemenuhan alutsista TNI diarahkan untuk mencapai kekuatan dasar minimum atau *minimum essential force* (MEF). Untuk mempercepat pengadaan alutsista antara lain melalui akselerasi, paralelisasi (pengadaan dan pembiayaan), integrasi (Kemhan dan TNI), koordinasi, dan inspeksi (kunjungan ke produsen), dibentuklah *high level committee* (HLC) sejak 2011. Sjafrie menjadi Ketua HLC, sehingga bisa dibayangkan betapa besar tanggung jawab modernisasi alutsista berada

di pundaknya. Untuk mendukung percepatan MEF, pemerintah mengalokasikan dana Rp 50 triliun untuk periode 2010-2014.

Menyiapkan Bahan Buku

Ketika banyak jenderal membuat memoar atau biografi, sampai awal dekade tahun 2000-an Sjafrie belum mau juga menyusun pengalamannya dibukukan. Saya beberapa kali memprovokasi agar Pak Sjafrie segera membuat buku. Menurut saya, pasti banyak pengalaman Pak Sjafrie yang menarik untuk dibaca dan menjadi cermin generasi berikutnya. Apalagi dia termasuk tentara yang begitu cepat bersinar dan mendapat tugas yang luar biasa istimewa. Contohnya saja menjadi pengawal Presiden Soeharto. Artinya, sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Pak Sjafrie bertanggung jawab terhadap keselamatan Pak Harto. Termasuk menjamin keselamatan Pak Harto saat berkunjung ke Bosnia-Herzegovina tahun 1995 di bawah incaran *sniper* dan moncong senjata perontok pesawat.

Namun, suatu waktu saya dihubungi Pak Nachrowi, yang menduduki Kepala Dinas Penerangan Umum Puspen TNI yang saya kenal lama sejak menjadi Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya. Pak Nachrowi bilang kira-kira begini: Pak Sjafrie meminta bantuan untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa yang dilakoninya. Saya tanya, apakah Pak Sjafrie mau bikin buku? Ternyata tidak atau tepatnya belum. Pak Nachrowi bilang, Pak Sjafrie hanya ingin mendokumentasi pengalaman-pengalaman hidupnya, mumpung ingatan masih segar. Wah, saya

langsung mengiyakan untuk membantu mendokumentasi pengalaman-pengalaman hidup Pak Sjafrie.

Akhirnya bersama Mbak Eni dari *Suara Pembaruan*, saya mendapat tanggung jawab untuk menggali pengalaman-pengalaman Pak Sjafrie. Kami lalu melakukan wawancara dengan Pak Sjafrie, mungkin sekitar satu tahun. Jadwal wawancara setiap minggu, biasanya malam hari sesudah maghrib. Umumnya kami lakukan wawancara di rumah Pak Sjafrie di Cijantung atau di sebuah rumah di daerah Denpasar, Kuningan. Untuk memudahkan proses penggalian data itu, kami memulai saja secara kronologi yaitu mulai lahir, masa kecil, masuk tentara, dan seterusnya. Sayang proses itu berhenti saat penugasan di Timor-Timur dan Aceh. Tetapi saya membayangkan buku memoar Pak Sjafrie yang merupakan tentara yang karirnya cepat meroket itu akan banyak dibaca orang, yang ingin mengetahui perannya dalam peristiwa-peristiwa penting di negeri ini.

*Penulis adalah wartawan Harian Umum *Kompas*

Pernah Minta Wartawan Jadi “Pengawal Presiden”

Mansyur Barus*

Ada rasa bangga menjadi wartawan Istana atau wartawan Kepresidenan pada era Presiden Soeharto. Setiap wartawan mengantongi tanda pengenal wartawan Sekretariat Negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Militer Presiden yang berpangkat mayor jenderal.

Pada peristiwa Mei 1998, saat Jakarta dilanda kerusuhan, tanda pengenal wartawan Sekretariat Negara itu sangat bermanfaat untuk menjadi tanda pengenal masuk ke kawasan Istana Negara/Istana Merdeka dan kediaman Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta.

Waktu itu Panglima Kodam Jaya adalah Mayor Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Saat melakukan inspeksi ke kawasan Istana ia menginstruksikan kepada para komandan pengawal kesatuan yang ada agar memberi akses kepada wartawan yang memiliki tanda pengenal wartawan Istana Negara tersebut. Instruksi Sjafrie itu begitu mujarab, sehingga para wartawan tidak mengalami kesulitan masuk ke kawasan Istana dan Sekretariat Negara. Padahal saat itu kondisi Siaga I. Lingkungan Istana dan Sekretariat Negara dipasang berbagai blokade ketat, semua pasukan yang mengawal bersenjata siap untuk ditembakkan. Tidak ada satupun manusia atau anggota masyarakat biasa yang boleh lalu-lalang memasuki

kawasan tersebut. Otomatis kota Jakarta lumpuh total, tetapi suasana justru menjadi aman.

Apa yang menjadi keputusan Sjafrie itu tentu saja menyenangkan para wartawan yang meliput di Istana Kepresidenan karena selama ini kami telah mengenal Sjafrie yang pernah bertugas di lingkungan Pengawal Presiden sebagai Komandan Grup A Paspampres. Sebagai komandan, boleh dikatakan Sjafrie selalu berada di dekat Presiden Soeharto. Bahkan sejumlah wartawan senior sudah mengenal Pak Sjafrie sejak masih perwira Letnan Satu, dan menjadi Komandan Pengawal Pribadi (Walpri) Presiden Soeharto.

Meski mendapat tugas yang sangat penting sebagai Komandan Pengawal Presiden, Sjafrie tetap ramah kepada wartawan yang terkadang ingin sesuka hati dalam meliput acara kepresidenan. Ada hubungan yang luar biasa antara wartawan dengan para pengawal presiden itu. Sepertinya sudah menjadi suatu keluarga besar. Ada keakraban antara wartawan dan para pengawal seperti Sjafrie. Keakraban terjadi saat-saat Presiden Soeharto sedang mengadakan pembicaraan atau menerima tamu, sehingga para pengawal tidak perlu berada di dekat presiden.

Namun dalam keakraban itu, aturan tentang keamanan Kepala Negara tetap menjadi prioritas utama. Saat Presiden Soeharto tidak boleh didekati wartawan, Sjafrie sendiri akan turun tangan melarang wartawan yang selalu mencoba-coba makin dekat dengan Presiden Soeharto.

Hebatnya, meskipun Sjafrie tidak lagi bertugas sebagai komandan pengawalan presiden dan saat itu sudah pindah menjadi Komandan Korem Suryakencana Bogor, saat dite-

lepon ia masih tetap menjawab. Hanya saja saat menjadi Pangdam Jaya, saya tidak pernah meneleponnya lagi, namun jika bertemu tetap ramah dan mengingat nama saya.

Peristiwa Dresden

Saya mengenal Sjafrie saat ia menjadi komandan pengamanan Presiden Soeharto. Kesan paling mendalam adalah saat Sjafrie menjadi komandan pengawalan Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Jerman dan mampir di kota Dresden.

Saat itu Timor Timur masih merupakan provinsi ke-27 Indonesia dan setiap Presiden Soeharto ke luar negeri, selalu saja ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan Timtim dari Indonesia melakukan demonstrasi. Saat di Dresden, demo yang dimotori para pemuda Timtim di luar negeri juga melakukan demonstrasi. Demonstrasinya juga brutal. Para demonstran membawa peralatan dapur dan memukulinya saat Presiden Soeharto dan rombongan melintas. Bahkan para demonstran berada di gapura sebuah kompleks yang dilalui rombongan dan dari atas menaburkan kertas yang berisi penghinaan kepada Indonesia. Sebagian kertas-kertas kecil yang ditaburkan itu sampai jatuh menimpa kepala rombongan termasuk Presiden Soeharto sendiri.

Wartawan yang meliput kunjungan Presiden Soeharto itu turut merasa tersinggung dengan perlakuan terhadap rombongan Kepala Negara. Saat itu Kolonel Sjafrie adalah komandan pengawalan Presiden yang selalu berada sangat dekat dengan Presiden Soeharto.

Keadaan terasa sedikit gawat karena para pendemo terus berusaha mengganggu rombongan. Sjafrie yang sangat

dekat dengan wartawan sampai minta kepada wartawan kali itu ikut mengamankan rombongan. Sehingga komposisi rombongan, Pak Harto dan rombongan pejabat berada di tengah-tengah, dikawal ketat oleh pasukan pengawal presiden, kemudian di bagian luar adalah para wartawan dan anggota rombongan lainnya.

Sjafrie terlihat tenang dengan komposisi seperti itu, hingga akhirnya rombongan berhasil meninggalkan lokasi yang dipenuhi para demonstran yang mendesak agar Indonesia melepaskan Timor Timur dari NKRI.

Mengawal Presiden ke Bosnia

Pada waktu Sjafrie masih menjadi Komandan Grup A pengawal presiden, Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Bosnia yang saat itu masih dalam dilanda perang saudara. Rombongan Presiden ke Bosnia sangat terbatas, tentu saja termasuk Komandan Grup A Pasukan Pengawal Presiden, Sjafrie Sjamsoeddin.

Para wartawan kecuali wartawan *Antara* yang ikut rombongan ke Bosnia menggunakan pesawat PBB, semuanya tinggal di Kroasia. Sebagai wartawan Indonesia, ada perasaan was-was Presiden Soeharto dan rombongan berangkat ke Bosnia, padahal beberapa jam sebelumnya sebuah pesawat PBB yang membawa utusan khusus Sekjen PBB ditembaki saat akan mendarat di Bosnia.

Akhirnya, Presiden Soeharto dan rombongan kembali dengan selamat dari Bosnia termasuk tentu saja Sjafrie meskipun ketika itu berwajah tegang. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, semua aman. Saat pesawat yang membawa rombongan Presiden Soeharto akan mendarat di Bosnia,

tidak ada tembakan sama sekali, padahal seperti yang diceritakan Sjafrie dalam buku 34 Wartawan Istana, para penembak jitu dari kedua belah pihak yang bertikai telah siap di masing-masing sisi landasan pendaratan pesawat.

*Wartawan senior *Harian Suara Pembaruan*



Memberi keterangan beberapa jam setelah dilantik menjadi Wamenhan oleh Presiden RI di Istana Negara.

Tokoh Seperti Dia Pantas untuk Tugas Lain di Masa Depan

Margiono*

Di komunitas pers Indonesia, Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin dikenal sebagai tokoh militer yang pintar, hangat, dan tidak banyak bicara. Saya pribadi tidak mampu mengenal dengan mendalam sosok yang secara umum saya persepsikan sebagai cendekiawan TNI yang serba bisa dan diterima banyak kalangan.

Saya mendengar dan tahu Pak Sjafrie memiliki hubungan baik dengan wartawan. Bahkan sejumlah rekan wartawan senior bilang punya hubungan sangat baik dengan Pak Sjafrie. Sangat baik bagaimana, tanya saya. “Orangnya sangat mengerti tentang wartawan,” katanya.

Tentu, keistimewaan Pak Sjafrie juga diperoleh karena sejarah panjang kariernya di kemiliteran. Jabatan sebagai ajudan Presiden Soeharto, kemudian Pangdam Jaya (1997-1998), lalu Kapuspen TNI (2002-2005), Sekjen Departemen Pertahanan (2005-2010), dan kini wakil menteri Pertahanan RI (2010-sekarang) adalah bidang-bidang tugas yang menjadikan Pak Sjafrie sebagai jenderal yang “lengkap”.

Dalam pandangan kami sebagai orang pers, tokoh seperti Sjafrie layak menempati tugas-tugas penting ke depan, di negeri tercinta ini. Integritasnya tentu tak perlu diragu-

kan. Kemampuan komunikasinya yang sangat baik, dan adaptasinya yang tinggi terhadap berbagai jenis situasi, sangat memungkinkan tokoh seperti dia akan terus bertahan. Emosinya yang matang dan terkendali, tampaknya menjadikan modal penting bagi suksesnya tugas yang diberikan kepadanya.

Pak Sjafrie, menurut saya, juga pejabat yang punya wawasan luas tentang banyak masalah. Kemampuan dan kemauannya untuk terus belajar, akan menjadikan dia tokoh yang tak pernah ketinggalan zaman.

Karena itu, buku ini, pasti menyenangkan siapa yang membacanya. Isinya adalah pengetahuan, pengalaman, keteladanan, dan inspirasi untuk maju.

*Ketua Umum *PWI Pusat*

Menteri Tampan yang Pintar Jualan

Muhamad Ihsan*

Sebagai wartawan ekonomi dan bisnis, saya memberi perhatian serius ketika Sjafrie Sjamsoeddin pada saat dia ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Sekarang Kementerian Pertahanan—Red.) Indonesia pada tahun 2005. Waktu itu dia mendapatkan tugas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Pertahanan Juwono untuk mengubah citra Departemen Pertahanan yang dikenal sebagai departemen yang tidak efisien, sarat KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme—Red.) dalam penggunaan anggarannya, namun tak ada pihak luar yang berani menyentuhnya. Bagaimana pun, kekuatan Orde Baru—yang ditulangpunggungi TNI—masih menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Persoalan terkait KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) peninggalan Rezim Orde Baru ini memang sudah sangat kronis ketika Sjafrie masuk. Kebocoran di departemen pertahanan diperkirakan 30%. “Saya sungguh sedih, bagaimana mungkin para pejabat kita diterima di sebuah ruko untuk pembelian sejumlah tank yang harganya puluhan miliar Rupiah,” cerita Sjafrie dalam sebuah seminar. Sjafrie pada akhirnya menemukan sumber masalah terbesar:

adanya margin besar yang diambil calo alias makelar senjata. Namanya makelar senjata tentunya bukan orang-orang sembarangan. Cukup banyak nama-nama besar yang terkait kepada penguasa bermain di sini.

Karena itu Sjafrie lantas mengoptimalkan upaya untuk mengadakan revitalisasi dalam manajemen pengadaan. Untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi, Sjafrie membuat *Dealing Management Centre*. Boleh dibilang secara umum Sjafrie mampu mengubah stigma buruk di Departemen Pertahanan. Kini, Kementerian Pertahanan tidak lagi dianggap sebagai tempat pemborosan anggaran negara. “Dengan adanya pembenahan, penataan, efisiensi, itu bisa kita buat sesuatu yang lebih menambah kemampuan, tapi belum maksimal. Contoh ya, tahun 2008 gaji pokok naik 20 persen,” cerita Sjafrie.

Landasan Strategis

Sjafrie bercerita bahwa dia memang mendapatkan tugas khusus dari Presiden SBY, di samping membantu Menteri Pertahanan tentunya, untuk mengembangkan industri pertahanan di dalam negeri serta memperkuat sistem pertahanan Indonesia. “Setelah Presiden SBY memberikan arahan revitalisasi industri pertahanan di Kementerian Pertahanan tahun 2004, sejak saat itu mesin dari semua pemangku kepentingan segera bekerja,” ujar Sjafrie. Kementerian Pertahanan, ujar Sjafrie, akan bertindak sebagai pembuat regulasi dan kebijaksanaan pembinaan industri pertahanan, TNI sebagai pengguna. “Dan industri pertahanan sebagai produsen dalam negeri, menyatu dalam target merevitalisasi industri pertahanan untuk membangkitkan kekuatan in-

dustri pertahanan dalam negeri,” tandasnya.

Menurut Sjafrie, berbagai langkah, strategi, dan regulasi segera diambil. Pemerintah yang diperankan oleh Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan bersama TNI dan Polri serta instansi pemerintah lain sebagai pengguna, segera menerjemahkannya.

Langkah berikutnya, Presiden pada 2010 telah membentuk suatu badan kebijakan nasional industri pertahanan yang disebut Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Tugas yang diemban oleh KKIP adalah mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, baik alutsista maupun non-alutsista.

Sejak saat itu Indonesia sebenarnya telah memiliki visi, misi, dan strategi dasar pembangunan industri pertahanan. Apalagi pemerintah dan DPR pada 2012 menetapkan Undang-Undang Nomor 16 tentang Industri Pertahanan Negara sebagai legalisasi dan legitimasi menghidupkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Implementasi dari strategi tersebut saya saksikan langsung ketika mengikuti dia dalam sebuah perjalanan ke beberapa negara Afrika. Sjafrie mengatakan bahwa saat ini Indonesia harus banyak melakukan terobosan di pasar Afrika. “Indonesia mempunyai nama yang bagus di negar-negara Afrika karena dikenal sebagai pelopor dan inisiator gerakan Non-Blok dan kebangkitan Asia-Afrika,” cerita Sjafrie.

Menurut Sjafrie, karena menyangkut penjualan senjata, maka hubungan dagang dimulai dengan *Government to Government Relation* (G to G) sebagai “payung”. “Apa-

bila sudah ada penjajagan, maka pembeli bisa langsung berhubungan dengan perusahaan pembuat,” ujarnya. Dalam hal sudah terjadi persetujuan, maka pihak Kemenhan akan mengeluarkan izin ekspor. “Hal ini diperlukan untuk memastikan agar senjata tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak diinginkan,” tandasnya. Sedangkan terkait masalah harga, pihaknya tidak menyentuhnya sama sekali.

Langka G to G juga efektif untuk memperpendek mata rantai penjualan. Sebab, lanjutnya, apabila menggunakan agen, maka pembeli bisa mendapatkan harga yang jauh lebih mahal. Sebagaimana diketahui, untuk pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Indonesia di masa lalu juga pernah didominasi oleh agen-agen yang membuat harganya melambung tinggi.

Tidak Seperti Birokrat

Sjafrie Sjamsoeddin, yang berwajah tampan ini, memang berani mendobrak kekakuan birokrat. Dalam perjalanan selama beberapa hari di kawasan Afrika, mengunjungi Uganda dan Senegal, Sjafrie dengan penuh keyakinan menjalankan tugasnya, memasarkan produk-produk pertahanan milik industri pertahanan nasional. “Ketika menjabat sebagai Wamenhan, Presiden memberi saya tiga tugas khusus, di samping membantu Menhan. Pertama, membuat *policy* bagi pertahanan. Kedua, mengembangkan angkatan bersenjata Indonesia. Ketiga, mengembangkan industri pertahanan dalam negeri,” cerita Sjafrie.

Langkah-langkah ini memang terlihat dalam berbagai pertemuan dengan menteri-menteri pertahanan di negara-negara yang dikunjungi, walaupun gaya bahasanya terlihat

sangat diplomatis. “Kami ingin membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pengalaman dan fasilitas yang kami miliki mungkin bisa menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak,” adalah kalimat yang biasa dia gunakan untuk membuka komunikasi dengan mitranya. Menurut Sjafrie, dalam diplomasi sangat penting memelihara sopan-santun dan *mood* lawan bicara, tapi tetap menunjukkan kekuatan kita. “Indonesia harus menunjukkan dirinya sebagai bagian dari *regional power*,” tegasnya.

Sjafrie juga meminta para dubes untuk membantu tugasnya menjadi salesman negara. “Dubes juga harus membantu memasarkan produk-produk BUMN sebagai bagian dari tugasnya,” ujar Sjafrie ketika dijamu Duta Besar RI di Dakar, Andradjati, yang bertugas sebagai dubes di 8 negara Afrika, seperti Kongo, Gambia, Mali, Sierra Leone, Pantai Gading, Gabon, dan Guinea Bissau. Selanjutnya, ketika mengunjungi Menteri Pertahanan Senegal, Augustine Tine, Sjafrie juga buru-buru menambahkan bahwa, “Untuk urusan selanjutnya mohon Yang Mulia berkomunikasi dengan Dubes kami,” ujarnya sambil menunjuk Andradjati.

Sesuai amanat konstitusi, cerita Sjafrie, Indonesia harus mengakselerasi jaringan industri pertahanan internasional. “Pada tahun 2014, seluruh benua harus sudah tersentuh kerjasama kegiatan pertahanan,” tegasnya. Di Afrika sendiri, lanjut Sjafrie, Indonesia sudah menjalankan berbagai misi, baik sebagai *peace keeping* (beberapa anggautan kontingen Garuda sempat dijumpai Sjafrie di Uganda), *observer*, maupun kerjasama-kerjasama lainnya. “Kongo, Haiti, Darfur adalah beberapa tempat di mana kita terlibat,” ujarnya.

Sebelumnya, Sjafrie juga sudah membantu memasarkan alutsista Indonesia ke beberapa negara di kawasan Asia dan Timur Tengah. Sjafrie mempunyai keyakinan kuat bahwa untuk ukuran teknologi menengah Indonesia mempunyai kekuatan yang dapat dipasarkan ke negara-negara yang sedang berkembang. Saya kira ini bukan hanya pilihan yang masuk akal, tapi memang merupakan pilihan yang cerdas. Kementerian Pertahanan ini memang sudah dinyatakan sebagai Kementerian yang boros dan bocor. Kami akan menghilangkan itu, 30 persen kebocorannya. Tiga tahun terakhir ini, kami optimalkan upaya untuk mengadakan revitalisasi dalam manajemen pengadaan.

*Penulis adalah Pemimpin Redaksi *Warta Ekonomi*
dan salah satu Pendiri Forum Pemred

Mengenal Dekat, Berkawan Dekat

Nasihin Masha*

Saya tidak mengenal Sjafrie Sjamsoeddin dari awal. Publik, termasuk saya, mengenal sosoknya saat terjadi peristiwa Dresden, Jerman, pada 1995. Saat itu terjadi demonstrasi menolak kedatangan Presiden Soeharto di kota itu. Sjafrie, yang saat itu masih berpangkat kolonel, tampak paling menonjol dalam liputan televisi. Posturnya yang tinggi dan wajahnya yang ganteng sangat membantunya. Namun bukan itu yang membuat dia tampak menonjol. Tapi kegesitannya dalam bertindak. Sejak itulah publik mulai mengenalnya. Padahal dia ‘hanyalah’ komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden. Grup ini memang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengamanan presiden. Tapi tetap saja dia bukan komandan tertinggi di Paspampres.

Figur Sjafrie, anak seorang pensiunan mayor jenderal TNI, makin berkibar ketika dia menjadi Pangdam Jaya. Lagi-lagi ini soal kegantengannya. Suaranya yang cempreng dan pernyataannya yang sebetulnya tak serunut misalnya Syarwan Hamid, mantan kapuspen TNI yang kemudian menjadi Kassospol TNI, tetap saja tak mengurangi kekaguman publik pada Sjafrie. Ia menjadi *media darling*. Apalagi ia memimpin Kodam Jaya, kodam paling bergengsi.

Rentetan jabatan sebelumnya memang selalu di tempat favorit. Ia adalah lulusan terbaik Akabri 1974, juga pernah menjadi Danrem Surya Kencana, Bogor. Penugasan di Timor Timur maupun Aceh selalu sukses. Demikian pula ia selalu terpilih untuk mengikuti pendidikan penting di luar negeri. Perwira Kopassus ini segera saja menjadi kandidat kuat untuk menjadi pimpinan ABRI, nama TNI saat itu, di masa datang.

Namun ketika menjadi Pangdam Jaya, terjadi kerusuhan Mei. Ia dianggap ikut bertanggung jawab. Namanya mulai tenggelam. Padahal apalah arti seorang Sjafrie. Dia hanya jenderal bintang dua. Huru-hara yang kemudian menjatuhkan rezim Soeharto itu bukan peristiwa yang sederhana. Itu peristiwa politik besar. Seorang Pangdam tak mungkin bisa menghentikan laju sejarah tersebut. Karena itu, ada yang menyebutkan bahwa dia sial saja: berada di tempat dan waktu yang salah. Tak heran jika Sjafrie tak tenggelam. Dia tetap berkibar, walaupun tak bisa menduduki jabatan komando apalagi menjadi KSAD maupun Panglima TNI. Dia bahkan tetap memainkan peran penting. Kemampuan, penguasaan jaringan, pengetahuan, karakter, kematangan, dan kecerdasan yang dimilikinya tak bisa diabaikan begitu saja.

Kapuspen TNI

Perkenalan saya yang intensif dengan Sjafrie adalah sejak ia menjadi kepala Pusat Penerangan TNI. Saat itu saya berposisi sebagai redaktur pelaksana di Republika. Secara rutin ia mengundang beberapa wartawan senior untuk berdiskusi. Maksudnya adalah wartawan yang biasa meliput

di lingkungan TNI. Kebetulan saya sejak awal menjadi reporter mendapat penugasan liputan di lingkungan TNI. Di masa Orde Baru, liputan TNI adalah liputan bergengsi. Walau saat itu tidak bisa disebut Indonesia sebagai negeri junta militer, tapi militer adalah yang menguasai Indonesia.

Ketika itu TNI ibarat raksasa yang terluka. Bukan luka ringan, tapi luka yang parah. Dominasi militer dalam kekuasaan selama 32 tahun membuat publik menumpahkan kemarahan bukan hanya ke Soeharto, tapi juga ke militer, termasuk Golkar. Tuntutan pengadilan HAM terhadap sejumlah jenderal—untuk kasus terbaru maupun kasus-kasus lama—begitu kuat. Di parlemen juga gencar menuntut agar militer kembali ke barak. Penghapusan dwifungsi ABRI tak terelakan. Tuntutan penghapusan lembaga teritorial TNI juga sangat kuat. Publik menuntut penghapusan Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, dan Kodam. TNI hanya dibolehkan memiliki lembaga-lembaga organik perang, seperti halnya di negeri-negeri maju pada umumnya.

Sebagai Kapuspen di masa seperti itu bukanlah perkara mudah. Namun TNI memang selalu jeli dan cepat mengambil keputusan. Puspen TNI justru dinaikkan statusnya. Jika dulu dijabat perwira berbintang satu, sejak Sjafrie dijabat perwira berbintang dua. Kapuspen menjadi bagian dari unsur pimpinan. Inilah yang kemudian diikuti oleh institusi-institusi negara yang lain. Sehingga seorang juru bicara bisa cepat dan tepat menyampaikan sesuatu. Ini karena ia ikut dalam rapat pimpinan di institusinya.

Namun sebagai raksasa yang terluka, Sjafrie tahu diri. (Sekedar catatan, seorang wartawan senior yang sangat dekat dengan TNI demikian benci pada TNI. Ia menyebut bahwa

TNI bukan sekedar tiarap pada saat kerusuhan Mei 1998, tapi justru menggali lubang untuk sembunyi. Pura-pura tak tahu dan tak bertanggung jawab). Tak heran, walau Puspen TNI kini menjadi institusi penting, Sjafrie tak banyak tampil ke publik. Ia mengubah gaya dan strategi. Ia sadar publik sedang marah pada TNI. Karena itu Sjafrie membangun berbagai level jaringan, dari level wartawan lapangan hingga ke level wartawan menengah dan pimpinan. Pengembangan jaringan pun dilakukan ke lembaga-lembaga lain yang dinilai penting. Ia juga begitu peduli terhadap isu *contingency plan*. Ia melihat jika dibiarkan ada bahaya yang menghangat terhadap gerak sejarah saat itu.

Melalui diskusi rutin dengan wartawan dan berbagai pihak itulah Puspen bisa membangun pengertian sekaligus menggali opini publik. Namun gangguan selalu datang, di tengah kesibukannya menata komunikasi publik, muncul laporan International Crisis Group. Inilah lembaga yang memfokuskan diri pada analisis dan riset tentang gerakan terorisme. Laporan itu disusun oleh Sidney Jones. Laporan ini mengesankan seolah Sjafrie berkomunikasi dengan teroris, karena hubungannya dengan Fauzi Hasbi Geudong, orang Aceh, yang diduga ada di rusuh Ambon. Laporan itu tentu menjadi batu ujian bagi Sjafrie. Akhirnya Sjafrie dan Sidney bertemu di sebuah hotel di Jakarta. Hasilnya, ICG mengoreksi laporannya.

Memang di saat itu, banyak jenderal yang rontok dan kehilangan jabatan karena berbagai tuduhan. Namun Sjafrie justru terus menanjak.

Sekjen Kementerian Pertahanan

Sjafrie dinilai sukses sebagai kepala Puspen TNI. Namun latar sejarah penugasannya tak mungkin ia berada di jalur pangkotama, bahkan staf di lingkungan TNI. Karena itu ia menjadi Sekjen Kemenhan. Pangkatnya pun naik menjadi berbintang tiga, letnan jenderal. Kebiasaannya menggelar diskusi rutin dengan wartawan tetap dilakukannya. Di sini, ia justru memiliki peran yang jauh lebih strategis. Ada dua hal utama yang ia lakukan. Pertama, memodernisasi organisasi dan sistem administrasi di kementerian pertahanan maupun TNI. Kedua, memperbaiki sekaligus meningkatkan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Ia selalu membayangkan ke depan, Kemenhan seperti halnya Pentagon. Gedung bersegi delapan tempat berkantornya menteri pertahanan Amerika Serikat. Desain ruangan, kelengkapan teknologi komunikasi dan informasi, sistem administrasi, kewenangan, dan tentu termasuk kualitas sumberdaya manusia, manajemen, dan kepemimpinannya. Sebagai sekjen, ia memiliki kewenangan untuk melakukan itu semua. Juwono Sudarsono, saat itu Menhan, memberi keleluasaan pada Sjafrie untuk mewujudkan visinya. Ia membayangkan di Kemenhan ada *operation room* dengan fasilitas teknologi canggih.

Karakternya yang terbuka dan mudah diajak bicara membuat dirinya memiliki pergaulan yang luas. Ia juga memiliki ketajaman dalam melihat beragam jenis reporter: ada reporter pada umumnya, reporter yang pandai menjalin jaringan, reporter yang pandai menggali informasi, maupun reporter yang memiliki kemampuan analisis yang bagus. Ia

bisa memperlakukan mereka sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang mereka miliki. Ia sangat menghargai orang. Ia juga sangat senang berbagi ilmu, wawasan, dan pengetahuan.

Sebagai negara besar—dengan kondisi wilayah, geo-strategis, jumlah penduduk, dan kekayaan sumberdaya alam—ia membayangkan visi TNI seperti apa yang cocok. Sjafrie bukan tipikal jenderal yang menggemari politik. Ia tipikal tentara murni namun dengan pemahaman yang utuh. Saat orang mendorong dia untuk terjun ke politik, dia tak mau meladeninya.

Menurutnya, salah satu kelemahan sistem persenjataan Indonesia adalah karena cuma dari satu rumpun tertentu saja. Katakan, hanya dari garis persenjataan Amerika Serikat saja. Hal ini tentu memiliki banyak kelemahan. Tak hanya dalam hal kemampuan tempur dan manuver, tapi juga ketika dihadang masalah tertentu. Salah satunya adalah embargo. Itulah yang pernah diderita Indonesia. Di masa Bung Karno, persenjataan Indonesia lebih banyak dari Blok Soviet. Sedangkan di masa Orde Baru hanya dari Blok AS. Padahal, ia melihat, Singapura dan Korea Selatan, dua negara yang benar-benar menjadi tangan kanan AS di Asia pun menampung sistem persenjataan dari manapun. Bahkan dalam satu kapal perang milik dua negeri itu bisa berisi bermacam teknologi tempur dari beragam rumpun.

Karena itu, TNI tak boleh lagi memiliki ketergantungan teknologi militer hanya dari satu rumpun saja. Juwono, selaku Menhan, memberi keleluasaan kepada Sjafrie untuk mengeksplorasi sistem persenjataan dari manapun. Keleluasaan serupa juga diberikan Purnomo Yusgiantoro,

Menhan saat ini, kepada Sjafrie yang kini sudah menjadi Wakil Menhan. Ia blusukan ke banyak negara. Tak hanya ke negeri-negeri penghasil senjata utama, tapi juga ke negeri-negeri konsumen dan pengumpul senjata. Di antaranya ke Brunei Darussalam dan Arab Saudi, dua negeri kaya raya. Bahkan ia terkagum-kagum pada Saudi. Negeri itu ternyata tak hanya menjadi konsumen dan pengumpul berbagai teknologi perang tapi juga memproduksinya. Dengan diplomasi khas Indonesia, ia bisa masuk ke dapur mereka hingga yang terdalam.

Dari situlah ia kemudian melihat apa yang sudah dilakukan para pendahulunya. Indonesia sebenarnya sudah meletakkan dasar-dasar yang benar. Indonesia memiliki beberapa BUMN strategis seperti Pindad, PAL, DI, Boma Bisma, Dahana, dan sebagainya. Secara perlahan Indonesia bisa memproduksi tank pengangkut manusia, dek-dek PAL yang panjang sangat cocok untuk menghasilkan kapal perang, DI juga diarahkan untuk memproduksi pesawat militer. Sebagian berdasarkan kemampuan sendiri dan sebagian bekerja sama dengan negara lain, misalnya dengan Korea Selatan. Ia juga blusukan ke negara-negara Afrika untuk memasarkan pesawat-pesawat militer buatan DI.

Selalu Dihadang

Sebetulnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin memanfaatkan Sjafrie secara lebih optimal. Suatu saat ia ingin mengangkatnya menjadi Sekretaris Kabinet. Namun sejumlah LSM segera bereaksi. Sejumlah negara Barat juga ikut bereaksi. Yang dimunculkan adalah isu kerusuhan Mei 1998. Namun jika menilik data Wikileaks, dari laporan

kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta ke negeri asalnya, tak ada laporan soal itu. Yang ada justru soal kiprahnya di Timor Timur. Pertama, laporan soal insiden Santa Cruz. Kedua, kerusuhan pasca jajak pendapat. Sebagai perwira Kopassus, siapapun, pasti punya catatan khusus di Timtim. Itu bagian dari tugas.

Sebagai nasionalis sejati dan tentara profesional, ia tentu akan membela Merah Putih. Namun etika profesional pasti akan membatasi dirinya dari memerangi warga sipil. Karena itu, sesuatu yang kontradiktif jika Sjafrie dihadang pada persoalan penembakan mahasiswa Universitas Tri Sakti. Bahkan ia memiliki analisis tersendiri tentang kasus itu. Adapun kasus Timor Timur merupakan sesuatu yang berbeda. Ia tentara yang ditugaskan untuk perang di sana. Saya sendiri sebagai wartawan punya sikap jelas bahwa Indonesia telah menginvasi Timor Timur, karena itu sudah seleyaknya Indonesia harus melepaskan Timor Timur. Namun kita harus memahami posisi seorang tentara, termasuk Sjafrie.

Tentu kita menjadi bangsa bodoh jika membiarkan diri kita untuk menjegal langkah Sjafrie memasuki wilayah penugasan yang lebih luas setelah ia pensiun. Pengalaman, kemampuan, kematangan, pengetahuan, dan wawasannya sangat bermanfaat bagi bangsa ini. Sebagaimana bangsa Amerika memberikan tempat yang baik pada Colin Powell untuk penugasan-penugasan sipil. Mereka tak pernah menyoal kepemimpinannya saat Amerika melakukan invasi dalam Perang Teluk. Justru kesuksesan dalam perang yang banyak membunuh warga Arab itulah yang membuat namanya melambung. Apapun definisi tentang perang

tersebut. Apakah hanya tentara Irak yang mati? Apakah hanya fasilitas militer yang lebur? Tentu tidak.

*Pemimpin Redaksi *Republika*



Bersama para wartawan senior selesai acara ramah-tamah.

Dari Aceh ke Perang Siber

Nezar Patria*

Tak ada hal luar biasa dari perjumpaan saya dengan Sjafrie Sjamsoeddin, seorang Letnan Jenderal rupawan, yang digandrungi kaum perempuan dan ibu-ibu pada zaman akhir Orde Baru. Pertemuan saya juga hanya sesekali dengan sosok yang kini menjadi Wakil Menteri Pertahanan RI itu. Sebagai wartawan yang meliput isu politik termasuk pertahanan, saya kerap bertandang ke Markas Besar TNI, dan Departemen (sekarang Kementerian) Pertahanan jika ada isu penting.

Ketika diminta menuliskan komentar tentang sosok Sjafrie saya berpikir keras, apa yang berkesan selama berinteraksi dengan jenderal bintang tiga ini? Saya tahu bahwa dia dituduh melanggar HAM di Timor Timur, disebut-sebut terlibat dalam peristiwa pembantaian di Santa Cruz. Ini katanya yang membuat Amerika Serikat masih menaruhnya dalam daftar hitam penjahat perang, dan tak memberikan visa kepadanya untuk masuk ke negeri itu sampai hari ini.

Selentingan lain menyebut dia pernah jadi orang dekat Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto, yang belakangan diberhentikan dari TNI karena kasus penculikan aktivis mahasiswa menjelang jatuhnya kediktatoran orde baru. Yang terakhir ini agak berat buat saya. Sebagai salah seorang

korban dari kasus itu, saya punya beban sejarah. Terutama dalam berhubungan dengan para narasumber yang berurusan dengan kasus yang belum tuntas itu: penculikan aktivis mahasiswa dan Peristiwa Mei 1998.

Tapi pekerjaan sebagai wartawan menuntut saya bersikap “dingin”. Saya harus bisa mengambil jarak dengan persoalan pribadi, agar bisa obyektif dalam mendekati fakta. Demikianlah, saya bertarung dengan diri sendiri untuk mencapai apa yang disebut “standar profesional” itu.

Dengan kesadaran itu pula, suatu hari di Mei 2003, saya mewawancarai Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, dan juga Jenderal TNI (Purn) Wiranto untuk melengkapi bahan tulisan di Majalah Berita Mingguan *Tempo* pada Edisi Khusus “Lima Tahun Reformasi 1998-2003”. Saya bertemu keduanya sebagai seorang wartawan profesional.

Jika ada satu titik di mana saya bisa bertemu Sjafrie, itu juga karena alasan profesionalisme. Sjafrie, seperti berulang-kali diakuinya, adalah prajurit profesional. Seorang militer yang terlatih, dan dengan demikian taat pada komando. Saya adalah wartawan profesional, yang bekerja mencari kebenaran fakta, dan taat pada kode etik jurnalistik. Jadi dalam setiap bertemu Sjafrie, saya selalu menempatkannya dalam bingkai profesionalisme.

Dari sudut itu, saya ingin menyimpulkan bahwa putra Makassar ini adalah tentara yang bekerja dengan prinsip militer yang teguh. Dia juga seorang perwira intelijen militer yang piawai. Saya ingin mengajukan tiga momen perjumpaan dengan Sjafrie, yang membawa saya kepada kesimpulan secara deduktif itu.

Pertama, ketika saya mengerjakan liputan soal mengapa Aceh bergolak untuk edisi khusus *Tempo* yang terbit tahun 2004. Saat itu saya sedang bertugas menulis satu episode dari pemberontakan DI/TII Daoed Bereu'eh di Aceh. Saya agak terkejut menemukan fakta bahwa Lettu Inf. Sjafrie Sjamsoeddin rupanya sudah terjun ke Aceh pada Operasi Nanggala 1977.

Tugasnya waktu itu lumayan berat: memindahkan paksa Abu Daoed, begitu sang mantan tokoh pemberontak itu biasa disapa. Abu Daoed sudah berusia lanjut di tahun 1977 itu. Pemberontakan Darul Islam belum lama usai. Tapi, saat itu Aceh kembali digemparkan oleh deklarasi Aceh Merdeka (AM), 4 Desember 1976, yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro. Soal lain: ABRI khawatir pengaruh Abu Daoed menjelang pemilu saat itu bisa mengancam program orde baru.

Maka, seperti pernah dikisahkan Sjafrie, dia dikirim ke Aceh sebagai perwira muda. Sjafrie baru 24 tahun waktu itu. Dia menyusup sebagai anggota tim sekuriti obyek vital di Aceh Utara. "Kehadiran kami tak boleh diketahui," ujar Sjafrie. Dari sana, dia bergerak ke Pidie. Misinya adalah membawa Abu Daoed ke Jakarta. Untuk keperluan itu, sebuah pesawat sudah disiapkan di Aceh Utara.

Kelak seperti kita tahu, Daoed Bereu'eh berhasil dibawa paksa ke Jakarta. Sang tokoh itu awalnya melawan. Tapi sebuah suntikan penenang, membuat Daoed lunglai. Dari Pidie, dia dibawa dengan helikopter ke Aceh Utara, dan lalu dievakuasi ke Medan sebelum dibawa ke Jakarta. Operasi yang senyap itu dipimpin oleh Sjafrie.

Momen kedua adalah ketika saya selaku Sekretaris

Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bertemu dengan Sjafrie untuk beraudiensi tentang misi penjemputan seorang juru kamera *RCTI* Feri Santoro. Pertemuan itu terjadi pada Mei 2004, saat Feri telah sebelas bulan ditawan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah komando Ishak Daud.

Upaya pembebasan Feri sangat mendesak. Soalnya, seorang wartawan *RCTI* lainnya, Ersa Siregar, yang juga ikut ditawan GAM, tewas tertembak akibat terjebak konflik bersenjata antara pasukan TNI dan GAM. Upaya penyelamatannya terus diusahakan oleh rekan-rekan dari *RCTI* dipimpin oleh Imam Wahyudi. Usaha itu nyaris berhasil. Tapi operasi militer di Aceh baru saja digelar, membuat misi itu semakin sulit. Dengan berkoordinasi dengan Imam Wahyudi dan kawan-kawan, AJI lalu membuat misi khusus ke Aceh Timur untuk pembebasan Feri Santoro.

Bersama Ketua AJI Edy Suprpto dan dibantu wartawan *The Jakarta Post* Ade Siboro (Cerita lengkap lihat tulisan Ade Siboro di bab lain di buku ini), saya bertemu Sjafrie yang saat itu menjadi Kapuspen TNI.

Kami melaporkan bahwa serombongan wartawan baik nasional maupun internasional akan bergerak ke Aceh Timur. Kontak dengan Ishak Daud sudah dilakukan, dan Panglima GAM Peureulak, Aceh Timur, yang terkenal garang itu mengatakan setuju membebaskan Feri dengan catatan harus dijemput wartawan dan tim Palang Merah Internasional (ICRC—International Committee of the Red Cross).

Yang membuat saya terkesan adalah Sjafrie menunjukkan simpatinya pada usaha penjemputan itu. Misi itu



Pangdam Jaya bersama beserta pelatihan *Winning the Media* dalam rangka memperkuat hubungan terbuka secara timbal-balik dengan pers.

melibatkan banyak rekan wartawan, dan AJI bekerja sama dengan ICRC, serta juga IFJ (International Federation of Journalists) untuk bernegosiasi dengan Ishak Daud, dan juga dengan Teungku Hasan di Tiro, pemimpin GAM di Swedia. Semua perkembangan itu rupanya telah diketahui oleh Sjafrie, dan dia memberikan komitmen bahwa TNI berniat kuat untuk bisa menyelamatkan Feri.

Dari pertemuan itu saya bisa menyimpulkan, Sjafrie sangat paham arti strategis media. “Dalam sebuah operasi militer modern, peran media sangat besar. Jika kita bisa memenangkan opini di media, maka separuh kemenangan dari target operasi militer itu sudah di tangan,” ujar Sjafrie saat itu.

Dia lalu mencontohkan bagaimana militer Amerika Serikat memenangkan isu penyerangan Irak di media AS, dengan strategi *shock and awe* dari penerjunan pasukan udara,

dan penyerbuan darat. Liputan media sangat membantu efek kejut dari serangan itu, dan juga membuat militer bekerja sesuai standar, menghormati hukum perang, dan hak asasi manusia. Itu sebabnya, pembebasan Feri baginya penting, agar TNI tidak dikecam media membiarkan wartawan terjebak dalam konflik bersenjata tanpa berusaha menyelamatkannya.

Perhatian tentang arti strategis media ini kelihatannya mendapat tempat sendiri bagi Sjafrie. Demikianlah, dalam pertemuan selanjutnya ketika Sjafrie menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, saya mencatat dia seorang perwira intelijen yang paham arti perkembangan teknologi informasi, terutama terkait isu pertahanan. Itu adalah momen ketiga bagi saya untuk mengenal cara berpikir Sjafrie.

Dalam satu dialog di Kementerian Pertahanan, Sjafrie menyampaikan bahwa Indonesia telah membetuk satu unit khusus menghadapi perang siber (*cyber war*). Indonesia punya unit khusus untuk menghadapi *cyber war*? Ini tentu cerita menarik.

Saya teringat tentang kisah satu bangunan di pinggiran gurun Negev yang tandus di Israel. Negara Yahudi itu mungkin hanya dikenal dengan kekuatan intelijen Mossad atau Shin bet-nya. Tapi tak banyak yang tahu mereka juga punya kekuatan intelijen sinyal yang mumpuni: Unit 8200. Mereka melakukan penyadapan alat komunikasi di seluruh daratan Eropa hingga Afrika.

Tapi, yang harus dicatat dari Unit 8200 adalah kekuatan pasukan elit siber-nya. Upaya dan obsesi Israel untuk memiliki kekuatan siber yang handal, telah dimulai sejak

1990-an. Mereka lalu merekrut para *hacker* jagoan untuk bergabung dengan Unit tersebut.

Satu konsultan di AS memperhitungkan The Unit sebagai salah satu ancaman siber terbesar dunia, di samping China Rusia, Iran, dan Perancis. Salah satu buktinya adalah Stuxnet, sebuah program komputer merusak (*malicious software/ malware*) paling rumit yang pernah ada. Para pakar keamanan komputer menyebut Stuxnet sebagai software senjata super atau *The Super Weapon*, yang akan menjadi model perang siber di masa depan.

Target Stuxnet adalah melumpuhkan aluminium *centrifuge*, sebuah onderdil penting dalam proses pengayaan unsur uranium, yang berada di reaktor nuklir Natanz dan Bushehr di Iran. Sebab, Stuxnet hanya menyerang sistem PLC yang memiliki kondisi-kondisi spesifik yang ada di reaktor itu.

Sebuah aluminium *centrifuge* di reaktor nuklir itu, memiliki rotor yang berputar mengaduk gas uranium dalam kecepatan yang sangat tinggi, untuk memperoleh bagian uranium dengan konsentrasi tertentu yang bisa menjadi bahan bakar reaktor dan bom. Nah, Stuxnet mampu memonitor frekuensi rotor di sistem yang ia infeksi.

Setelah itu, Stuxnet diam-diam akan mengubah-ubah frekuensi putar rotor-rotor di sistem target, sehingga menyebabkan tabung *centrifuge* mengembang, dan saling bertabrakan hingga rusak. Washington Post menulis saat itu, bahwa International Atomic Energy Agency (IAEA) mencatat kerusakan sebanyak 900–1000 *centrifuge* di reaktor Natanz, selama serangan Stuxnet, sekitar November 2009-Januari 2010.

Serangan lain dari bentuk perang siber adalah pengalangan Estonia pada 2007. Saat itu para *hacker* menyerang sistem perbankan, dan melakukan *deface* di situs web pemerintah, media, kantor-kantor kementerian dan partai politik. Estonia, negara kecil di Eropa Timur itu nyaris lumpuh. Kekacauan terjadi di mana-mana. Dunia siber mencatat itu adalah serangan terencana yang ditujukan melumpuhkan sebuah negara, dengan bermotif politik.

Sjafrie menyimak cerita itu. Dia mengatakan Indonesia juga tengah mempersiapkan satu sistem teknologi informasi terpadu mengantisipasi perang melalui dunia maya (*cyber war*).

Saya jadi teringat pernyataan markas departemen pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, yang menyatakan *cyber space* adalah matra tempur keempat selain matra darat, laut, dan udara. Itu sebabnya, militer AS membangun “Angkatan Siber” melengkapi satuan tempur mereka selain angkatan darat, laut dan udara.

Sjafrie lalu melanjutkan bahwa perang informasi, perang teknologi menjadi tantangan global saat ini. “Kita tidak mungkin mengabaikannya, kecuali membangun sistem teknologi informasi yang memadai, kuat, dan solid,” ujarnya.

Ia juga mengatakan media sebagai komponen pertahanan non-militer punya peran penting di medan tempur baru itu. Peran, fungsi, dan teknologi media harus menjadi sarana mengantisipasi perang informasi dan teknologi, alias perang di dunia maya. Itu satu bentuk perang asimetris. “Media salah satu komponen pertahanan non-militer yang dapat mendukung sistem pertahanan negara,” dia menjelaskan.

Sjafrie menegaskan, selain perang konvensional yang harus tetap diantisipasi dengan pergelaran kekuatan militer memadai, ancaman perang inkonvensional seperti perang teknologi informasi, dunia maya, juga harus diantisipasi dan dikelola dengan baik. Meski di tengah alutsista TNI yang belum memadai, Sjafrie mengatakan RI akan tetap memberi perhatian membangun unit pertahanan siber ini. “Untuk mengantisipasi ancaman perang inkonvensional, sesuai perkembangan lingkungan strategis yang ada,” katanya.

Saya tahu dari Sjafrie bahwa TNI sedang membangun Cyber-Defence Operations Centre (CDOC). Unit ini akan memperkuat proteksi kekuatan TI (Teknologi Informasi) nasional, terutama yang terkait dengan jaringan keuangan. Tapi tak banyak informasi yang saya dapatkan tentang bagaimana bentuk sistem pertahanan itu, bagaimana bentuknya, dan apa dan siapa saja pasukannya.

Sejumlah sumber saya di unit elit TNI mengatakan mereka telah membentuk satuan khusus untuk itu, yang ditangani oleh satuan elit TNI. Tenaganya direkrut dari putra-putra bangsa terbaik di bidang IT, dan dilatih khusus untuk aneka misi militer yang terkait pertahanan siber.

“Apakah kita punya unit semacam itu, Pak Sjafrie?” saya mencoba bertanya.

Sjafrie hanya diam, dan menatap saya. Dia tak mau menjawab. Saya makin penasaran. Saya bertanya lagi, bagaimana kalau ada serangan siber yang bisa melumpuhkan semua jejaring Internet swasta, termasuk militer?

“Kalau itu kita sudah antisipasi. Kita punya sistem alternatif,” jawabnya singkat. Setelah itu bungkam.

Saya makin mengerti bahwa Sjafrie, berbeda dengan

banyak rekannya yang lain, pembicaraannya selalu terukur, dan khas intelijen militer. Dia sulit dipancing, dan selalu ingin menyerap informasi lebih banyak dari lawan bicaranya. Saya tahu, seperti saat dia dikirim ke Aceh sewaktu muda dulu untuk melakukan operasi yang senyap itu, sampai sekarang untuk urusan profesional, dia rasanya tak banyak berubah.

**Nazar Patria kini adalah Redaktur Pelaksana Viva-News*

My Friend, A Handsome and Smart General

Parni Hadi*

Kebanyakan orang bilang tentara, apalagi yang berpangkat jenderal, itu berwajah keras, yang menunjukkan sifat tegas, penuh wibawa dan cenderung galak, menakutkan. Tapi, tidak yang satu ini.

Ia murah senyum, jauh dari kesan menyeramkan. Bicaranya pun lembut, tidak ada nuansa instruktif atau memerintah. Ibu-ibu menyebutnya Jenderal “ganteng”, tampan atau *handsome*. Tak heran, banyak orang yang menyukai dan bahkan mengidolakannya.

Saya mengenalnya pertama kali waktu bertugas sebagai reporter LKBN *Antara* yang bertugas di istana presiden jaman Pak Harto pada tahun 1977. Saya tidak tahu apa pangkatnya waktu itu, karena ia sering tampil dengan baju safari warna hitam kebiruan, baik yang berlengan pendek maupun panjang. Kalau tidak karena potongan rambutnya yang *crew-cut*, saya tidak tahu kalau ia seorang anggota TNI, apalagi dari Kopassus.

Begitu halus dan santunnya, semula saya kira ia salah seorang petugas protokol istana. Tugasnya yang sering berdiri di depan pintu kantor Pak Harto di Bina Graha bersama sejumlah orang berbadan kekar yang disebut Walpri (pengawal pribadi) Presiden lah yang meyakinkan saya bahwa

ia seorang tentara.

Saya lebih dulu mengenal seniornya, Pak Ucu Safri dan Mas Subagyo HS (terakhir menjabat Kasad, jenderal berbintang empat). Ia cenderung pendiam, tidak banyak bicara, tapi murah senyum dan rendah hati.

Antara sebagai kantor berita resmi Republik Indonesia, tidak boleh absen dalam setiap liputan kegiatan Presiden dan Wakil Presiden baik di Bina Graha, Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Merdeka Selatan (Istana Wapres) dan perjalanan di dalam dan luar negeri. Itulah yang saya kerjakan antara tahun 1977 sampai 1979. Apalagi, waktu itu Pemimpin Umum LKBN *Antara* adalah Pak Ismail Saleh SH (alm), yang merangkap sebagai Waseskab, Wakil Sekretaris Kabinet, yang kemudian menjadi Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman.

Praktis waktu itu saya lebih banyak berkantor di Bina Graha daripada di kantor *Antara* di Jalan Antara, Pasar Baru, waktu itu. Selama itu pula saya sering berjumpa dan berinteraksi dengan dia dan kawan-kawannya.

Akhir tahun 1979 saya berangkat tugas belajar ke Jerman dan kemudian langsung bertugas sebagai Kepala Perwakilan LKBN Antara untuk wilayah Eropa berkedudukan di Hamburg sampai tahun 1986.

Sejak itu, saya jarang jumpa teman-teman Paswalpres. Tapi, dari Hamburg saya selalu meliput kunjungan Pak Harto ke Eropa, yang menjadi wilayah kerja saya. Antara lain, ke Turki, Rumania, Hongaria, Austria dan Roma, Italia, untuk menerima penghargaan WHO (Badan Pangan PBB) atas keberhasilan Indonesia berswasembada beras pada tahun 1985. Tentu, saya juga bertemu dia, karena

Walpri sebagai orang-orang kepercayaan dan pengawal terdekat tidak pernah lepas dari Presiden. Biasanya, kalau berjumpa dengan teman-teman lama, termasuk fotografer kepercayaan Pak Harto, Saidi (alm) kami bersendu gurau dengan penuh keakraban.

Pertemuan berikutnya yang tidak akan pernah saya lupakan terjadi di awal tahun 1990-an waktu saya menjadi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Koran *Republika*. Waktu itu saya mengenakan jaket murahan dengan logo *Republika*. Dengan senyumnya yang khas dan ucapannya yang santun, ia menyatakan tertarik dengan jaket saya itu dan menukarnya dengan jaket bagus, tebal berwarna biru dengan tulisan Grup A. Waktu itu menjabat sebagai komandan Grup A Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden). Jaket pemberiannya itu masih saya simpan sampai sekarang dalam keadaan bagus.

Bintangnya sangat terang, hingga dengan wajah yang awet muda dan cenderung *boyish* itu ia meraih posisi Pangdam Jaya dengan pangkat Mayjen TNI. Pada saat itu banyak ibu-ibu yang menggelarnya dengan “jenderal ganteng”. Dari Pangdam Jaya ia pindah tugas menjadi Kapuspen TNI. Sehari setelah pelantikannya sebagai “jubir” TNI, ia SMS saya, minta kapan-kapan berjumpa untuk “ngobrol-ngobrol”. Saya kaget campur senang menerima ajakannya untuk berjumpa itu. Memang, sejak zaman Kapuspen TNI Pak Pieter Damanik saya punya hubungan dekat dengan Mabes TNI. Puncaknya ketika Pak Try Sutrisno menjabat sebagai Pangab TNI dengan Kapuspennya Pak Nurhadi Purwosaputro. Pak Try saya kenal baik sejak beliau menjadi ajudan Presiden Soeharto. Beliau sangat dekat dan suka

mengobrol dengan para wartawan di ruang tunggu Bina Graha.

Pertemuan lagi dengannya, yang istimewa dan sulit juga saya lupakan adalah ketika sama-sama menjadi saksi pernikahan keluarga. Mas Bisri Latief (terakhir Kol. Purn.) “man-tu” (menikahkan puterinya) dengan seorang perwira CPM yang berasal dari Sulawesi Selatan. Istri Mas Bisri, Mbak Katharina, teman kuliah saya dan almarhumah isteri saya, Dik Maringi Peni, di Madiun. Sejak masih sama-sama kuliah, hubungan kami sangat dekat. Karena itu, saya diminta menjadi saksi pernikahan puteri mereka. *Eee*, di situ saya jumpa teman lama itu. Sama sekali ia tidak berubah, tetap sangat ramah. Bahkan, berkat sama-sama menjadi saksi itu, hubungan menjadi lebih erat.

Pertemuan lain yang sangat mengesankan terjadi di Omah Betari Sri, gedung pertemuan di Jalan Ampera Raya, milik Mbak Sri, isteri Mas Teddy Rusdi, Marsdya TNI, mantan Asrenum Mabes TNI era Pangab Jenderal LB Moerdani. Waktu itu ada acara peluncuran buku karya Mbak Linda Djalil, wartawati Majalah *Tempo*, yang sama-sama pernah tugas di istana presiden. Lagi-lagi, perjumpaan itu penuh dengan canda ria. Ia tak berubah, walau kini jabatannya lebih tinggi.

Siapakah dia? Saya yakin, para pembaca sudah tahu jawabannya. Ia adalah Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Sebelumnya ia adalah Sekretaris Jenderal Kemenhan.

Bahwa ia *handsome*, jawabannya Anda sudah tahu. Bahwa ia *smart* atau cerdas, Anda pun pasti juga sudah tahu. Buktinya, pangkatnya terus menanjak sampai sekarang.

Sebagian teman seangkatannya telah turun panggung, tapi ia masih eksis. Dari anggota pasukan dan pengawal pribadi presiden yang identitas dan tugasnya tidak boleh banyak diketahui banyak orang, hingga menjadi *man of public* atau *public figure*. Dan, mungkin jabatannya masih akan naik lagi.

Mohon maaf, judul tulisan ini dalam bahasa Inggris untuk napak tilas dan menghormati senior saya Dr. O.G. Roeder, wartawan Jerman yang bermukim lama di Indonesia dan menulis buku: *Soeharto, A Smiling General*.

*Penulis adalah wartawan senior, mantan wartawan LKBN Antara, mantan Pemimpin Redaksi Koran Republika, dan mantan Direktur Utama LPP RRI.



Para reporter media tidak pernah berhadapan dengan Sjafrudin yang tidak tersenyum.

Harusnya Jadi Model TNI Masa Kini

Ray Wijaya*

Sebagai wartawan media elektronik sejak lebih dari 20 tahun lalu, saya beruntung mempunyai “jam terbang” yang tinggi dalam berhadapan dengan berbagai nara sumber. Ada yang “pelit” memberikan keterangan, ada yang sok tahu padahal dia tidak menguasai masalah, tetapi banyak pula nara sumber bermutu yang malahan menimbulkan respek yang besar dari saya.

Kebetulan diantara sejumlah nara sumber yang saya hormati adalah pak Sjafrie Sjamsoeddin semenjak beliau menjadi Pangdam Jaya hingga menjadi Wakil Menteri (Wamen) Pertahanan. Saya melihat bahwa Pak Sjafrie adalah seorang tentara yang sangat demokratis, sebagai anti-tese yang mengatakan bahwa tentara umumnya lebih banyak “tutup mulut” dari pada bicara. Mungkin bagi mereka agaknya semboyan *silence is golden* dipatuhi benar-benar. Padahal pengertian demokratis adalah dari caranya yang menghargai diskusi dengan para wartawan. Dari beberapa interaksi yang saya lakukan dengan Pak Sjafrie saya cepat mendapat kesan bahwa ia membuka ruang untuk berbeda pendapat dan tidak pernah memaksakan pendapatnya.

Begitu demokratis sikapnya sehingga dalam banyak kasus, ia memberikan kebebasan para juru warta untuk



Secara tetap Wamenhan melakukan dialog dan komunikasi dengan para pimpinan media nasional di Jakarta, nampak antara lain Elman Saragih dari Metro TV (nampak punggung), di sebelah kirinya Ray Wijaya (MNC-TV), Suryapratomo (Direktur Pemberitaan Metro TV) dan Gatot Tryanto (Trans-TV).

menentukan bagian mana yang patut dan pantas untuk diberitakan, dan mana yang hanya menjadi pengetahuan mereka. Sepengetahuan saya, sampai sekarang saya belum menemukan kasus di mana wartawan membocorkan “rahasia negara” yang menyebabkan situasi yang gawat. Ini membuktikan bahwa para wartawan apabila diberikan penjelasan yang terbuka dan lengkap, mereka bisa memilah-milah mana informasi yang mempunyai nilai berita dan mana informasi yang tidak/belum patut untuk diberitakan.

Saya masih ingat, bagaimana beliau memberikan informasi yang sangat lengkap mengenai rencana pembelian alat utama sistem senjata (Alutsista) bagi TNI untuk 3 tahun ke depan. Jadi kami tahu betul bagaimana dalam rangka

menuju pemenuhan rencana MEF (Minimum Essential Force) atau kebutuhan minimal kekuatan bersenjata TNI sampai tahun 2020 mendatang. Saya pada awalnya agak terkejut juga ketika Pak Sjafrie menjelaskan semua itu seperti memberi penjelasan dihadapan para Jenderal TNI. Tetapi lama-lama, saya menjadi tertarik setiap kali ia mengundang kami, entah untuk makan malam atau buka puasa bersama.

Ini adalah respek pertama saya kepada beliau.

Respek kedua, secara pribadi saya mendapat kesan bahwa Pak Sjafrie adalah seorang perwira yang pintar, cerdas dan mampu tampil elegan. Sebagai perwira lulusan Akabri tahun 1974, ia tidak hanya sebagai *role officer* era dahulu, tetapi harusnya Pak Sjafrie menjadi model perwira TNI “masa kini” yang ideal. Saya sayangkan bahwa mengingat masa dinasnya sudah diujung akhir, beliau tidak sempat tampil di era sekarang ini sebagai model yang patut di contoh.

Tentunya saya mengharap TNI akan melahirkan seorang “Sjafrie baru” di masa mendatang.

*Penulis adalah Pemimpin Redaksi *MNC-TV*, sebelumnya ia adalah produser senior di *RCTI*.



Round-table bersama para wartawan.

Jangan “Main-main” Dengannya...!

Rini PWI*

Saya tahu Sjafrie Sjamsoeddin sejak dulu karena Sjafrie teman sekelas kakak saya di SMA Negeri 4 Jakarta. Angkatan mereka adalah angkatan yang dominan, angkatan paling bagus, paling terkenal urusan memberi donasi sebagai alumni tentunya.

Kebetulan ada juga teman-teman kakak, yang dulu sering menginap di rumah, yang kemudian menjadi perwira tinggi. Mereka tahu saya, justru saya yang tidak tahu, mengingat waktu itu masih kecil. Jadi, karena itu pula, saya menganggap biasa saja, sebagai kenalan kakak, tidak menganggap mereka sebagai pejabat.

Sering kali latar belakang seperti itu menjadi sebuah kedekatan. Namun, semua terpulang kepada masing-masing pribadi, apalagi dalam hal ini saya berkarier sebagai jurnalis. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang jurnalis harus tahu persis kapan dia pakai baju jurnalis, kapan dia buka. Dan ada etika yang tidak dicantumkan di dalam tulisan, etika-etika yang kadang-kadang muncul dari lahir, etika yang ditanamkan keluarga menanggapi kedekatan itu.

Etika itu yang saya pegang ketika harus menjalankan tugas kantor yang memungkinkan saya bertemu dengan

Sjafrie. Jadi, kalau diminta pendapat saya bagaimana Sjafrie, saya akan bilang Sjafrie itu pintar. Waktu ada wartawan muda menanya saya tentang bagaimana dia, saya mengingatkan untuk tidak main-main dengannya.

Sjafrie itu pengingat. Dan, dia orang intelijen. Itu saja dasarnya. Itu kata kunci. Jadi, kalau sudah dikasih tahu kata kunci itu, ya harus tahu bagaimana berhubungan dengan Sjafrie.

Boleh dekat, tetapi tidak boleh masuk di dalam pagar. Boleh saja kenal keluarga dan sebagainya, tetapi tidak boleh terlalu menebar kata, karena dia pasti tahu. Seberapa jangkauan kamu bisa diterawang, dia bisa mengukur.

Ketika seorang jurnalis bisa diperlakukan seperti itu oleh si sumber berita, ya sudah. Siapa yang pintar? Ya sumber berita.

Nah, dalam hal itu Sjafrie jago. Seharusnya para jurnalis tahu.

Salah satu keberhasilan Sjafrie adalah ketika reformasi.

Pada awal dia kolonel, Sjafrie ibarat *hit and run* dalam *operation*-nya. Dia suka mendadak pergi ke suatu lokasi. Dia ke B harus melewati A, misalkan, semua dilakukan mendadak, membuat orang di B dan A gelagapan. Itu saja kepada anggotanya. Bayangkan kalau kepada kalangan yang dia anggap tinggi resistensinya, misalkan kelompok tertentu yang dia kejar.

Tentunya, pasti cerdas sekali.

Jadi, ditanya hubungan, saya memang dekat, kenal baik dengan istrinya, tetapi tidak pernah menempel. Kalau pas lewat rumahnya dan ingin mampir ya mampir, tapi kalau tidak ingin, ya tidak mampir. Seperti itu.



Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin bersama juru foto Rini PWI.

Ketika Sjafrie diangkat sebagai Kapuspen TNI, wartawan semakin banyak. Kedekatan dengannya justru membuat saya menjaga jarak, terutama pada saat dia meminta saya membantu soal dokumentasi untuk pameran. Saya malah mengantarkan utusannya ke asosiasi fotografi.

Memasuki masa DOM di Aceh, saya tidak ikut dalam rombongan wartawan yang ikut program *embedded*. Saya sudah masuk Aceh waktu latihan-latihan, tahun 1990-an. Awal-awal 1990, saya sudah mulai ikut latihan PPRC ke Aceh. Belum banyak wartawan saat itu.

Pada waktu gejolak Aceh tahun 2000, seorang rekan wartawan mengatakan kemungkinan saya ikut *embedded*

jurnalis ke Aceh. Saya katakan mengapa mesti pakai cara *embedded* untuk masuk ke wilayah Indonesia sendiri? Walaupun wartawan dilarang masuk karena dikhawatirkan terjadi sesuatu, ya kan bisa masuk tanpa baju wartawan? Maksud saya, pintar-pintar wartawan untuk masuk ke sana. Saya tahu, *embedded* bukan Sjafrie yang minta. *Embedded* mengharuskan wartawan mengikuti latihan dua minggu di Gunung Sanggabuana, Karawang. Berapa biaya yang harus keluar dengan mengikuti *embedded*? *Embedded* kan berarti dibiayai rakyat. Berapa itu? Berapa wartawan yang ikut?

Saya katakan kepada teman itu, walaupun harus pergi ke Aceh, saya akan pergi sendiri. Berarti, tanggung jawab ada di saya sendiri. Tetapi, saya akan keluar biaya sendiri, tidak membebani rakyat. Risiko besar tapi bebas.

Jadi, itulah hasil *embedded*. Wartawan harus mengikuti semua yang ditetapkan. Kalau bisa *stay long*, tidak apa-apa. Tetapi, kalau tidak, ya dapat apa?

Begitu saya cek ke Cilangkap, dan mendengarkan rekaman, ternyata itu hasil permintaan wartawan sendiri untuk terjun ke medan perang dengan cara *embedded*. Mengherankan, karena saya masuk ke *front line* saja tidak perlu tahu sedetail itu, tetapi bisa belajar *on the spot*. Semua saya lakukan langsung dengan mengikuti aturan di lapangan. Kadang-kadang saya hanya bisa rekaman di otak, karena tidak memungkinkan memotret.

Puncak kejagoan Sjafrie Sjamsoedin adalah cepat “menangkap” jurnalis yang kemudian menguntungkan untuknya.

**Fotografer senior bidang militer*

Sesungguhnya Ia Seorang Pendiam dan Lebih Banyak Tersenyum

Salim Said*

Setelah begitu banyak yang ditulis para wartawan tentang hampir segala aspek kehidupan publik serta kegiatan profesi Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, pertanyaan besar yang dihadapi seorang yang diminta menulis kata pengantar untuk buku tentang Wakil Menteri Pertahanan ini adalah, apa lagi yang bisa saya tulis? Terutama kalau saya nyaris setuju dengan semua yang ditulis para kolega wartawan tersebut.

Sebagai seorang peneliti peran politik militer yang selama 25 tahun juga menjalankan profesi kewartawan sebelum akhirnya menjadi ilmuwan politik, sosok Sjafrie buat saya memang sangat menarik. Saya mengenal perwira kelahiran Makassar yang rupawan ini ketika dia masih berpangkat Mayor dan bertugas sebagai salah seorang komandan dalam lingkungan Kopassus. Kami jumpa pertama kali pada suatu malam peringatan wafatnya almarhum Jenderal TNI (Anumerta) Sarwo Edhie Wibowo di rumah kediaman mantan Komandan RPKAD yang legendaris tersebut di Cijantung. Tapi hubungan kami mulai beranjak akrab

ketika Sjafrie berpangkat Letnan Kolonel dan bertugas sebagai pengawal Presiden Soeharto.

Meski Sjafrie seorang pendiam—lebih banyak senyum dari pada bicara—tapi dia nampaknya sadar pada peran saya sebagai peneliti peran politik militer dan itu yang rupanya menggerakkannya memberikan bantuan sebisa mungkin. Sjafrie adalah salah seorang yang menolong untuk mengerti banyak hal dalam belantara kegiatan politik militer.

Selain Sjafrie, yang sebenarnya juga banyak menolong adalah Jenderal TNI Fachrul Razie, Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI yang kemudian menduduki posisi Wakil Panglima TNI, dan almarhum Letjen TNI. Z.A. Maulani yang jabatan terakhirnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hal penting yang selalu saya ingat dari persahabatan saya dengan Sjafrie adalah pesannya agar saya selalu obyektif dalam membicarakan ABRI yang dikemudian hari kembali bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perlu saya ingatkan, waktu itu dalam berhubungan dengan wartawan, ilmuwan, politisi atau tokoh masyarakat, perwira TNI pada umumnya mencurigai kaum sipil dan karena itu mereka harus membina mereka. Sjafrie, Maulani dan Fachrul seingat saya tidak pernah mencoba membina saya. Mereka semua bahkan tidak pernah berkomentar terhadap apa yang saya tulis mengenai ABRI.

Adapun Fachrul Razie dia selalu menjelaskan kepada teman sesama perwira tinggi TNI agar memperlakukan saya sebagai peneliti. Ketika banyak perwira marah karena cara saya mengomentari pemberhentian Prabowo dari dinas militer yang dipersepsikan sejumlah perwira sebagai bernada

membela Pang Kostrad tersebut, Jenderal Fachrul konon menjelaskan kepada teman-temannya, “Kita bersahabat dengan Bang Salim, tapi dia tidak harus selalu sejalan dengan kita.”

Almarhum Maulani selalu mengingatkan saya agar berhati-hati dan jangan menjadikan Sjafrie, Bambang Yudhoyono dan Fachrul sebagai contoh yang mewakili perwira ABRI. “Mereka itu orang baik-baik, tapi merupakan perkecualian. Jumlah mereka dalam jajaran ABRI tidak besar. Mayoritas perwira ABRI itu tentara saja, menjalankan perintah tanpa memiliki pertimbangan sendiri.”

Sjafrie, Fachrul dan Maulani dan beberapa perwira tinggi ABRI waktu itu adalah para nara sumber saya untuk mengerti pergolakan dan kontroversi serta berbagai dinamika di dalam kubu militer. Tanpa bantuan mereka niscaya saya tidak akan sanggup menulis berbagai tulisan sebagai yang kemudian terbit dalam buku terbaru saya, *Dari Gestapu Ke Reformasi*.

Kedekatan saya kepada para perwira tinggi TNI itu bukannya saya peroleh dengan gratis. Kepada para Jenderal itu saya memerlukan waktu cukup lama membangun kepercayaan untuk meyakinkan mereka, saya tidak bekerja untuk siapa-siapa, tidak punya agenda politik, dan bahwa kegiatan saya mendapatkan informasi tentang tentara melalui untuk tujuan akademik. “Saya seorang peneliti, tidak bekerja untuk siapa-siapa,” kata saya kepada mantan Pangab dan mantan Pangkopkamtib Benny Moerdani ketika beliau menunjukkan sikap curiga setelah saya memajukan banyak pertanyaan sensitif kepada beliau pada salah satu wawancara kami.

Ketika saya telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari sejumlah perwira, muncul pula persoalan baru. Para aktivis berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejumlah besar mahasiswa justru mengambil sikap sebaliknya. Saya dicurigai sebagai kaki tangan tentara. Saya bahkan pernah menerima surat kaleng yang menuduh saya intel tentara. Suasana anti-tentara di kalangan aktivis dan LSM dan sejumlah besar mahasiswa memang mendominasi sikap dan wacana politik mereka.

Tentang kepribadian serta sikap professional dan hubungan kemanusiaan Sjafrie dalam menjalankan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari, semua sudah dibebankan para wartawan dalam buku ini. Semua tulisan dan komentar itu benar adanya. Dan serupa sebagai yang saya saksikan dan alami sepanjang persahabatan saya dengan perwira Sandhi Yudha Kopassus tersebut sejak dia masih berpangkat Letnan Kolonel.

Tapi kalau masih ada tempat, beberapa hal ingin saya tambahkan yang sepertinya belum muncul dalam banyak tulisan dalam buku ini. Lama berada di sekitar Cendana sebagai pengawal pribadi Presiden Soeharto, tentulah Sjafrie kenal baik dengan keluarga Presiden, termasuk dengan Ibu Negara (*First Lady*) dan anak-anak mereka. Yang menarik, Sjafrie tidak menyebut istri Presiden Soeharto seperti banyak orang memanggil dan menyebutnya. Sjafrie menyebut istri Presiden itu sebagai Ibu Soeharto, bukan Ibu Tien. Kenapa begitu? Jawabnya kepada saya, “Saya serdadu yang berada di lingkungan Presiden dan keluarganya sebagai prajurit yang menjalankan tugas. Saya tidak mau sok akrab dan mempribadikan hubungan dengan tokoh yang ditugaskan

kepada saya untuk mengawalnya.”

Kendati selalu bersikap professional dan menjaga jarak, tidak urung Presiden Soeharto tetap saja memposisikan Sjafrie sebagai orang dekat yang dipercayainya. Ketika Sjafrie menjadi Panglima Kodam (Pangdam) Jakarta yang kediaman resminya (Jalan Teuku Umar) berjarak sekitar hanya 300 meter dari kediaman Bapak Presiden, hampir setiap malam sang Pangdam diminta datang ke Cendana. Seorang Jenderal senior yang sudah almarhum pernah mengisahkan kepada saya bahwa yang sebenarnya dekat dan dipercayai Presiden Soeharto bukan Prabowo, menantunya, melainkan Sjafrie. Maka kononnya sebagian besar masukan ke Bapak Presiden mengenai urusan militer banyak dicek oleh penghuni jalan Cendana itu kepada Sjafrie. Itulah penjelasannya mengapa Sjafrie tahu banyak mengenai kebijakan Presiden Soeharto mengenai ABRI, terutama mengenai mutasi dan pemilihan perwira-perwira untuk jabatan-jabatan sensitif.

Tapi mengapa Soeharto senang dan percaya kepada Sjafrie? Jawaban cepatnya, tentu karena sang perwira Kopassus yang lama berada di sekitar Bapak Presiden berhasil menimbulkan kepercayaan kepada pemimpin negara dan keluarganya. Seperti diketahui sebagai perwira Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Sjafrie dua kali bertugas di sekitar Presiden Soeharto.

Tapi yang tidak kurang penting untuk diperhitungkan adalah perkenalan almarhum Mayor Sjamsoeddin, Komandan Militer Kota (KMK) Makassar yang banyak membantu Letkol Soeharto tatkala sebagai Komandan Brigade Garuda Mataram bertugas mengatasi pemberontakan Andi Azis di Makassar pada tahun 1950. Sjafrie, sebagai putra

Komandan KMK Makassar, lahir ketika Soeharto bertugas di Ibu kota Sulawesi Selatan itu. Maka mudah dibayangkan betapa *exited*-nya Bapak Presiden ketika tahu perwira muda pengawalnya adalah seorang putra Mayor Sjamsuddin yang dulu banyak membantunya di Makassar.

Adapun sikap santun dan rendah hati Sjafrie penjasannya sebaiknya ditelusuri kebelakang, kepada kedua orang tuanya. Almarhum Sjamssoeddin adalah guru sekolah sebelum ikut berjuang sebagai tentara di zaman revolusi. Guru sekolah dizaman kolonial tergolong kelas menengah yang hidup dan mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai yang lazim berlaku di kalangan elit di sekitarnya.

Ibunda Sjafrie, almarhumah Hamdana, adalah ibu yang sangat religius yang membesarkan anak-anaknya dengan didikan agama yang saksama. Pengaruh didikan almarhumah ibu dan almarhum ayahnya dalam pertumbuhan Sjafrie terpancar dari pribadi perwira baret merah itu yang terlihat dan terasa serta tercatat dalam pengamatan sejumlah wartawan yang menulis dalam buku ini.

Di satu pihak Sjafrie seorang tentara yang memegang teguh disiplin kemiliteran dan secara saksama menunaikan tugasnya, di lain pihak dia seorang relijius yang sejak muda secara ajeg menjalankan puasa sunnah Senin—Kamis dan solat lima waktu yang tidak pernah ditinggalkannya. Dan ini juga diakui oleh sejumlah wartawan lain dalam beberapa tulisan di buku ini. Kesalahannya juga terpancar dalam laku sosialnya.

Saya ingin menutup tulisan singkat saya ini dengan dua cerita tentang Sjafrie dan Timor Timur yang secara resmi sekarang bernama Timor Leste. Cerita pertama

mengenai keributan berdarah di Dili pada tahun 1991 yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Sjafrie yang waktu itu berada di Dili sedang menanti saat kepulangannya ke Jakarta setelah menyerahkan jabatannya sebagai komandan satgas intel. Pada subuh terjadinya tragedi Santa Cruz itu Sjafrie bangun untuk sahur sebagai persiapan menjalankan ibadah puasa sunnah Senin-Kamis. Mendadak dia mendengar keributan di luar sana. Dengan seorang pengawal yang mengemudikan kendaraan Toyota, Sjafrie keluar mencari informasi mengenai apa sebenarnya yang terjadi. “Saya sudah tidak punya wewenang apa-apa waktu itu, sudah timbang terima” katanya. Tapi melihat banyaknya korban, Sjafrie turun tangan mengusahakan ambulan untuk mengangkut para korban ke rumah sakit dan mencari mobil pemadaman kebaran untuk menyemprot dan membersihkan darah yang berceceran di jalan ke arah sekitar pekuburan yang menjadi titik berlandung para demonstran.

Ketika Presiden Soeharto membentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM) untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu dan siapa yang bersalah, Sjafrie diminta memberi kesaksian. DKM dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI Faisal Tanjung, dan salah satu yang kemudian menjadi “korban” DKM adalah Mayjen TNI Sintong Panjaitan, Pangdam Udayana yang wilayah kekuasaannya termasuk Timor Timur.

Cerita kedua terjadi menjelang jajak pendapat di Timor Timur, yakni beberapa bulan setelah reformasi. Kedudukan Sjafrie waktu itu adalah Kepala Penerangan TNI. Menjelang dan selama reformasi hubungan saya de-

ngan Sjafrie sangat intensif. Saya sering menelepon untuk mendapatkan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang terjadi dalam TNI. Nah, suatu pagi, telepon genggam saya berdering. Suara Sjafrie terdengar. Dia menyatakan sedang berada di lapangan terbang militer Halim Perdanakusuma. “Saya ikut rombongan ke Dili, Pak,” katanya. Dia menelepon mungkin maksudnya agar saya tahu dan tidak meneleponnya hari itu.

Apa persisnya tugas yang akan dijalankannya bersama rombongan di Dili tidak sempat saya tanyakan. Tapi malam harinya, Sjafrie menelepon lagi dan menyatakan sudah pulang dan akan mengirimkan anak buahnya menyampaikan botol berisi sambel Dili sebagai oleh-oleh dari perjalanan. Sambel Dili adalah sambel yang pedasnya luar biasa. Dibuat dari ulekan cabe rawit dan diawetkan dengan jeruk nipis. Kami berdua suka makan dengan sambel itu di rumah Sjafrie di Cijantung.

Dua kisah tersebut tadi sengaja saya kemukakan karena nama Sjafrie hingga kini masih dihubungkan dengan kasus pelanggaran HAM. Dan kisah pelanggaran HAM tersebut selalu dikait-kaitkan dengan tragedi berdarah di Dili (Santa Cruz) serta kunjungan sehari Sjafrie sebagai anggota rombongan Mabes ABRI tersebut. Setahu saya hingga kini kasus itu belum dituntaskan. Tapi tetap dimainkan setiap Sjafrie mendapat posisi baru.

Tidak kurang menarik, adalah pemerintah Amerika Serikat yang dengan alasan pelanggaran HAM, hingga kini masih belum membuka kemungkinan Sjafrie mendapatkan visa berkunjung ke Amerika. Pemerintah Amerika Serikat maupun beberapa LSM yang menuduh Sjafrie melakukan

Sesungguhnya Ia Seorang Pendiam dan Lebih Banyak Tersenyum

pelanggaran HAM di Timor Timur dan di Jakarta pada hari-hari krisis jatuhnya Orde Baru, hingga kini belum juga berhasil menunjukkan bukti kuat untuk mereka bawa ke pengadilan.

**Prof. Dr. Salim Said, MA, MAIA, adalah mantan wartawan majalah TEMPO, mantan Duta Besar RI di Praha, guru besar Ilmu Politik pada Universitas Pertahanan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, Sesko TNI, Sesko AL dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).*



Selalu ada topik menarik yang dibicarakan oleh Wamenham pada setiap kesempatan.

Semua, Jurnalis dan Anak Buahnya, Mencintai Pak Sjafrie!

Saptono*

Pada periode 1999-2003 Aceh menjadi sorotan semua media baik di Indonesia maupun Internasional karena pergerakan bersenjata yang semakin besar dan merata di seluruh kabupaten di Aceh. Saya sebagai pewarta foto sangat tertarik untuk dapat meliput di daerah konflik itu yang kemudian mendapat penugasan ke daerah tersebut.

Pada awalnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menolak kehadiran wartawan yang inisialnya menggunakan bahasa atau nama berbau Jawa dan saya lah orang pertama yang ditolak masuk ketika berlangsungnya milad GAM di daerah Jeunib, Beureun, dan dicurigai sebagai kiriman pemerintah RI. Tetapi berkat teman-teman pewarta foto yang kala itu menjadi bagian rombongan saya dapat meyakinkan bahwa saya adalah pewarta foto dan benar bekerja di *Antara*, akhirnya kami dapat meliput milad GAM yang dihadiri Panglima GAM Tengku Abdulah Syafi'i dan Darwis Jeunib.

Berkat pengalaman itu sepanjang tahun saya selalu ditugaskan ke Aceh atau dalam setahun bisa 4-5 kali ke daerah konflik tersebut dan tentu saja karya foto saya banyak sekali di kutip di sejumlah koran ibukota maupun daerah mengingat pelanggan Antara ada ratusan koran.

Mungkin foto-foto inilah yang menyebabkan pihak aparat keamanan merasa kecolongan karena di wilayah penjagaan mereka yang relatif ketat ternyata ada orang bersenjata, bahkan di beberapa daerah yang saya masuki sebelum mencapai tempat persembunyian anggota GAM, harus melalui pos TNI ataupun Brimob/Polri. Dan tidak jarang kami pun diinterogasi maksud tujuan ke daerah itu tetapi berkat kelihaihan sebagai pewarta biasanya kita tetap dapat mencapai tempat tujuan.

Tentu saja hasil karya saya berupa foto bukan melulu GAM tetapi kegiatan TNI pun diliput sebagai berita yang harus disebar. Karena saya banyak melakukan liputan di TNI maka banyak petinggi TNI yang mengajak bertukar pikiran mengenai gerakan bersenjata di Aceh dan dampak liputan pers, dan salah satunya adalah Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin waktu itu adalah Kapuspen TNI yang notabene selalu berhubungan dengan wartawan.

Pada suatu kesempatan Pak Sjafrie bertemu saya dan berbicara masalah Aceh. Dalam pembicaraan itu Pak Sjafrie berharap saya dapat bekerja sama untuk masalah GAM. “Sap, saya akan mempertemukan kamu dengan Panglima (Jenderal TNI Endriartono Starto) empat mata ya,” kata Pak Sjafrie.

Waktu itu Pak Sjafrie meminta saya kalau masuk ke tempat GAM dapat menginformasikan posisi atau daerah orang bersenjata itu dengan akurat bahkan ada pemikiran dibekali alat semacam GPS gitu lah.

Saya hanya meraba kemungkinan niat Pak Sjafrie itu tidak lepas sebagai Kapuspen TNI yang memiliki tanggung jawab juga untuk tegaknya NKRI. Terus terang setelah

pertemuan itu di kepala saya berkecamuk kegelisahan juga karena sebagai jurnalis saya harus independen dan bertanggung jawab terhadap sumber berita. Bila misi “titipan” itu dilaksanakan bisa-bisa membahayakan diri saya dan tentu saja profesionalisme wartawan yang tidak boleh berpihak.

Saya bersyukur setelah pertemuan itu tidak ada lagi kelanjutan sehingga saya pun bebas bergerak dan meliput di daerah konflik itu hingga bencana tsunami memporakporandakan Aceh dan lahirnya kedamaian setelah MoU Helsinki.

Wartawan *Embedded*

Memuncaknya konflik Aceh membuat pemerintah menyetujui dilaksanakannya Darurat Militer (DM) sehingga pengiriman pasukan TNI secara besar-besaran akan dilaksanakan untuk menumpas gerakan bersenjata di Aceh.

Karena sejak 1999 media massa sudah banyak meliput di daerah konflik itu maka sebelum dilaksanakan DM, Kapuspen TNI saat itu Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin berinisiatif untuk membuat liputan di Aceh lebih proporsional dan tidak selalu menyudutkan TNI terutama dari sudut pandang adanya pelanggaran HAM yang saat itu sangat menghantui segala gerak TNI. Sjafrie pun mengajak diskusi sejumlah teman wartawan di antaranya adalah Alm. Agus Butar Butar (ABB) dan saya sendiri.

Belajar dari Perang Irak di mana Militer AS ketika menumbangkan pemerintahan Saddam Husein membawa sejumlah wartawan terlatih yang menempel di mesin perangnya (*Embedded*) sehingga pemberitaan perang tersebut selalu positif maka Pak Sjafrie memiliki ide untuk melatih

teman-teman jurnalis sebelum diberlakukannya DM.

Saat pelaksanaan ide tersebut, ABB bertugas mengkoordinir teman-teman dibantu saya, mulai mensosialisasi rencana itu dan ternyata mendapat sambutan positif dari sejumlah teman media cetak maupun televisi, terutama mereka yang menempati pos liputan di lingkungan TNI.

Pak Sjafrie pun menyetujui rencana pelatihan yang di pusatkan di kaki Gunung Sanggabuana dengan materi latihan adalah mengenalkan teknik pertempuran dari sisi jurnalis termasuk cara memegang dan menembakan senjata.

Akhirnya pelatihan wartawan untuk DM di Aceh dilangsungkan selama seminggu penuh, suka duka dan gembira terpancar dari semua teman-teman yang mengikuti latihan itu, saya sendiri tidak mengikuti pelatihan tersebut karena sudah berada di Aceh menunggu kedatangan pertama pasukan TNI setelah DM diberlakukan.

Ide *embedded journalist* ini sangat baik, tetapi tidak semua sumberdaya jurnalis menyukai medan konflik sehingga dalam perjalanannya para jurnalis *embedded* justru terkungkung dalam liputan TNI dan kesulitan masuk GAM yang dari awal telah menyatakan diri steril dari wartawan yang pro TNI.

Zaman “Enak”

Zaman siapa yang paling enak? Pertanyaan tersebut umumnya dijawab para jurnalis, tentu zaman Pak Sjafrie (Mayjen TNI Sjafrie Syamsuddin). Jawaban serupa itu juga terlontar dari setiap anggota atau anak buah tempat Pak Sjafrie bertugas, dan hingga kini pun aroma itu tetap terasa. Pak Sjafrie merupakan figur pemimpin yang mengayomi dan

selalu terbuka untuk sesuatu yang bersifat kemajuan. Pada saat di Kodam Jaya, selain membangun sarana dan prasarana untuk prajurit—misal lapangan tembak, barak, atau tempat ibadah—dia juga selalu memperhatikan keperluan personil seperti di Penerangan Kodam Jaya, di mana alat peliputan dan dokumentasi diberikan yang terbaik pada masa itu.

Sedangkan ketika bertugas di Puspen TNI maka hampir semua personil di bawahnya mendapatkan perhatian baik sebagai anak buah maupun sebagai pribadi termasuk pelibatan setiap kegiatan sehingga penerangan sangat hidup saat itu, termasuk komunikasi dengan para wartawan sehingga Puspen menjadi “rumah kedua” setelah kantor mereka masing-masing. Padahal lokasi Puspen TNI lokasinya di Cilangkap relatif jauh dari kota.

Saya pun pernah suatu ketika meliput sebuah acara militer tetapi ada beberapa kegiatan yang dilarang untuk diliput dengan alasan yang tidak jelas, pada hal secara fotografi itu sangat menarik dan tidak membahayakan baik institusi maupun personil. Karena tidak ada kejelasan maka saya mengontak Pak Sjafrie dan menceritakan hal tersebut setelah beberapa saat kami semua boleh meliput acara itu. Ternyata Pak Sjafrie sebagai rekan wartawan juga memberi dukungan terhadap hal-hal yang memang sepatutnya dapat diberitakan sehingga masyarakat sebagai penyokong keberadaan TNI dapat mengetahui kemampuan yang membanggakan dari angkatan bersenjata.

Dan hingga kini setiap personil yang pernah berada di bawah Pak Sjafrie selalu merindukan adanya pimpinan yang peduli terhadap bawahannya.....

*Penulis adalah wartawan LKBN *Antara*.



Berfoto bersama tidak pernah ditolak.

Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin Berjuang di Tengah Pusaran Kontroversi

Subur Tjahjono*

Sebagai wartawan yang baru bergabung di Desk Ekonomi *Kompas* tahun 1997, saya mengenal melalui media massa bahwa Sjafrie Sjamsoeddin, yang waktu itu berpangkat Mayor Jenderal, adalah jenderal yang sedang bersinar. Cerita tentang sepak terjang Sjafrie, juga sering saya dengar dari senior sekerja saya di *Kompas*, Mohamad Subhan SD.

Berdasarkan catatan berita *Kompas*, Sjafrie pertama kali menjadi berita pada 15 Maret 1996. Beritanya dimuat dalam Info Jabotabek di halaman 8. Judul beritanya, “Kolonel Eddi Budianto Danrem Suryakencana”. Beritanya adalah serah terima Komandan Komando Resor Militer 061/ Suryakencana dari Brigadir Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin kepada Kolonel Inf Eddi Budianto di Stadion Pajajaran Kodya Bogor. Sjafrie menjadi Kepala Staf Gabungan Garnisun I/Jakarta. Umumnya disebut sebagai jabatan “transit”, bisa menuju ke posisi yang lebih tinggi, atau kalau garis tangan berbicara lain, maka bisa-bisa stagnan.

Tetapi Sjafrie bintangnya terus bersinar, sehingga ia menjadi Panglima Komando Daerah Militer V/Jakarta

Raya (Kodam V/Jaya) tahun 1997. Namun ia menjadi Panglima Kodam V/Jaya pada pusaran politik Indonesia. Ibu Kota menjadi pusat huru hara pergantian rezim Presiden Soeharto. Perwira militer yang sedang menjabat saat ini dianggap berkaitan dengan kegagalan mengendalikan huru hara 1997 tersebut. Sjafrie, juga tidak luput dari keterkaitan itu. Karena jabatannya, pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Oktober 1952, ini dianggap bertanggung jawab atas keamanan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Tidak mudah untuk melewati huru hara pergantian rezim ini. Dalam perjalanan waktu, Sjafrie selalu dikaitkan dengan huru-hara tersebut. Hal itu pula yang terjadi saat Sjafrie diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) pada Februari 2002 menggantikan Marsekal Muda Graitto Usodo. Saat itu saya sudah dirotasi ke Desk Politik dan Hukum, untuk meliput berita-berita, khususnya seputar TNI.

Tidak mudah juga bagi saya untuk memberitakan kontroversi ini. Saya sehari-hari bertugas di lingkungan TNI, sementara kritik atas pengangkatan Sjafrie menjadi Kapuspen TNI ini tidak kurang derasnya dari aktivis hak asasi manusia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menjaga keseimbangan pemberitaan adalah tantangan waktu itu. Tetap menjaga hubungan baik dengan nara sumber, sembari memberi kritik membangun melalui pemberitaan, itu cara yang saya tempuh waktu itu.

Kritik itu antara lain muncul pada berita yang menjadi berita utama halaman 6, edisi 18 Februari 2002. Judulnya “Penunjukan Sjafrie Sebagai Jubir Militer Mengejutkan”. “Banyak pihak terkejut dengan penunjukan Pak Sjafrie ini

karena posisi juru bicara militer itu penting. Kenapa, kok, orang yang menjadi sorotan justru menduduki jabatan yang berhadapan dengan publik,” kata Direktur Eksekutif Research Institute for Democracy and Peace (Ridep) M Riefqi Muna waktu itu.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Reformasi Djoko Susilo berpendapat senada. “Saya tidak meragukan kapabilitas Pak Sjafrie dalam jabatan itu, tetapi juru bicara yang merupakan jabatan strategis itu kan seperti wajah dari institusi yang diwakilinya. Kalau Pak Sjafrie diduga terkait dengan kerusuhan Mei yang masih belum tuntas, bagaimana ia harus menjadi juru bicara dari TNI? Saya kecewa,” ujar Djoko.

Sjafrie tidak emosional menanggapi kontroversi ini. Ia tidak bicara meledak-ledak. Gaya bicaranya tertata, intonasi suaranya cenderung datar, kadang-kadang terdengar lirih. Sebagai pribadi, ia merupakan teman mengobrol yang tidak membosankan.

Dalam berita di halaman yang sama 19 Februari 2012, Sjafrie menjawab, “Saya menghormati keputusan Panglima TNI dalam menentukan tugas yang diembankan kepada saya. Saya sekarang dalam posisi siap melaksanakan tugas. Oleh karena itu, yang saya harapkan adalah bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam rangka saya bisa melaksanakan tugas. Komitmen saya adalah atas dasar keprajuritan dan dalam rangka kepentingan tugas. Adapun kontroversi, pro-kontra, dan sebagainya, saya senang. Dan dengan tulus saya menghormati itu semua. Tetapi sekali lagi, saya dalam posisi melaksanakan tugas”.

Setelah kontroversi pengangkatannya, Sjafrie sibuk sebagai juru bicara darurat militer Aceh. Selepas tengah

malam pada 18 Mei 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri menerapkan darurat militer di Aceh. Pada bulan Mei 2004, darurat militer di Aceh diturunkan menjadi darurat sipil. Sepanjang waktu pemberlakuan darurat militer itu, Sjafrie berjuang membangun citra positif atas operasi militer yang digelar di Aceh.

Kontroversi muncul kembali ketika Sjafrie dipromosikan menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Sekjen Dephan) 15 Januari 2005 dengan pangkat Letnan Jenderal. Pelantikannya diwarnai unjuk rasa puluhan korban pelanggaran hak asasi manusia. Unjuk rasa itu berlangsung di luar pagar Dephan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, di tengah berlangsungnya upacara pelantikan dan serah terima jabatan Sjafrie Sjamsoeddin di aula Dephan. Pengunjuk rasa mempersoalkan diangkatnya Sjafrie yang diduga terkait dalam kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.

Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono waktu itu berargumen, banyak kalangan militer aktif masuk Dephan karena kalangan sipil banyak yang tidak memenuhi persyaratan. “Beberapa kawan saya di swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang mampu dan memahami masalah pertahanan tidak bisa saya usulkan karena mereka bukan pegawai negeri sipil. Ketentuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Taufik Effendi) semua pejabat di lingkungan departemen termasuk Dephan adalah pegawai negeri sipil,” kata Juwono, dalam jumpa pers waktu itu, didampingi Sjafrie.

Dengan santun, Sjafrie tetap menjawab kontroversinya. Sjafrie mengaku tidak akan mematikan pendapat-pendapat miring terkait dirinya, yang dituduh beberapa pihak terlibat

dalam pelanggaran hak asasi manusia di beberapa kasus, seperti Timor Timur, tragedi Mei 1998, dan kasus Trisakti. “Biar masyarakat sendiri yang menilai nanti karena saya merasa tidak perlu memberikan penjelasan tentang itu. Saya tidak ingin mematikan pemikiran orang karena sekarang ini kan masanya demokrasi. Kecuali jika mereka sampai menghina atau memfitnah. Dalam penugasan saya berada di bawah kewenangan Dephan, sementara terkait pembinaan saya berada di bawah Mabes TNI,” ujar Sjafrie, (*Kompas*, 16 April 2005, halaman 6).

Di tengah kontroversinya, Sjafrie tetap terus bekerja untuk meningkatkan kinerja TNI, terutama anggaran TNI yang menjadi bidang kerjanya. Berbagai upaya pengembangan alat utama sistem persenjataan dilakukan. Demikian pula kerja sama militer dengan negara lain.

Kinerja itu pula antara lain yang menjadi pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkatnya menjadi Wakil Menhan pada 6 Januari 2010. Protes dari aktivis hak asasi manusia kembali muncul. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Usman Hamid bahkan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usman untuk mempertanyakan pengangkatan Sjafrie yang dinilai tidak tepat. Hal itu karena posisi Wakil Menhan tidak boleh dijabat seorang prajurit TNI aktif, seperti diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menhan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, di mata pemerintah, sosok Sjafrie tidak ada masalah. “Jaminannya adalah Menhan, Purnomo. Saya tidak sembarang untuk bisa terima Wakil Menhan,” ujar Purnomo, seperti

termuat Kompas, 7 Januari 2010, halaman 7. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) harus menangani anggaran sebesar Rp 42 triliun. Kemenhan juga harus mengkoordinasikan serta Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, sehingga membutuhkan wakil menteri. “Sjafrie sudah lima tahun menjadi sekjen, jadi bukan orang baru, tidak butuh transisi,” kata Purnomo.

Setelah lama tidak meliput TNI, saya berkesempatan mengikuti kunjungan kerja Sjafrie ke Irak dan Kongo akhir Agustus 2012. Sesuai tugasnya, ia menawarkan kerja sama militer kepada Pemerintah Irak. Di Kongo, ia mengunjungi prajurit TNI yang menjadi pasukan perdamaian di sana.

Hingga tulisan ini dibuat, 29 November 2013, nama Sjafrie telah muncul dalam 634 berita di harian *Kompas*. Selain kontroversinya, berita tentang upaya meningkatkan kinerja TNI juga mewarnai pemberitaan. Begitulah sosok Sjafrie Sjamsoeddin dalam kesan saya. Sosoknya kontroversial, tetapi ia tidak tenggelam dalam kontroversinya. Ia tetap berjuang untuk kesejahteraan prajurit TNI dan meningkatkan kepercayaan TNI di mata dunia.

*Penulis adalah wartawan Harian Umum *Kompas*

Sjafrie, Tentara Lapangan

Suryopratomo*

Sekitar tahun 1995, Presiden Soeharto hadir di Stadion Madya untuk menyaksikan Kejuaraan Atletik Internasional. Sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden, Kolonel Sjafrie Sjamsoeddin otomatis ikut hadir untuk mengawal Pak Harto di tempat itu. Dengan sosok yang tinggi-tegap, ia bersender di dinding dekat tangga menuju tribun stadion. Melihat saya hadir di stadion, Ketua Umum PB Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Mohamad “Bob” Hasan lalu memperkenalkan saya kepada Pak Sjafrie. “Sini Tom, kenalkan ini Komandan Grup A, Pak Sjafrie,” kata Pak Bob kepada saya. “Pak Sjafrie, ini Tommy, wartawan olahraga *Kompas*.”

Saya segera mengulurkan tangan dan kemudian terasa sebuah tangan yang besar segera menyambut uluran tangan saya. “Saya Tommy Pak,” ujar saya yang hanya disambut senyuman oleh Pak Sjafrie.

Itulah perkenalan pertama saya secara langsung dengan sosok tentara yang kemudian melesat pesat kariernya. Tahun 1996 kemudian ia ditugaskan sebagai Komandan Resor Militer di kota tempat saya besar yaitu Bogor. Rumah dinas Danrem tidak jauh dengan rumah saya di Bogor.



Setahun setelah itu, Sjafrie Sjamsoeddin ditarik sebagai Kepala Staf Komandan (Kasdam) Daerah Militer Jakarta Raya dan tidak lama kemudian menjadi Panglima Kodam Jaya. Ketika itu saya pun sudah tidak lagi bertugas sebagai wartawan olahraga dan sebagai Wakil Redaktur Pelaksana Kompas, saya berhubungan dengan Pak Sjafrie dalam urusan pemberitaan yang skalanya lebih nasional.



Direktur Pemberitaan Metro TV, Suryapratomo memperhatikan penjelasan Wamenhan Sjafrie sebelum pesawat mendarat di Bontang, Kalimantan Timur.

Kebetulan situasi politik nasional ketika itu sedang meningkat. Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap situasi keamanan di Jakarta, Pangdam Jaya menjadi narasumber yang paling penting untuk dimintai keterangan. Saya menugaskan wartawan politik, M. Subhan untuk meliput kegiatan di Kodam (Komando Daerah Militer) Jaya

dan terus mengikuti Pangdam. Hubungan intens yang dibangun membuat *Kompas* sering mendapat kesempatan mewawancarai Pangdam ketika harus ada berita yang harus dikonfirmasi.

Ternyata kondisi politik berubah begitu cepat. Bahkan ketegangan politik memuncak dengan terjadinya Tragedi Mei 1998, yang menyebabkan pergantian pemimpin nasional setelah Presiden Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya.

Reformasi TNI

Sistem demokrasi yang kemudian dijalankan di Indonesia membuat semua komponen bangsa harus ikut berubah. Tidak terkecuali Tentara Nasional Indonesia harus mengikuti perubahan besar yang sedang terjadi.

TNI harus mau mereformasi diri. Mereka harus terbuka kepada publik yang menuntut segalanya lebih akuntabel dan transparan. Setelah 32 tahun begitu dominan dan bahkan tidak tersentuh, TNI harus bisa dikontrol dan dikoreksi oleh masyarakat sipil. Salah satunya TNI harus lebih terbuka kepada pers. Hubungan yang dibangun dengan pers bukan lagi atas dasar dominasi, tetapi harus sederajat. Ibaratnya, pertanyaan sekritis apa pun harus dijawab dengan tenang.

Ini jelas bukan hal yang mudah. Dibutuhkan sikap rendah hati untuk menerima kenyataan baru, apalagi kemudian harus juga dijalankan dengan mengubah sikap dan perilaku.

Sjafrie Sjamsoeddin merupakan salah seorang anggota TNI yang harus menjalani hal itu. Apalagi pada tahun 2002, ia ditunjuk sebagai Kapuspen TNI, yang salah satu pekerjaannya adalah berhubungan dengan wartawan.

Ketika penugasan baru di bidang penerangan, maka hubungan saya semakin intens. Sebagai Pemimpin Redaksi *Kompas*, Pak Sjafrie sering mengajak bertukar pikiran tentang bagaimana seharusnya TNI membangun hubungan dengan pers dan juga dengan masyarakat. Saya harus mengakui bahwa Pak Sjafrie merupakan orang yang mau belajar dan cepat belajar. Sikapnya yang terbuka dan cara berkomunikasi yang enak membuat ia cepat akrab dengan teman-teman wartawan.

Sjafrie merupakan salah seorang anggota TNI yang mendorong keterbukaan di institusi militer. Bahkan ketika Pemerintahan Megawati Soekarnoputri memerintahkan dilakukannya operasi militer di Aceh, Sjafrie mengajak wartawan untuk melihat sendiri apa yang dikerjakan prajurit TNI yang ditugaskan di Aceh.

Untuk pertamakalinya TNI membuka diri terhadap wartawan saat menjalankan operasi militer. Bahkan sebelum berangkat ke Aceh, wartawan dari berbagai media menjalani program pendidikan di Pusat Pendidikan TNI-AD di Sanggabuana, Jawa Barat.

Pilihan untuk melibatkan langsung wartawan dalam operasi militer menghindarkan TNI dari tuduhan melakukan pelanggaran kemanusiaan. Setiap kali ada isu tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan prajurit TNI, bisa dilihat sendiri oleh wartawan di lapangan.

Kelebihan dari Sjafrie Sjamsoeddin adalah dia selalu ada di lapangan. Ia benar-benar orang lapangan, sehingga wartawan selalu mendapatkan informasi yang baru dan memang riil terjadi di lapangan.

Saya beberapa kali mendapat kesempatan untuk ikut

melihat langsung apa yang dilakukan TNI dalam operasi militer di Aceh. Pak Sjafrie mampu meyakinkan Panglima Komando Operasi di Aceh, Mayor Jenderal Bambang Darmono untuk menginformasikan apa yang dilakukan TNI dalam menjalankan perintah politik negara.

Bahkan saya sempat diajak ke tempat pelatihan gerilyawan Aceh yang tertangkap. Bagaimana mereka dilatih untuk bisa menguasai keterampilan sesuai dengan bidangnya, sehingga ketika kelak kembali ke masyarakat, mereka bisa hidup mandiri.

Tsunami Aceh

Komunikasi yang intens baik secara langsung maupun melalui telepon, membuat saya sering mendapatkan informasi penting dari Pak Sjafrie. Salah satunya adalah ketika terjadi tsunami di Aceh pada hari Minggu, 26 Desember 2004.

Saat itu saya sedang bersama para pemimpin redaksi makan malam bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla di Hotel Dharmawangsa. Tiba-tiba telepon saya berdering dan saya meminta izin untuk keluar ruangan.

Di ujung telepon Pak Sjafrie mau mengecek informasi yang saya miliki tentang sesuatu yang tidak biasa terjadi di Aceh. «Tom, punya informasi tentang apa yang terjadi di Aceh? Soalnya, saya dapat laporan prajurit TNI yang sedang bertugas di dekat pantai tiba-tiba hilang kontak,» tanya Pak Sjafrie.

Terus terang saya pun belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Aceh. Saya hanya dilaporkan teman-teman di kantor bahwa terjadi gempa di Aceh, namun seperti biasa

wartawan Kompas di Aceh baru akan menuliskan beritanya agak larut malam.

“Saya belum tahu detailnya juga Pak, karena saya sedang ada acara bersama Wapres. Baik Pak, saya akan cek teman di Aceh dan saya segera sampaikan informasi yang saya dapatkan dari teman di Banda Aceh nanti,” jawab saya ke Pak Sjafrie. Saya segera telepon kantor untuk menghubungi wartawan *Kompas*, Najamuddin yang tinggal di Banda Aceh. Saya pun kemudian masuk kembali ke ruangan pertemuan dan menyampaikan kepada Wapres bahwa saya mendapatkan informasi tentang beberapa prajurit TNI yang hilang secara tiba-tiba ketika bertugas di sekitar pantai Aceh.

Diskusi politik bersama Wapres Jusuf Kalla kemudian bergeser menjadi diskusi tentang apa yang terjadi di Aceh. Wapres Jusuf Kalla saat itu bertanggung jawab untuk menangani persoalan yang ada di Jakarta, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang merayakan Hari Natal bersama masyarakat Papua di Jayapura.

Malam itu Wapres mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi yang belum lengkap tentang apa yang terjadi di Aceh. Ia menyampaikan bahwa besok pagi akan terbang ke Aceh untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi.

Baru keesokan harinya memang diketahui fakta yang lebih jelas bahwa terjadi gempa hebat di Aceh yang menyebabkan tsunami. Ratusan warga Aceh menjadi korban, salah satunya wartawan Kompas, Najamuddin yang memang tidak pernah sempat melaporkan apa yang terjadi di Aceh.

Tanggal 27 sore, Pak Sjafrie menelepon saya untuk memberikan informasi tambahan tentang apa yang terjadi di Aceh.

Namun pada akhir pembicaraan ia mengatakan: “Tom, besok pagi saya mau berangkat ke Aceh bersama Asisten Operasi Kepala Staf Umum Panglima TNI Mayjen Adam Damiri. Kalau *loe* mau ikut, besok jam lima pagi datang ke Base Ops, Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma,” ujar Pak Sjafrie.

Di tengah keterbatasan sarana untuk bisa masuk Banda Aceh dan minimnya informasi lapangan yang bisa diperoleh, ajakan Pak Sjafrie ibarat durian runtuh. Saya segera mempersiapkan kebutuhan untuk liputan lapangan termasuk membawa telepon satelit, yang merupakan satu-satunya pilihan untuk komunikasi setelah semua infrastruktur telekomunikasi hancur.

Ternyata memang kondisi Banda Aceh porak-poranda. Dari kokpit pesawat Hercules yang kami tumpangi, terlihat dahsyatnya tsunami yang terjadi, sehingga kerusakan yang diakibatkannya begitu luar biasa.

Perjalanan dari Lanud ke pusat kota harus hati-hati sekali karena jenazah masih bergelimpangan di mana-mana. Warga yang selamat seperti orang yang kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Di depan Kantor Palang Merah Indonesia Banda Aceh tumpukan jenazah jumlahnya tidak terhitung. Bau mayat menusuk hidung, sehingga Banda Aceh benar-benar menjadi kota yang tidak sehat.

Siang harinya Presiden SBY yang terbang langsung dari Jayapura tiba di Banda Aceh. Di Lanud Presiden segera memanggil Mayjen Adam Damiri dan Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin untuk meminta laporan sebelum melakukan kunjungan langsung ke pusat kota Banda Aceh.

Seusai melihat langsung lokasi bencana dan sebelum terbang ke Medan untuk menginap di sana, Presiden sem-

pat memanggil kembali kedua perwira TNI itu. Perintahnya adalah memakamkan segera tumpukan jenazah yang sudah dua hari ada di depan Kantor PMI agar tidak membuat trauma masyarakat dan menghindarkan lingkungan menjadi tidak sehat.

Perintah Presiden harus segera dikerjakan. Oleh karena keterbatasan personel yang ada di Aceh, Sjafrie segera menghubungi Pangdam Bukit Barisan Mayjen TNI Tritamtomo untuk dikirim satu kompi pasukan ke Banda Aceh.

Menjelang magrib, pasukan dari Medan tiba di Lanud Banda Aceh. Sjafrie segera memeriksa pasukan dan menjelaskan tugas lapangan yang harus dikerjakan. Ia memerintahkan pasukan untuk istirahat sejenak dan kemudian bertugas kembali setelah makan malam.

Kemudian saya baru tahu mengapa tugas pengangkatan jenazah dipilih malam hari. *Pertama*, untuk membuat prajurit tidak terlalu paham tentang kondisi yang harus mereka hadapi. *Kedua*, untuk membuat masyarakat Banda Aceh tidak menangkap kesan yang keliru dalam penanganan keluarga mereka.

Pak Sjafrie meminta saya melihat langsung bagaimana proses pemindahan ribuan jenazah di depan Kantor PMI untuk dibawa ke pemakaman massal. Prajurit dari Kodam Bukit Barisan sempat tidak tahu harus memulai pekerjaan dari mana. Namun ketika Pak Sjafrie turun sendiri di tengah ribuan mayat yang ada dan mengangkat dengan tangannya untuk dinaikkan ke atas truk, maka para prajurit yang lain segera bekerja mengangkat semua jenazah yang ada.

Sampai tengah malam pemindahan jenazah dilakukan. Namun karena jumlahnya yang sangat banyak dibutuhkan

dua hari untuk benar-benar membersihkan Kantor PMI dari tumpukan jenazah dan semua jenazah dimakamkan secara lebih pantas.

Masyarakat Banda Aceh ternyata sangat berterima kasih atas kerja yang dilakukan sendiri oleh Pak Sjafrie bersama prajurit Kodam Bukit Barisan. Dengan dimakamkannya seluruh jenazah yang ada di depan Kantor PMI membuat kota menjadi lebih bersih dan trauma tsunami perlahan-lahan bisa dihilangkan.

Baru kemudian saya tahu, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang dipakai saat mengangkut jenazah tidak bisa ia gunakan. Tidak ada satu pun perusahaan *laundry* yang mau menerima untuk membersihkan pakaian dinas lapangan yang bau mayat.

Bintang Empat

Begitu banyak perjalanan yang saya ikuti bersama Pak Sjafrie saat menjadi Kapuspen. Saya mendapat banyak kesempatan untuk berkenalan dengan banyak tentara dari semua angkatan yang memang dekat dengan Pak Sjafrie. Saya sering menguping pembicaraan di antara para tentara yang meminta Pak Sjafrie untuk melobi Panglima TNI agar mendapat kesempatan ditugaskan di posisi yang baru. Salah satu yang saya ingat betul bagaimana perwira bintang satu itu kemudian mendapatkan promosi naik bintang dua, bahkan kemudian pensiun dengan bintang empat.

Lama Pak Sjafrie sendiri tidak pernah bertambah bintangnya. Bahkan sering saya bertanya, mengapa ia tidak pernah naik pangkat dan tetap saja berpangkat mayor jenderal. “Siapa bilang saya hanya bintang dua? Saya bintang em-

pat. Lihat saja dua bintang di bahu kiri dan dua bintang di bahu kanan, itu kan empat bintang,” jawab Pak Sjafrie berseloroh.

Namun kemudian saya bisa mengerti bahwa bagi dirinya bintang bukanlah segala-galanya. Pengabdian kepada negaralah yang jauh lebih bermakna. Bahkan bagi seorang tentara, kehormatan dan penghormatan merupakan dua hal yang berjalan beriringan. Tidak akan ada artinya kehormatan, tanpa ada penghormatan. Penghormatan itu akan diberikan ketika kita berbuat sesuatu untuk korps.

Dengan sikapnya yang menerima setiap kepercayaan yang diberikan, saya melihat Pak Sjafrie tidak pernah terbebani oleh ambisi. Ketika tahun 2005 mendapat tugas sebagai Sekjen Dephan, yang ia lakukan adalah menjadi administrator yang baik bagi Departemen Pertahanan dan institusi TNI.

Demikian pula ketika pada tahun 2010, ia ditunjuk sebagai Wamen Pertahanan. Kemampuannya untuk menempatkan diri secara tepat membuat ia menjadi partner yang baik bagi Menteri Pertahanan.

Saya pernah bertanya kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tentang keberadaan Pak Sjafrie sebagai Wakil Menteri Pertahanan. “Saya suka bekerja dengan dia. Orangnya *smart* dan sebagai seorang tentara, saya sangat terbantu untuk bisa membangun komunikasi dan kerja sama dengan TNI,” ujar Menhan.

Pengalamannya berhubungan dengan wartawan, membuat Pak Sjafrie tidak canggung ketika harus menduduki jabatan publik. Bahkan ia menjadi komunikator yang efektif bagi Kementerian Pertahanan, karena mampu men-

jelaskan setiap kebijakan yang diambil pemerintah kepada masyarakat luas.

Dalam kontroversi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional misalnya, Pak Sjafrie dengan tepat menjalankan peran untuk menjelaskan kerangka berpikir kepada fraksi-fraksi di DPR. Demikian pula dalam kontroversi pembelian alat utama sistem persenjataan TNI, ia mampu membangun dialog yang baik dengan semua pemangku kepentingan.

Prinsip yang diterapkannya memang membuat saya kagum kepada Pak Sjafrie. Ia adalah seorang prajurit sejati dan tidak pernah tertarik untuk terjun ke dunia politik.

”Saya ini tentara dan sejak awal memutuskan untuk menjadi tentara. Keluarga saya, anak-anak saya tahu kalau saya memilih tentara sebagai jalan hidup. Saya harus konsekuen dengan pilihan hidup saya dan saya tidak mau sampai anak saya menilai saya sebagai orang yang tidak konsisten. Kalau pun saya nanti pensiun, saya akan pensiun sebagai seorang tentara...!”

Ini agaknya sudah terpenuhi. Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin pensiun dengan pangkat Letjen, untuk menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan mungkin menjadi orang paling lama menjabat sebagai *second man* di Kementerian Pertahanan, mula-mula sebagai Sekjen di era Menteri Juwono Sudarsono dan kemudian Wamen di era Purnomo Yusgiantoro.

*Direktur Pemberitaan *Metro TV* dan mantan Pemimpin Redaksi Harian Umum “*Kompas*”

Saya Datang, Dia Pergi

Syarifiddin*

Proses mengenal Pak Sjafrie Sjamsoeddin bagi saya, ibarat air laut yang mengalun ke pantai. Lambat. Mengingat latar belakang kami berjauhan, bahkan pada masa itu dianggap tak mungkin nyambung.

Pada pertengahan tahun 1985 hingga tahun 2003, saya bekerja di Harian Ekonomi *Bisnis Indonesia*. Koran yang melulu mengangkat berita-berita ekonomi, perbankan dan keuangan, terutama pasar modal. Boleh dibilang tak pernah ada berita maupun analisis tentang militer dan personilnya.

Saya lalu melakukan perubahan. Berita dan foto tentang pergantian jabatan dan pergeseran personil dimuat di *Bisnis Indonesia*. Dalihnya sederhana saja, kaum pebisnis perlu mengetahui dinamika di kalangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebaliknya aparat militer juga layak memahami dunia bisnis dalam arti yang sesungguhnya.

Pucuk dicinta ulam tiba, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menyelenggarakan perayaan ulang tahun dan berbagai kegiatan lainnya. Maka saya pun merapat ke instansi militer yang berlokasi di Cijantung itu. Setelah itu hampir setiap minggu saya datang, walaupun Kopassus belum punya perwira yang menangani pers dan tentu saja jarang punya berita.

Pada tahap awal, saya nge'pos' di lantai satu, bertemu dengan Kapten Inf. Tiswan. Kerap saya bawa koran Bisnis yang isinya tentang pak Agum, Komandan Kopassus saat itu, serta foto-foto serah terima jabatan di lingkungan Kopassus. Pernah seorang perwira mengutip perkataan pak Sjafrie tentang pentingnya tentara memahami masalah-masalah ekonomi. Jadi kehadiran Koran Bisnis Indonesia disambut baik.

Saya mulai naik ke lantai dua Mako Kopassus setelah Letkol Inf. Amirul Isnaeni diangkat menjadi Wakil Asisten Intelijen (Waasintel). Di lantai inilah terdapat ruang kerja para wakil, asisten, wadan dan komandan Kopassus. Sejak itu saya sangat akrab dengan para perwira bahkan kerap diajak makan siang.

Seringkali saya bersedih karena menunya biasa-biasa saja. Ikan mas goreng, tempe-tahu, sayur asam, lalap, sambal, kerupuk warung atau rempeyek. Padahal beban tugas, secara fisik maupun mental, para perwira ini sangat berat. Bukankah waktu itu sedang sibuk-sibuknya menangani daerah konflik?

Sering ke lantai dua tak berarti ketemu pak Sjafrie, sekalipun dia pernah menjabat Wakil Asisten Operasi (Waasops). Seperti umumnya perwira Kopassus, maka ia pun banyak meninggalkan markas. Penugasan ke Aceh, Papua, Timor-Timur, Komandan Satuan Pelaksana Pengawal Pribadi Presiden dan Komandan Grup A Pengamanan Presiden. Belum lagi sekolah ini, sekolah itu. Lalu menjadi Danrem 061/Suryakencana Kodam III Siliwangi.

Bertahun-tahun, saya boleh dibilang satu-satunya wartawan atau sipil yang mondar-mandir di Mako Kopassus,

untuk bertemu para perwira ataupun sholat Jumat di mesjid hingga diam-diam dikenali. Beberapa pati Kopassus bahkan senyum-senyum kalau bertemu pada acara di Dephankam/ABRI, DPR atau Mabes AD. Kenal rupa, tak ingat nama.

Ketika mantan Wadanjen Kopassus /Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Idris Gassing wafat, saya pun melawat ke rumahnya dan melihat pak Sjafrie ada di sana. Tak ada satupun tamu yang pulang sebelum 'lurah taruna Akmil 1974' tersebut meninggalkan tempat.

Frekuensi pertemuan justru sering terjadi ketika pak Sjafrie menjadi Pangdam Jaya, Kapuspen TNI dan Wakil Menteri Pertahanan. Dalam posisi-posisi seperti itu, pak Sjafrie kelihatannya seperti memperoleh tempat untuk mencurahkan pandangan dan gagasannya tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, tak hanya aspek teknis militer.

Para wartawan seringkali diajak berbincang-bincang tentang berbagai hal. Pada waktu itulah berlangsung komunikasi dua arah. Pak Sjafrie menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya serta sekaligus mendengar pandangan-pandangan wartawan. Suasananya rileks dan seringkali diwarnai gelak tawa.

Dalam perbincangan itu kerap terlihat ketidakseimbangan. Wartawan umumnya cenderung melihat sesuatu masalah secara berdiri sendiri dan bergerak dari satu isu ke isu yang lain. Di lain pihak, pak Sjafrie melihat masalah atau isu secara menyeluruh dan menyelipkan atau mengundang pendengarnya untuk menganalisis.

Pernah juga pak Sjafrie datang ke kantor *Sinar Harapan* dan berdiskusi dengan jajaran pers dengan topik

masalah regional maupun internasional. Ketika itu saya menyampaikan dua buah buku karangan PM Malaysia Najib bin Abdul Razak yang isinya antara lain menyinggung soal, prasyarat ketahanan nasional suatu bangsa. Saat menerima buku tersebut, pak Sjafrie nyeletuk sambil ketawa, “Wah ini anteknya Najib...”

Sebagai perwira militer, pak Sjafrie mempunyai bekal yang mantap. Kuat di bidang intelijen, berpengalaman di berbagai palagan, posturnya meyakinkan, intelek dan memberi peluang kepada bawahan untuk berkembang. Kakak kelas saya di SMP mengaku mendapat bimbingan dan kesempatan dari pak Sjafrie hingga berkarir militer cermerlang.

**Wartawan, pernah bekerja di Harian “Bisnis Indonesia”, “Sinar Harapan” dan kini, majalah mingguan ekonomi “Inilah Review”*

Seorang Letnan “Culun” di Lingkungan Istana

Tarman Azzam*

Saya mulai bertugas dalam lingkungan Istana Kepresidenan tahun 1972. Jauh sebelum Sjafrie Sjamsueddin bertugas di sana, jadi praktis saya telah “menguasai medan” lebih lama. Artinya saya kenal banyak staf dan petugas keamanan yang berada di lingkungan Istana. Jadi ketika sekitar pertengahan tahun 1977 seorang perwira baru masuk menjadi bagian dari Pasukan Pengawal Presiden (Paswalpres, istilah pertama dahulu), kami para jurnalis, langsung tahu. Perwira baru ini segera menarik perhatian karena masih “culun” tetapi posturnya tinggi berisi dan ganteng. Saya ingat, ia sangat santun ketika berkenalan dengan kami, para reporter. “Saya Sjafrie...” katanya dengan nada merendah bersalaman dengan kami.

Saya juga memperhatikan ia memang berbeda dengan anggota Paswalpres yang lain. Tadinya saya kira ia hanya berbasai-basi saja, tetapi kemudian Sjafrie ternyata bisa dengan cepat adaptasi dalam sebuah lingkungan baru dan mampu berkomunikasi dengan para wartawan tanpa sekat-sekat atau kecurigaan. Ini cukup mengagumkan, karena kemudian jabatannya adalah Komandan Satuan Pelaksana (Dan Satlak) Pengawal Pribadi Presiden membuat ia selalu harus waspada atau selalu curiga. Tetapi saya memperhatikan

ia tidak pernah kelihatan tegang seperti layaknya seorang *body guard*. Bahasa tubuhnya sangat santai, tetapi saya yakin ia tidak pernah kehilangan kewaspadaan.

Ketika kemudian saya diangkat oleh kawan-kawan wartawan Istana untuk menjadi Koordinator Wartawan Istana, hubungan kami semakin erat. Saya gembira karena Pak Sjafrie itu adalah sosok yang tidak malu bertanya kalau ia tidak mengerti. Sering ia menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan para wartawan atau tugas-tugas wartawan kepada saya selaku koordinator. Dan ternyata ia seorang *quick learner*. Seorang yang cepat belajar.

Setelah beberapa tahun, ia tiba-tiba pamit kepada kami. Katanya ia mendapat penugasan kembali ke lapangan sebagai anggota Korps Baret Merah. Seingat saya meskipun di luar lingkungan Istana, sering tiba-tiba ia muncul di Press Room kami di Sekretariat Negara. Ia datang sekedar ngobrol dan setelah itu pergi lagi. Entah tugas kemana.

Seperti banyak dikisahkan oleh kawan-kawan, Sjafrie kembali ke lingkungan Istana, pangkatnya Kolonel dan menjadi Komandan Grup A Paspampres, artinya menjadi pejabat yang bertugas menjaga keamanan Presiden RI selama 24 jam, 365 hari dalam satu tahun. Wartawan yang bertugas di lingkungan Istana sudah banyak yang berganti pula. Anak-anak muda atau reporter muda mulai masuk, tetapi menurut cerita mereka, Sjafrie pun bisa akrab dan dekat dengan mereka.

Saya lama tidak ketemu dia karena saya semakin sibuk di organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dia karirnya baik sehingga bertugas di luar lingkungan Istana Kepresidenan. Pertemuan kembali dengan Pak Sjafrie terjadi

ketika ia sudah menjadi Kepala Staf Kodam Jaya (Pangdam Jaya waktu itu Pak Mayjen Sutiyoso) dan saya menjadi Ketua PWI Jaya sekaligus anggota DPRD Jakarta.

Ketika Sjafrie menjadi Pangdam Jaya, hubungan kami menjadi intensif lagi, karena Pangdam banyak berhubungan dengan insane pers dan organisasi pers yang saya pimpin banyak punya hubungan kerja dengan beliau. Menurut pandangan saya, sifat-sifatnya yang dulu masih tetap kental. Ia tidak sungkan menelepon saya kalau hendak menanyakan sesuatu. Tidak jarang saya dan pengurus PWI diundang ke kantornya untuk menerima penjelasan. *Background information* (informasi latar belakang) diberikan dengan terbuka dan penuh kepercayaan.

Jadi ketika terjadi huru-hara Mei 1998, ia menilai beliau sedang “apes”. Atau kalau digunakan bahasa lain, Pak Sjafrie berada di tempat salah pada waktu yang salah pula. Mengenal sifat-sifatnya, saya tidak sependapat kalau ia dianggap melakukan pelanggaran HAM. Tetapi itu sudah menjadi bagian dari sejarah.

Saya kemudian bergembira ketika mengetahui bahwa ia menjadi Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI). Kemitraan dan hubungan kerja setara dilanjutkan dalam suasana yang lebih terbuka, mengingat Indonesia sudah memasuki era reformasi. Selaku Ketua Umum PWI Pusat, Kapuspen sering mengundang saya memberikan penjelasan atau ceramah dihadapan para perwira tinggi TNI.

Bagi saya pribadi, Sjafrie adalah seorang sahabat, bukan sekedar mitra dan lebih dari sekedar teman. Sahabat tidak mengenal batas formal, pangkat atau jabatan. Sebagai Wamenhan, saya masih selalu dkiundang dalam acara tatap-

mata dengan para pemimpin redaksi media massa nasional. Dan ia adalah Sjafrie Sjmasoeddin yang saya kenal ketika masih “culun” berpangkat Letnan Satu Infanteri.

Demikian interaksi saya dengan Pak Sjafrie Sjmasoeddin dimulai dari lingkungan Istana hingga jadi Wamenhan. Bertahun-tahun setelah meninggalkan “pos” di lingkungan Istana Kepresidenan, saya masih ingat dan akrab dengan tiga orang pengawal Pak Harto. Pertama adalah Kol. Inf. Utju Sjafri (alm.), kedua adalah Pak Sjafrie Sjmasoeddin dan yang ketiga adalah Pak Subagyo HS (kemudian menjabat Kasad). Ketiganya mempunyai kemiripan kepribadian, akrab dengan wartawan, tidak sombong dan perwira yang bertanggungjawab serta professional. Tetapi dengan Pak Sjafrie saya lebih dekat, mungkin karena kemudian banyak berinteraksi di pekerjaan yang mirip: saya wartawan, beliau di bidang teritorial dan kemudian penerangan. Dan usia kami tidak beda jauh-jauh amat.

* * *

Pada kesempatan ini izinkanlah saya bercerita sedikit mengenai pengalaman unik saya dengan Presiden Soeharto selama menjadi wartawan dalam lingkungan Istana Kepresidenan, dan sebenarnya tidak berkaitan dengan Pak Sjafrie tetapi patut direnungkan:

Saya satu-satunya wartawan di lingkungan Istana yang pernah “dibentak” Pak Harto. Kisahnya itu terjadi tahun 1977, yaitu periode sekitar Pak Sjafrie mulai bertugas, Pak Harto mengajak para wartawan peliput

kegiatan Kepresidenan meninjau pembangunan Komplek Perumahan “Bermis” untuk para anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat itu beliau mengungkapkan rencana pembangunan banyak perumahan murah di seluruh daerah Indonesia. Ratusan ribu, bahkan jutaan rumah akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, rumah-rumah yang layak, sehat dan harganya terjangkau.

Sebagai seorang reporter yang kritis saya pun bertanya polos, “Dari mana uang pembangunannya pak?”

Segera Pak Harto menoleh ke arah saya, lalu menjawab ketus, “Iya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), *emangnya* dari kantong *mbah*-mu?!”

Wahhh.... saya pun terkejut bukan kepalang.

Pak Harto menambahkan, “Semua dana pembangunan ini dari APBN, bukan dari yang lain, jangan ada yang mengira macam-macam....!” *Wah... wah...* saya pun kemudian *diomelin* teman-teman wartawan.

Setelah “insiden” itu, secepatnya saya melapor diri ke Kol. G. Dwipayana, Asisten Dokumentasi Mass Media Menteri Sekretaris Negara, mengenai kejadian saya dimarahi Pak Harto. Pak Dipo—demikian panggilannya—mengatakan dengan santai, “*Ga* apa-apa, itu bukan marah”.

“*Lho*, kalau beliau marah bagaimana?” tanya saya bingung.

“Iya diam! Jadi (kamu) sekarang kerja *aja* normal”, jawab Pak Dipo. Dan kalau beliau marah, maka sudah

menjadi “urusan” Paswalpres.

Hati saya pun tenang, kemudian berlalu meninggalkan Pak Dipo.

Beberapa waktu kemudian saya menyadari mengapa waktu itu Pak Harto begitu “sensitif” terhadap pertanyaan saya. Rupanya ada isu-isu dan pemberitaan yang gencar mengenai proyek-proyek non-budgetair yang dituduhkan menyebabkan korupsi.

Beberapa bulan kemudian, ada sebuah pameran diselenggarakan di lingkungan Istana Kepresidenan. Pak Harto hadir, dan ketika melihat ada stan sate kelinci beliau mengambil tiga tusuk sate dan kemudian duduk di sebuah kursi dekat tiang Istana Negara. Melihat itu, insting kewartawanan saya muncul lagi. Dengan langkah pasti saya mendekati ke Presiden dan bertanya, “Pak, bagaimana rasanya sate kelincinya..?”

Pak Harto mendongak ke atas dan tersenyum. Ia menyodorkan satu tusuk sate ke saya, dan segera saya memasukkan ke mulut. Belum sempat mengunyah Presiden berkata, “Enak nggak?” Tentu saja saya jawab dengan cepat, “Enak pak. Enak sekali...!”

Siapa bilang Pak Harto marah sama saya...?

*Penulis adalah wartawan senior, mantan Pemimpin Redaksi harian *Terbit*, mantan anggota DPRD DKI Jakarta dan mantan Ketua Umum *Persatuan Wartawan Indonesia* (PWI) Pusat. Kini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat.

Pencetus Pertama ***Embedded Journalist***

Teguh Tri Sartono*

Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai seorang perwira TNI, proaktif dalam melaksanakan tugasnya. Saya mengenalnya sejak ia menjabat sebagai Kapuspen TNI. Sebelumnya namanya sudah lama saya dengar, saat menjabat sebagai Pangdam Jaya pada era 1998, namun saat menjabat sebagai Kapuspen lah saya bersentuhan langsung dengannya karena pekerjaan. Kebetulan saat itu saya ditugaskan oleh studio untuk mengisi Desk Liputan TNI Pertahanan dan Keamanan, sehingga sering bersinggungan langsung dengannya.

Kesan saya, ia sangat proaktif terkait pemberitaan. Salah satu pengalaman yang saya ingat ketika secara responsif ia menghubungi saya dan meminta untuk *on air* di udara ketika saat itu studio kami sedang mewawancarai nara sumber terkait isu TNI Pertahanan dan Keamanan, yang ia nilai masih kurang pas atau lengkap. Sebagai media yang mengutamakan *cover both side*, dengan senang hati kami memberi ruang kepadanya untuk *on air* dan menjawab atau memberikan klarifikasi jika memang ada yang harus diklarifikasi seperti masalah Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), anggaran TNI, oknum TNI yang terlibat masalah hukum, mutasi promosi dan rotasi dalam tubuh

TNI, wacana hak pilih prajurit dalam pemilu, serta beragam isu lainnya.

Hal itu penting demi memberikan keseimbangan sehingga pendengar kami mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif terhadap sesuatu masalah terkait TNI Pertahanan dan Keamanan.

Pengalaman lain yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika berlangsung masa darurat militer di Aceh. Saat itu saya masuk dalam *embedded journalist* Angkatan Pertama. Pada saat itu, setiap media yang akan mengirimkan reporternya ke medan darurat militer di Aceh, terlebih dulu harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Puspen TNI di daerah latihan Kostrad di bukit Sanggabuana, Karawang, selama empat hari tiga malam.

Ide Sjafrie sebagai Kapuspen TNI membekali wartawan dengan pengetahuan lapangan tanpa membatasi *content* materi pemberitaan saya rasakan sangat menarik. Kami, reporter di lapangan dibekali “lebih” dengan pengalaman yang kami dapat selama pelatihan. Karena adanya pelatihan itulah kami mengerti tentang peta sosial di daerah konflik, teknik menjaga keselamatan diri saat terjadi kontak senjata, dan teknik *survival*, bertahan hidup di tengah hutan.

Karena pelatihan itu jugalah di medan darurat militer di Aceh saya bisa membedakan kaliber ukuran peluru, sehingga bisa membedakan mana amunisi milik TNI dan milik GAM, membedakan mana suara senapan AK-47 milik GAM, atau bunyi SS-1 (Senapan Serbu) senjata organik milik TNI buatan Pindad.

Demikian pula kami tahu cara menghindar dan berlindung saat terjadi kontak senjata, penggunaan kompas,

bahkan teknik bertahan hidup di hutan.

Saat menjabat sebagai Sekjen Dephan pun hubungan kami terus berlanjut. Saya masih kerap mendapat “pencerahan”, latar belakang tentang beragam hal terkait pertahanan.

**Reporter di Radio Elshinta sejak tahun 2001*



Jalan Panjang Sjafrie Menuntaskan Reformasi TNI

Tiurma Siboro*

*“All stuffs should be ‘covered both sides’;
especially in journalism.”*

Penggalan kalimat itu bukanlah kata-kata yang terasa asing bagi telinga para insan jurnalistik di belahan negeri mana pun. Persoalannya, mengucapkan mantra tersebut jauh lebih mudah daripada melaksanakannya.

Sebagai jurnalis muda yang memulai karier jurnalistik pada penghujung 1990-an, saya hanya sempat sepenggalan jalan merasakan kuatnya rezim Orde Baru; dan hari-hari terakhir menjelang berakhirnya rezim tersebut, aktivitas jurnalistik saya dipenuhi dengan berbagai aksi demonstrasi mahasiswa menuntut pergantian pucuk kepemimpinan di negara ini.

Dalam hari-hari yang dipenuhi hiruk-pikuk manuver politik itu—baik oleh kelompok *status quo* maupun kelompok yang menginginkan perubahan total—saya seperti tersentak ketika terjadi penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti, yang kala itu berniat keluar dari kampus mereka di wilayah Grogol, Jakarta Barat, dan turun ke jalan melancarkan aksi menuntut reformasi. Insiden itu menewaskan empat mahasiswa.

Sehari setelah peristiwa penembakan itu amuk massa, penjarahan, dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa bercampur baur dengan gelombang aksi demonstrasi yang lebih besar lagi, yang terjadi dalam skala nasional. Tak ada pilihan bagi rezim berkuasa saat itu kecuali mundur.

Kerusuhan massal di Jakarta terjadi pada 12-13 Mei 1998 dan akan selalu dikenang sebagai tragedi dalam sejarah republik ini. Sebagai jurnalis, saya berada di antara massa, melihat porak porandanya Ibukota negeri ini. Aparat yang berjaga tidak bisa banyak berbuat—atau jika bisa saya ungkapkan, terjadi pembiaran saat tensi keamanan semakin memanas dan kritis.

Ketika keamanan Ibukota berada pada titik terendah itulah Mayjen Sjafrie Sjamsuoddin menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya).

Saya belum lama ditugaskan meliput berbagai isu nasional (terkait politik, hukum, keamanan dan pertahanan) oleh kantor media tempat saya bekerja ketika peristiwa Mei 1998 terjadi. Saat itu saya pun hanya sempat beberapa kali meliput kegiatan di Kodam Jaya saat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memutuskan untuk mengganti Pangdam Jaya, Mayjen Sjafrie, dengan seniornya, Mayjen Djadja Suparman (lulusan Akabri tahun 1972, sementara Sjafrie lulus 1974). Pergantian Pangdam Jaya itu tidak terlepas dari insiden penembakan di Trisakti pada Mei 1998 dan aksi amuk massa yang terjadi setelahnya.

Gelombang reformasi dan lengsernya penguasa Orde Baru, Soeharto, telah pula memberi pengaruh yang cukup besar ke dalam institusi TNI—yang selama kurun 32 tahun

berkuasanya rezim Orde Baru, telah menjadi salah satu pilar pendukung kekuasaan.

Aktivitas saya meliputi perkembangan politik yang sangat pesat pasca berakhirnya Orde Baru menarik saya kepada satu fokus utama: reformasi internal militer. Hal itulah yang kemudian membuat saya banyak melakukan interaksi dengan sejumlah perwira tinggi di Mabes TNI, termasuk kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat sebagai Kepala Staf Sosial dan Politik (Kasospol)—untuk selanjutnya jabatan tersebut berganti menjadi Kaster, atau Kepala Staf Teritorial sejalan dengan berakhirnya dwifungsi militer.

Pada masa-masa itulah saya kembali bertemu dengan Mayjen Sjamsoeddin, yang saat itu tengah mengikuti kegiatan di Lemhannas. Pertemuan saya kembali dengan Mayjen Sjamsoeddin (selanjutnya saya akan menyebut dengan “Pak Sjafrie”—*Red.*) di Lemhannas di penghujung 1999 hanyalah kebetulan belaka. Namun, dengan insting kewartawanan saya, tidak sedikit pun saya ingin menyia-nyiakannya karena—sebagaimana semua memahami—figur seorang Pak Sjafrie bukan figur yang dapat dengan mudah ditembus jurnalis—apalagi yang masih sangat junior seperti saya. Pun, dia adalah sosok yang sangat kontroversial, dengan berbagai isu “miring” terkait aktivitas operasi militer yang selalu dikaitkan dengan namanya.

Pertemuan saya dengan Pak Sjafrie di Lemhannas pun terjadi di tengah-tengah gencarnya upaya Komnas HAM melakukan investigasi dan pemanggilan terhadap sejumlah figur militer yang dianggap bertanggung jawab dalam aksi pembumihangusan Timor Leste (saat itu masih bernama

Timor Timur) pasca-jajak pendapat di bekas wilayah Indonesia tersebut.

Saat itu, Pak Sjafrie, yang berniat melakukan salat *dzuhur*, tengah melintasi lapangan tenis yang berada di dalam areal Gedung Lemhannas. Bersama Pak Sjafrie, ada lagi beberapa jenderal, termasuk Letjen Johnny Lumintang, mantan wakil kepala staf Angkatan Darat. “Ini *nih* wartawan, hei, mau apa?” Letjen Johnny menyapa saya sambil tertawa. Saya terkejut, menoleh, dan sadar bahwa bersama Letjen Johnny adalah Mayjen Sjamsoeddin. “Wah, mau wawancara Pak Sjafrie,” ujar saya, ikut bercanda.

“*Tuh*, dicari wartawan *tuh*,” ujar Letjen Johnny ke arah Pak Sjafrie. Saat itu, Pak Sjafrie hanya tersenyum dan segera mengambil wudhu. Saya menunggui Pak Sjafrie selesai mengambil wudhu, lalu mulai mendekat. “Pak, apa kabar? Sudah lama sekali tidak bertemu. Bisa minta nomor *handphone*?” sapa saya segera. Pak Sjafrie hanya tersenyum, mengambil sepotong kertas dari saku bajunya, menuliskan nomor telepon selularnya, dan memberikannya kepada saya.

“Nanti saya hubungi ya Pak, minta wawancara,” ujar saya. Pak Sjafrie tertawa. Saya pun bergegas pergi meninggalkan halaman gedung Lemhannas, berpikir-pikir, apakah Pak Sjafrie benar-benar memberikan nomor telepon selularnya dan apakah akan mudah bagi saya menghubunginya kelak.

Menghubungi Pak Sjafrie via telepon selular ternyata memang tidak semudah yang saya duga. Beberapa kali telepon saya tidak diangkat, padahal saat itu saya sangat ingin mengkonfirmasi berbagai isu, termasuk rangkaian penyelidikan yang tengah dilakukan oleh Komnas HAM terkait isu pelanggaran HAM di Timor Timur saat jajak

pendapat tahun 1999. Baru setelah berkali-kali mencoba, telepon saya terjawab, oleh salah satu staf Pak Sjafrie—saat itu, Pak Sjafrie menjabat sebagai koordinator staf ahli (Koopsahli Panglima TNI).

Kepada staf tersebut, saya menjelaskan maksud saya menelepon. “Saya ingin mendapat penjelasan versi Pak Sjafrie tentang kasus Timor Timur, karena saya harus menulis pemberitaan yang berimbang, *cover both sides*,” demikian saya menjelaskan pada staf Pak Sjafrie.

Tidak lama setelah itu, telepon selular saya berdering, dari seberang telepon, sang staf berkata, “Bapak (Sjafrie—*Red*) akan menjawab dalam bentuk tertulis, apakah bisa?” Saya pun mengiyakan setelah berdiskusi dengan pemimpin redaksi saya saat itu, Mas Bambang Bujono, karena pada prinsipnya, jawaban lisan akan jauh lebih diutamakan ketimbang jawaban yang diberikan secara tertulis.

Sore harinya, jawaban tertulis dari Pak Sjafrie dikirimkan ke kantor redaksi saya, dan dalam beberapa lembar keterangan tertulis itu, Pak Sjafrie menjelaskan berbagai sangkaan miring terhadapnya. Keterangan tertulis itu menjadi pembelaannya. Saya kembali berdiskusi dengan pemimpin redaksi dan editor saya tentang apakah keterangan itu akan dimuat utuh atau tidak. Akhirnya, tulisan itu dirangkum dan dimuat sebagai bagian dari laporan utama majalah tempat saya bekerja, *D&R* – tentu saja disandingkan dengan hasil-hasil temuan Komnas HAM.

Komunikasi saya dengan Pak Sjafrie tidak secara otomatis terjalin setelah itu. Baru di penghujung 2000, saya memulai lagi komunikasi dengannya ketika akan menulis *review* tentang situasi keamanan nasional yang hampir

sepanjang masa sejak awal reformasi bergulir, diguncang kerusuhan sosial, termasuk isu etnik dan agama.

Saat itu saya sudah bekerja di salah satu media berbahasa Inggris, *The Jakarta Post*. Itulah saat di mana saya mempunyai kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Sjafrie. Berdiskusi cukup lama, terutama karena sebagai orang sipil, saya tidak banyak memahami dunia militer. Diskusi-diskusi saya dengan Pak Sjafrie sangat mewarnai tulisan saya, karena saya bisa merangkum dari berbagai sisi, baik dari para aktivis HAM, masyarakat lokal, korban konflik, dan, tentu saja, dari “kacamata keamanan versi militer.”

Karena kesibukan keseharian, terkadang saya baru bisa bertemu dan berdiskusi dengan Pak Sjafrie pada malam hari seusai jam kantor. Saat itu, Pak Sjafrie masih menjabat sebagai Koorsahli di Mabes TNI. Ia sama sekali tidak banyak tampil ke permukaan. Hingga suatu saat, dalam sebuah pertemuan, Pak Sjafrie bertanya, “Bagaimana caranya menghadapi media?”

Tersirat dalam kepala saya saat itu, bagaimana Pak Sjafrie, yang pada awal-awal kariernya di Kodam Jaya, mendapat julukan sebagai salah satu *the rising stars*; namun kemudian namanya memenuhi *headlines* di hampir semua media sebagai salah satu yang paling bertanggung jawab dalam berbagai isu pelanggaran HAM. “Bapak mau dapat jabatan baru? Menjadi Kapuspen?” saya bertanya, menduga-duga apakah ia akan mendapat penugasan baru sebagai Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI yang tentu saja akan “memaksanya” berhadapan langsung dengan insan pers.

Ia tidak menjawab. Baru setelah beberapa hari kemudian, Mabes TNI mengumumkan *reshuffle* jabatan dan seperti yang



Sebagai Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie menjawab pertanyaan wartawan televisi *Indosiar*.

sudah saya duga, nama Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin disebut sebagai Kapuspen Mabes TNI, dengan wakilnya, Brigjen TNI Tono Suratman. Saya segera menelepon Pak Sjafrie, dan stafnya menjawab di seberang telepon, “*Mbak*, ke Cilangkap saja, ditunggu Bapak.” Bersama salah seorang teman, saya berangkat ke Mabes Cilangkap. Sepanjang perjalanan yang panjang dari kantor saya di wilayah Jakarta Selatan menuju Cilangkap, saya dan teman saya sempat membahas, “Wah, bagaimana ya, figur yang jadi ‘bulan-bulanan media’ ini sekarang harus bertatap muka langsung, justru dengan orang-orang media.”

Setiba di Mabes Cilangkap, ternyata sudah banyak orang berkumpul, terutama para insan pers, karena ingin mendapat komentar Pak Sjafrie tentang penunjukannya di pos yang baru sebagai Kapuspen. Saya dan teman-teman

yang lain menunggu, hingga tiba-tiba salah satu staf Pak Sjafrie turun dari lantai atas dan mendekati saya, “Mbak, ditunggu Bapak di ruangan...”

”Lho, jadi tidak ada *press conference*? “Tidak, nanti saja Bapak baru akan memberikan keterangan resmi.” Hanya saya dan teman saya yang kemudian diajak naik ke atas dengan *lift*, masuk ke ruangan Pak Sjafrie.

Setiba di ruangan, saya menjabat tangannya, dan ia tersenyum. “Selamat ya Pak, tugas Bapak tidak mudah, Bapak harus bisa mendapatkan kembali *trust* dari publik dan media.” Pak Sjafrie sendiri tampaknya sudah memahami bahwa beban tugasnya tidaklah mudah.

Jenderal yang selama ini lebih banyak menutup diri dari media, sekarang harus bertatap muka langsung dengan pers. Jenderal yang selama ini memenuhi *headlines* media dengan isu-isu negatif, sekarang mengemban misi mensosialisasikan program-program militer hingga gamblang di mata publik. “Ngomong-ngomong, *kok* Kapuspen dan Wakapuspennya orang intel, Pak? Kami mau *diintelin* ya?” saya berseloroh.

“Saya akan menjaga komunikasi dengan media, reformasi menuntut ini semua,” itulah salah satu penggalan kalimat Pak Sjafrie.

Program TNI yang mendapat sorotan cukup tajam dari berbagai pihak adalah pelibatan media sebagai *embedded journalists* ketika Pemerintahan Megawati Soekarnoputri menyatakan darurat militer di Aceh pada Mei 2003. Banyak yang beranggapan bahwa pelibatan media itu hanya akan menjadikan pers sebagai bagian dari propaganda militer, dan, tentu saja, independensi media dan *trust* dari masyarakat menjadi taruhannya.

Saya tidak bisa menyalahkan mereka yang berpikiran seperti itu, karena sebagai individu saya pun sempat berpikir tentang hal yang sama. Mempertanyakan diri saya, apakah saya akan mampu menjaga independensi saya sendiri? Apakah objektivitas saya saat meliput situasi di Aceh akan mampu saya pertahankan? Sungguh bukan sebuah pilihan yang mudah, apalagi karena ada kebijakan dari Mabes TNI bahwa hanya jurnalis yang mengikuti program *embedded* itulah yang bisa keluar-masuk Aceh.

Saya sempat bertanya kepada Pak Sjafrie, apakah kami tidak dalam “bahaya” jika saat berada di Aceh, kami melihat pelanggaran HAM oleh TNI dan menuliskannya dalam pemberitaan kami. Ia menjelaskan bahwa itu tugas yang harus saya dan teman-teman media lakukan: melihat dan menuliskannya dalam berita, sehingga publik tetap tahu tentang apa yang terjadi di Aceh. Berbekal janji bahwa militer tidak akan mengintervensi pemberitaan, kami pun berangkat ke Aceh.

Saya dan teman-teman dekat telah memutuskan untuk berfokus pada rakyat, sebagai *concern* utama kami karena rakyatlah yang menjadi korban dari konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kami pun lebih banyak pergi ke desa-desa.

Sesekali kami mendapat intimidasi dari militer Indonesia yang bertugas di Aceh, dan memang, ternyata tidak ada jaminan bahwa *embedded journalists* akan steril dari berbagai intimidasi ini. Namun kami tetap mencatat dan melaporkan apa yang kami lihat dengan mata-kepala sendiri terkait situasi di lapangan lewat pemberitaan kami di media. Dan itulah saat pertama kalinya Mabes TNI

menggelar pengadilan militer terhadap sejumlah prajurit yang melakukan penyiksaan kepada warga Aceh di Desa Laweung, Aceh Utara.

Para personel TNI yang dituduh terlibat saat itu langsung dilucuti. Pengadilan militer yang digelar di tengah situasi darurat militer itu menjadi suatu pemandangan yang baru, yang tidak pernah terlihat sebelumnya di era Orde Baru. Pemberitaan kami menjadi masukan bagi Mabes TNI untuk mengambil langkah mengadili personel mereka yang terbukti menyiksa rakyat. Di lapangan, kami dapat merasakan kemarahan beberapa prajurit atas berita-berita yang kami buat.

Peristiwa lain yang masih hangat dalam rekaman saya adalah ketika rekan kami, senior kami, Ersa Siregar dan Ferry – keduanya dari stasiun televisi swasta, *RCTI*, disandera kelompok GAM.

Upaya membebaskan keduanya tidak berjalan singkat, lebih dari satu tahun. Tekanan internasional pun tidak banyak mengubah keadaan. Kami melakukan aksi demonstrasi di Kantor Menkopolkam saat rapat koordinasi menteri-menteri jajaran Polkam berlangsung. Harapan kami, Pemerintah Indonesia lewat Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, dapat menempuh jalan yang arif untuk kebebasan rekan-rekan kami, pun jika itu harus dilakukan melalui gencatan senjata dengan kelompok GAM.

Sore harinya saya mendapat telepon dari Kapuspen Sjafrie Sjamsoeddin, “De, tadi Panglima TNI (Jenderal Endriartono Sutarto) bilang, kalian bikin aksi di Kantor Polkam, soal apa?” demikian pertanyaan Pak Sjafrie. Panglima TNI memang termasuk dalam jajaran Polkam yang mengikuti Rakor Polkam

siang hari saat kami berdemonstrasi. “Kami ingin Pemerintah Indonesia mau berkompromi sesaat saja untuk kebebasan Ersu dan Ferry,” jawab saya. Pak Sjafrie mengajak saya bertemu malam harinya.

Saat pertemuan itu, saya jelaskan pada Pak Sjafrie, bahwa kami melakukan aksi demonstrasi semata-mata karena kami jurnalis dan ingin melihat keluarga Ersu dan Ferry bisa bersatu lagi setelah hampir satu tahun terpisah akibat aksi penyanderaan tersebut. “Kami tidak bertindak atas nama kantor mana pun, media mana pun; kami atas nama jurnalis semata, tolong Bapak memahami ini,” saya menjelaskan kepada Pak Sjafrie, karena khawatir pada kemungkinan adanya tekanan-tekanan dari Mabes TNI ke kantor media tempat kami masing-masing bekerja. “Tuntutan kalian apa?” tanya Pak Sjafrie.

“Tolong lakukan gencatan senjata sekiranya itu memang diperlukan. Sorotan internasional pada TNI bisa buruk kalau TNI berkeras membiarkan teman-teman kami tetap disandera,” jawab saya. Pak Sjafrie terdiam. Barangkali bukan pilihan yang mudah untuk dia memutuskan apa pun. Upaya pembebasan Ersu-Ferry masih alot, hingga akhirnya kabar itu masuk ke telinga kami: Bang Ersu meninggal dalam kontak tembak antara GAM dan TNI. Saya merasakan kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan yang sama dengan teman-teman yang lain, dan kami kembali melakukan aksi demonstrasi di Kantor Polkam.

Usai menggelar demonstrasi, kami diizinkan melakukan *hearing* dengan jajaran Polkam, minus Yudhoyono. Saya sempat mengatakan kepada Pak Sjafrie via SMS, bahwa saya kecewa dengan semua itu. Saat itu Pak Sjafrie menelepon

saya, menyatakan belasungkawa.

Kesempatan melakukan *hearing* langsung dan tertutup dengan Mabes TNI terjadi beberapa hari kemudian ketika rekan saya, Nezar Patria, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyampaikan kepada saya bahwa Christopher Warren, Presiden International Federation of Journalists (IFJ) yang berbasis di Brussels akan datang ke Indonesia dan ingin melakukan pertemuan langsung dengan Mabes TNI terkait upaya perlindungan terhadap Ferry dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Saya pun menelepon Pak Sjafrie dan menanyakan kesediaan Mabes TNI untuk bertemu dengan perwakilan IFJ dan AJI.

Pertemuan antara Pak Sjafrie – sebagai perwakilan Mabes TNI, Christopher Warren, dan Nezar Patria terjadi di ruangan Pak Sjafrie di Mabes TNI, saya ikut mendampingi. “Ini adalah pertama kalinya AJI bersilaturahmi dengan TNI,” ujar Nezar waktu itu. Kordinasi pun disepakati, sesuai dengan tuntutan GAM: bahwa perwakilan AJI dan International Commission for the Red Cross (ICRC)-lah yang boleh masuk ke markas GAM wilayah Aceh Timur untuk menjemput Ferry, sementara personel TNI akan melakukan gencatan senjata dalam radius dan jangka waktu yang telah disepakati. Meski ada ketegangan saat proses pembebasan itu berlangsung, upaya teman-teman di lapangan membuahkan hasil: Ferry bebas.

Sebagai jurnalis yang cukup lama mengenalnya, relasi yang terjalin antara saya dengan Pak Sjafrie tidak selamanya berjalan mulus. Saya bahkan sempat dituding sebagai *back stabber*” oleh salah satu stafnya ketika ia dipromosikan

menjabat sebagai Sekretaris Jendral Kementerian Pertahanan RI. Penunjukan Pak Sjafrie ke posisi yang lebih tinggi saat itu menimbulkan reaksi dari para aktivis HAM, yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian saat pelantikannya menjadi Sekjen.

Adalah fakta bahwa Pak Sjafrie mendapat promosi di Kementerian Pertahanan, dan adalah fakta juga bahwa ada suara-suara yang mengkritik penempatan Pak Sjafrie ke posisi yang strategis tersebut, dan—sekali lagi—adalah tugas saya sebagai jurnalis untuk mencatat semua peristiwa itu dalam berita. “Kamu mengecewakan; tidak seharusnya kamu tuliskan aksi demonstrasi itu. Saya pikir kamu ‘teman’ kami,” ujar sang staf via telepon selular ketika membaca berita yang saya tulis keesokan harinya. Saya terdiam; kemudian menjelaskan, bahwa apa yang saya lakukan adalah bagian dari profesionalisme sebagai wartawan. Belakangan saya baru tahu, telepon dari stafnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pak Sjafrie.

Tidak bisa dimungkiri, hingga kini sosok Sjafrie Sjamsoeddin masih menjadi kontroversi bagi banyak pihak. Namun, terlepas dari semua pro dan kontra, suka atau tidak suka, pencapaian yang telah dilakukan oleh Sjafrie Sjamsoeddin bukanlah sesuatu yang “biasa-biasa saja”. Salah satu peran penting yang dijalankannya adalah membantu pengambilalihan bisnis militer oleh Negara sesuai dengan reformasi tentara dan amanat UU TNI Tahun 2004. Meskipun setelah diinventarisasi, bisnis militer yang harus diserahkan “hanya” bernilai Rp 3.1 triliun pada tahun 2008, upaya pemisahan tentara dari bisnis merupakan langkah konkret menuju profesionalisme TNI.

Demikian pula dalam membenahan pengadaan senjata yang tidak lagi memberi ruang kepada perantara (*broker*) yang sangat berpotensi melibatkan suap, peranan Pak Sjafrie nyata adanya. Dari sumber yang dekat, saya bahkan mendengar Pak Sjafrie sempat “dikejar-kejar” para *brokers* ketika menegosiasikan pembelian MTB Leopard dari Jerman, sehingga ia terpaksa berpindah-pindah hotel hampir setiap hari selama berada di sana.

Penunjukan Pak Sjafrie sebagai Wakil Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 menurut saya tidak bisa dilepaskan dari kontinuitas upaya pengembangan profesionalisme TNI yang diwujudkan dengan pemutakhiran alat-alat utama sistem persenjataan utama (*alutsista*). Akan tetapi terlalu dini untuk memberikan *eulogy* kepada Pak Sjafrie, paling tidak sampai masyarakat melihat hasil nyata reformasi TNI, yakni postur prajurit yang bekerja semata-mata untuk melindungi rakyat, bukan menyakiti.

Bisa dibayangkan betapa sulit, bahkan mungkin dilematis, bagi seorang Sjafrie—sebagai bagian tak terpisahkan dari TNI—untuk menuntaskan agenda reformasi militer.

Hanya waktu yang akan menjawab.

**Wartawan senior*

Di Atas Panser, Tetap *Charming*

Tiya Diran*

Kerusuhan Mei 1998 menjadi pengalaman kerja saya pertama kali yang memungkinkan berhubungan dengan Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, yang saat itu menjabat Pangdam Jaya. Sebagai reporter di lapangan, saat itu saya sempat ikut patroli lapangan, naik panser. Itu pertama kalinya dalam hidup saya naik panser, dan baru tahu bahwa panser bisa juga dijalankan dengan cepat (ngebut) dan dilengkapi pendingin udara. Saya masih ingat, satu panser dengan Brigjen Sudi Silalahi (Kasdam Jaya, sekarang Sekretaris Negara RI) saat itu, dan Sjafrie di panser yang lain.

Suasana Jakarta sangat mencekam saat itu. Kami berpatroli ke arah Pondok Indah, dan mengadakan apel di Mal Pondok Indah, Sjafrie sendiri yang memimpin apel. Tak disangka tak dinyana, begitu Sjafrie turun dari panser, ada teriakan dari ibu-ibu, menyambut Sjafrie. Rupanya mereka mendengar Sjafrie mau patroli dan berjaga untuk menyambutnya. Bayangkan, di tengah suasana yang mencekam, ada kejadian yang menyejukkan!

Bagi saya, ia memang sosok yang *charming*, yang mampu menyejukkan di tengah suasana yang mencekam. Tentu ia juga sosok yang bertanggungjawab, dan peduli.

Quoting Him *37 Years with Journalists*

Ketika kami pulang dari patroli, dan tidur kelelahan, ia pasti masih berjaga.

** Penyiar, reporter TVRI*

“Dia yang Memulai Persahabatan Ini”

Tony Hasyim*

Saya dan Sjafrie Sjamsoeddin sudah “berteman” sekitar 20 tahun. Sepanjang waktu berjalan, kita kerap bertemu untuk wawancara, ngobrol, diskusi, makan, ngopi, shalat *bareng*, dan sebagainya. Sebenarnya, seorang wartawan harus menjaga jarak dengan narasumber agar tidak bias dalam menurunkan berita. Tapi Sjafrie pengecualian bagi saya. Dan saya tahu banyak wartawan bersikap sama seperti saya.

Dulu, baru pertama kenal, saya sering mencegatnya sebelum masuk kantor atau setelah Shalat Jumat, untuk mengkonfirmasi suatu isu atau cari berita. Sambil berjalan, disaksikan oleh ajudan dan anak buahnya, Sjafrie kerap merangkul pundak saya, sambil meladeni pertanyaan-pertanyaan saya. Siapa pun pasti sulit menolak keramahan seperti itu. Jadi, dialah yang mulai persahabatan ini. Saya pun wajib membalasnya. Kepada pejabat lain, yang sering mengalami masalah dalam berinteraksi dengan wartawan, saya selalu bilang, tirulah cara Bang Sjafrie.

Tetapi jangan salah sangka, selama berurusan dengan Sjafrie, tidak pernah sekalipun dia memberi saya uang atau barang. Saya juga tidak pernah minta. Paling jauh, dia mentraktir saya makan di restoran. Pernah, suatu kali,

dia memberi saya sarung Bugis. Wah, senang sekali rasanya waktu itu.

“Saya pakai buat Shalat *nih*, Bang...” kata saya.

Tapi pemberian paling berharga dari Sjafrie adalah informasinya. Keterangan, pendapat dan pandangan Sjafrie terhadap suatu peristiwa menurut saya bernilai A-1. Saya sering membuktikan kebenaran dan akurasinya. Mungkin karena dia berlatar belakang perwira Sandi Yudha, jadi indera keenamnya sangat tajam.

Suatu hari, sebelum Pilpres 2004, Sjafrie “meramal” SBY akan menang. Dia tahu saat itu saya mendukung Wiranto.

“Ton, yang menang *kayaknya* SBY...” Maksudnya baik, supaya saya nanti jangan berada di kubu yang kalah.

Saya jawab, “Saya sudah terlanjur dukung Wiranto, Bang. *Gak* enak *kalo* saya balik badan.”

Saya, kebetulan sama-sama dekat dengan Wiranto dan SBY. Masalahnya, Wiranto lebih dulu ikut Konvensi Capres Golkar yang digelar mulai pertengahan 2003. Sedangkan SBY, baru maju sebagai capres sekitar Maret 2004, hanya beberapa minggu sebelum Pemilu Legislatif 2004. Ternyata ramalan Sjafrie benar, SBY yang menang.

Terakhir bertemu, Sjafrie memberi gambaran ke saya bahwa Timtim dalam 10 tahun ke depan bisa “kembali ke Indonesia. Karena katanya, anak muda di Timtim sekarang banyak yang berbahasa Indonesia. Para pejabatnya juga sebagian besar adalah mereka yang pernah kuliah di kampus-kampus di Indonesia. Masyarakatnya juga menonton televisi Indonesia.

Saya langsung bilang, “*Gak* usah nunggu sepuluh tahun lagi, sekarangpun bisa.”

Caranya gampang, lanjut saya. Cukup SBY dan Xanana Gusmao duduk di depan satu meja. Bikin kesepakatan bilateral bahwa KTP Indonesia berlaku di Timor Leste. Sebaliknya KTP Timor Leste juga berlaku di Indonesia.

Sjafrie bilang, “Seperti Uni Eropa dong...?”

Iya, jawab saya penuh keyakinan.

Dengan begitu, rekonsiliasi antara ke dua bangsa semakin cepat. Tidak ada yang merasa kalah atau menang. Begitulah kita jika berdiskusi. Sjafrie, tidak pernah mendikte saya. Dia sungguh memosisikan saya sebagai teman.

Karena bersahabat, saya selalu berprasangka baik terhadap Sjafrie. Dulu, terkait kerusuhan Mei 1998, Sjafrie sebagai Pangdam Jaya, dituduh melakukan *crime by omission* oleh para aktivis HAM. Tuduhan tersebut menurut saya adalah pemutarbalikan fakta. Sewaktu kerusuhan, saya meliput dengan sepeda motor, siang dan malam, saya saksikan sendiri, Sjafrie dan pasukannya berjuang habis-habisan meredam amuk massa. Ia berpatroli ke segala penjuru kota, untuk menenangkan masyarakat dan menyemangati pasukannya yang sudah kelelahan menghadapi kebringasan perusuh.

Di tengah suasana Jakarta yang begitu mencekam, Sjafrie lah satu-satunya jenderal yang terjun langsung ke lapangan. Begitu banyak Jenderal di Jakarta, tapi dimana mereka berada? Seandainya banyak perwira tinggi, para jenderal, ikut turun ke jalan, berdiri diatas panser atau truk tentara, menghimbau masyarakat untuk pulang ke rumah, kerusuhan tidak akan menyebar luas. Sjafrie saya lihat sudah menjalankan tanggungjawabnya secara maksimal. Tragisnya, justru dia yang menjadi korban. Ia dicopot sebagai Pangdam. Karirnya yang bersinar terang, redup seketika.

Orang Alim

Saya pertama kali kenal dengan Sjafrie sekitar tahun 1993-1994. Waktu itu saya masih reporter di Majalah *FORUM KEADILAN*. Suatu hari saya mendapat tugas mewawancarai Bob Hasan. Seperti biasanya, jika mau mewawancarainya orang dekat Presiden Soeharto itu saya mencarinya di lapangan golf atau di lapangan atletik. Bob adalah pecandu golf dan menjabat Ketua Umum Persatuan Atletik Indonesia (PASI). Kebetulan, waktu itu ada Kejurnas Atletik di Stadion Madya Senayan. Maka berangkatlah saya ke sana.

Begitu masuk tribun VIP, sambil melongok kiri kanan mencari Bob Hasan, tiba-tiba ada yang memanggil saya dari belakang, “Ton, ngapain kamu?” Ketika saya menoleh, ternyata yang memanggil adalah Brigjen Cholid Ghozali, staf operasi Mabes ABRI (terakhir menjadi Asops Kasum ABRI, dengan pangkat Mayjen). Dia sebelumnya sudah mengenal saya sebagai wartawan yang mangkal di Mabes TNI. Di samping Cholid, ada seorang lelaki yang nampak asing bagi saya. Dia berpakaian *training, crew-cut*, berkulit putih, dan fisiknya gagah sekali. “Saya lagi cari Bob Hasan,” kata saya.

“Saya juga lagi nunggu dia,” kata Cholid.

Lalu saya diperkenalkan dengan lelaki yang semula saya pikir hanya seorang atlet. “Kenalin nih Ton, Bang Sjafrie...” Saya lantas memberi dia kartu nama. Kemudian dia membaca sebentar, lalu bilang, “Oh, saya selalu *ngikutin* berita di *FORUM* nih...” Kemudian dia memberi kartu nama kepada saya. Di situ tertera: Pasukan Pengamanan Presiden, Kolonel Inf. Sjafrie Sjamsoedin, Komandan Grup A. Kartu nama tersebut sampai sekarang masih saya

simpan. Kemudian kita bertiga ngobrol di tribun stadion sambil menunggu Bob Hasan, yang masih sibuk di pinggir *track* atletik. Saya mewawancarai Bob sambil ditunggu oleh Cholid dan Sjafrie. Setelah itu kita mengantar Bob sampai ke mobil. Waktu itu saya baru tahu, ternyata Bob Hasan mau menitipkan sebatang *stick* golf untuk Pak Harto melalui Sjafrie.

Memori yang terekam di benak saya tentang Sjafrie bukan karena fisiknya yang gagah atau bicaranya yang merendahkan suara. Waktu itu, sekitar jam 3-4 sore, cuaca lagi panas-panasnya. Ketika kita sedang asyik ngobrol, ada penjaja minuman gendong melintas. Karena haus, saya memanggilnya. Saya tawari mereka. Cholid mengambil sebotol minuman. Begitu juga saya. Tapi Sjafrie bilang, "Sorry, saya lagi puasa..."

Lalu Cholid nyeletuk, "Oh iya, kamu lagi *Senen-Kemis* ya, Frie..." Mengetahui hal itu, saya tak jadi minum, saya letakan botol minuman ke bawah bangku. Tapi Sjafrie bilang, "Nggak apa-apa, minum aja ..." Ya sudah, saya pun minum. Tapi dalam hati, saya bilang, "Wah, ketemu tentara alim nih, " Sejak itulah, saya sudah merasa dekat dengan dia.

Saya tidak "jiper" setiap kali melihat atau bicara dengan tentara. Karena saya wartawan seksi Hankam-ABRI, jadi saya kenal banyak tentara dan jenderal-jendralnya. Tapi, saya menaruh hormat kepada tentara yang alim. Menurut saya, menjadi ksatria sejati, harus alim. Harus takut akan kekuasaan Tuhan. Di mata saya, tentara ideal itu adalah Sudirman dan A.H. Nasution. Alkisah, dua Jenderal Besar, pemimpin TNI di masa Perang Kemerdekaan tersebut

terkenal karena kealimannya. Keduanya, meski di masa gerilya, rajin puasa Senin-Kamis.

Beruntung saya sempat mengenal dekat Jenderal Besar Nasution. Suatu hari, pertengahan tahun 1990-an, saya mewawancarai beliau sambil melihat album-album fotonya. Saya iseng bertanya, “Kok, Bapak gak pernah gemuk sih?”

Pak Nas bilang, “Patokan saya ikat pinggang ini. Dari zaman gerilya sampai sekarang masih sama ukurannya.”

Kok bisa? “Karena saya rajin puasa Senin-Kamis.”

Nah, karena takjub melihat kedisiplinan Pak Nas mempertahankan ukuran pinggang itu lah, maka setiap kali bertemu Sjafrie, saya pasti lebih dulu mengomentari keadaan perutnya. Kalau terlihat agak gemuk, saya bilang, “Kok gemuk, Bang?” Tapi kalau terlihat terlalu *kempes*, saya bilang “Jangan telalu kurus dong, Bang.”

Kondisi Sjafrie sekarang ini tak berbeda banyak dengan ketika saya melihatnya pertama kali di lapangan atletik Senayan.

Saya tidak pernah bertanya langsung, sejak kapan Sjafrie menjalani puasa *sunnah* tersebut. Beberapa waktu lalu saya pernah ngobrol dengan Danjen Kopassus Mayjen Agus Sutomo. Ceritanya, waktu Sjafrie menjadi Komandan Satgas Kopassus ke-VIII di Timor-Timur (tahun 1990-1991), Agus sebagai anak buah, dipanggil ke posko untuk membuat sebuah laporan. Ia diberi membuat laporan dari jam 9 malam hingga sebelum azan Subuh. Kala itu, Sjafrie berpangkat Letnan Kolonel, Agus masih berpangkat Kapten. Dini hari menjelang subuh, Agus mengetuk kamar Sjafrie untuk menyerahkan laporan. Begitu masuk, Agus melihat Sjafrie sedang makan. Ia langsung diajak untuk makan sahur

puasa Senin-Kamis.

Sampai sekarang, Sjafrie masih rajin berpuasa Senin-Kamis. Terakhir saya main ke Kemenhan, pertengahan Februari 2014. Begitu azan Maghrib berkumandang, ajudannya tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Ia menginterupsi obrolan kami, "Pak, sudah azan..." Sjafrie langsung menenggak secangkir minuman di meja kerjanya. Dalam hati saya, "Oh iya, ini kan hari *Senen...*"

Selain itu, Sjafrie adalah orang yang rajin i'tikaf di masjid. Dari dulu, setiap pertengahan Ramadhan dia selalu mengundang wartawan berbuka puasa bersama. Suatu kali, begitu bubarannya, dia bilang mau pamit ke tanah suci. Saya menanggapinya biasa saja. "Selamat Umroh, Bang." Tapi pada Ramadhan tahun berikutnya, Sjafrie pamit lagi mau ke Mekah. Akhirnya saya tanya ke ajudannya, "*Emang* Pak Sjafrie tiap Ramadhan ke Mekah ya? "Tapi menurut ajudannya bukan setiap Ramadhan, melainkan setiap dapat cuti, Sjafrie beri'tikaf di Masjidil Haram.

Jadi, kala ditanya apa kesan pertama saya terhadap Sjafrie, maka saya akan menjawab, "dia adalah orang alim." Bahwa dia ganteng dan baik, semua orang tahu. Tapi menurut saya, hal yang paling menonjol dari sosok Sjafrie adalah kealimannya itu. Memang, bukan jaminan bahwa orang yang taat beribadah, tidak akan korupsi atau main perempuan. Tapi untuk Sjafrie, saya berani garansi, dia adalah orang yang amanah. Sampai sekarang, dia masih *lempeng*.

Pernah suatu hari, seorang kawan dari sebuah partai politik memperkenalkan saya dengan seorang wanita setengah baya, seksi dan cantik. Wanita ini adalah *lobbyist* dari sebuah perusahaan importir senjata. Ia minta tolong

dipertemukan dengan Sjafrie. Saya sampaikan saja ke Sjafrie. Waktu itu dia sudah menjabat Sekjen Kemenham dan ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai ketua komite pengadaan persenjataan TNI. “Bang, ada cewek nih, minta ketemu..”

Sjafrie langsung jawab, ”Gak usah *diladenin*, bahaya...” Lain waktu ada lagi kawan minta tolong dibantu soal perizinan impor bahan peledak. Saya sampaikan lagi. Sjafrie bilang, ”Jangan, kalo ada apa-apa kita yang berabe...”

Sjafrie lulusan Akabri 1974. Semua orang tahu, dia sejak awal dekat dengan Prabowo Subianto. Saya tidak pernah bertanya kepada Sjafrie bagaimana asal usulnya dia dekat dengan Prabowo. Tapi menurut cerita-cerita anak buahnya, setelah lulus Akabri, Prabowo dan Sjafrie terpilih masuk Kopassus secara bersamaan. Ketika pasukan Indonesia menginvasi Timtim, Desember 1975, Sjafrie, Prabowo, dan teman-teman seangkatannya masih digodok di Pusdik Passus, Batujajar. Pada April 1976, barulah mereka dikirim ke Timtim, di bawah Satgas Nanggala-X, pimpinan Mayor Yunus Yosfiah. Waktu itu, Sjafrie, Prabowo, Mahidin Simbolon, dan kawan-kawan seangkatannya, mendapat tugas membebaskan kota demi kota yang masih dikuasai Fretelin. Di situlah pertama mereka bersama bertaruh nyawa.

Singkat cerita, pada Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Pangkostrad. Sedangkan Sjafrie, tetap menjabat sebagai Pangdam Jaya, yang sudah dipegangnya sejak September 1997. Pada saat itu, semua media-massa meramalkan keduanya bakal menjadi pucuk pimpinan TNI di masa depan. Prabowo menjadi Panglima TNI, Sjafrie

menjadi Kasad. Tapi menurut saya bisa sebaliknya. Sebab, yang saya tahu, meskipun Prabowo menantu Pak Harto, tapi Sjafrie malahan sudah dianggap anak oleh Pak Harto. Nah, di saat bintang mereka bersinar terang itulah berjaya itu lah meletus kerusuhan hebat di Jakarta, 13-15 Mei 1998. Akibatnya, beberapa hari kemudian, Prabowo dicopot dari jabatannya. Lalu beberapa bulan kemudian, menyusul Sjafrie.

Saya melihat karir Sjafrie bakal habis saat itu. Saya tahu, Sjafrie marah. Tapi dia tetap profesional. Menurut saya, pencopotan Sjafrie tidak *fair*. Harusnya Sjafrie, sebagai panglima komando operasi (Pangkoops) masih diberi kesempatan menjabat 3-6 saja untuk membongkar jaringan perusuh tersebut. Kalau tidak salah, ada sekitar 400-an orang yang ditangkap oleh pasukan Kodam. Mereka diserahkan semua ke polisi. Kemudian setelah diperiksa, tinggal sekitar 60-an orang yang dianggap sebagai provokator. Maunya Sjafrie, pernah disampaikan ke saya, seharusnya pengusutan terhadap dalang kerusuhan dilanjutkan, meskipun dia sudah dicopot. Tak kenyataannya, ternyata semua tahanan dilepas. Dalam kerusuhan sebesar itu, yang menimbulkan kerugian tak terkira, tidak ada satu pun orang yang diadili di meja hijau. Baik karena menjarah, memprovokasi, membunuh, membakar, menggerakkan massa, dan sebagainya. Praktis, yang dimenangkan dalam Peristiwa Mei 1998 adalah kaum perusuh.

Sjafrie bukan perwira salon. Semula dibesarkan di Grup-1 Kopassus, hingga pangkat Kolonel dia orang lapangan sejati. Dia bolak-balik melaksanakan operasi militer di Timtim, Aceh dan Papua. Dia pernah operasi sendirian ke Aceh atas perintah langsung Presiden Soeharto.

Mirip cerita James Bond. Tapi saya lebih banyak tahu cerita tentang kepriawaian Sjafrie di medan operasi melalui cerita-cerita para anak buahnya, dari yang prajurit hingga perwira. Anak buah Sjafrie di Kopassus kini memegang posisi-posisi strategis di TNI. Antara lain Mayjen Agus Sutomo (Danjen Kopassus) dan Mayjen Doni Moenardo (Komandan Paspamres). Mantan Kasad Jenderal Purn Pramono Edhie Wibobo, juga pernah menjadi anak buah langsung Sjafrie di Kopassus.

Keluar dari medan operasi, Sjafrie kemudian menjadi perwira paling lama berada di lingkaran dalam kekuasaan. Pengalaman dia berteman sejak muda dengan Prabowo, menjadi pengawal pribadi Pak Harto, menjadi anak buah jenderal A, laksamana B, marsekal C, sampai menjadi anak buah SBY sekarang ini, adalah kisah yang penuh warna.

Menariknya, dari sekian panjang karirnya, Sjafrie adalah satu-satunya perwira yang pernah dua kali “diadili” oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Dalam sejarah kemiliteran Indonesia, DKP hanya dibentuk dalam kasus-kasus yang beskala besar saja. Nah, Sjafrie, pertama pernah menjadi “terperiksa” dalam DKP kasus Santa Cruz (12 November 1991) yang dipimpin oleh Jenderal Feisal Tanjung. Yang kedua, ia juga diperiksa oleh DKP pimpinan Jenderal Subagio HS, terkait kasus penculikan aktivis tahun 1997-1998.

Dalam DKP kasus “Santa Cruz” ada 22 jenderal yang menjadi anggota dewan. DKP tersebut memutuskan Mayjen Sintong Panjaitan (Pangdam Udayana), Brigjen Rudolf Warouw (Pangkolakops Timor-Timor), dan Kolonel Gatot Purwanto (Asintel Kolakops/Komandan Satgas Intel-SGI),

dicopot dari jabatannya, dan diberhentikan dari dinas militer. Sedangkan Sjafrie, yang diperiksa sebagai Komandan Satgas Kopassus ke-VII dan Wakil Komandan SGI dinyatakan tidak bersalah.

Berikutnya, dalam DKP pimpinan Subagyo HS, ada 15 jenderal yang menjadi anggota. Selain Prabowo (Pangkostrad), Muchdi PR (Danjen Kopassus), Sjafrie selaku Pangdam Jaya juga turut menjadi terperiksa. Hanya Prabowo yang diberhentikan dari dinas militer. Muchdi dan Sjafri lolos. Saya pikir, ajaib juga nih Bang Sjafrie. Dua kali kena DKP, dua kali lolos. Sementara Sintong dan Prabowo yang sosoknya begitu melegenda di Kopassus, dipecat begitu saja dari dinas militer oleh para seniornya.

“Media Darling”

Setelah dicopot sebagai Pangdam Jaya, Sjafrie diparkir sementara ke posisi Aster Kasum TNI. Tak lama kemudian digeser menjadi Staf Ahli Polkam Panglima TNI, lalu digeser lagi menjadi Koorsahli Panglima TNI. Perwira yang menjadi staf ahli biasanya masuk kotak. Tapi di masa-masa itulah saya justru bisa sering bertemu dengan Sjafri. Mungkin karena jabatannya tidak penting, jadi tidak banyak kesibukan. Bersama beberapa kawan wartawan, kita kerap melakukan pertemuan, berpindah-pindah, dari satu restoran ke restoran lain.

Saat itu lah, saya menyaksikan sendiri, Sjafrie begitu populer di kalangan wanita. Di setiap restoran yang kita datangi, pasti para pelayan wanitanya minta berfoto bareng dengan Sjafrie. “Ini Pak Sjafrie ya, boleh minta foto gak?” begitu kata mereka. Pindah ke restoran lain, sama juga.

Cewek-cewek pasti minta berfoto bareng dengan Sjafrie. Sampai suatu hari saya bilang, “Bang, kalau sudah gak betah militer, *mending* masuk ke parpol saja...” Melihat tingkat popularitasnya di lapangan, Sjafrie pasti terpilih menjadi anggota DPR. Tapi Sjafrie bilang, “Kalo diperintah, *gue* baru maju...” Jawaban yang sama diulangi lagi waktu saya dan beberapa kawan wartawan mendorong dia agar maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2007. “*Gue* masih aktif *nih*, tergantung yang kasih perintah *dong*...”

Coba, seandainya Sjafrie yang diperintahkan maju sebagai Cagub Jakarta waktu itu, pasti dia menang melawan jago dari PKS, Komjen Pol Adang Daradjatun. Kemudian dalam Pilgub Jakarta tahun 2012, Sjafrie akan berhadapan dengan Jokowi. Dua-duanya sama-sama *media darling*. Orang yang disayang oleh media. Pasti akan sangat seru. Sayangnya, itu hanya impian saya.

Sama seperti Jokowi sekarang ini. Sjafrie pada masanya adalah “*media darling*” di lingkungan wartawan, terutama wartawan di lingkungan Istana dan Hankam/ABRI. Jika dibanding sosok militer yang lain, Sjafrie mirip dengan Jendral Try Sutrisno, sewaktu masih menjabat Panglima TNI. Setiap hari, wartawan menempel Pak Try. Saat itu, nyaris tiada hari tanpa berita mengenai ABRI dan Pak Try. Saya kira, jika dulu Sjafrie diberi kesempatan menjadi Kasad atau Panglima TNI, pasti dia akan ditempel wartawan setiap saat.

Pada Maret 2002, bintang Sjafrie yang saya kira sudah redup, tiba-tiba bersinar lagi. Dia diangkat menjadi Kapuspen TNI. Saya kaget membaca berita tersebut. Waktu itu, saya sudah menjadi Wapemred di *Forum*. Seorang

redpel mengusulkan Sjafrie dijadikan *Cover Story*. Akhirnya kita setuju, dengan cerita utama, "*Test Case, Sjafrie*". Menurut saya, pengangkatan Sjafrie menjadi Kapuspen TNI merupakan langkah "terselubung" dari Panglima TNI, untuk merehabilitasi karir Sjafrie. Meski cuma mutasi jabatan, tapi saya melihat itu adalah batu ujian bagi Sjafrie untuk dapat dipromosikan ke jabatan dan pangkat yang lebih tinggi.

Sesaat setelah mutasi tersebut diumumkan, Sjafrie langsung dicari oleh wartawan. Tapi dia menghindar. Saya menemukan dia di acara pesta perkawinan anak Mayjen Sjahrir MS (Asops Kasad) di Balai Kartini. Waktu itu Sjafrie sedang memakai pakaian adat Jawa. Pakai blankon. Saya sapa, "Ngapain, bang?" Ternyata dia di situ "menjabat" sebagai Ketua Panitia Perkawinan. Saya langsung ucapkan selamat atas jabatan barunya sebagai Kapuspen TNI. Tapi dia langsung bertanya, "Bagaimana, menurut *lu?*" Saya bilang, "Bagus dong, berarti kita bisa kumpul lagi sama temen-temen di Cilangkap."

Dulu, Mabes ABRI di Cilangkap adalah salah satu tempat favorit saya *ngepos* sebagai wartawan. Minimal seminggu sekali saya main ke sana. Tapi, setelah Reformasi 1998, seiring lengsernya ABRI dari panggung kekuasaan politik, Mabes Cilangkap langsung sepi, bak kuburan. Wartawan juga *males* datang ke situ. Karena memang tidak ada berita yang bisa di gali. Nah, sewaktu Sjafrie jadi Kapuspen, saya jadi rajin lagi ke Cilangkap. Teman-teman saya yang tadinya menghilang, juga berdatangan lagi. Menurut saya, di situlah Sjafrie menunjukkan kemampuannya menggalang komunikasi dengan wartawan. Kalau tidak ada sesuatu yang layak berita,

dibuatlah diskusi berkala dengan dengan wartawan. Dari situ akan muncul ide berita dengan sendirinya. Sederhana sekali caranya.

Awal 2003, situasi di Aceh semakin memanas. Sekitar Maret, Sjafrie mengundang pimpinan media massa nasional untuk bertemu dengan Panglima TNI, Jenderal TNI Endriatono Sutarto, di Wisma Yani, Menteng. Intinya, Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI akan melancarkan operasi militer di Aceh dan selanjutnya minta “pengertian” dari media massa. Waktu itu saya membaca ada keraguan Sutarto akan nasionalisme wartawan Indonesia. Saya masih ingat, Sutarto menekankan kepada pihak media-massa bahwa isu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah adalah masalah kedaulatan dan keutuhan NKRI, jangan dicampuradukan dengan isu HAM.

Saya, sebagai wartawan, agak tersinggung dengan ucapan tersebut. Waktu sesi tanya-jawab, saya tunjuk tangan pertama. Kemudian saya langsung mengomentari pernyataan Panglima tersebut. Saya katakan, jangan meragukan patriotisme kami sebagai wartawan. Menurut saya, isu kemerdekaan Aceh yang mencuat kembali sejak tahun 1998 (sejak reformasi) dipelintir oleh GAM menjadi isu HAM internasional. Salahnya, karena sejak awal Pemerintah dan TNI terlalu lunak dalam menyikapi manuver-manuver GAM. Padahal, lanjut saya, di negara mana pun, semua gerakan politik bersenjata langsung dilibas. Sementara di Indonesia, GAM yang sudah jelas-jelas mengangkat senjata malah dibujuk untuk meletakkan senjata. “Harusnya dihajar dulu, baru disuruh meletakkan senjata.” Saya lihat Sutarto langsung terperangah. Tapi mukanya terlihat senang. Setelah

acara selesai, Brigjen Tono Suratman (Wakil Kapuspen) mencegat, “Ton, bagus tuh, kamu ngomong begitu...”

Singkatnya, dalam pertemuan tersebut, pihak media-massa siap mendukung TNI dalam operasi militer ke Aceh. Tapi media minta diberi kesempatan untuk meliput secara langsung. Panglima langsung setuju. “Silakan, nanti diatur sama Sjafrie,” kata Sutarto. Beberapa hari kemudian, saya dan beberapa wartawan diundang Sjafrie untuk membahas konsep *embedded journalist* dalam operasi militer di Aceh. Waktu itu disepakati, TNI akan memberikan perlindungan maksimal terhadap wartawan yang ikut dalam program *embedded journalist*. Untuk perlindungan standar, TNI mewajibkan wartawan mengikuti pelatihan dasar militer. Wartawan juga wajib memakai alat pelindung seperti helm dan rompi anti peluru yang disediakan oleh TNI. Selain itu, wartawan selama mengikuti program *embedded journalist* juga wajib mematuhi disiplin militer, jika melanggar akan dikenakan sanksi.

Waktu itu Sjafrie tanya ke saya, “Lu ikut gak Ton?” Saya jawab, “Gak, Bang. Saya jaga gawang di Jakarta. Saya punya koresponden di sana.” Sjafrie bilang, “Ya sudah, suruh teman kita di sana hati-hati ngeliputnya..” Saya bukannya takut meliput perang atau tidak setuju dengan *embedded journalist*. Masalahnya, saya sudah punya koresponden yang tangguh di sana. Orang asli Aceh. Sebelumnya, dia sudah dikenal netral oleh pihak yang bertikai di sana. Dan terbukti dia diterima baik oleh petinggi TNI dan Polri, tapi juga bisa menemui para petinggi-petinggi GAM. Jadi, saya pikir, daripada saya membebani TNI, saya maksimalkan koresponden yang sudah menguasai medan di Aceh.

Menurut saya, ada satu hal yang tak terpikirkan saat itu. Sebetulnya, hal ini sudah ditanyakan oleh seorang wartawan, saat briefing awal di Puspen TNI. Pertanyaannya, apakah di luar program *embedded journalist* ini kita boleh meliput operasi di Aceh dengan biaya sendiri? Seingat saya, Safrie bilang, TNI tidak bisa melarang wartawan meliput ke sana. Tapi keselamatan harus ditanggung masing-masing.

Belakangan, baru sebulan operasi militer di mulai, ada dua wartawan RCTI dan beberapa warga sipil disandera oleh GAM. Mereka meliput perang di Aceh di luar program *embedded journalist*. Tapi akibat mereka disandera, hampir setengah tahun setelah operasi militer dimulai, saya amati para petinggi TNI, termasuk Sjafrie, justru jadi kelimpungan menyelamatkan wartawan sandera. Bagaimana pun juga, mereka adalah warga negara yang harus diselamatkan jiwanya. Jadi ada masalah dalam masalah di medan operasi.

Saya tidak tahu apakah Mabes TNI pernah melakukan evaluasi terhadap peristiwa itu. Program *embedded journalist* sebenarnya bertujuan agar operasi militer TNI bisa diawasi langsung oleh publik. Jangan sampai kebablasan, jangan sampai membunuh orang tak bersalah, jangan sampai melanggar HAM. Tapi, menurut saya, begitu TNI memberi kesempatan wartawan ikut serta dalam operasi, seharusnya dikeluarkan memberi aturan tegas bahwa wartawan lokal maupun asing dilarang masuk ke daerah operasi tanpa seizin TNI. Dengan demikian, modus-modus musuh menjadikan wartawan sebagai sandera atau tameng bisa dicegah sejak awal.

Menurut saya, setelah Sjafrie dijadikan Kapuspen, nama TNI yang semula terpuruk pasca kerusuhan Mei 1998,

mulai bangkit kembali. Sjafrie mensosialisasikan sosok TNI dengan menekankan sisi profesionalisme. TNI perlahan tapi pasti menegaskan dirinya sebagai alat negara, bukan penguasa negara. Isu seputar TNI yang dulunya melulu soal politik dan kekuasaan, mulai bergeser menjadi isu pengamanan perbatasan, modernisasi persenjataan, kesejahteraan prajurit, kerjasama antar negara, latihan perang, *civic mission*, dan sebagainya. Sjafrie selalu menegaskan, bahwa TNI secara praktis sudah menanggalkan syahwat politiknya. Meskipun begitu, saya dan beberapa kawan, secara *off the record* sering bertukar informasi dengan Sjafrie tentang perkembangan politik.

Setelah menjadi Kapuspen TNI, tahun 2005 Sjafrie dipromosikan menjadi Sekjen Kemenhan. Pangkatnya dinaikan menjadi Letnan Jenderal. Saya pikir, lumayan juga, meski harus keluar dari struktur komando TNI. Selanjutnya, tahun 2006, setelah meletus perang Israel-Hisbullah, Sjafrie ditunjuk Presiden SBY menjadi Kepala Tim Pembelian Panser jenis VAB dari Renault, Prancis. SBY waktu itu butuh pengadaan panser cepat, karena dia yang berinisiatif di forum PPB untuk mengirim Pasukan Perdamaian di mana Indonesia bersedia menjadi tulang punggungnya. Beberapa anggota DPR protes, karena pembeliannya tidak melalui tender.

Tapi buktinya, sampai sekarang, panser yang dibeli Sjafrie masih berfungsi baik, masih diandalkan oleh kontingen Perdamaian di Lebanon. Belakangan, di bawah koordinasi Sjafrie, Pindad sudah bisa membikin panser sejenis yang lebih canggih, bernama Anoa. Panser nasional ini adalah bagian dari kesepakatan transfer teknologi saat

pembelian VAB dari Prancis. Sampai sekarang, dalam posisi Wamenham, Sjafridetap dipercaya menjadi kepala pengadaan alutsista TNI yang nilainya triliunan rupiah.

Nyaris Jadi Kasad, Menhan, dan Seskab

Di penghujung 2007, Marsekal Djoko Suyanto pensiun sebagai Panglima TNI. Kasad Jenderal Joko Santoso diajukan ke DPR untuk naik menjadi Panglima TNI. Kursi Kasad, otomatis akan kosong. Waktu itu, ada 6 letnan jenderal yang punya kans dipromosikan menjadi Kasad. Suatu hari, saya mendapat kabar, bahwa SBY dan JK sudah setuju mengangkat Sjafrie menjadi Kasad. Saya temui Sjafrie, kasih selamat. Tapi dia bilang, “Saya *belum* tahu *tuh...*”

Setelah SBY terpilih kembali dalam Pilpres 2009, Sjafrie dijagokan banyak orang sebagai Menhan dalam kabinet baru. Tapi yang ditunjuk sebagai Menhan ternyata mantan Menteri ESDM Purnowo Yusgiantoro. Saya masih ingat komentar Sjafrie kepada saya, “Bagus dong, tentara lagi butuh banyak dana untuk memodernisasi persenjataan. Pak Pur kan pintar melobi DPR...”

Tak lama setelah kabinet berjalan saya dapat informasi SBY akan menempatkan Sjafrie di posisi Sekretaris Kabinet. Yang saya dengar, SBY sudah memanggil Sjafrie untuk dimintai kesediaannya membantu di kabinet. Setelah ditunggu-tunggu sekian lama, tahu-tahunya Sjafrie “hanya” dijadikan Wakil Menteri Pertahanan. Lumayan juga sebetulnya. Tapi saya jadi bertanya-tanya, mengapa SBY selalu ragu memberi jabatan strategis kepada Sjafrie.

Sjafrie sebetulnya sangat diandalkan oleh SBY. Buktinya, sejak diangkat menjadi Sekjen Kemenhan tahun

2005, hingga menjadi Wamenhan, dia tetap dipercaya sebagai ketua tim pengadaan alutsista TNI, istilahnya Ketua High Level Committee (HLC). Sebagai Ketua HLC, Sjafrie adalah pemimpin dalam rapat pengambil keputusan pengadaan alutsista TNI.

Menurut saya, yang membuat SBY ragu mengangkat Sjafrie menjadi Kasad, Menhan, dan Seskab karena sosok Sjafrie masih dikait-kaitkan oleh beberapa negara asing sebagai penjahat perang dalam pembantaian di Santa Cruz, Dili, tahun 1991. Buktinya, pemerintah AS mencekal visa masuk Sjafrie begitu dia ada dalam daftar rombongan Presiden SBY yang akan menghadiri KTT G-20, di Pittsburgh. Jadi kelihatannya SBY enggan berkonfrontasi dengan kebijakan pemerintah AS. Tapi, pada saat bersamaan, SBY justru memberi kepercayaan kepada Sjafrie untuk menjadi kepala tim pengadaan alutsista TNI, yang memberi kewenangan kepada Sjafrie untuk menjajaki pengadaan senjata dari negara lain.

Akibatnya, karena Sjafrie dimusuhi oleh pemerintah AS, lihat saja nanti, dalam lima atau sepuluh tahun ke depan, senjata buatan AS akan menjadi minoritas dalam sistem persenjataan modern di Indonesia. Dalam daftar panjang belanja senjata besar-besaran di kedua pemerintahan SBY (2012-2014), yang dibeli langsung dari AS paling banter hanya 8 helikopter AH-64 Apache. Nilainya hanya 6,8 triliun dari total belanja sekitar 150 triliun rupiah. Itu pun setahu saya, pihak AS yang menyodor-nyodorkan, bukan inisiatif dari tim yang dipimpin Sjafrie. Jadi, penunjukkan Sjafrie sebagai pemutus akhir pengadaan alutsista TNI, merupakan cara halus SBY memberi pelajaran kepada pemerintah AS.

Saya pernah bertanya ke Sjafrie, bagaimana sebenarnya posisi dia dalam Peristiwa Santa Cruz itu. Menurut Sjafrie, setahun sebelum peristiwa tersebut meletus (12 November 1991) dia masuk ke Timtim sebagai Komandan satgas Kopassus ke-VIII. Tugasnya dimulai per 24 Oktober 1990. Ketika itu ia merangkap jabatan sebagai Wakil Komandan Satuan Tugas Intelijen (SGI). Ada pun komandan SGI-nya adalah Kolonel Gatot Purwanto, yang merangkap sebagai Asintel Kolakops Timtim. Setelah setahun bertugas, empat hari sebelum kejadian, atau pada 8 November 1991, Sjafrie menyerahkan jabatan kepada Letkol Johan Yunus Supit (Komandan Satgas Kopassus ke-IX/Wadan SGI).

Menurut Sjafrie, pada tanggal 12 November 1991, ia memang masih berada di Timtim dalam rangka persiapan pulang ke Jakarta. Senjata dan perlengkapan pasukan sudah dimasukkan kotak. Tinggal menunggu jempukan pesawat dari Jakarta. Pada pukul 8 pagi, dia keluar dari rumah dinas untuk acara perpisahan dengan informan atau agen binaan Kopassus. Sampai di tengah kota, dia lihat suasana sepi. Seorang polisi memberitahu bahwa ada demonstrasi di pemakaman Santa Cruz dan Wadanyon 700, Mayor Geerhan Lantara ditusuk oleh demonstran.

Tadinya Sjafrie mau ke rumah sakit melihat keadaan Geerhan. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara berondongan dari arah Santa Cruz. Ketika ia mendekati lokasi, ternyata sudah banyak orang, terutama pelajar berseragam sekolah, yang bergelimpangan, berdarah-darah di hantam peluru. Waktu itu Sjafrie melihat Mayor Lobo, Kasdim Dili, sebagai perwira berpangkat paling tinggi yang ada di lapangan. Sementara, Pangkolakops, Danrem, Komandan Sektor,

Asisten-asisten, justru sedang menerima tamu dari Komisi HAM Internasional di Mako Kolakops.

Melihat situasi tersebut dia memerintahkan Lobo untuk mengevakuasi korban dan membawa ke rumah sakit. Tadinya Lobo sempat menolak, karena katanya korban adalah pihak musuh. Tapi, Sjafrie menyergah. “Mereka bukan musuh, ini anak sekolah!” Setelah itu, barulah korban-korban yang bergelimpangan itu di evakuasi dengan mobil dan truk.

Di lapangan, Sjafrie menyaksikan sendiri, bahwa pelaku penembakan kebanyakan adalah “milsas” yaitu bekas pejuang prointegrasi yang diangkat menjadi anggota TNI. Waktu itu, Sjafrie juga sempat menyelamatkan beberapa wartawan bule yang ketakutan setengah mati karena ditangkapi dan diancam mau dibunuh oleh para milsas tersebut. Wartawan-wartawan asing tersebut kemudian dibawa keluar dari lokasi dengan mobilnya.

Akibat mendatangi lokasi pembantaian itulah, Sjafrie dicurigai terlibat. Tapi Sjafrie sudah diperiksa oleh DKP Kasus Santa Cruz, dan dinyatakan tidak bersalah. Sjafrie adalah orang baik yang sering berada di tempat yang salah. Dia orang alim alim yang banyak mendapat cobaan dari Tuhan. Dia bersahabat, loyal dan disayang teman dan atasan. Tapi kisah tentang Sjafrie belum selesai sekarang. *Feeling* saya, dia masih akan berperan dalam pemerintahan ke depan. Semoga Bang Sjafrie bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak.

*Penulis adalah wartawan majalah *FORUM KEADILAN* (1991-2003)



Batu Intan di Mana pun Tetap Berkilau

Totok Suryanto*

Dibanding banyak rekan wartawan lain, perkenalan saya dengan Pak Sjafrie Sjamsoeddin relatif belum terlalu lama. Saya mulai “menempel” beliau ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya bukan karena pamrih pribadi, tetapi karena penugasan saya sebagai reporter di stasiun televisi *SCTV* lah yang mengharuskan saya dekat dengan beliau.

Saya memang mulai memperhatikan karirnya yang meroket, dari jabatan sebagai Komandan Grup A Paspampres, kemudian ditugaskan keluar dari lingkaran pengamanan Presiden menjadi Komandan Korem Suryakencana di Bogor. Hanya satu tahun di Bogor, ia kemudian naik jadi Kepala Staf Garnisun satu/Ibukota, kemudian jadi Kasdam Jaya (Pangdamnya adalah Mayjen Sutiyoso yang sebelumnya juga pernah jadi Danrem Bogor) dan kemudian menjadi Pangdam Jaya.

Beliau cepat sekali akrab dengan awak media, sebagian juga karena dibantu seorang Kepala Penerangan Kodam yang cekatan yaitu Letkol DJ Nachrowi, sebagian lagi terutama karena kepribadiannya yang menarik dan sikapnya yang tulus terhadap para reporter yang meliputnya. Kami dalam acara informal memanggilnya dengan sebutan “bang” atau

“Abang” dan beliau memanggil nama depan saya, dan sering menyebut kata ganti dirinya dengan “gua” dan bukannya “kami” yang formalistis seperti layaknya para pejabat zaman itu.

Peristiwa kerusuhan 13-16 Mei 1998 merupakan ujian terberatnya sebagai penanggungjawab keamanan nomor satu di Jakarta. Seperti kita ketahui, peristiwa itu dimulai dengan peristiwa Universitas Trisakti yang menewaskan 4 orang mahasiswa akibat tembakan “misterius”. Keesokan harinya, unjukrasa liar mulai meletus di kawasan Grogol, tidak jauh dari kampus Usakti, dan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah DKI Jakarta tanpa bisa dicegah lagi.

Sebagai seorang wartawan yang harus juga mendapatkan informasi tangan pertama dari aparat keamanan, saya mengikuti gerakan dari Pangdam Jaya, merekam penjelasan resmi yang disampaikannya, selain juga tentu meliput dinamika kerusuhan di Jakarta tersebut. Saya melihat kedudukan Pangdam sangat sulit. Pada satu sisi, semua yang dilakukannya tidak lepas dari kendali Markas Besar ABRI, karena Jakarta sebagai ibukota negara merupakan barometer keamanan di Indonesia. Pada sisi lain, dia juga tidak bisa mengacuhkan saran dari para pejabat militer lain, seperti dari Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto.

Jadi meskipun ada yang mempertanyakan mengapa Pangdam Jaya mau ikut patroli bersama Panglima Kostrad pada hari kerusuhan waktu itu, menurut saya itu tidak ada kaitannya dengan keberpihakan atau pertemanan atau apapun yang berbau politik.

Pada tanggal 18 Mei 1998. Pangdam Jaya mengumpulkan para prajurit ABRI yang bertugas dalam penanganan

keamanan ibukota di kawasan Senayan. Sebagai seorang wartawan saya hadir, dan mungkin adalah satu-satunya wartawan media elektronik ketika itu, saya minta juru kamera merekam seluruh pengarahannya Pak Sjafrie di depan para prajurit itu. Menurut saya, ini pidato pengarahannya Pangdam yang paling baik. Wajahnya serius ketika mengingatkan agar para prajurit ketika melakukan tugasnya tanpa melakukan kekerasan karena, katanya, para mahasiswa itu adalah 'saudara sendiri'. Saya kemudian melakukan wawancara dengan Pangdam, dan saya gembira karena saya satu-satunya wartawan televisi yang mendapatkan wawancara dengan Pak Sjafrie pada hari itu. Benar-benar wawancara eksklusif, dan disiarkan secepatnya. Pada pokoknya, Pangdam menghimbau agar masyarakat tetap tenang, karena ABRI akan melakukan semua hal untuk mengamankan ibukota.

Meskipun kerusuhan, pembakaran atau penjarahan telah berakhir pada 16 Mei 1998, tetapi suasana politik pasca kerusuhan masih tegang, dan tensi masih sangat tinggi. Ini berkaitan dengan seruan yang diberikan oleh seorang aktivis reformasi yaitu Dr. Amien Rais yang menyerukan masyarakat untuk berkumpul di Monas pada tanggal 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Bisa dibayangkan bila masyarakat Jakarta, terutama para mahasiswa kemudian memenuhi seruan Amien Rais tersebut dalam suasana yang masih sangat panas, datang ramai-ramai ke Monas yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari Istana Merdeka. Bisa-bisa muncul kerusuhan baru, dan bukan tidak mungkin ada penyerbuan ke Istana, sebagai simbol negara. Dampaknya bisa sangat buruk terhadap kewibawaan negara dan bangsa!

Untuk mengantisipasi seruan tersebut, maka Pangdam Jaya mengambil tindakan pengamanan paling tegas yang pernah dilakukan di Jakarta. Ribuan orang pasukan pada 20 Mei 1998 sejak dini hari dikerahkan untuk menutup seluruh koridor dan jalan yang menuju Monas. Saya katakan “menutup” karena benar-benar seluruh jalan besar dan kecil sejak Jalan MH Thamrin di depan Bundaran HI, Jalan Budi Kemulyaan, Lapangan Banteng, Jalan Hayam Wuruk/Gajah Mada dekat perapatan Harmoni; dipasang kawat berduri, dan didepannya berjaga para prajurit ABRI bersenjata lengkap. Siapa pun tidak boleh mendekati sampai jarak 10 meter dari pagar kawat berduri tersebut.

Otomatis seluruh perkantoran dalam radius tersebut tutup karena para pegawai tidak bisa masuk. Rekan-rekan wartawan yang hendak bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan pun tidak bisa masuk, meskipun ada yang mencoba berdebat sambil memperlihatkan kartu identitas sebagai wartawan bidang Kepresidenan. Pokoknya, tidak ada yang dapat melewati pagar kawat berduri tersebut.

Melihat penjagaan yang super kuat tersebut, saya maklum bahwa untuk kali ini Pangdam Jaya tidak mau mengambil risiko sekecil apapun.

Rupanya, selain sikap sangat tegas dari Pangdam Jaya, pada malam hari, beberapa pihak yang punya ‘otoritas tinggi’ mencoba mencari Pak Amien Rais dan bernegosiasi agar ia mau mencabut seruan apel di depan Monas. Sekitar tengah malam Amien Rais akhirnya mengeluarkan semacam pernyataan yang direkam terlebih dahulu dan membatalkan seruannya untuk berkumpul di lapangan Monas. Saya yakin Pak Sjafrie tentu telah mendapat informasi mengenai

pembatalan apel tersebut, tetapi perintah melakukan isolasi tersebut di kawasan Monas tetap dijalankan.

Pada pagi itu, saya bersama juru kamera saya mencoba mencari Pak Sjafrie, dan mencari jalan agar bisa menembus kawasan Monas. Berbagai jalan kami coba, tetapi gagal. Para prajurit yang berjaga-jaga tidak membolehkan kami berlalu, meskipun saya mencoba meyakinkan mereka bahwa kami akan mengadakan wawancara dengan Pangdam yang saya yakini pasti berada di sekitar Monas.

Melalui telepon kepada Kapendam Pak Nachrowi, akhirnya saya bisa terhubung dengan Pangdam Jaya. Beliau berjanji mengirimkan seorang perwira untuk menjemput kami di dekat kawasan Tugu Tani (Jalan Prapatan). Benar juga, beberapa menit kemudian seorang perwira menengah datang ke kawasan tersebut naik kendaraan. Kami berdua diloloskan dari kawat berduri, tetapi mobil operasional SCTV tidak boleh ikut. Di lapangan Monas saya bertemu dengan Pak Sjafrie yang duduk di atas sebuah panser.

“Bang, saya mau wawancara dong, turun sini!” pinta saya.

“Naik saja ke panser, wawancara saja di sini!” ujarnya dari atas kendaraan lapis baja tersebut.

Saya dan juru kamera kemudian naik ke atas panser tersebut. Beliau bersedia memberikan wawancara, dan itu dilakukan di atas panser. Pada pokoknya pak Pangdam dengan nada sejuk menjelaskan mengapa ia mengambil tindakan menutup rapat wilayah Monas dan sekitarnya. Tidak lupa ia minta maaf kepada masyarakat karena tindakan yang terpaksa diambilnya tersebut menimbulkan “kesusahan” kepada masyarakat karena tidak bisa melakukan

aktivitas di kawasan yang ditutupnya. Beliau juga berjanji akan membuka kawasan itu begitu situasi di nilai kondusif.

Saya kembali merasa mendapat “durian runtuh”. Ini wawancara pertama dan eksklusif yang dilakukan sebuah stasiun televisi terhadap Pangdam Jaya pagi itu. Lebih eksklusif lagi karena wawancara dilakukan di atas kendaraan panser. Saya buru-buru turun dari panser karena ingin membawa materi wawancara itu ke studio.

“Tok, siarkan secepatnya ya, agar masyarakat mengetahuinya!” pesan beliau kepada saya.

“Siap bang!”

Saya kemudian dihantar kembali ke lokasi mobil operasional, dan dari sana saya kembali ke studio. Pernyataan Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin saya siarkan siang itu dalam kesempatan pertama. Dan untuk pertama kalinya masyarakat mendapat penjelasan mengapa kawasan itu tiba-tiba saja ditutup dengan penjagaan super ketat.

Tanpa setahu saya, Pak Sjafrie kemudian juga melonggarkan penjagaan kepada teman-teman wartawan Kepresidenan hingga mereka bisa masuk ke kawasan Sekretariat Negara, tempat mereka biasanya berpangkal. Pada sore hari itu, seluruh penjagaan di kawasan Monas telah ditarik sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan normal kembali.

Kota Jakarta secara perlahan tetapi pasti kembali aman dan damai.

Hubungan pribadi saya dengan Pangdam Jaya juga kembali normal. Saya masih sering menyambangi beliau, baik untuk wawancara, mendapat *background information* atau sekedar ngobrol santai.

Beberapa bulan kemudian, jabatan Pangdam Jaya diserahkan kepada Mayjen TNI Djadja Suparman yang sebelumnya adalah Pangdam V/Brawijaya. Praktis beliau hanya satu tahun menjabat sebagai Pangdam Jaya (1997-1998). Meskipun tidak pernah diungkapkan, tetapi melihat raut wajahnya, ia agak kecewa juga diganti. Manusiawi lah. Jabatan baru sebagai Staf Ahli (Sahli) Panglima ABRI di Cilangkap menurut pandangan saya adalah jabatan “pemain cadangan” atau “jabatan buangan”.

Tetapi justru ketika Pak Sjafrie menduduki jabatan tersebut itulah, saya semakin sering bertemu dengan beliau. Di samping karena ia punya waktu yang lebih luang, terutama saya datang sebagai teman, bukan dalam hubungan wartawan dan narasumbernya. Saya berpendapat bahwa *a friend in need is a friend in deed*. Teman sejati adalah teman dalam masa susah. Kalau bertemu dengannya, saya berbicara mengenai berbagai topik ringan dan bergurau. Sesekali saya mengatakan kepadanya, “Bang percayalah, intan itu kalau ditempatkan di mana saja ia tetap batu yang berharga...” Saya sesungguhnya yakin bahwa “parkirnya” Bang Sjafrie hanya untuk sementara saja. Mungkin semacam *cooling down* untuk beberapa waktu.

Benar juga, Pak Sjafrie kemudian diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan ABRI di era kepanglimaannya Pak Endriartono Sutarto. Setelah itu beliau jadi Sekjen Departemen Pertahanan dan Wakil Menteri Pertahanan. Jadi benar juga, intan akhirnya tetap bersinar di manapun!

*Penulis kini adalah Wakil Pemimpin Redaksi *TV One*, sebelumnya adalah reporter *SCTV*.



Suatu Ahad di Puri Cikeas....

Usamah Hisyam*

Suatu Ahad di penghujung tahun 2006 saya diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbincang empat mata di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Cibubur, Bogor. Presiden mengeluhkan pemberitaan negatif terhadap kinerja pemerintahan yang mulai gencar di media massa.

Ia meminta saya untuk membantu langsung mengkoordinir para wartawan Istana sekaligus menyusun konsep dan membangun strategi komunikasi. Kebetulan antara tahun 2003-2004 pernah saya ditunjuk sebagai Koordinator SBY Media Center, dan menulis serta menerbitkan buku biografi *SBY Sang Demokrat*.

Sebagai mantan anggota DPR RI (1997-1999) yang juga *chairman* Dharmapena Group, saya menyampaikan kepada Presiden kurang begitu nyaman untuk “mengurusi” lagi wartawan apalagi di Istana, yang harus ditangani secara *day to day operation*. Selain itu, saya juga sibuk menjabat Ketua Partai Demokrat Provinsi Banten, yang tengah mempersiapkan diri untuk maju sebagai Calon Gubernur Banten dalam Pilgub 2007. Presiden lantas bertanya, siapa kira-kira orang yang dapat direkomendasikan untuk menjadi komandan pers di Istana.

Saat itulah secara spontanitas saya teringat nama Mayjen TNI SjafrieSjamsoeddin. “Bapak Presiden, setahu saya, pengelolaan kelembagaan pers dan penerangan dalam institusi pemerintahan yang terbaik di Indonesia selama ini hanya ada tiga, yakni Kemenlu, Mabes TNI, dan MabesPolri. Saya kira pak Sjafrie Sjamsoeddin yang pernah menjabat Kapuspen TNI paham betul siapa yang pantas untuk menjadi komandan pers di Istana dari lingkungan perwira TNI. Saya melihat ada dua orang perwira yang bagus dan pernah menjadi staf kepercayaan beliau, yakni Kol. Ahmad Yani Basuki dan Kol. D.J. Nachrowi. Tetapi yang lebih paham kinerja mereka berdua pak Sjafrie,” saya menyarankan.

“Ooo baik pak Usamah. Pak Sjafrie sekarang sudah Sekjen Departemen Pertahanan. Dia memang prajurit yang baik, saya punya proyeksi untuk beliau. Nanti saya panggil,” ujar Presiden SBY, yang justru memberikan atensi kepada sosok Sjafrie Sjamsoeddin.

Tak lama berselang, sekitar awal 2007 terbetik kabar bahwa Kolonel D.J. Nachrowi diangkat menjadi Kepala Biro Pers dan Media Sekretariat Negara dan belakangan menjadi Asisten Juru Bicara Presiden RI. Lantas usai Pilpres 2009, Presiden SBY mengumumkan pengangkatan Kolonel Ahmad Yani Basuki menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi, kini malahan berpangkat Mayor Jenderal TNI. Sedangkan Sjafrie Sjamsoeddin sendiri dari Sekjen Departemen Pertahanan diangkat menjadi Wakil Menteri Pertahanan pasca Pemilu 2009.

Terus terang, sejak beliau menjabat sebagai Sekjen Departemen Pertahanan, saya tak pernah lagi bertemu secara khu-

sus dengan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Satu-satunya pertemuan, sekitar tahun 1998, beliau masih menjabat Sekjen, saya diterima di ruang kerjanya untuk berbincang-bincang. Terakhir, saya bertegursapa dengan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin ketika secara kebetulan berpapasan di lokasi persemayaman mendiang Lim Sioe Liong (Sudono Salim) di Mount Vernon Funeral Parlours, di pinggiran kota Singapura, 17 Juni 2012.

Sekalipun tak pernah lagi bertemu, tetapi sosok Sjafrie Sjamsoeddin adalah nama yang sulit terhapus dalam memori kehidupan saya sebagai wartawan. Berbeda dengan kebanyakan sosok perwira militer yang cenderung menunjukkan sikap dan karakter otoriter, Sjafrie adalah seorang perwira tinggi yang justru egaliter. Seorang intelektual yang cerdas, dan pribadi yang sangat bersahaja, familiar, relijius, serta peduli terhadap permasalahan yang dihadapi wartawan. Ia seorang perwira yang lebih mengedepankan dialektika pemikiran ketimbang memaksakan sikap dan kehendaknya. Sjafrie sangat menghargai pandangan lawan bicaranya ketika berdiskusi, tetapi juga tegas ketika menentukan sikap.

Sikap egaliter Sjafrie terlihat pada saat ia kerap membuka ruang diskusi dengan kelompok-kelompok wartawan. Sjafrie sangat terbuka dengan pemikiran-pemikiran progresif sungguhpun mengarah pada pemberdayaan *civil society*. Ia tak alergi terhadap kritik, tetapi juga tak segan-segan untuk mengoreksi konsepsi pemikiran yang dirasakan tak sesuai dengan pemahamannya terhadap tugas dan pengabdianya sebagai prajurit profesional. Sebagai seorang prajurit yang memiliki latar belakang pendidikan intelijen, Sjafrie

mampu membangun kerjasama serta komunikasi yang intens dengan wartawan untuk menopang tugas dan pengabdian dalam posisi apa pun.

Ketika beliau menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya, Sjafrie meminta saya untuk menjadi Ketua Tim Penyusunan buku *Sejarah dan Konsepsi Tugas dan Pengabdian Kodam Jaya* (1996). Menjelang era reformasi tersebut, saya juga mengkoordinir sejumlah wartawan di lingkungan ABRI, Istana Negara, dan DPR RI yang tergabung dalam Yayasan Dharmapena Nusantara, yang fokus terhadap pengkajian dan pengembangan wacana demokratisasi melalui pemberitaan pers serta penerbitan buku. Sejumlah wartawan kerap berdiskusi secara intensif dalam Yayasan Dharmapena, antara lain Syukri Alvin (*Angkatan Bersenjata*), Solemanto (*Terbit*), Radjab Ritonga (*Antara*), Hersubeno Arief dan Purwadi Tjitrawiata (*Republika*), Selamat Ginting (*Merdeka*), Arief Sofiyanto (*Surya*), Yoedi Karyono (*Jawa Pos*) dan Sahrudi (*Bali Pos*). Para wartawan inilah yang terus mengembangkan jaringan ke lingkungan wartawan lainnya untuk ikut serta memperjuangkan wacana demokrasi melalui berbagai FGD (Focus Group Discussion). Ingat, pada waktu itu, masa Orde Baru dan Dwifungsi ABRI, wacana mengenai demokrasi adalah isu yang sensitif untuk dibicarakan.

Yayasan ini juga menyelenggarakan berbagai diskusi dan seminar dengan menghadirkan para pakar dan pengamat politik militer. Sjafrie Sjamsoeddin merupakan salah seorang perwira tinggi yang mendukung wacana tersebut. Dari pengkajian ini Yayasan Dharmapena Nusantara menerbitkan buku berjudul *ABRI dan Demokratisasi*, dengan Kata Pengantar oleh pengamat politik asal Australia

Harold Crouch, yang juga mendapat dukungan moril dari KSAD Jenderal TNI R. Hartono serta diluncurkan oleh Kassospol ABRI Letjen TNI M. YunusYosfiah, di *ball room* Hotel Grand Melia, Jakarta (1997).

Bukti dukungan Sjafrie Sjamsoeddin terhadap dinamika aspirasi demokrasi yang hendak dikembangkan oleh wartawan dalam jaringan Yayasan Dharmapena Nusantara terlihat ketika kami tak mampu lagi melanjutkan kontrak rumah untuk Sekretariat Yayasan di Jalan Bangka II, Jakarta Selatan, sebagai posko untuk berdiskusi sejak 1995 karena tidak punya dana. Tanpa meminta komitmen apapun, Sjafrie menyediakan sebuah ruko berlantai tiga di kawasan Pancoran, Pasar Minggu, untuk digunakan sebagai Sekretariat selama dua tahun. Dengan modal seadanya dari penghasilan tabungan saya sebagai anggota DPR RI, serta kontribusi sejumlah perwira tinggi yang proreformasi, Dharmapena lantas menerbitkan tabloid mingguan *Demokrasi* (2008), yang hanya mampu bertahan selama 11 bulan.

Pada masa itu, Sjafrie kerap menelepon saya untuk berdiskusi di kediaman pribadinya pada petang hari. Satu hal yang sangat berkesan bagi saya, setiap memasuki adzan maghrib Sjafrie senantiasa mengajak shalat berjamaah di lantai dua kediamannya, dan saya selalu diminta menjadi imam. Selain wartawan, ketika itu saya juga sudah menjadi anggota DPR RI dari PPP. Usai shalat, dengan familiar Sjafrie selalu mengajak santap malam bersama. Itulah kenangan indah tak terlupakan bersama Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

Hingga kini saya sering bernostalgia, kapan suasana tersebut dapat terulang kembali dengan Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin?

*Penulis adalah wartawan senior, penulis buku dan kini
Chairman Dharmapena Group.

Sabar Menjawab Pertanyaan Apa pun

Wandi Yusuf*

Sjafrie Sjamsoeddin tak kabur ketika harus menjawab pertanyaan gencar para wartawan terkait rencana pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi tipe SU-30MK 32 buatan Rusia yang sempat diperdebatkan banyak kalangan, termasuk oleh para anggota DPR. Ia bahkan dengan sabar menjawab apa pun pertanyaan wartawan terhadapnya.

Pada saat ada pertanyaan yang menyudutkan Kementerian Pertahanan, sebagai Wakil Menteri Pertahanan, ia juga tak serta-merta meninggikan intonasi suaranya. Dengan sabar dan suara pelan, Sjafrie menjelaskan dan menjawab pertanyaan tersebut. Ia bahkan siap dengan serentetan data untuk meyakinkan bahwa apa yang dituduhkan tak benar.

Jika dibandingkan Menteri Pertahanan Purnomo Yudiantoro, sepertinya Sjafrie adalah tandem yang tepat untuk mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu. Purnomo bertindak cekatan, Sjafrie mengimbanginya dengan kehati-hatian. Purnomo bicara soal urusan kebijakan, Sjafrie menjelaskan setiap detail menuju kebijakan tersebut. Pengalamannya sebagai tentara membuat Sjafrie penuh perhitungan.

Tak hanya itu, Sjafrie juga selalu hadir pada setiap peluncuran alutsista dalam negeri. Ia juga tak pernah absen untuk hadir dalam pameran persenjataan, baik tingkat nasional maupun internasional. Dan pada setiap kehadirannya, ia tak pernah datang terlambat. Wartawan yang biasanya mengikuti kegiatannya, harus siap bangun pagi untuk mengimbangi kegesitannya.

*Wartawan "*Koran Jakarta*"

Sepeda Motor Lewat Gerbang Depan Berkat Pak Sjafrie

Wisnu Dewabrata*

SETELAH lama tak saling kontak apalagi bertemu muka, “kongkow-kongkow”, macam dulu sering dilakukan saat masih meliput bareng, Sabtu (21/9) siang, saya dikejutkan dengan balasan *chatting* teman “seperjuangan” dan sepeliputan dahulu, Ade Siboro.

Kaget karena sapaan yang saya buat di *chatting* jejaring sosial *Facebook* itu sebenarnya sudah lama sekali dan baru dibalas sekarang oleh si mantan jurnalis kawakan koran berbahasa Inggris terkemuka di Indonesia.

Tapi yang lebih mengejutkan sekaligus juga menggem-birakan, Ade mengajak saya berkontribusi tulisan. Dia minta saya ikut menyumbang cerita tentang pengalaman atau pun pandangan pribadi saya terkait sosok Sjafrie Sjamsoeddin.

Sepanjang sekitar pertengahan sampai akhir 2000-an sosok sang jenderal bintang tiga itu memang terbilang akrab, terutama di kalangan teman-teman peliput seputar *beat* pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Saya terus terang memang terbilang agak “telat” masuk ke lingkungan peliputan itu. Awal saya mengenal dan bertemu sosok Pak Sjafrie saat beliau sudah di “penghujung” masa

jabatannya sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Markas Besar TNI.

Bisa dibilang saya memang jauh intens meliput dan mengutip pernyataan Pak Sjafrie saat dia sudah berada di dalam lingkungan Kementerian Pertahanan, baik sebagai Sekretaris Jenderal maupun kemudian sebagai Wakil Menhan.

Saat itu Kemhan juga dipimpin seorang figur pejabat simpatik, cerdas, dan sama seperti Pak Sjafrie, tak terlalu ribet atau memagari diri dengan urusan protokoler.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Sjafrie, dalam istilah saya pribadi, ibarat *dynamic duo* ala komik superhero Amerika Serikat.

Keduanya, saat masih menjabat bersama, saya nilai mampu saling mengisi. Hal itu saya anggap bisa terjadi lantaran keduanya punya visi dan misi yang kurang lebih sama terkait kelanjutan reformasi TNI ketika itu.

Jika pak menteri yang dari kalangan sipil maju meng-*handle* urusan ke luar, terutama menghadapi sesama pihak sipil, macam para anggota dewan terhormat dengan berbagai ragam tingkah polahnya, maka Pak Sjafrie berbagi peran meng-*handle* sesama militer.

Salah satu pengalaman paling saya ingat, yang kurang lebih merepresentasikan sikapnya yang tak suka terlalu ingin dirumitkan dengan urusan protokoler, adalah ketika satu kali saya dan Ade selesai mewawancara di ruangnya.

Karena asyik mengobrol setelah wawancara, tak terasa waktu sudah hampir pukul 15.30. Saatnya jalan-jalan di Jakarta mulai dihajar kemacetan. Persoalan lain, saat itu saya memarkir sepeda motor di tempat yang salah, parkir

gerbang belakang gedung Kemhan.

Padahal biasanya saya dan banyak rekan lain selalu memarkir sepeda motor kami di halaman parkir kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang memang bersebelahan dengan gedung Kemhan di Jalan Medan Merdeka Barat. Tambah lagi pada jam-jam segitu para pegawai negeri sipil dan militer di lingkungan Kemhan menggelar apel sore sebelum pulang.

Sialnya, gerbang belakang selalu lebih awal ditutup walau upacara apel biasanya digelar di halaman depan.

Untuk beradu debat dengan petugas jaga sipil, yang galaknya melebihi petugas dari kalangan militer, bukanlah opsi tepat lantaran akan sama sekali buang waktu dan tenaga.

Akhirnya kami nekat minta “kebijaksanaan” Pak Sjafrie agar dibolehkan lewat gerbang depan. Setidaknya mumpung apel sore belum dimulai dan pintu gerbang juga belum ditutup. Ajaibnya, izin diberikan dan melengganglah Ade dan saya sambil menuntun sepeda motor bebek Kawasaki yang saya beli dan cicil sejak masih ditugaskan meliput di Jawa Timur.

Karena merasa sudah “mengantongi” izin langsung dari salah satu petinggi Kemhan, kami santai saja berjalan menuju gerbang depan.

Seingat saya air muka penjaga di gerbang depan saat itu seperti tidak keruan melihat kedatangan kami. Maklum saja, gerbang depan hanya diperuntukkan jalur keluar masuk kendaraan roda empat.

Setelah sempat beradu tegang beberapa menit dan menolak disuruh kembali ke halaman parkir belakang, Ade berinisiatif menelepon ajudan Pak Sjafrie. Kami ingin

menunjukkan kalau kami tidak bohong dan benar-benar sudah mengantongi izin untuk bisa lewat gerbang depan walau pun tak pernah ada sepeda motor lewat sana.

Tak lama salah seorang ajudan Pak Sjafrie datang dengan tergepoh-gepoh dan berlari kecil meminta petugas jaga membiarkan kami lewat.

Akhirnya, jadilah sepeda motor saya itu, boleh jadi, satu-satunya kendaraan roda dua yang pernah lewat gerbang depan gedung Kemhan.

Selamatlah kami pula, tak terlambat sampai kantor hanya gara-gara terlanjur terjebak apel sore yang bisa berlangsung sejam dan kemacetan parah ibu kota menuju kantor kami.

Pengalaman macam itu jelas tak akan pernah terjadi jika yang kami temui bukan Pak Sjafrie.

Sosok yang tak banyak basa basi dan selalu membuka diri untuk bisa didekati wartawan, tanpa perlu direpotkan dengan urusan protokoler maupun kedinasan, yang dalam konteks tertentu sebetulnya terkadang memang bisa dibuat fleksibel.

*Penulis adalah wartawan Harian Umum *Kompas*



Simbol dari hubungan saling percaya dan saling memberi dengan media: Wamenhan membawa kamera televisi.